ICMI
Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia Orda Kota Parepare

MEMBANGUN INDONESIA BERMARTABAT

Mozaik Pemikiran Cendikiawan Muslim Indonesia - Orda Kota Parepare

Editor:
Syarifuddin Yusuf
Haniarti
Usman
Ibrahim Fattah

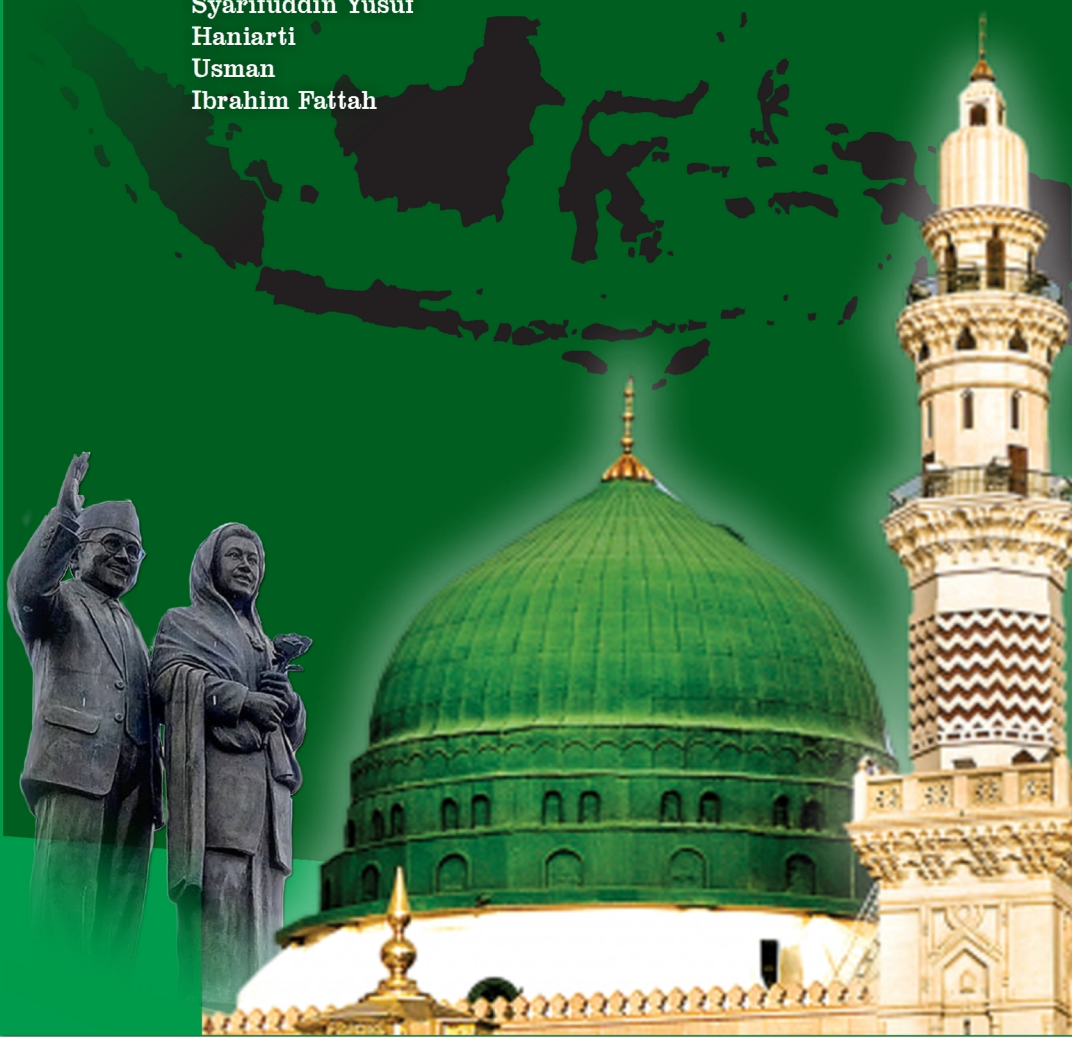

MEMBANGUN INDONESIA BERMARTABAT

Syarifuddin Yusuf, Haniarti, Usman, Ibrahim Fattah

MEMBANGUN INDONESIA
BERMARTABAT

Editor:
Syarifuddin Yusuf
Haniarti
Usman
Ibrahim Fattah

Penerbit
De La Macca
2022

MEMBANGUN INDONESIA BERMARTABAT

ISBN: 978-602-263-199-6

Penulis:
Irwan Idrus, Irfan, Andi Fitriani Djollong, Alfiansyah Anwar, Haniarti, Nurpika Hardiyanti S., Syafira Maharani S., Usman, Rahmi Amir, Mahsyar, St. Nurhayati Ali, Ahmad Dhiyaul Haq, Amaluddin, Yadi Arodhiskara, Fajar Ladung, Taqyuddin Djabbar, Muh. Nashir T., Syarifuddin Yusuf, Muhammad Amin Syarhan, Muhammad Majdy Amiruddin, Asram A. T. Jadda, Ibrahim Fattah

Editor:
Syarifuddin Yusuf
Haniarti
Usman
Ibrahim Fattah

Penerbit
De La Macca (Anggota IKAPI)
Jl. Borong Raya, No. 75, Lt. 2 Makassar 90222
Tlp. 08114124721; 081343703421

Desain/Layout
Anthony

Ketentuan Pidana, Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta
Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGANTAR EDITOR

Bismilahirrahmanirrahim

Judul buku "Membangun Indonesia Bermartabat" ini bukan hanya menarik dari sisi "topik" tetapi terutama dari sisi pesan yang diusung. Terminologi "Bermartabat" menjadi "kata kunci" penting dalam buku ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terminologi "Bermartabat" yang berasal dari kata dasar "Martabat" diartikan sebagai "tingkat harkat kemanusiaan, harga diri" dan diselaraskan dengan kata "derajat". Dalam bahasa Inggris menggunakan kata "*Prestige*" yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Prestise" yang berarti "wibawa" yang berhubungan dengan prestasi dan atau kemampuan seseorang. Dalam perspektif filsafat eksistensialisme, terminologi "Martabat" dapat dimengerti sebagai prinsip jati diri (ke-diri-an) seseorang yang dihadirkan melalui pola perilaku dan tutur kata. Terminologi "Martabat" sering dihubungkan dengan karakteristik kepribadian seorang. Jika terminologi "Martabat" ditempatkan pada konteks "kebangsaan" atau kehidupan bernegara, menjelaskan tentang hakikat, prinsip hidup atau lebih tepat identitas yang mempertegas jati diri suatu bangsa. Bila menyoal "jati diri", maka "Martabat" merupakan produk dari ke-"aku"-an, sejauh sebagai makhluk yang berkesadaran. Artinya, tidak pernah ada orang yang memiliki otoritas untuk menciptakan atau memproduksi "martabat" dari dirinya, karena sejak saat manusia itu mulai terjadi (= sejak saat pembuahan, hingga lahir dan sampai kematian), "Martabat" itu sudah hadir dan melekat dengan diri

pribadi manusia tanpa manusia itu merencanakan. Pertanyaan mendasar ialah "bagaimana martabat itu mewujudkan dirinya?" Sejauh ini, pertanyaan demikian sering digandengkan dengan persoalan-persoalan moralitas, etika. Namun dalam perkembangannya, terminologi "Martabat" berkembang dan meresap dalam persoalan-persoalan dari disiplin ilmu dan aspek kehidupan yang lebih luas seperti dalam kehidupan sosial-politik, ekonomi, ideologi, budaya, psikologi dan sebagainya. Misalnya martabat ekonomi, martabat politik, martabat bangsa, martabat ideologi, dan martabat lainnya. Dari latar belakang pemahaman "Martabat" yang begitu luas, maka buku "Membangun Indonesia Bermartabat" ini berupaya untuk membedah topik tersebut dari berbagai disiplin dan sudut pandang keilmuan.

"Membangun Indonesia Bermartabat" bukan sekedar membangun pola perilaku sebagai sebuah bangsa yang memiliki harkat, derajat dan harga diri yang harus dihormati oleh sesama. "Membangun Indonesia Bermartabat" tidak berhenti pada pengamalan nilai-nilai kehidupan yang memanusiawi. "Membangun Indonesia Bermartabat" tidak sekedar merefleksikan akar kebangsaan ke-Indonesia-an yang sering didiskusikan dalam forum-forum ilmiah dan dalam perbincangan di kedai kopi atau café atau dalam fakultas-fakultas ilmiah. "Membangun Indonesia Bermartabat" sekaligus mengajak kita untuk mengritisi realitas kehidupan kekinian dalam kerangka hubungannya dengan historisitas pergumulan bangsa (proses terbentuknya "jati diri" bangsa) dan menghadirkan praktik kehidupan konkrit yang mengalir dari prinsip-prinsip dasar nasionalisme bangsa. Dalam frame inilah, kita dihadirkan dalam disposisi membangun kesadaran berbangsa yang otentik, yang kebenarannya tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi direalisasikan dalam konteks keseharian hidup. Karena dengan demikian, kita dapat menerjemahkan dan atau mengartikulasi unsur-unsur ke-Indonesia-an yang bermartabat. "Membangun Indonesia yang Bermartabat" lantas tidak membeku dalam

kompilasi gagasan - gagasan dan menggema dalam retorika, tetapi tereksplorasi ke dalam realitas sehari-hari setiap pribadi.

Buku "Membangun Indonesia yang Bermartabat" merupakan suatu mahakarya bersama yang dihasilkan dari elaborasi berbagai gagasan yang merangkul berbagai disiplin keilmuan para Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) cabang Organisasi Daerah (Orda) Kota Parepare. Para cendekia ini merefleksikan secara mendalam intisari nilai luhur martabat ke-Indonesiaan yang mencerminkan kearifan berbangsa dan bernegara. Gagasan-gagasan inovatif-kontekstual berpadu bagaikan sebuah mozaik, tersusun, terpadu, harmoni.

Dalam konteks kekinian, kehadiran buku ini merepresentasikan harapan hati nurani para pendiri bangsa (*Founding Fathers*) ini, untuk kembali kepada hakikat sebagai sebuah bangsa, kembali kepada prinsip-prinsip bernegara yang mungkin saja dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membuat kita nyaris kehilangan "martabat" ke-Indonesia-an yang autentik. Realitas tersebut tampak menonjol dalam perilaku hidup generasi Indonesia beberapa tahun belakangan, sejak digemakan munculnya revolusi digital 4.0, dimana hampir seluruh pola perilaku hidup manusia Indonesia bergantung dan dikendalikan oleh teknologi digital dan produk-produk nilai baru dan asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemajuan tidak serta merta membawa dampak perkembangan ilmu pengetahuan tentang kecanggihan, tetapi juga mengalirkan nilai-nilai negatif di dalamnya. Lebih dari perkara-perkara tersebut, problem yang lebih besar dan belakangan mendominasi kehidupan berbangsa ialah adanya disparitas hubungan di antara masyarakat yang menciptakan perpecahan di tengah masyarakat dan elite politik. Banyak isu yang dimainkan oleh aktor-aktor kepentingan tertentu seperti isu agama yang sering dipelintir untuk mengadu-domba masyarakat, isu-isu terorisme, pertarungan kepentingan politis hingga perkara resesi ekonomi. Persoalan-persoalan tersebut, bahkan

menyusup di setiap unsur kehidupan sosial, politik, agama, budaya dan lainnya. Kita bahkan hampir tidak dapat membedakan batasan-batasan di antara setiap isu yang menyebar. Semua persoalan yang begitu heterogen, pada prinsipnya menjadi ancaman nyata terhadap lunturnya jati diri dan martabat kita sebagai sebuah bangsa yang beradab. Hal penting yang patut diwaspadai ialah, jika problem-problem yang berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa ini mengambil-alih otoritas pemerintahan, sehingga negara ini dapat kehilangan "kendali diri" yang sesungguhnya. Apalagi dewasa ini semakin banyak bermunculan aneka gerakan dan kekuatan politik tertentu dari segala penjuru nusantara, disamping terjadinya dikotomi mayoritas dan minoritas.

Membaca buku ini, kita tidak sekedar membaca mozaik pemikiran "Membangun Indonesia Bermartabat", tetapi sekaligus ditenggelamkan lebih dalam, sambil menyelami panorama nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dijiwai oleh kearifan lokal, meresap membentuk sayap-sayap garuda Pancasila. Logika-nalar kita dibawa terbang bersamanya, mencapai pengertian yang mendalam tentang "Menjadi Indonesia yang Bermartabat".

Melalui buku ini, para Cendekiawan Muslim Kota Parepare memberikan perspektif baru tentang membangun tatanan kehidupan bersama yang secara universal meresap dalam tabiat dan perilaku keseharian kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, bukan saja dari aspek ideologi, tetapi juga dari aspek-aspek praktis kehidupan konkrit lainnya.

Dalam perspektif logika filsafat politik kontemporer, buku "Membangun Indonesia Bermartabat" hendak membentangkan suatu cakrawala argumentasi pemecahan masalah (*problem solving*) kebangsaan (nasionalisme) yang mampu menampung berbagai ragam persoalan yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, buku ini berusaha untuk memberikan fondasi (landasan) bagi "identitas universal" yang sedapat mungkin menjawabi berbagai perkara multi-

kultural, multi-aspek.

Buku ini juga sekaligus membawa kita untuk "kembali" ke asal "ke-Indonesia-an" dalam arti menghidupkan kembali prinsip-prinsip, falsafah hidup yang otentik. Sehingga ketika ke-Indonesia-an dihadirkan dalam fakultas-fakultas diskusi dan dialog, rasa bangga sebagai sebuah bangsa yang bermartabat teraktualisasi. Itulah sebabnya buku "Membangun Indonesia Bermartabat" sangat direkomendasikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya lintas generasi.

Parepare, Januari 2022,

Tim Editor

KATA PENGANTAR
KETUA ICMI ORDA KOTA PAREPARE

Puji syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia- Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang mengeluarkan manusia dari alam kegelapan memasuki alam yang penuh dengan sinar keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

Alhamdulillah, buku yang berjudul Membangun Indonesia Bermatabat, Mozaik Pemikiran Cendikiawan Muslim Indonesia: Orda Parepare. Buku ini pada mulanya direncanakan akan dijadikan sebagai kado pada acara Muktamar ICMI di Bogor yang dilaksanakan tanggal 4 s.d. 6 Desember 2021 Di Bandung, namun penulisan buku ini menghadapi beberapa kendala terutama kesibukan penulis.

Pasca Mutamar ICMI penulisan buku ini tetap dilanjutkan dengan harapan mudah mudah bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Tim yang menangani Penulisan Buku dibentuk oleh Pengurus ICMI Orda Pare Pare. Tim tersebut adalah: 1. Dr. Syarifuddin Yusuf, MSi, Usman, SKM, M.Kes, Dr. Ibahim, MH, Haniarti, S.Si, Apt., M.Kes. Mozaik Pemikiran ICMI Orda Parepare mendapat dukungan dari berbagai kalangan dan karena itu pengurus ICMI Orda Parepare merasa perlu untuk menerbitkan dalam bentuk buku seperti yang ada sekarang. Tim Editor telah berupaya semaksimal mungkin sehingga buku ini dapat terwujud seperti

yang ada ditangan pembaca sekarang ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Penulisan buku ini terutama kepda Tim Editor, *layout,* dan desin cover sehingga bisa terbit. Saya mengucapkan *jaza kumullah khairan katsiran*. Melalui Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Majlis Pengurus Wilayah ICMI Sulsel yang telah bersedia memberikan kata Pengantar atas penerbitan buku ini. Saya menyadari tanpa bantuan semua Pihak buku sederhana ini tidak akan terwujud. Hanya kepada Allah kita bermohon semoga Allah senantiasa memberikan Rahmat-Nya. Dan Kepada penulis yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam rangka penulisan buku ini saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan bernilai ibadah, dan membawa manfaat bagi kehidupan beragama, berbangsa dan kehidupan bermasyarakat. Amin.

Parepare, Maret 2022
Ketua ICMI Orda Parepare.

Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag.

SAMBUTAN
WALIKOTA PAREPARE

Bismilahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya Penyusunan Buku *Chapter* ICMI Orda Kota Parepare dengan judul "Membangun Indonesia Bermartabat". Buku ini dapat memberikan gambaran bagaimana peran besar yang dilakukan oleh ICMI sehingga dapat membangun Indonesia yang lebih Beradab.

Dalam membangun peradaban Indonesia, Pemerintah Kota Parepare sedang giat-giatnya membangun masyarakat menjadi masyarakat berkarakter. Pemerintah Daerah ingin memadukan pembangunan iman dan taqwa dan pembangunan teknologi sebagaimana yang menjadi tujuan dari ICMI. Hal ini diartikan bahwa Pemerintah Kota mempunyai inovasi kuat untuk menghadirkan pembangunan Imtaq dan Iptek yang bersesuaian dengan karakter kearifan lokal menuju pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka menuju Indonesia Emas yang diawali dengan pendidikan karakter yang kuat dan tangguh. Pendidikan karakter merupakan proses pengenalan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam membangun Indonesia bermartabat, hal yang menjadi per-

hatian kita adalah menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Pemerintah Kota Parepare mendorong terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat. Budaya-budaya lokal harus terus dipelihara sehingga tidak tergerus oleh budaya luar. Tentunya kita menyadari bersama, bahwa Kota Parepare ini akan terus berkembang menjadi kota metropolis. Namun demikian nilai-nilai agama dan budaya lokal harus senantiasa dipertahankan sebagai salah satu entitas budaya kita. Kota Parepare adalah miniatur budaya di Indonesia, karena ada banyak ragam budaya yang hadir di Kota Parepare. Banyaknya pendatang yang ada di Kota Parepare menjadikan Kota Parepare sebagai kota yang sarat akan budaya daerah.

Peran ICMI di Kota Parepare telah terbukti memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan di daerah ini khususnya dalam pembangunan pendidikan dan keagamaan. Dengan melihat peran strategis yang dimiliki ICMI, saya yakin dan percaya bahwa ICMI akan mampu mengawali pendalaman dan penerapan kesalehan sosial di kalangan para kadernya serta menularkannya di kalangan masyarakat luas, sehingga ICMI benar-benar menjadi suatu organisasi yang mampu memadukan antara kekuatan struktural dan kekuatan kultural/moralitas dalam pelaksanaan setiap tugas pokok, fungsi dan perannya.

Keberadaan ICMI dan Kota Parepare memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ICMI yang dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 dalam sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim dimana Bapak BJ Habibie sebagai aktor yang mendukung lahirnya ICMI. Beliau adalah Ketua Umum Pertama ICMI. Bapak BJ Habibie ini merupakan putra kelahiran Parepare dan sumber inspirasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare. Dengan demikian, baik Pemerintah Kota Parepare maupun ICMI samasama menjadikan Bapak BJ Habibie sebagai sumber inspirasi pembangunan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kota Parepare terus membangun citra sebagai Kota Habibie. Kota Parepare dibangun dengan sentuhan nama Habibie, sosok tokoh nasional dan internasional yang lahir dan besar di Kota Parepare. Berbagai ikon kota yang memilki *branding* BJ Habibie telah dibangun, diantaranya, Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, Balai Hasri Ainun Habibie, RS Hasri Ainun Habibie dan Museum BJ Habibie.Oleh karena itu, saya berharap ICMI Orda Parepare dapat lebih maju dengan daerah lainnya mengingat Kota Parepare merupakan kota kelahiran pendiri dan Ketua Umum ICMI yang pertama.

Terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada ICMI Orda Kota Parepare dalam penerbitan buku "Membangun Indonesia Bermartabat". Semoga dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran dan berguna bagi semua pihak.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
Walikota Parepare

Dr. H. M. Taufan Pawe, SH.,MH

SAMBUTAN
MAJELIS PENGURUS WILAYAH IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) ORGANISASI WILAYAH SULAWESI SELATAN

Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat hidayah dan taufik-Nya jugalah sehingga buku "Membangun Indonesia Bermartabat" yang diterbitkan oleh Majelis Pengurus Daerah ICMI Orda Parepare dapat diterbitkan dan tiba di tangan pembaca. Atas nama pengurus Orwil ICMI Sulsel saya mengucapkan selamat kepada jajaran Pengurus Orda ICMI Parepare dan Tim Editor yang telah bekerja keras mengumpulkan tulisan dan menerbitkannya dalam bentuk buku cetak.

Penerbitan buku ini patut diapresiasi terutama dalam memperkuat kiprah ICMI dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan bangsa. Apalagi judul yang dipilih adalah "Membangun Indonesia Bermartabat" yang tentu penting dalam menjaga arah pembangunan yang tidak hanya semata-mata untuk mencapai kemajuan ekonomi tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter yang dilandasi oleh ikatan sosial yang kuat, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama, serta memiliki daya saing yang tinggi di dunia internasional. Karena itu buku ini yang merupakan kumpulan pemikiran para penulis dari berbagai sudut pandang sangat bermanfaat terutama dalam memberikan kontribusi dalam memecahkan

masalah pembangunan bangsa.

Dengan terbitnya buku ini pula semakin memperkuat komitmen ICMI dalam menjaga identitas dan pandangan dasar ICMI yaitu keislaman, kecendekiawanan, dan keindonesiaan. Buku ini mengajak kita untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam praktik berbangsa dan bernegara. Di samping itu, buku ini juga menunjukkan sikap kecendekiawanan para anggota ICMI yang peduli terhadap nasib bangsa dan menawarkan solusi cerdas dan inovatif. Tidak kalah pentingnya, buku ini menunjukkan wawasan keindonesiaan, dimana kontribusi para penulis tidak lain untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam konteks negara madani yang dicita-citakan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan taufik-Nya kepada kita semua. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Makassar, Januari 2022
Ketua ICMI Orwil Sulawesi Selatan

Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd

SAMBUTAN
KETUA DEWAN PAKAR IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) ORGANISASI DAERAH KOTA PAREPARE

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas kesempatan yang diberikan kepada Dewan Pakar ICMI Orda Parepare untuk menginisiasi penyusunan buku "Membangun Indonesia Bermartabat" yang saat ini kita bisa membaca karya ini. Atas nama Dewan Pakar ICMI Orda Parepare, saya mengucapkan selamat kepada seluruh penulis yang telah mempersembahkan karya ilmiah yang tentu sangat bermanfaat bagi agama dan bangsa, dan terkhusus kepada Tim Editor yang diketuai oleh Bapak Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si, yang telah meluangkan waktunya mengkoordinir pengumpulan tulisan dan telah berupaya menerbitkannya dalam bentuk buku cetak.

ICMI sebagai organisasi cendekiawan muslim, punya tanggungjawab moral untuk menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan umat dan bangsa di tengah pandemi Covid-19 yang melanda bangsa kita. Penerbitan buku ini, sungguh suatu momen yang sangat tepat di tengah permasalahan bangsa yang sedang terjadi, yang mana penyelesaiannya membutuhkan alternatif solusi dari berbagai pendekatan. Buku ini salah satu bentuk kontribusi pemikiran pengurus ICMI Orda Parepare untuk bangsa. Penetapan judul "Membangun Indonesia Bermartabat" diambil

dari tema Muktamar ICMI di Bandung, bulan Desember 2021. Tantangan bangsa kita saat ini dan di masa depan tentu tidak sedikit, terlebih kita harus berkompetisi dengan bangsa lain yang telah lebih duluan maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula kondisi umat yang sebagian masih hidup di bawah garis kemiskinan sedang di sisi lain bangsa kita sedang menghadapi pandemi Covid-19 dan utang luar negeri yang semakin membengkak. Dewan Pakar ICMI Orda Parepare, berinisiatif menerbitkan buku ini sebagai upaya menguatkan komitmen untuk mendorong Indonesia dari daerah tampil menjadi bangsa yang bermartabat.

Semoga buku ini memberi manfaat dan menyemangati pengurus ICMI untuk terus berkomitmen kuat memberikan kontribusi pemikiran konstruktif untuk kemajuan bangsa. Beragam pemikiran penulis dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi, menjadikan buku ini kaya dengan berbagai sudut pandang. Buku ini menawarkan beragam alternatif solusi menuju suatu kondisi bangsa yang bermartabat. Islam itu berorientasi keselamatan dunia, yaitu *Rahmatan Lilalamiin*, menjadi Rahmat bagi seluruh alam. Sejak kelahirannya, ICMI tetap menjaga komitmennya memajukan bangsa.

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan taufik-Nya kepada kita semua. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Parepare, Maret 2022
Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Kota Parepare

Taqyuddin Djabbar

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR v
KATA PENGANTAR KETUA ICMI ORDA PAREPARE x
SAMBUTAN WALIKOTA PAREPARE xii
SAMBUTAN MAJELIS PENGURUS WILAYAH IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) ORGANISASI WILAYAH SULAWESI SELATAN xv
SAMBUTAN KETUA DEWAN PAKAR IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (ICMI) ORGANISASI DAERAH KOTA PAREPARE xvii
DAFTAR ISI xix

BAGIAN 1: PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Bab 1 Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Melalui Pendidikan Untuk Indonesia Bermartabat
Irwan Idrus, Irfan 1
Bab 2 Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Mewujudkan Generasi Indonesia Bermartabat
Andi Fitriani Djollong 14
Bab 3 Merawat Sumber Daya Alam, Perkuat Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Bermartabat
Alfiansyah Anwar 33

BAGIAN 2: KESEHATAN DAN GIZI

Bab 4 Gerakan Literasi Gizi, Wujudkan Generasi Indonesia Sehat
Haniarti, Nurpika Hardiyanti S, Syafira Maharani S. 50

Bab 5 Mewujudkan Masyarakat Sehat Melalui Program Home Visit Untuk Indonesia Bermartabat
Usman 65

Bab 6 Health Literacy, Adaptasi Perubahan Iklim Untuk Indonesia Sehat Bermartabat.
Rahmi Amir 77

BAGIAN 3: KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA

Bab 7 Relasi Pesan Kuasa Dan Umat Islam Indonesia Bermartabat
Mahsyar, St. Nurhayati Ali, Ahmad Dhiyaul Haq 89

Bab 8 Mengokohkan Peradaban Bangsa Indonesia Melalui Pesan Tradisi Sastra Lisan Bugis (untuk Membangun Indonesia Bermartabat)
Amaluddin 112

BAGIAN 4: EKONOMI PEMBANGUNAN

Bab 9 Pembangunan Ekonomi Dengan Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal
Yadi Arodhiskara, Fajar Ladung 132

Bab 10 Meningkatkan Daya Tahan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Sejahtera
Taqyuddin Djabbar 144

Bab 11 Ketimpangan ekonomi dan upaya membangun infrastruktur jalan yang handal dan berkualitas
Muh. Nashir T 164

BAGIAN 5: EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Bab 12 Ekonomi Syariah Penggerak Ekonomi Nasional Dan Sumber Kesejahteraan Umat
Syarifuddin Yusuf, Muhammad Amin Syarhan 174

Bab 13 Inklusi Keuangan Syariah: ICMI dan Martabat Indonesia di Mata Dunia
Muhammad Majdy Amiruddin 197

BAGIAN 6: HUKUM DAN PEMERINTAHAN
Bab 14 Penegakan Hukum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Untuk Indonesia Bermartabat
Asram A. T. Jadda 210
Bab 15 Tantangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Multi Partai Versus Presidensial
Ibrahim Fattah 220

TENTANG EDITOR 236

BAGIAN 1:
PENDIDIKAN
DAN PENGEMBANGAN SDM

Pendidikan merupakan indikator utama dalam mendorong pengembangan SDM yang berkualitas, terutama pendidikan karakter, yang turut serta membentuk martabat sebuah bangsa.

Bab 1

MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL MELALUI PENDIDIKAN UNTUK INDONESIA BERMARTABAT

Irwan Idrus[1], Irfan[2]

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Itulah sebabnya sebuah bangsa yang memiliki perhatian yang tinggi pada bidang Pendidikan, maka akan memiliki SDM yang *qualified* sebagai modal besar bagi bangsa tersebut untuk mencapai tingkat kemajuan yang tinggi. Pendidikan adalah investasi jangka Panjang, sehingga *road map* dalam bidang pendidikan mesti diformulasikan dengan baik, cermat dan terukur.

Mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pada dasarnya pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pertumbuhan dan pengembangan pendidikan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa

[1]Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare; email: idrusiwan@yahoo.com;
[2]Pegawai (ASN) pada institusi pemerintah Kota Parepare

pendidikan merupakan kunci dasar dari suatu negara. Pendidikan sering diibaratkan sebagai lambang kekuatan, kewibawaan dan kebesaran dari suatu bangsa di manapun di dunia ini. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kebutuhan asasi manusia, Hal ini sudah dijelaskan pada alenia 4 dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara ialah "ikut mencerdaskan kehidupan bangsa". Kemudian dalam Pasal 31 UUD 1945 ini juga disebutkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran".

Upaya nyata yang perlu dipacu adalah mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan. SDM sangat diperlukan untuk pembangunan sektor industri dan sektor lainnya atau dapat memanfaatkan SDM yang dihasilkan oleh pembangunan pendidikan. Pengembangan pendidikan perlu dikelola lebih baik lagi seperti perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi.

Secara teoritis bahwa pendidikan akan menimbulkan diferensiasi kerja. Hal ini tidak dapat disangkal, sebab pendidikan dengan berbagai jenis dan jenjang, baik pendidikan formal maupun non formal akan memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap pada subjek didik dalam berbagai bidang dan aspek. Manusia terdidik akan memiliki daya cipta, rasa, karsa dan karya, dan pada saatnya manusia itu akan terjun ke masyarakat untuk bekerja secara profesional atau menjadi seorang *entrepreneur.*

Realitas yang dialami bangsa kita hari ini termasuk di Kota Parepare menunjukan kualitas SDM masih rendah, hal ini membutuhkan perhatian yang serius karena akan berimplikasi pada tingkat pengangguran yang akan semakin meningkat. Rendahnya kualitas SDM sekaligus menunjukkan pengelolaan pendidikan perlu ditingkatkan agar menghasilkan *output* SDM yang mampu bersaing di dunia global.

Unsur Utama Pengembangan Pendidikan

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi fokus perhatian penulis dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan Pendidikan di Kota Parepare, maka penulis menguraikan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Kompetensi Guru

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Dalam Al Qur'an kita juga dapat temukan terkait dengan keteladanan, yang ada pada diri Rasulullah Muhammad Saw, yakni surah Al Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah*."

Seorang guru tentu harus memiliki kepribadian yang baik, yang dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Sifat disiplin, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghargai adalah merupakan sifat yang mesti diajarkan dan diimplementasikan dalam keseharian, baik Ketika proses

belajar mengajar maupun ketika hadir di tengah-tengah masyarakat.

Suatu hal yang sangat ironi, ketika kita menyaksikan di beberapa tempat, masih ada oknum guru yang melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti kasus *bully* siswa yang tidak mengerjakan tugas, siswa dihukum dengan tidak mendidik bahkan ada yang sampai melakukan tindakan fisik. Tentu ini semua tidak mencermikan kepribadian yang baik dari seorang guru.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi guru dalam bidang penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan arus teknologi digitaliasi mengharuskan guru memiliki *skill* dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Berbagai aplikasi pembelajaran akan sangat membantu bagi guru untuk memberikan materi yang variatif dalam pembelajaran. Masa pandemi covid-19 telah membuktikan pentingnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi dengan sistem pembelajaran daring dengan menggunakan berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi *zoom, google meeting* dan sebagainya.

2. Sarana dan Pra sarana

Berbicara tentang sarana dan prasarana, maka hal ini tentu merupakan bagian yang sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Pendidikan di semua jenjang mesti ditunjang dengan ketersediaan fasilitas yang lengkap.

Mencermati hal tersebut, maka pemerintah Kota Parepare mesti memberikan perhatian yang serius terhadap ketersediaan sarana dan pra sarana, mulia dari jenjang, PAUD, SD, SLTP maupun SLTA. Meskipun untuk jenjang SLTA menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi.

a. Jenjang PAUD

Ketersediaan sarana yang menunjang proses pembelajaran masih sangat minim. PAUD yang didominasi sekolah swasta terlihat sarana yang sangat kurang, baik itu sarana untuk stimulasi motorik halus maupun

sarana untuk stimulasi motorik kasar. Hal ini berakibat pada kurangnya variasi pembelajaran bagi peserta didik. Pembelajaan cendrung monoton dan kaku karena kurangnya fasilitas di satuan PAUD.

b. Jenjang SD

Beberapa kali kami melakukan evaluasi dan monitoring di jenjang SLTP, sarana/ fasilitas laboratrium masih minim. Ketersebaran jumlah komputer, sarana yang menunjang pembelajaran teknologi komunikasi dan informasi terlihat sangat minim. Hal tersebut menjadikan proses pembelajaran tidak maksimal karena siswa harus saling bergantian dalam menggunakan fasilitas tersebut. Rasio sarana praktek komputer dengan jumlah siswa masih sangat tinggi.

c. Jenjang SLTP

Hal yang sama juga terjadi pada jenjang SLTP. Fasilitas laboratorium masih sangat kurang. Padahal untuk mencapai sebuah pembelajaran yang berkualitas, ketersedian fasilitas lab menjadi hal yang sangat urgen dan sangat dibutuhkan bagi guru dan siswa. Ketercapaian tujuan pembelajaran sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana pembelajaran.

3. Alokasi Anggaran Pendidikan

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam

pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Hasan Ashari, 2014).

Anggaran Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam peningkatan kualitas Pendidikan di Kota Parepare. Kurangnya sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan, disemua level tentu memiliki korelasi dengan jumlah alokasi anggaran Pendidikan di Kota Parepare. Sejatinya alokasi anggaran Pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional yakni 20% dari APBN mestinya terimplementasi di tingkat Kabupaten/Kota. Inilah salah satu hal yang mesti mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Parepare bersama dengan legislatif untuk mengimplementasikan kebijakan nasional tersebut terkait anggaran pendidikan sehingga mutu pendidikan di Kota Parepare dapat dicapai secara maksimal.

4. Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah

Kemajuan sebuah satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial di sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dalam pencapaian mutu Pendidikan di sekolah. Fungsi manajemen seperti perencanaan (*Planning*), pengorgansian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan Pengendalian (*Controlling*) mesti terimplementasi secara terencana dan terukur.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi yang tinggi antara kompetensi manajerial kepala sekolah dengan kapabilitas mengajar guru di sekolah. Hal ini penting untuk diperhatikan bagi pengambil kebijakan dalam perekrutan atau seleksi kepala sekolah agar variable kompetensi manajerial menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk menentukan kepala sekolah yang akan menempati posisi puncak

di sebuah satuan Pendidikan.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan (Suratman, 2012) bahwa ada hubungan langsung antara kompetensi manajerial kepala sekolah dengan kapabilitas mengajar guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Kapabilitas Mengajar Guru di SMP Negeri se- Kota Surabaya memiliki hubungan langsung yang signifikan. Dalam kaitannya dengan pernyataan hasil penelitian tersebut, seorang kepala sekolah sebagai pelopor pendidikan (*educator*) memiliki tanggung jawab membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan program pengajaran. Dengan demikian sangat jelaslah bahwa kapabilitas mengajar guru dengan segala unjuk kerjanya memiliki ketergantungan maupun hubungan yang erat dengan kompetensi manajerial kepala sekolah di SMP Negeri se-Kota Surabaya.

Mencermati hal tersebut di atas maka kepala sekolah perlu secara terencana untuk mendapatkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) terkait bagaimana kepala sekolah dapat memahami dan mengimplementasikan kemampuan manajerial dalam mengelola satuan Pendidikan agar mutu pendidikan dapat dicapai secara maksimal sesuai denga target yang telah ditetapkan.

5. Pendidikan karakter

Kalau kita mencermati sepanjang sejarahnya, di seluruh dunia ini, pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar (*smart*), dan membantu mereka menjadi manusia yang baik (*good*). Menjadikan manusia cerdas dan pintar, boleh jadi mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar menjadi orang yang baik dan bijak, tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Dengan demikian, sangat wajar apabila dikatakan bahwa problem moral merupakan persoalan akut atau penyakit kronis yang mengiringi kehidupan manusia kapan dan dimana pun (Ajat

Sudrajat. 2011).

Pendidikan karakter menjadi hal yang sangat urgen dalam membentuk generasi masa depan. Siswa tidak boleh hanya memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, namun tidak didukung oleh moralitas yang baik. Kecerdasan emosonal (*emotional intelligence*) merupakan bagian yang penting dalam pendidikan karakter. Di samping itu kemampuan empati bagi siswa menjadi sangat menentukan dalam membentuk kepribadian seorang siswa.

Empati adalah kemampuan untuk berbagi dan mamahami emosi orang lain. Dalam ilmu psikologi dikenal tiga jenis empati. Pertama adalah empati afektif, yakni kemampuan untuk berbagi emosi dengan orang lain. Orang yang memiliki empati jenis ini biasanya adalah mereka yang menunjukkan reaksi mendalam saat menonton film horor. Mereka akan merasa takut atau merasakan derita orang lain saat melihat orang lain mengalaminya. Sebaliknya dengan jenis empati yang kedua, yaitu empati kognitif. Ini merupakan kemampuan untuk memahami emosi orang lain. Contohnya adalah psikolog yang memahami emosi kliennya secara rasional, tapi tak harus berbagi emosi secara mendalam. Terakhir adalah empati regulasi emosional. Ini merujuk pada kemampuan untuk mengatur sebuah emosi. Misalnya, ahli bedah yang bisa mengendalikan emosinya saat mengoperasi pasien. Empati tidak sama dengan meniru atau imitasi. Untuk memiliki rasa empati kita harus memiliki kesadaran diri dan juga jarak antara diri sendiri dan orang lain.

Pelajaran tentang empati dapat kita temukan dalam AL Qur'an, yang pada dasarnya merupakan sifat dari Rasulullah Saw dalam seluruh aktivitas keseharian Beliau. Ini tergambar dalam Surah *At Taubah* ayat 128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan (keamanan dan keselamatan) bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin*."

6. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengembangan Pendidikan di Kota Parepare seyogiyanya melibatkan seluruh *stakeholder* Pendidikan termasuk dalam hal ini adalah Badan Usaha, baik milik negara maupun swasta. Keterlibatan pihak perusahaan/badan usaha dalam peningkatan mutu Pendidikan dapat diwujudkan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan salah satu bentuk partisipasi atau tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Kecenderungan dari banyak perusahaan masih memaknai program *Corporate Social Responsibility* hanya sebatas kegiatan donasi kepada masyarakat, masih belum dimaknai sebagai sebuah upaya serius dari perusahaan yang ditujukan untuk lebih memberdayakan masyarakat lokal. Seperti halnya program CSR untuk bidang pendidikan, selama ini hanya dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa untuk siswa/siswi berprestasi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, bantuan perbaikan sarana belajar sekolah dan pemberian insentif untuk para guru. Dan anehnya hal ini justru banyak dibanggakan oleh para pekerja sosial perusahaan dan dianggap telah banyak membantu (Zaelani, 2015).

Salah satu visi Kota Parepare adalah menjadi kota industri tanpa cerobong asap. Hal ini menunjukkan bahwa Parepare memiliki perusahaan/industri yang diharapkan dapat berkontribusi bagi dunia Pendidikan di Kota Parepare. Sebutlah misalnya Pertamina, PLN, Telkom, Bulog, sejumlah Bank-Bank Swasta, Lembaga Keuangan, Hotel-Hotel dan lan sebagainya. Kontribusi perusahaan di Parepare dalam bentuk CSR bidang Pendidikan perlu dimaksimalkan. Baik dalam hal sarana pra sarana, peningkatan kualitas guru, beasiswa, dan program lainnya.

Dengan demikian jika perusahaan tersebut terlibat secara maksimal melalui program CSR bidang Pendidikan maka tentu akan sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu Pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ketersediaan akses jaringan internet mesti terjangkau di semua sekolah. Pembelajaran dengan system *blended learning*, melalui online menjadi kebutuhan yang sangat urgen.

7. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Non Formal

Telah menjadi amanat undang-undang bahwa bentuk Pendidikan di Indonesia meliputi Pendidikan formal, informal dan non formal. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal.

Pengembangan Pendidikan Non Formal di Kota Parepare masih minim. Hal ini terlihat dengan minimnya program-program dari pemerintah kota Parepare terkait pemberdayaan Lembaga Pendidikan non formal, dalam hal ini Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kota Parepare.

Keberadaan LKP di Parepare dengan jumlah yang kurang lebih 60 LKP adalah modal bagi pemerintah Kota dalam upaya memberikan kursus dan pelatihan kepada masyarakat melalui LKP. LKP memiliki

sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk membekali masyarakat agar memiliki *skil*/keterampilan sebagai modal untuk memasuki dunia kerja. LKP adalah mitra pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Parepare.

Era revolusi Industri 4.0 menuntut para *job seeker* untuk memiliki hard skill dalam bidang IT dan juga soft skill dalam hal kemampuan *collaboration*. Oleh sebab itu ke depan menjadi Langkah strategis dari pemerintah kota Parepare untuk memberdayakan LKP dalam upaya peningkatan *skill* dan pengurangan tingkat pengangguran khususnya di Kota Parepare.

8. Optimalisasi Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan Lembaga independen yang diharapkan dapat bermitra dengan pihak satuan Pendidikan dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu peran dan fungsi komite sekolah mesti dioptimalkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Kehadiran komite sekolah pada pengelolaan satuan unit pendidikan menjadi penting dirasakan dalam kondisi saati ini, dimana wabah pandemi covid-19 sedang mempengaruhi seluruh sector kehidupan, termasuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Komite sekolah sebagai representatif mereka untuk ikut serta memberikan solusi atas persoalan pembelajaran akibat hantaman badai corona. Pemerintah melalui Kemendikbud memberikan arahan kepada sekolah dalam melaksanakan pembelajaran selama pandemi covid-19 berlangsung sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dimana proses belajar mengajar dirumahkan serentak sebagaimana surat edaran Kemendikbud nomor 36962/MPK.A/HK/2020 perihal pengambilan keputusan pada berbagai jenjang (Fathurrahman, 2020).

Pemberdayaan Komite Sekolah ini terdiri atas tiga hal, yaitu: (1) Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah, (2) Peningkatan Kemampuan Organisasional Pengurus Komite Sekolah, dan (3) Peningkatan Wawasan

Kependidikan Pengurus Komite Sekolah. (Erola et al., 2016)

9. Optimalisasi Trisentra Pendidikan

Upaya peningkatan mutu Pendidikan di Kota Parepare perlu memperhatikan keterlibatan secara maksimal trisentra Pendidikan meliputi pihak sekolah, orang tua dan masyarakat. Kerjasama dan pola kemitraan yang harmonis akan menghasilkan capaian yang maksimal. Dapat dibayangkan bisa pendidikan hanya dianggap tanggung jawab guru/sekolah, sementara orang tua dan masyarakat abai terhadap pendidikan maka tentu akan berakibat pada pola Pendidikan yang tidak sinkron dalam kehidupan.

Pada tahun 1937 Ki Hadjar Dewantara memperkenalkan tiga konsep pendidikan, yaitu keluarga, sekolah atau perguruan, dan masyarakat. Pendidikan tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Misalnya, jika di sekolah anak-anak diajarkan membuang sampah pada tempatnya, tetapi di dalam lingkungan keluarga tidak pernah dibiasakan membuang sampah pada tempatnya bahkan dalam kehidupan masyarakat tidak ada kebiasaan menjaga lingkungan bersih dan dibiasakan membuang sampah di mana-mana maka pendidikan budi pekerti menjaga kebersihan tidak akan berhasil. Jika Trisentra pendidikan ini dijalankan secara sinergis, maka terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya bukan suatu keniscayaan (Nanang & Subekti, n.d. 2015).

Oleh karena itu Pemerintah Kota Parepare perlu secara kontinu dan massif memberikan pemahaman dan pemberdayaan terhadap tri sentra Pendidikan agar ketiga bagian tersebut dapat bersinergi membangun Pendidikan di Kota Parepare. Kegiatan workshop ataupun pelatihan dapat dilakukan untuk mempertemukan dan mengoptimalkan peran dan fungsi Tri Sentra Pendidikan.

Kesimpulan

1. Membangun SDM Unggul melalui Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Seluruh *stakeholder* Pendidikan mesti terlibat dan berkolaborasi untuk Indonesia yang bermartabat.
2. Pengembangan Pendidikan mesti diarahkan pada kemampuan guru maupun peserta didik dalam penguasaan penggunaan IT (*Information technology*) sebagai konsekuensi logis dari kemajuan tekonologi komunikasi dan informasi.
3. SDM yang unggul berkarakter akan berkontribusi secara optimal dalam membangun masa depan bangsa yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Erola, J., Jalonen, S., & Lehti, H. (2016). Pemberdayaan komite sekolah. Research in Social Stratification and Mobility, 44, 33–43.

Fathurrahman, F. (2020). Optimalisasi Kinerja Komite Sekolah Dalam Pengolahan Satuan Unit Pendidikan. Reforma : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 9(1), 40–50.

Ajat Sudrajat. 2011. Mengapa Pendidikan Karakter. Jurnal Pendidikan Karakter, I(1), 47–58. https://doi.org/10.21831/JPK.V1I1.1316

Nanang, O., & Subekti, B. (n.d.). 2015. Memaknai Kembali Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara.

Suratman, B. (2012). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah, Ketersediaan Sarana Prasarana, Kapabilitas Mengajar Guru, dan Dukungan Orang Tua, Kaitannya dengan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri di Kota Surabaya. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP), 17(1), 89–97.

Zaelani, M. A. (2015). Program CSR Bidang Pendidikan Sebagai Investasi Sosial. Kompasiana.com, 3.

Bab 2

PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA DINI MEWUJUDKAN GENERASI INDONESIA BERMARTABAT

Andi Fitriani Djollong[1]

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan. Pendidikan karakter menjadi hal penting untuk mencegah dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan karakter diberikan kepada anak sejak dini, pendidikan karakter yang baik akan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik secara *hardskill* juga *softskill,* pendidikan karakter yang dilakukan sejak dini, akan membuat generasi kedepannya semakin berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan diimplementasikan secara sistematik untuk menanamkan nilai-nilai perilaku anak didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tatakrama, budaya dan adat istiadat (Gunawan dalam Khoiriyah, 2016). Pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti, bahwa aspek pengetahuan, aspek perasaan dan aspek perilaku

[1] Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare; andifitrianidjollong71@gmail.com

terlibat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0 hingga 8 tahun, pada usia ini merupakan masa yang sangat penting, dimana perkembangan otak anak dapat berlangsung dengan optimal dan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan anak nantinya. Usia dini adalah usia anak belum memasuki pendidikan formal. Rentang usia 0-6 tahun ini merupakan saat yang tepat dalam memberikan pendidikan karakter serta mengembangkan potensi dan kecerdasan anak.

Pendidikan karakter merupakan salah satu program pemerintah yang pelaksanaannya diterapkan melalui lembaga pendidikan yang dimulai dari level terendah pendidikan anak usia dini sampai ke tingkat perguruan tinggi, hal ini agar memudahkan pemerintah dalam membangun karakter bangsa yang diinginkan sesuai harapan bangsa, sehingga melalui peserta didik karakter yang baik akan tumbuh karena terbiasa dilaksanakan dan dilakukan baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun masyarakat (Fadilah, 2021).

Pendidikan karakter pada anak usia dini adalah usaha yang dilakukan untuk menanamkan dan pengembangan nilai-nilai karakter kepada anak sejak dini, sehingga anak usia dini mempunyai karakter luhur yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan di keluarga dan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini dapat mengembangkan nilai karakter bangsa dan akhlak mulia anak secara optimal.

Pendidikan Karakter

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. Sementara pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai dan karakter sebagai karakter dirinya,

sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasional, produktif dan kreatif. (Kemendiknas, 2010) Karakter adalah kulminasi dari kebiasaan yang dihasilkan dari pilihan etik, perilaku, dan sikap yang dimiliki individu yang merupakan moral yang prima walaupun tidak seorangpun yang melihatnya. Karakter mancakup keinginan seseorang untuk melakukan yang terbaik, kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, kognisi dari pemikiran kritis dan alasan moral, dan pengembangan keterampilan interpersonal dan emosional yang menyebabkan kemampuan individu untuk bekerja secara efektif dengan orang lain dalam situasi setiap saat (Yaumi, 2014).

Karakter dalam terminologi agama, khususnya agama Islam, karakter dapat disepadankan dengan akhlak, terutama dalam kosakata ”*al-akhlak al-karimah*” akhlak yang mulia sebagai lawan dari ”*akhlak al-Syuu*’” akhlak yang buruk, yang dalam ikon pendidikan di Indonesia dulu semakna dengan istilah ”budi pekerti”. Akhlak menurut Ahmad Muhammad Al-Hufy dalam ”*Min Akhlak al-Nabiy*”, ialah ”*azimah* (keutamaan) yang kuat tentang sesuatu yang dilakukan berulangulang sehingga menjadi adat (membudaya) yang mengarah pada kebaikan atau keburukan ”. Betapa pentingnya akhlak atau karakter sehingga Nabi Muhammad Saw. diutus untuk menyempurkan akhlak manusia, dan dalam praktik kehidupan beliau dikenal sebagai berakhlak yang agung (Haedhar, 2013).

Pendidikan karakter adalah sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli dan bertindak dengan landasan nilai-nilai etis, yang mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*), keberhasilan pendidikan karakter dimulai dengan pemahaman karakter yang baik, mencintainya, dan pelaksanaan atau peneladanan atas karakter baik itu. (Lickona, 1997). Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia

secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi anak guna membangun karakter pribadinya sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter erat hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik (Nuraidah, 2020).

Pendidikan karakter adalah unsur psiko-sosial dari diri individu yang dapat terbentuk secara bertahap dalam proses yang membutuhkan waktu panjang. Pembentukan karakter anak seyogyanya dimulai sejak dalam kandungan sampai anak dewasa dengan dukungan dan keterlibatan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sehingga anak memiliki kepribadian yang utuh yang memiliki akhlak yang baik. Dasar pendidikan karakter ini, dimulai di usia dini yang disebut juga sebagai usia emas (*Golden Age*), pada usia ini akan menentukan pengembangan potensi anak.

Undang-undang Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar yang terencana agar terwujud suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif di mana peserta didik bisa mengembangkan potensi dirinya supaya mempunyai kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan karakter tidak lepas dari nilai-nilai dasar yang dipandang baik, pada pendidikan anak usia dini nilai-nilai yang diinternalisasikan ke dalam perilaku mereka mencakup: 1) Kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2) Kejujuran, 3) Kedisplinan, 4) Toleransi dan Cinta Damai, 5) Percaya Diri, 6) Mandiri, 7) Tolong Menolong, 8) Hormat dan Sopan Santun, 9) Tanggung Jawab, 10) Kerja Keras, 11) Kepemimpinan dan Keadilan, 12) Kreatif, 13) Rendah Hati,

14) Peduli Lingkungan, 15) Cinta Bangsa dan Tanah Air. (Khoiriyah, 2016)

Pendidikan karakter perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi memiliki integrasi dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik, memiliki akhlak yang baik dan karakter yang berkualitas.

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Karakter

Secara umum fungsi pendidikan karakter sesuai dengan fungsi pendidikan nasional, pendidikan karakter dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan karakter yaitu:

1. Pembentukan dan Pengembangan Potensi. Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi potensi peserta didik agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Oleh karenanya, dalam konteks ini pendidikan harus mampu memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi maupun bakat yang dimilikinya sesuai dengan norma-norma yang ada.
2. Perbaikan dan Penguatan. Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter peserta didik yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera.

3. Penyaring. Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat. (Muchlas, 2011)

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yakni Pancasila, yang meliputi: 1) Menumbuhkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati, berpikir dan berperilaku baik, 2) Menciptakan Bangsa berkarakter Pancasila, 3) Mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, berbangsa dan bernegara serta mencintai umat manusia (Rahmawati, 2017). Pendidkan karakter diharapkan dapat membentuk karakter anak yakni karakter Pancasila yang memilki potensi yang selalu berkembang, memiliki perilaku baik dan berpikir untuk kejayaan masa depan agama, bangsa dan negara.

Pendidikan karakter bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter, pengembangan nilai-nilai karakter bangsa dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penilaian pendidikan karakter untuk mengetahui keberhasilan pendidikan karakter kepada anak usia dini atau peserta didik (Veny, 2018).

Pendidikan karakter berupaya untuk membentuk karakter anak usia dini sehingga pada masa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dapat mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Pendidikan karakter yang diharapkan diberikan kepada anak usia dini adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam sehingga karakter anak usia dini adalah karakter yang Islami.

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter pada usia dini adalah hal yang tepat karena pada usia ini periode perkembangan dalam kehidupan manusia menjadi penting. Pertumbuhan dan perkembangan individu pada usia dini berlangsung cepat sehingga menjadi penentu bagi karakter anak pada usia dewasa. Pendidikan karakter yang diawali pada usia dini, akan dapat membentuk generasi penerus bangsa yang mempunya karakter yang kokoh, kuat dimana karakternya tersebut mencerminkan karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai karakter dapat dikelompokkan menjadi lima nilai utama 1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu: pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama. 2) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, seperti: jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, mandiri. 3) Nilai karakter hubungannya dengan sesama, yaitu sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, mematuhi aturan-aturan sosial, mampu berempati dan simpati kepada orang lain. 4) Nilai karakter hubungannya dengan lingkungan, yaitu berkaitan dengan kepedulian terhadap sosial dan lingkunganm seperti menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan. 5) Nilai kebangsaan, yaitu berhubungan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Nilai karakter berupa nasionalis dan menghargai keberagaman (Ary Kristiyani, 2014).

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter Harus bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini (Fadlillah, 2013).

1. Religius, Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/ atau ajaran agamanya.

2. Jujur, Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain
3. Toleransi, Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja keras, Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif , Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri, Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis, Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Ingin tahu, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.
10. Nilai kebangsaan, Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Nasionalis, Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.
12. Menghargai karya dan prestasi orang lain, Sikap dan tindakan

yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mempunyai sikap mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat atau komunikatif, Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai, Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar Membaca, Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial, Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung jawab, Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan karakter adalah proses pembentukan karakter yang dilaksanakan dengan usaha pembinaan atau penanaman dan pengembangan karakter-karakter yang baik kepada anak usia dini, sehingga anak mempunyai karakter yang baik, mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan warga negara. Pendidikan karakter merupakan pembinaan yang diberikan kepada anak sesuai dengan ajaran Islam sehingga anak dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, pikiran, perilaku, tindakan, perbuatan atau dengan kata lain akhlak anak

adalah sesuai dengan karakter yang berlandaskan ajaran Islam.

Anak Usia Dini

Menurut NAECY (*National Association of Education For Young Children*). anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. Karakteristik anak usia dini tersebut berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Pada masa ini, anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga pelaksanaan pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan perkembangan anak, baik secara kelompok usia maupun secara individual (Agusniatih, 2019).

Anak usia dini merupakan usia anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana diharapkan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui tahap-tahap yang normal sesuai dengan masa perkembangan anak. Hal ini perlu dilakukan sehingga anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Pendidikan karakter pada anak usia dini dapat mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan anak usia dini sehingga dapat berfungsi sebagai insan yang utuh sebagaimana dengan falsafah negara dan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Usia dini merupakan masa emas (*the golden ages*) yang hanya ada sekali dan tidak dapat diulang kembali. Pada masa itu anak berada pada periode sensitif yang dimana dimasa inilah anak secara khusus mudah menerima berbagai dampak danpelajaran dari lingkungan anak–anak tersebut. Anak pada usia 0 hingga 8 tahun adalah usia yang sangat penting karena pada masa–masa tersebutlah adalah masa dimana perkembangan otak mereka dapat berlangsung dengan optimal dan itu sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan seorang anak nantinya (Fitriani, 2020).

Anak usia dini pada hakekatnya ialah anak yang membutuhkan pendidikan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan

perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan anak usia dini memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal.

Allah SWT. telah memberikan beragam amanah kepada umat manusia. Salah satu amanah yang Allah SWT. bebankan kepada manusia, dalam hal ini orag tua, pendidik adalah memperhatikan dan memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada anak. Sejak usia dini anak dididik, dibimbing, dituntun sehinnga anak memiliki akhlak yang baik, sebagaimana Yang demikian ini merupakan penerapan dari Firman Allah SWT. surah Al-Tahrim/66 : 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Orangtua merupakan pendidik, pembimbing, pengasuh yang pertama dan utama kepada anaknya. Orangtua memiliki tanggung jawab akan pendidikan anak. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah yang merupakan kekuatan lahir atau potensi yang diberikan Allah SWT. kepada setiap individu yang lahir. Anak membutuhkan pendidikan, bimbingan, pengasuhan secara optimal dan maksimal dari orangtua.

Pendidikan karakter anak usia dini adalah pendidikan dalam rangka penanaman dan pengembangan nilai-nilai karakter kepada anak usia dini, sehingga anak berkarakter luhur untuk dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari.

Anak usia dini memiliki sikap spontan, baik dalam melakukan aktivitas maupun saat berinteraksi dengan orang lain. Anak tidak bisa membedakan apakah perilaku yang ditunjukkan dapat diterima oleh orang lain atau tidak dapa diterima, jika orang dewasa (seperti: orang tua, guru) tidak menyampaikan atau memberitahukan kepada anak secara langsung tentang-perilaku-perilaku yang diharapkan masyarakat, memberikan contoh kepada anak tentang sikap-sikap yang baik, dan membiasakan anak untuk bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari di manapun anak berada. Namun yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan sikap anak agar menjadi individu yang bersikap baik adalah anak usia dini belum mengetahui banyak hal tentang bagaimana harus berperiku yang dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu peran pendidikan dibutuhkan untuk membantu penanaman karakter pada anak sejak usia dini melalui pendidikan karakter (Mulianah, 2017).

Pendidikan karakter sebagai upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat alaminya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Penekanan dan pemberdayaan penerapan pendidikan karakter di berbagai lembaga pendidikan, baik informal, formal maupun nonformal diharapkan mampu pula menjawab berbagai tantangan serta permasalahan kompleks yang dialami bangsa Indonesia. Jadi pendidikan karakter sendiri harus dimulai sedini mungkin Pendidikan karakter pada usia dini memanglah permulaan yang tepat karena usia ini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa ini berlangsung sangat cepat dan akan menjadi penentu bagi sifat-sifat atau karakter anak di

masa dewasa (La Hadisi, 2015).

Pendidikan karakter anak usia dini adalah usaha pengembangan dan peningkatan potensi dan kompetensi anak dalam kaitannya dengan pikiran, perilaku dan perbuatan anak, yang tentunya disesuaikan dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al Qur'an dan Al Hadis sehingga anak usia dini memiliki karakter yang Islami.

Karakteristik Anak Usia Dini

Karakteristik anak usia dini merupakan ciri khas dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak adalah individu yang memiliki karakteristik masing-masing, bahwa anak adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. makhluk individu bahwa setiap manusia memiliki perbedaan individual, sedang makhluk sosial bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian, manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Masa usia dini merupakan masa paling penting untuk sepanjang kehidupan anak, sebab masa usia dini merupakan masa pembentukan pondasi dan dasar kepribadian yang akan menentukan pengalaman selanjutnya, kerena pentingnya usia dini maka kebutuhan anak usia dini mutlak dipenuhi.

1. Unik, yaitu sifat anak itu berbeda satu sama lainnya. Anak memiliki bawaan, minat kapabilitas, dan latar belakang kehidupan masing-masing.
2. Egosentris, yaitu anak lebih cendrung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Bagi anak sesuatu itu penting sepanjang hal tersebut terkait dengan dirinya.
3. Aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan aktivitas. Selama terjaga dalam tidur, anak seolah-olah tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah berhenti dari aktivitas. Terlebih lagi kalau anak dihadapkan pada suatu

kegiatan yang baru dan menantang.

4. Rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Yaitu, anak cendrung memperhatikan , membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, terutama terhadap hal-hal baru.
5. Eksploratif dan berjiwa petualang, yaitu anak terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat dan senang menjelajah, mencoba dan mempeajari hal-hal yang baru.
6. Spontan, yaitu prilaku yang ditampilkan anak umumnya relative asli dan tidak ditutup-tutupi sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya.
7. Senang dan kaya dalam fantasi, yaitu anak senang dengan hal-hal yang imajinatif. Anak tidak hanya senang dengan cerita-cerita khayal yang disampaikan oleh orang lain, tetapi ia sendiri juga senang bercerita kepada orang lain.
8. Masih mudah frustasi, yaitu anak masih mudah kecewa bila menghadapi sesuatu yang tidak memuaskan. Ia mudah menangis dan marah bila keinginannya tidak terpenuhi.
9. Masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, yaitu anak belum memiliki pertimbangan yang matang, termasuk berkenaan dengan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.
10. Daya perhatian yang pendek, yaitu anak lazimnya memiliki daya perhatian yang pendek, kecuali terhadap hal-hal yang secara *intrinsic* menarik dan menyenangkan.
11. Bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman, yaitu anak senang melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada dirinya sendiri.
12. Semakin menunjukkan minat terhadap teman, yaitu anak mulai menunjukkan untuk bekerja sama dan berhubungan dengan teman-temannya. Hal ini beriringan dengan bertambahnya usia

dan perkembangan yang dimiliki oleh anak (Husnuzziadatul, 2018).

Anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak usia dini mempunyai karakteristik yang khas baik dari segi jasmani, moral, sosial dan sebagainya. Anak usia dini membutuhkan rasa aman, istirahat dan makanan yang baik, mempunyai kebutuhan untuk bertanya dan memperoleh jawaban, anak usia dini senang bermain yang merupakan dunia masa anak-anak. Anak usia dini berbeda dengan orang dewasa karena anak usia dini mempunyai tahap perkembangan yang unik baik secara jasmani maupun rohani, untuk mencapai tahapan perkembangan anak secara optimal anak memerlukan ransangan dan stimulasi dalam perkembangannya. Dukungan dari semua pihak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sangat berperan penting dalam kehidupan anak. Anak membutuhkan stimulasi untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak memiliki potensi dan bakat, olehnya itu anak membutuhkan bantuan dari orang dewasa agar potensi dan bakatnya itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Setiap anak akan berkembang sesuai dengan rangsangan dan dukungan dari lingkungan sekitarnya.

Pentingnya Pendidikan Karakter Anak Usia Dini

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pada lampiran 1 menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Bab I Pasal 1 Butir 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pendidikan harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik sebagai dasar anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Masa usia dini adalah masa emas perkembangan anak dimana semua aspek perkembangan dapat dengan mudah distimulasi. Periode emas ini hanya berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pengembangan menyeluruh yang melibatkan aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan. Kurikulum pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya (Enah, 2015).

Pendidikan karakter bagi anak usia dini merupakan penanaman nilai-nilai kebaikan agar dapat menjadi kebiasaan ketika dewasa kelak atau pada jenjang pendidikan selanjutnya. Anak usia dini adalah usia yang tepat untuk melaksanakan pendidikan karakter karena diusia ini anak belum terpengaruh negatif yang berasal dari luar lingkunganya. Pendidikan karakter anak usia dini memiliki arti yang lebih tinggi dari pendidikan moral karena buka hanya berhubungan dengan masalah benar-salah, tetapi lebih berhubungan dalam penanaman kebiasaan yang berkaitan dengan berbagai perilaku yang baik pada kehidupan sehingga anak memiliki kesadaran dan komitmen untuk mengimplementasikan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Pendidikan karakter adalah suatu upaya orang dewasa secara sadar dan terencana untuk mendidik, membimbing dan memberdayakan potensi anak usia dini untuk membentuk dan membangun karakter pribadi anak usia dini sehingga terwujud insan yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama dan bangsa. Pendidikan karakter seyogyanya dimulai sedini mungkin karena usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa ini berlangsung sangat cepat dan akan menjadi penentu bagi sifat-sifat atau karakter anak di masa dewasa.

Pendidikan karakter anak usia dini merupakan pengembangan potensi anak dalam rangka mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Pendidikan karakter anak usia dini mendorong lahirnya anak-anak yang baik, jika anak usia dini telah memiliki karakter yang baik, anak usia dini akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmen untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar. Anak usia dini diharapkan memiliki tujuan hidup yang jelas, sehingga menjadi generasi muda penerus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Agusniatih, Andi, Jane M Manopa. (2019). Keterampilan Sosial Anak Usia Dini: Teori Dan Metode Pengembangan. Tasikmalaya:

Edu Publisher.

Ary Kristiyani. (2014). Implementasi Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Bahasa Di PG-TPA Alam Uswatun Khasanah. Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun IV, Nomor 3. Sleman Yogyakarta.

Enah Suminah, dkk (2015). Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Apa, Mengapa dan Bagaimana, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini & Pendidikan Masyarakat.

Fadilah, dkk. (2021). Pendidkan Karakter. Bojonegoro: Agrapana Media.

Fitriani Djollong, Andi. (2020). Pembelajaran Beyond Centers And Circle Time Pada Anak Usia Dini (Kasus Pada Raudhatul Athfal) Di Kota Parepare. Disertasi, UIN Alauddin Makassar.

Husnuzziadatul Khairi. (2018). Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini Dari 0-6 Tahun Jurnal Warna Vol. 2 , No. 2. IAIIG Cilacap.

Khoiriyah. (2016). Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini melalui Bermain. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Kajian Teori dan Praktik Pendidikan Anak Usia Dini. Volume 2 Nomor 1 Juni 2016. hlm 39-45.

Nashir, Haedar. (2013). Pendidikan Karakter Berbasis Agama & Budaya. Yogyakarta : Multi Presindo.

Nuraidah, Siti. (2021). Pembelajaran Pendidikan Karakter. Yokyakarta: KBM Indonesia.

Mardapi, D. (2017). Penilaian Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Mulianah Khaironi, (2017, 82-89). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, Jurnal Golden Age Vol. 01 No. 2, Desember 2017, Universitas Hamzanwadi.

Muchlas Samani & Hariyanto. (2011). Konsep Dan Model Pendidikan

Karakter, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahmawati, I. Y. (2017). Media Pembelajaran Komik Sebagai Inovasi dalam Pembelajaran Keterampilan Membaca pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berbasis Nilai Pendidikan Karakter. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan III "Prodi. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhamadiyah Ponorogo.

Thomas Lickona, (1992). Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility, New York: Bantam Books .

Veny Iswantiningtyas. (2018, 197-204). Pentingnya Penilaian Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. Proceedings of The ICECRS.

Yaumi, Muhammad. (2014). Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar dan Implementasi. Jakarta, Kencana.

Bab 3

MERAWAT SUMBER DAYA ALAM, PERKUAT SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU INDONESIA BERMARTABAT

Alfiansyah Anwar[1]

Pendahuluan

Pengelolaan negara jangan hanya mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) saja, tetapi harus mengembangkan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). Itu penting, agar negara Indonesia bisa sejajar dengan mengikuti negara maju lainnya. Setidaknya, begitulah pesan yang saya ingat dari Pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang juga Presiden Ketiga RI, Almarhum Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie. Pesan tersebut diungkapkan Habibie semasa hidup saat menggelar jumpa pers di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Agustus 2014 lalu.

Saat itu, penulis yang bekerja sebagai Jurnalis Metro TV diundang untuk meliput jumpa pers tersebut. Pesan tersebut diingatkan Habibie lantaran negara Eropa dulu juga mengandalkan SDA, namun akhirnya lambat laun terkikis dan bahkan ada yang habis. Karena itu, lanjut Habibie, di sejumlah negara-negara maju kemudian menggenjot SDM warganya. Salah satu contoh negara yang minim SDA-nya, tapi makmur yakni Singapura. Sebab negera tersebut mengandalkan SDM-nya.

[1] Dosen Ilmu Komunikasi dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Habibie juga menceritakan pengalamannya saat tinggal di Jerman. Di negeri tersebut juga mengandalkan SDM. Ia pernah mendapat undangan untuk menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) perusahaan pesawat terbang. "Saat itu saya sempat terkejut. Sebab perusahaan pesawat terbang tersebut merayakan hari ulang tahun ke-500," kata putra kelahiran Kota Parepare tersebut.

Artinya, sudah ratusan tahun negara Eropa memiliki perusahaan pembuatan pesawat terbang sebagai industri. Karena itu, Habibie menyarankan agar pemuda pemudi saat ini harus lebih giat belajar dan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka juga harus dibekali sejumlah keterampilan. Salah satunya keterampilan dalam bidang Informasi dan Teknologi.

Sebelumnya, Habibie pernah membuat pesawat terbang Indonesia bernama N250 Gatotkaca. Tapi karena diduga minim dukungan finansial dari negara, sehingga proyek pembuatan pesawat tersebut tidak dilanjutkan. Padahal, Habibie berkeinginan agar Indonesia punya sendiri industri pesawat terbang untuk memudahkan moda transportasi antar pulau. Sebab Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar.

Walau keahliannya membuat pesawat terbang, namun Habibie justru menyarankan agar kaula muda bergerak di bidang industri informasi dan teknologi. Seperti membuat aplikasi, membuat konten video dan film animasi. Pesan Habibie tersebut ternyata kini terbukti. Di masa pandemi Covid-19, teknologi informasi ini berkembang pesat. Penggunaan aplikasi *zoom, google meet* dan kini *video whatsapp* juga semakin digandrungi saat melakukan pertemuan. Apalagi adanya pembatasan orang untuk berkumpul.

Atas saran itu, penulis pun mengarahkan seorang ponakan laki-laki yang meminta pandangan mengenai jurusan saat hendak kuliah pada awal tahun 2021 lalu. Penulis pun menyarankan untuk mengambil jurusan

Informasi dan Teknologi (IT). Sedangkan ponakan perempuan penulis juga kini berhenti dari Jurusan Eksakta di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar setelah diterima di Universitas Telkom, Bandung. Jurusannya juga terkait dengan Informasi dan Teknologi.

Penulis berpandangan, sejumlah kerabat dan teman yang dulu memiliki keterampilan di bidang IT, hampir seluruhnya berhasil menekuni bidang tersebut. Terutama di masa pandemi saat ini. Kembali saat BJ Habibie menggelar jumpa pers. Beliau juga menyampaikan, khusus kepada warga Kota Parepare agar senantiasa bersyukur bisa tinggal di kota kelahirannya.

"Di Kota Parepare jarang terjadi kemacetan. Udaranya jauh lebih sehat. Sehingga jika mau berangkat dari satu tempat ke tempat lainnya di Parepare bisa ditempuh dengan hitungan menit. Coba jika berada di Kota Jakarta. Dari rumah saya ke suatu tempat di Jakarta bisa ditempuh berjam-jam, karena macet akibat padatnya kendaraan," ujar Habibie saat itu.

Habibie juga memuji tempat kelahirannya di Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Sebab menurut Habibie, alam dan pergaulannya semasa kecil serta didikan dari kedua orang tuanya bisa membentuk karakternya. "Saat sekolah di Jerman, saya sering ditanya sama Professor dan juga sesama mahasiswa. Habibie makan dan minum apa saat kecil. Saya hanya bilang makan nasi, sayur, ikan dan air putih. Mereka beranggapan saya rajin minum susu dan vitamin," ujar Habibie sambil tertawa.

Habibie juga mengungkap orang tuanya sangat peduli terhadap pembentukan karakter agama Islam dan dunia pendidikan. Tujuannya untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Orang tuanya juga menyiapkan dana secara khusus untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam buku *The Spirit of Parepare*, *Sumange'na* Parepare karya

Ibrahim Leman juga menceritakan sepenggal kisah perjalanan Habibie dari Kota Parepare menuju ke tempat sekolahnya di Achen, Jerman. Buku yang diterbitkan Dirah Parepare tahun 2017 itu mengisahkan, Ayah dan Ibu Habibie pindah ke Makassar karena tugas kedinasan. Saat itu, Habibie kecil berduka. Ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibie wafat. Diduga terkena serangan jantung. Itu terjadi saat Ayahnya bersujud ketika menunaikan rangkaian salat Isya.

Sepeninggal ayahnya, ibunda Habibie R.A Tuti Marini Puspowadojo mengirim Habibie ke Pulau Jawa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tepatnya di Jakarta. Hanya berlangsung singkat, Habibie minta pindah ke Bandung, Jawa Barat. Ibunya pun menyarankan agar Habibie menumpang sejenak di rumah kawan ayahnya di Bandung. Namanya Pak Soejoed. Ia bekerja sebagai Inspektur Pertanian di Jawa Barat.

Ada hal menarik yang bisa dicontoh dari kegigihan Ibu Tuti Marini untuk membiayai sekolah Habibie dan saudaranya. Dengan usaha rumah kos-kosan di Bandung usai pindah dari Makassar, Tuti Marini membiayai sekolah Habibie dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi di Achen, Jerman. Kesederhanaan Habibie membuatnya bisa bertahan dengan uang kiriman dari ibundanya. Bahkan, kerap Habibie harus berjalan kaki dari tempat kosnya ke kampus sejauh 15 kilometer. Itu dilakukan untuk mengirit biaya hidup sekaligus menjaga kebugaran tubuhnya di Jerman. Dalam buku tersebut juga ditulis, sepatu yang digunakan Habibie untuk ke kampus sudah bolong atau rusak, namun setelah ditambal dan diperbaiki, Habibie masih setia memakainya. Tanpa rasa gengsi. Mungkin beda, dengan sebagian pelajar saat ini. Mereka sudah merasa malu jika sepatunya hanya satu pasang ataukah tidak bermerk. Padahal, sesungguhnya hanya manfaat sepatu itu yang dibutuhkan, agar kaki kita terlindungi. Bukan untuk dipakai bergaya. Ada pesan bijak yang sering kita baca, biaya hidup itu sesungguhnya murah. Yang mahal yakni gaya

hidup.

Kerja keras dan kerja cerdas Habibie tak menghianati hasil. Habibie sering menjadi juara kelas di kampusnya. Saat libur, Habibie tetap belajar sambil bekerja serabutan untuk biaya hidup di negeri rantauan. Meski sudah bergelar doktor di kampusnya, namun sejumlah perguruan tinggi di luar negeri juga memberikan gelar doktor honoris causa. Itu atas karya dan kegeniusannya. Bahkan, sebuah perusahaan penerbangan mengangkat Habibie menjadi wakil pimpinan perusahaan. Habibie merupakan satu-satunya orang di luar Jerman yang memangku jabatan tersebut.

Pentingnya Sumber Daya Manusia

Bagaimana dengan pesan Habibie terkait pentingnya menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Habibie berpesan; Masa depan Indonesia ditentukan keunggulan Sumber Daya Manusia yang memiliki nilai budaya, memahami dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya dibarengi dengan Iman dan Taqwa (Imtaq).

Kata-kata Mutiara Habibie juga mestinya membangkitkan warga Indonesia untuk lebih kreatif. Seperti dalam kumpulan 35 kata mutiara Habibie. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Kalimat bijak Habibie juga dinukil pengelola Kafe dan Resto Lago'ta di Jalan Ahmad Yani, Kota Parepare. Di ruang pertemuannya, pengelola menampilkan lukisan sejumlah tokoh dunia. Salah satunya Presiden Ketiga RI, BJ Habibie lengkap dengan penggalan kalimat. Apabila kamu sudah memutuskan menekuni satu bidang, maka jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya.

Hemat penulis, kata-kata mutiara Habibie tersebut semoga telah diaplikasikan di negeri ini. Bukan malah sebaliknya, investor bersama

pekerja asing banyak masuk ke Indonesia, sedangkan sebagian warga Indonesia sendiri kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Utamanya di masa Pandemi Covid-19.

Dalam banyak literatur dan media yang penulis baca, perusahaan tambang emas, minyak dan nikel di Indonesia juga banyak dikerjakan oleh negara asing. Jika toh ada keterlibatan Republik Indonesia, sahamnya mungkin tidak banyak. Belum lagi tenaga kerjanya juga didatangkan dari luar negeri. Padahal, rakyat Indonesia juga sangat membutuhkan lapangan pekerjaan untuk sekadar menyambung hidup.

Peran ICMI Mendorong Kemandirian Indonesia

Ketua ICMI Pusat, Jimly Asshidiqi, dalam pertemuan virtual dengan anggota ICMI se- Indonesia juga pernah mengingatkan Pemerintah Indonesia, sah-sah saja bekerjasama dengan investor asing. Hanya saja, pekerjanya jangan seluruhnya didatangkan juga dari luar negeri. Sebab tenaga kerja lokal di Indonesia juga banyak yang bisa direkrut dan membutuhkan lapangan pekerjaan.

Dalam buku Bachruddin Jusuf Habibie dengan Judul "*Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*" juga ditulis mengenai pentingnya membangun Sumber Daya Manusia. Buku setebal 549 halaman yang diterbitkan *The Habibie Centre* (THC) Mandiri tersebut tertulis di halaman 45-46. Isinya mengenai pengunduran diri Presiden Kedua RI, HM Soeharto dan pelantikan BJ Habibie menjadi Presiden Ketiga RI. Buku itu juga menulis soal sejarah Bangsa Indonesia tertinggal dalam hal SDM.

Begini penggalan narasinya; Keadaan yang tidak menentu, ketidakstabilan politik dan turunnya kredibilitas pemerintah adalah penyebab utama "krisis moneter", "krisis-ekonomi", dan "krisis politik". Mengapa semua ini terjadi? Apa benar tiga faktor tadi yang menjadi penyebab utamanya? Selama 53 tahun, sejarah Indonesia telah disatukan

oleh Proklamasi Kemerdekaan yang dikeluarkan pada 17 Agustus 1945. Secara khusus, "dijajah selama 350 tahun oleh penjajah yang sama.

Nasib 350 tahun penjajahan Belanda yang mengikat kita bersama, bukan budaya, agama, ras, atau suku. Akibat penjajahan Belanda, rasa senasib sepenanggungan menjadi faktor pemersatu dan perekat bangsa. Akibatnya, yang dinyatakan sebagai wilayah Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda, bekas jajahan Belanda. Kolonialisme berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan tingkat keterampilan masyarakat saat itu karena hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi. Seperti halnya sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan, pengembangan sumber daya manusia hanya dimaksudkan untuk mengelola dan memanfaatkannya.

Kekuatan kolonial mengutamakan ketertiban dan keamanan guna menekan biaya pengambilan kekayaan rakyat Indonesia, untuk kepentingan Belanda, untuk kepentingan kekuasaan kolonial. Atas nama keuntungan, institusi budaya dan tradisional didegradasi secara sistematis. Aturan perdagangan yang diberlakukan oleh penjajah mengharuskan pembentukan institusi ekonomi. Kondisi pra-kemerdekaan bangsa Indonesia tidak memiliki aparatur atau lembaga administrasi atau birokrat yang handal, maka dari itu kemerdekaan diproklamasikan.

Demi eksploitasi ekonomi, Negara Kesatuan dan kepemimpinan tradisional Indonesia secara sistematis dirusak untuk mencegah proklamasi kemerdekaan negara yang baru-baru ini pecah. Pimpinan NKRI terpaksa menjalankan pemerintahan otoriter untuk mencegah bangsa Indonesia yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya dari perpecahan.

Namun demikian, meskipun pembukaan proklamasi kemerdekaan UUD 1945 yang menyatakan nilai-nilai kemerdekaan, kemerdekaan, dan kemerdekaan, belum dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saat itu, lebih dari 95% penduduk Indonesia buta huruf; hari ini, jumlah itu kurang dari

15%. Selain pendidikan, masalah yang paling mendesak adalah akses ke makanan sehat, air bersih, perawatan medis, dan pekerjaan yang menguntungkan.

Pertama kali sejak 1968 selama lebih dari tiga dekade, Indonesia mampu menciptakan dan melaksanakan program pembangunan berkelanjutan berkat organisasi multilateral dan negara maju. Momen Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi oleh B.J. Habibie) *The Habibie Center*-THC) adalah penerbitnya.

Seringnya Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, SH, MH berinteraksi dengan BJ Habibie semasa hidup membuatnya banyak mendapat inspirasi. Tak heran, Taufan Pawe banyak membuat karya monumental terkait dengan ketokohan Presiden Ketiga RI tersebut. Di antaranya, monumen Cinta Habibie-Ainun, Balai Ainun-Habibie, Auditorium BJ Habibie di kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Museum BJ Habibie dekat Pelabuhan Nusantara Parepare, Rumah Sakit Regional dr Hasri Ainun Habibie di Tonrangeng dan Institute Teknologi BJ Habibie (ITH).

ITH ini sudah punya gedung sementara dan rektor. Diperkirakan Tahun 2022 akan menerima mahasiswa baru. Tentunya akan ada juga jurusan teknologi dan informasi di perguruan tinggi negeri tersebut. Di akhir tahun 2021, Pemerintah Kota melalui Wali Kota Parepare Taufan Pawe kini tengah membangun Masjid Terapung BJ Habibie di Pinggir Pantai Mallusetasi, Kota Parepare. Anggarannya puluhan miliar rupiah. Bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).

Kota Parepare yang minim SDA juga dikelola dengan mengandalkan sumber pendapatan lain dari sektor jasa dan perdagangan. Karena itu, Walikota Parepare membenahi Pasar Senggol, membangun Pasar Rakyat Lakessi dan Sumpang Minangae. Serta merampungkan pembangunan rumah sakit Hasri Ainun Habibie di Tonrangeng, sebagai lokasi *medical tourism*.

Warga yang sedang dirawat bisa memandang keindahan pantai dan pegunungan di Kota Parepare. Itu dilakukan Walikota Parepare, Taufan Pawe sesuai dengan gagasanya dengan teori telapak kaki. Disusul teori industri tanpa cerobong asap di periode keduanya. Sekadar diketahui, Dana Pembangunan RS Regional Hasri Ainun Habibie tersebut menggunakan APBD Kota Parepare dengan APBD Pemerintah Provinsi Sulsel.

Beragam ikon Habibie tersebut tentunya mendatangkan multi player efek sehingga denyut perekonomian bisa bergerak. Utamanya di masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ribuan warga dari luar daerah, provinsi bahkan dari luar negeri sudah kerap berkunjung ke Kota Parepare. Utamanya jika ada Kapal Pesiar sandar di Pelabuhan Nusantara Parepare. Sebelum ke Tana Toraja, wisatawan tersebut mampir dan berkeliling di Kota Parepare.

Tak lengkap pula rasanya jika tak berfoto di depan monumen Cinta Sejati Ainun Habibie. Lokasinya terletak di sudut Lapangan Andi Makkasau, Kota Parepare. Di tempat tersebut terdapat patung perunggu, almarhum BJ Habibie bersama istrinya Alm Hasri Ainun Habibie. Kedua patung dan area monumen cinta Habibie-Ainun kini direvitalisasi atau dibenahi. Itu terlihat sejak Sabtu 20 November 2021.

Penulis pernah berbincang dengan seorang turis asal Jerman yang baru turun dari Kapal Pesiar. Saat itu, penulis tanya apakah mengetahui nama BJ Habibie di Jerman. Pria bule tersebut sangat mengenal sosok BJ Habibie sebagai orang genius pembuat pesawat terbang. Ia juga bangga karena bisa menginjakkan kakinya di tanah kelahiran Presiden RI Ketiga tersebut. Terlebih lagi, Habibie telah menjadi warga kehormatan di Jerman. Tak bisa dipungkiri sosok Almarhum Prof Dr BJ Habibie telah banyak memberi manfaat dan menorehkan berbagai prestasi saat menjadi Presiden RI ke-3.

Seingat penulis, saat memimpin Indonesia, BJ Habibie yang

merupakan teknokrat yang mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi dan politik. Juga bisa menstabilkan nilai mata uang dollar terhadap rupiah. Penulis memandang, pemerintahan saat ini semoga telah memiliki instrumen menstabilkan mata uang rupiah terhadap dollar Amerika. Juga diharapkan pemerintah Indonesia bisa melunasi sebagian utang luar negeri yang kabarnya sudah capai ribuan triliun. Bunganya saja per tahun dibayar ratusan miliar. Soal utang ini, saya tonton di Youtube Akbar Faisal Uncensored, mantan Anggota DPR-RI saat mewawancarai, Ekonom, Ichsanuddin Noorsy. Wawancara tersebut ditayangkan di *Youtube* pada 6 September 2021 dan sudah ditonton sebanyak 1,3 juta kali.

Berita soal utang ini juga pernah ramai di pemberitaan media. Salah satunya yang dipublikasikan media kontan.co.id. Judulnya; Utang pemerintah Indonesia di era Jokowi naik lagi, per September 2021 Rp 6.711 Triliun. Kembali ke prestasi BJ Habibie saat menjabat sebagai Presiden yakni menstabilkan harga tukar dollar dengan rupiah dan membuka kran kebebasan pers. Sebab pers dianggap sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di halaman 49 buku Detik-detik yang menentukan kisah Habibie diceritakan. Inilah isi tulisan BJ Habibie; Saya memutuskan untuk membenarkan semua orang yang menyuarakan pendapat mereka, tidak peduli seberapa takutnya mereka. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat di mana mereka dapat dengan bebas bergerak dan mengungkapkan pendapat mereka tanpa dilecehkan akan dapat berkontribusi lebih pada produktivitas dan kualitas masyarakat. Kita harus bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan masyarakat lain yang telah mampu menikmati produktivitas dan kualitas hidup yang tinggi setelah melalui proses panjang reformasi dan demokratisasi.

Untuk mengungkapkan pikiran saya, saya memutuskan bahwa saya harus diberi kebebasan untuk melakukannya dengan segala

konsekuensinya. Kualitas berita akan dinilai di masa depan oleh publik. Jelas bahwa mereka yang menghasilkan berita berkualitas rendah tidak menjual, dan akibatnya bisnis mereka akan menderita. Konstitusi dan hukum yang berlaku harus ditaati dalam semua pelaporan.

Sejak tahun 1945, ketika Presiden Pertama Republik Indonesia dan Presiden Kedua Republik Indonesia menjabat, Presiden telah "mengendalikan" beberapa kekuatan atau lembaga yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa objektivitas dan kualitas pembuatan kebijakan telah menderita akibat dari kebiasaan buruk yang telah merasuki budaya kepemimpinan saat ini.

Lembaga dan kekuasaan Indonesia yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung, lembaga legislatif (DPR dan MPR) serta ABRI (kini berganti nama menjadi TNI, red). Selain itu, prestasi BJ Habibie di bidang informasi juga patut dicatat di bidang kedirgantaraan. Dalam buku Masyarakat Cita: *Conception & Practice*, ditulis oleh Natsar Desi, dkk (2021).

The Crack Progression Theory adalah salah satu penemuan BJ Habibie yang terkenal, menurut Natsar, yang mengutip sebuah artikel di *kompas.com.* Faktor Habibie atau Teori Habibie mengacu pada penemuan ini. Retak sayap dan badan pesawat dapat dijelaskan dengan menggunakan teori *Crack Progression*. *Smart Learning Skill* 4.0 (2021) oleh Miswan Thahadi menguraikan *Habibie Factor*, sebuah formula untuk menentukan timbulnya retakan dan perkembangannya.

Teorema Habibie dan Metode Habibie adalah dua penemuan lain yang diterima secara luas di seluruh dunia. Kedua teori memiliki dampak signifikan pada penerbangan. Dengan menggunakan teori ini, pesawat dapat dibangun untuk tahan terhadap segala cuaca dan kondisi operasi. Keselamatan penumpang dan awak jelas menjadi pertimbangan. Hanya teori ini yang dapat membantu Anda menghemat uang untuk perjalanan pesawat. Faktor Habibie, Teorema Habibie, dan Metode Habibie adalah

tiga dari penemuan BJ Habibie yang diakui dunia internasional.

Lantas, seperti apa karakter dan sikap Habibie sehingga bisa mencapai hal-hal hebat tersebut? Tingkah Habibie itu diulas dalam artikel Kompas.com berjudul Penemuan BJ Habibie yang Diakui Internasional yang tayang 27 September 2021. Artikel tersebut menjelaskan dedikasi Habibie seumur hidup terhadap kerja keras, gaya hidup disiplin, tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dan rasa disiplin diri yang kuat. Pandangan seorang anak di dunia, Habibie sejak tahun-tahun awal, telah membawa kesuksesan dan penemuan yang luar biasa.

Demi menunjukkan kecintaannya pada Indonesia, Habibie membuat negara bangga di seluruh dunia. Penemuan besar dan hasil telah dibuat sebagai hasil dari ini. Alhasil, Habibie pun menjabat sebagai Wakil Presiden ke-3 Republik Indonesia dan Presiden Republik Rakyat Indonesia.

Disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab dikaitkan dengan kesuksesan di dunia nyata oleh sikap Habibie.Maha benar Allah SWT yang tertulis dalam Al Qur'an surah al-Mujadalah [58] ayat 11. Isinya tentang kedudukan orang yang berilmu. Habibie yang bekerja keras menuntut ilmu telah ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT hingga bisa menjadi Presiden Ketiga RI.

Tulisan Arivaie Rahman yang diterbitkan di *kumparan.com* menafsirkan surah al-Mujadalah [58] ayat 11 tentang kedudukan orang yang berilmu di sisi Allah sebagaimana yang disitir melalui ayat al-Qur'an. "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Mujadalah [l58]: 11).

Fokus penafsiran ayat di atas adalah tentang derajat orang-orang yang beriman dan berilmu yang diangkat dan ditinggikan oleh Allah SWT, "*yarfa'illahu alladzin amanū minkum walladzina tū al-ilma darajat*". Arivaie mengutip beberapa tafsir untuk menjelaskan makna ayat tersebut, antara lain: Tafsir *Mafatih al-Ghaib,* Tafsir *al-Qurthubi*, Tafsir *al-Maraghi*, Tafsir *al-Munir*, dan Tafsir *Fath al-Qadir.*

Tak heran jika Wali Kota Parepare Taufan Pawe kembali memuji prestasi mendiang BJ Habibie. Hal itu kembali diungkapkan saat memberikan sambutan pada acara pelantikan dan pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare periode 2020-2025.

Taufan Pawe mengungkapkan, tagline Kota Peduli, Kota Santri dan Ulama karena begitu cinta dengan kampung halamannya. "Saya Walikota Parepare yang ke-17, kali ini saya adalah putra asli kelahiran Parepare. Maka sebagai wujud cinta tanah air, saya akan mengabdikan diri dan berkomitmen untuk menjadikan Parepare Kota Peduli, Kota Santri dan Ulama dan kini menjadi Kota Cinta," ujar Walikota berlatar belakang advokat itu.

Di bidang agama dan ummat, berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare di bawah komando Taufan Pawe. "Salah satunya dengan mengirimkan imam masjid ke tanah suci untuk menunaikan umrah. Tercatat 140 imam masjid telah memberangkatkan, namun dalam dua tahun terakhir program tersebut terhenti karena pandemi Covid-19," ujar Taufan seperti dikutip dari *pijarnews.com*.

Selain Imam masjid, lanjut Ketua DPD I Golkar Sulsel, Pemkot yang dipimpinnya juga telah memberangkatkan guru umrah untuk mengaji sambil meningkatkan intensitas. "Dulu hanya ratusan ribu, sekarang menjadi Rp 1 juta dan rencananya akan ditambah lagi," kata suami Erna Rasyid itu.

Lebih lanjut, kata Taufan, Parepare sebagai Kota Cinta terinspirasi dari sosok kelahiran Parepare, Presiden Ketiga Republik Indonesia, Prof.

Dr. Ing BJ Habibie. "Sebagai wujud kecintaan, kami membangun Tugu Cinta Ainun Habibie, Auditorium BJ Habibie, Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Museum BJ Habibie, Institut Teknologi BJ Habibie dan Masjid Terapung BJ Habibie. Masjid ini dibangun sebagai wujud mewujudkan Kota Parepare. sebagai Kota Santri dan Ulama," kata Taufan.

Saat pelantikan kepengurusan ICMI Parepare pada Sabtu, 3 Juli 2021, Wali Kota Taufan Pawe berharap pengurus ICMI Kota Parepare dan Pemkot bersinergi dalam pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat. Dihadapan pimpinan ICMI Parepare yang diketuai Dr. H Mahsyar Idris M.Ag, Wali Kota dua periode itu berpesan agar ICMI berambisi. Taufan menegaskan bahwa ICMI merupakan wadah berkumpulnya para ulama dari berbagai latar belakang, sehingga harus memiliki ambisi yang jelas.

"Ambisi adalah ikhtiar, jadi tidak salah jika ICMI punya ambisi. Apalagi didukung oleh pengurus dan anggota yang memiliki sumber daya manusia yang terbarukan," tambah walikota yang bergelar doktor hukum tersebut seperti dikutip dari *Suaraya.news.*

Taufan juga mengingatkan bahwa Parepare dikenal sebagai Kota Santri dan Ulama, oleh karena itu diharapkan kepengurusan ICMI yang baru dapat memberikan rekomendasi kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Selain menghadiri peresmian, pada saat yang sama Taufan Pawe juga menjadi salah satu narasumber dalam Web Seminar Nasional yang diadakan oleh ICMI Parepare. Taufan bersama Ketua ICMI Pusat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Majelis Ahli ICMI Pusat Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, menjadi pembicara dalam Webinar bertema Tantangan Pembangunan Islam, Keindonesiaan, Kearifan Lokal dan Akal di Era Disrupsi dan Digitalisasi.

Kesimpulan

Semoga kita sebagai pengurus ICMI bisa terus berkontribusi dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga profesi apapun yang kita emban saat ini bisa bermanfaat membangun peradaban bangsa dan negara. Karena itu, mari kita merawat dengan baik Sumber Daya Alam (SDA) kita, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) kita, agar ke depan Indonesia semakian bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

BJ Habibie, Detik-detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, The Habibie Centre (THC Mandiri), Jakarta, September 2006.

The Spirit of Parepare, Sumange'na Parepare, Ibrahim Leman, Diterbitkan oleh Dirah Parepare, 2017

Media Siber;

Merdeka.com

https://m.merdeka.com/jateng/35-kata-kata-mutiara-bj-habibie-yang-penuh-makna-dan-inspiratif-kln.html

Kompas.com

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/09/27/150000669/penemuan-bj-habibie-yang-diakui-dunia-internasional

Kontan.co.id

https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/utang-pemerintah-indonesia-di-era-jokowi-naik-lagi-per-september-2021-rp-6711-t

Pijarnews.com
https://www.pijarnews.com/8-tahun-gajinya-tak-diambil-wali-kota-parepare-bakal-bantu-mui-bangun-kantor/

Suaraya.news
https://suaraya.news/2021/07/03/taufan-pawe-ucapkan-selamat-bekerja-icmi-parepare-pemkot-selalu-siap-bersinergi/

BAGIAN 2:
KESEHATAN
DAN GIZI

Kualitas kesehatan masyarakat memiliki kontribusi besar dalam mendorong daya saing bangsa. Untuk itu, upaya-upaya promosi kesehatan harus selalu menjadi prioritas, khususnya dalam menggerakkan program literasi gizi.

Bab 4

GERAKAN LITERASI GIZI, WUJUDKAN GENERASI INDONESIA SEHAT

Haniarti[1], Nurpika Hardiyanti S[2], Syafira Maharani S.[3]

Pendahuluan

Berubahnya gaya hidup manusia karena adanya urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi telah menyebabkan terjadinya peningkatan Penyakit Tidak Menular (PTM). Penyakit tidak menular telah menjadi penyebab utama kematian secara global pada saat ini (1). Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) diperkirakan akan terus meningkat di seluruh dunia, peningkatan terbesar akan terjadi di negara-negara menengah dan miskin. Lebih dari dua pertiga (70%) dari populasi global akan meninggal akibat penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, stroke dan diabetes. Dalam jumlah total, pada tahun 2030 diprediksi akan ada 52 juta jiwa kematian per tahun karena penyakit tidak menular, naik 9 juta jiwa dari 38 juta jiwa pada saat ini (Haniek Try Umayana, 2015).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menyatakan prevalensi obesitas atau kegemukan pada orang dewasa di atas 18 tahun terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 2007. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan menunjukkan

[1]Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare; e-mail: haniarti.umpar@gmail.com
[2]Pegiat Promosi Kesehatan dan Gizi Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
[3] Mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Makassar

prevalensi obesitas meningkat sejak tiga periode Riskesdas yaitu 10,5% (2007), 14,8 %, (2013) dan 21,8% (2018). Selain obesitas hipertensi dan diabetes militus juga mengalami peningkatan. Prevalensi kejadian hipertensi sebesar 34,1%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang menyentuh angka prevalensi 25,8%. prevalensi hipertensi pada usia 25-34 tahun sebesar 2,07% sedangkan untuk usia 35-44 tahun sebesar 5,73%. Setelah hipertensi DM juga menunjukkan bahwa prevalensi DM yang terdiagnosis oleh dokter pada penduduk umur ≥ 15 tahun adalah 2%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan prevalensi DM di dalam situasi yang mengutamakan pertimbangan kesehatan dan keselamatan semua, dunia pendidikan menghadapi tantangan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar bagi siswa, orangtua serta guru termasuk pendidikan gizi. Literasi gizi pun semakin penting untuk dipelajari, dipahami dan diterapkan oleh siswa di sekolah sebagai bagian dari pola konsumsi pangan sehat dan gaya hidup aktif yang diperlukan bangsa Indonesia untuk melalui masa pandemi covid-19.

Pemerintah melalui Permenkes no. 41 Tahun 2014 telah mengeluarkan Pedoman Gizi Seimbang serta Permenkes no. 75 tahun 2013 tentang anjuran Angka Kecukupan Gizi Harian, guna mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Untuk meraih pemenuhan gizi seimbang, dibutuhkan literasi gizi yang baik, agar seseorang paham dengan kandungan nilai gizi dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Faktanya, tingkat literasi Indonesia secara umum masih memprihatinkan. Data dari *World's Most Literate Nations* menempatkan tingkat literasi Indonesia berada di urutan kedua terbawah (peringkat 60) dari 61 negara di dunia. Artinya, kesadaran masyarakat untuk membaca, mencari tahu dan memahami informasi, termasuk terkait masalah gizi, masih sangat rendah. Rendahnya literasi gizi adalah gerbang dari timbulnya berbagai masalah gizi, yang tentunya

dapat berimplikasi pada terganggunya pertumbuhan dan kesehatan fisik seseorang. Literasi yang minim menyebabkan pemenuhan gizi masyarakat kurang. Berbagai masalah gizi pun muncul mulai dari gizi buruk, sampai obesitas. Untuk itu, literasi gizi perlu ditanamkan di satuan pendidikan anak usia dini disertai sosialisasi yang masif kepada orangtua.

Dampak dari rendahnya literasi gizi di antaranya obesitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi obesitas adalah rendahnya aktivitas fisik. Faktor lain, yaitu faktor keturunan, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, faktor pola makan, faktor psikis, faktor kesehatan, faktor perkembangan, faktor aktifitas fisik, faktor ras, faktor hormon. faktor yang berhubungan dengan obesitas adalah pengetahuan dan Pendidikan. Asupan energi yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang seimbang dengan kurang melakukan aktivitas fisik karena faktor pengetahuan yang kurang akan menyebabkan terjadinya penambahan berat badan. Perubahan gaya hidup mengakibatkan terjadinya perubahan pola makan masyarakat yang merujuk pada pola makan tinggi kalori gula, lemak dan kolesterol, dan faktor pekerjaan yang mempengaruhi sehingga tidak diimbangi dengan aktivitas fisik (Widiantini W, Tafal Z. 2014).

Proses pertumbuhan dan perkembangan otak dan pertumbuhan fisik yang cepat dimulai sejak anak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Konsumsi gula, garam, dan lemak harus dibatasi untuk mencegah obesitas. Sebab, obesitas bisa memicu berbagai komplikasi serta penyakit tak menular pada masa depan.

Gerakan Literasi Gizi

Manusia memerlukan zat gizi yang dibutuhkan untuk energi harian, serta membangun dan memelihara jaringan serta organ dalam tubuh. Di pasar, banyak tersedia jenis pangan, baik olahan maupun

pangan lokal yang masing – masing memiliki manfaat tersendiri untuk pemenuhan kebutuhan gizi. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi makanan tidak berdasarkan pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Padahal, kondisi kekurangan, atau kelebihan konsumsi gizi dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang seseorang. "*Remember, you are what you eat*!"

Literasi gizi merupakan tingkat kemampuan seseorang untuk mencari, memahami dan menggunakan informasi gizi dasar untuk tujuan kesehatan. Literasi gizi bukan hanya tentang memahami informasi gizi, tapi juga tentang diet, kandungan dalam produk makanan hingga tentang penyakit. Literasi gizi yang baik dapat membentuk kebiasaan makan yang sehat yang pada akhirnya mengurangi risiko kejadian penyakit, termasuk penyakit tidak menular yang saat ini mulai banyak ditemukan pada kelompok usia muda. Studi pada masyarakat kelompok usia muda telah menunjukkan hubungan antara literasi gizi yang tidak adekuat dengan perilaku makan yang tidak sehat. Lebih dari 4 dekade, prevalensi obesitas pada usia dewasa muda telah meningkat dari 8% menjadi 32,6% (1971-2010) label nutrisi telah disediakan pada produk makanan dan minuman untuk membantu masyarakat memilih makanan yang sehat yang ditegaskan dalam peraturan pemerintah (Nur Aisyiyah Widjaya. 2021).

Literasi gizi atau keaksaraan adalah salah satu derajat kemampuan seseorang untuk mendapat, memproses. serta memahami informasi tentang nutrisi. Tujuan pertama "melek" gizi adalah memahami makanan sehingga orang meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan tentangyang mana makanan, untuk menjaga kesehatan. Ini juga mencakup kesadaran yang mana makanan yang harus dihindari dan mengapa. Dari konsep di atas dapat dikatakan bahwa literasi gizi memiliki peran yang cukup besar dalam bidang kesehatan. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup

keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk media cetak, visual,digital, dan auditori. Gerakan literasi sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa dan masyarakat (Nazmi. 2015).

Literasi gizi bisa menjadi proses berbasis keterampilan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengubah pesan tentang makanan menjadi pengetahuan. Umumnya, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang gizi dan akan membuat pilihan makanan yang sehat. Dengan demikian, literasi gizi merupakan bagian integral dalam meningkatkan pengetahuan gizi dan penyampaian kebiasaan makan yang sehat (Aihara Yoko Jm. 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Jumrana berkaitan dengan literasi gizi pada Aparatur Sipil Negara menyimpulkan bahwa ada pengaruh literasi gizi terhadap perubahan pengetahuan Aparatur Sipil Negara di Dinas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.

Karena itu, sangat penting untuk memahami kandungan nilai gizi dasar, serta takaran dan proposi yang tepat dari makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Seseorang dengan literasi gizi yang baik akan dengan cermat menghitung kebutuhan gizinya, serta bijak dalam membaca label informasi pada makanan olahan yang dikonsumsi. Tidak ada jenis pangan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Karenanya, dibutuhkan variasi pangan – baik pangan alami maupun olahan – guna memenuhi berbagai kebutuhan gizi dalam tubuh. Contohnya, nasi dan sumber karbohidrat lainnya merupakan sumber utama energi, namun minim kandungan vitamin dan mineral. Sayuran dan buah-buahan umumnya kaya akan vitamin, mineral dan serat, tetapi sedikit megandung energi dan protein. Ikan merupakan sumber protein yang baik, namun tidak dapat dijadikan sumber makanan utama. Sedangkan susu sebagai salah satu asupan bergizi baik,

mampu melengkapi kebutuhan gizi harian seseorang guna mendukung pemenuhan gizi seimbang.

Selain memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi pangan, pemenuhan gizi seimbang juga menekankan pada pentingnya aktivitas fisik, kebersihan, dan pemantauan Berat Badan (BB). Setiap orang membutuhkan jumlah dan takaran asupan gizi yang berbeda. Tiga faktor utama yang perlu diperhatikan untuk pemenuhan gizi seimbang adalah: Kenali kondisi tubuh, Pahami kandungan gizi dari asupan makanan dan rutin berolahraga.

Layaknya sebuah bisnis, untuk menjalani hidup yang sehat, juga diperlukan perencanaan dan penetapan strategi yang tepat. Selain itu, dibutuhkan disiplin dan juga komitmen untuk mulai menjalani hidup yang lebih sehat, dimulai dengan pemahaman gizi yang baik. Dengan berbagai kemajuan teknologi dan pengetahuan, masyarakat era milenial khususnya generasi muda tentu akan lebih mudah dalam menerapkan gaya hidup sehat melalui pola gizi seimbang. Contohnya saja saat ini banyak aplikasi yang memberikan kemudahan untuk menghitung jumlah kalori pada makanan, serta mengukur kalori yang terbakar dalam tubuh berdasarkan aktivitas fisik yang dilakukan."

Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka menyadarkan mayarakat di bidang gizi salah satunya meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui penyediaan media materi komunikasi informasi dan edukasi serta kampenya gizi. Beberapa kegiatan yang terkait untuk menyadarkan masyarakat di bidang gizi salah satunya promosi gizi.

Menurut Bloom dalam Notoatmodjo (2012) perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu kelompok atau masyarakat.Oleh sebab itu intervensi atau upaya yang ditujukan kepada faktor perilaku sangat strategis.Perubahan perilaku masyarakat dapat dilakukan melalui promosi kesehatan yang salah satunya dengan pendidikan atau

penyuluhan gizi (Notoatmodjo. 2012).

Pola Konsumsi

Menurut Kementerian Pertanian, Indonesia merupakan negara terkaya kedua di dunia dalam keanekaragaman hayati. Diantaranya Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 26 jenis kacang-kacangan, 228 jenis sayuran, serta 389 jenis buah-buahan. Namun potensi ini belum diimbangi dengan pola konsumsi masyarakat yang bervariasi, untuk pemenuhan gizi seimbang.

Problem gizi erat kaitannya dengan konsumsi pangan dan pendapatan. Beberapa jenis pangan dikenal sebagai pangan elastis yang konsumsinya meningkat seiring membaiknya pendapatan. Pangan-pangan tersebut antara lain gula dan pangan hewani. Kecenderungan asupan energi di Indonesia meningkat terutama pada kuintil 1 dan 2 menurut pendapatan. Capaian kuintil 1 dalam hal asupan energi adalah 82,2% dan kuintil 2 94,5%. Untuk kuintil 3-5 asupan energi rata-rata sudah mencapai 100% atau lebih. Ini bisa dimaknai bahwa masyarakat bawah masih berjuang keras untuk mencukupi asupan energinya yang bersumber pada pangan pokok, sementara masyarakat golongan atas sudah tidak mempunyai problem asupan energi dan bahkan sudah berlebihan. Asupan energi masyarakat golongan atas terdiri atas pangan pokok, ditambah gula dan lemak yang kontribusinya semakin tinggi sebagaimana tren di negara maju (Ali Khomsan, 2021).

Pola konsumsi merupakan gambaran jenis, porsi, dan ukuran dari makanan yang dikonsumsi oleh tiap individu. Dari pola konsumsi pangan, juga terbentuk gambaran mengenai seberapa besar kecukupan gizi yang telah terpenuhi. Zat gizi yang diasup berguna bagi kesehatan untuk menghasilkan energi, membangun serta memelihara jaringan tubuh. Pemenuhan zat gizi pada tiap individu berbeda-beda tergantung

dari jenis kelamin, usia, dan aktivitas fisiknya. Apabila zat gizi yang diasup telah sesuai dengan yang dibutuhkan, maka individu tersebut dapat dikatakan memiliki status gizi yang baik, namun pemenuhan zat gizi tidaklah mudah, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan status gizi dapat terjadi pada setiap individu di setiap tahapan siklus kehidupan. Oleh karena hal tersebut, diperlukan kesadaran pemenuhan gizi mulai dari sedini mungkin. Kesadaran pemenuhan gizi dapat diimplementasikan dengan cara menerapkan pola makan seimbang secara kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan kebutuhan gizi tiap individu mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Terlebih pemenuhan vitamin dan mineral memang harus dimulai sejak dini bahkan ketika masih dalam kandungan. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting dalam mendukung pemenuhan nutrisi terutama vitamin dan mineral dalam tubuh (Nafsiah Mboi. 2014).

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh berbagai sumber, salah satunya adalah metode dan media. Adapun pendukung keberhasilan dalam pemsberian pengetahuan melalui literasi gizi ialah penggunaan alat media yang digunakan ketika menyampaikan informasi seperti bentuk buku, baik berupa tulisan maupun gambar. Dimana mediamerupakan bentuk dalam menyalurkan pesan atau informasi (Pratiwi Yf, Puspitasari Di, 2017).

Pengetahuan dalam pengaturan konsumsi makan dengan pola makan sangat diperlukan untuk memiliki status gizi baik. Perilaku yang positif dapat dibentuk dari pengetahuan yang baik, sehingga cara yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan adalah dengan menggunakan media sebagai pendidikan kesehatan (Ma'munah M., 2015). Pengetahuan gizi meliputi mampu membuat makanan yang memiliki komposisi beraneka ragam atau bervariasi untuk dikonsumsi sehingga kebutuhan zat gizi dapat tercukupi (Veriyal, Nura. 2017).

Salah satu penelitian tentang pola konsumsi dilakukan oleh

Jumrana yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh literasi gizi terhadap penurunan pola konsumsi berupa jumlah asupan energi, lemak dan karbohidarat pada Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.

Asupan energi seseorang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya umur, berat badan, pola makan, tinggi badan, status sosial (Kartasapoetra, G Dan Marsetyo. 2017). Menurut Kusumaastuti (2017) menyatakan bahwa bila dewasa mengkonsumsi makanan dengan kandungan energi yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya maka tidak ada energi yang disimpan. Namun sebaliknya remaja dalam mengkonsumsi energi melebihi kebutuhan tubuh maka kelebihan energi akan disimpan menjadi cadangan energi. Cadangan energi yang disimpan dalam otot akan digunakan jika asupan energi kurang dari kecukupan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seseorang jika kekurangan energi dalam jangka panjang akan mengakibatkan penurunan berat badan, kekurangan zat gizi dan akan berakibat timbulnya infeksi. Sebaliknya apabila asupan energi berlebih akan disimpan dalam tubuh sehingga mengakibatkan kenaikan berat badan. Komposisi kenaikan berat badan sebagian besar berupa pertambahan lemak (sekitar 70 hingga 80%) dan sisanya berupa pertambahan massa otot (sekitar 20 hingga 30%). Oleh karena itu apabila asupan energi berlebih akan berdampak pada status gizi dan terjadinya penyakit *degenerative* (Hardiansyah et al. 2016).

Gizi Seimbang

Di Indonesia, pedoman gizi mengalami evolusi pada enam dekade terakhir. Mulanya, nama pedoman gizi bagi penduduk Indonesia adalah "Empat Sehat Lima Sempurna" (ESLS). ESLS sangat sederhana berupa visualisasi lima kelompok pangan, yaitu pangan pokok (pangan karbohidrat), lauk-lauk (pangan protein), sayur, buah dan susu. Pada kelompok pangan dalam *Basic Four,* kelompok sayur dan buah berada

dalam satu kelompok pangan, sedangkan pada ESLS sayur dan buah pada kelompok pangan yang terpisah.

Empat sehat dimaknai terpenuhnya sebagian besar kebutuhan gizi untuk hidup sehat apabila seseorang mengkomsumsi empat kelompok pangan yang pertama dalam jumlah sesuai anjuran. Namun, dalam kondisi pertumbuhan pesat dan fisiologis tertentu, misalnya kehamilan, menyusui dan anak pasca-pemberian ASI (setelah usia dua tahun), atau rendahnya komsumsi salah satu kelompok pangan, ada kemungkinan kelompok pangan tersebut belum mampu mencukupi keseluruhan asupan gizi. Pada umumnya, komsumsi yang rendah adalah kelompok pangan hewani. Oleh sebab itu, dengan tambahan kunsumsi pangan kelompok kelima, yaitu susu akan lebih menyempurnakan pemenuhan kebutuhan gizi sehingga disebut dengan "Lima Sempurna".

ESLS lahir sesuai zamannya, sesuai permasalahan dan perkembangan iptek saat itu. Dapat dibayangkan, pada tahun 1950-an maih banyak penduduk Indonesia yang buta aksara dan tidak memiliki akses terhadap media komunikasi., apalagi yang Namanya literasi Gizi. Ini menjadi alasan penting mengapa pesan komunikasi (panduan pangan ESLS) berupa gambar yang polos tanpa tulisan dan angka-angka, tetapi memiliki warna dan bentuk yang menarik, akan lebih mudah di terima dan dipahami masyarakat saat itu. Semakin meningkat pendidikan masyarakat, semakin kritis terhadap informasi, dan semakin memerlukan hal atau pesan yang lebih terperinci dan operasional. Dalam kondisi yang terakhir ini, di perlukan panduan pangan yang di sertai dengan porsi anjuran komsumsi dan pesan tertulis.

ESLS lahir dikala maslah gizi yang umum di hadapi Indonesia adalah masalah kekurangan gizi. Saat itu, masalah kegemukan dan masalah gizi ganda belum menjadi masalah kesehatan masyarakat, serta penyebab kematian adalah penyakit menular yang sangat erat kaitannya

dengan lingkungan dan sanaitasi yang buruk serta perilaku hidup sehat yang belum memadai.

Selain itu, iptek di berbagai bidang, termasuk iptek gizi dan pangan, terus berkembang. Pengaturan makan saja tentu tidak cukup untuk mencegah kegemukan.bukti-bukti sangat kuat menunjukan bahwa kombinasi pengaturan makan dan minum serta aktivitas fisik yang tepat berperan penting dalam pencegahan kegemukan, peningkatan kebugaran, konsentrasi dan stamina. Kemajuan iptek pangan juga telah meningkatkan ketersediaan pangan sepanjang waktu dan di berbagai lokasi, meningkatkan penyedian dan komsumsi pangan yang rendah serat, serta tinggi garam dan energi dari gula lumak. Hal ini dapat meningkatkan resiko kegemukan dan berbagai di PTM (Kemkes RI, 2013).

Semua hal tersebut menjadi alasan utama, pemerintah Indonesia melalui kementerian kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) meninjau ulang dan menyempurnakan ESLS menjadi pedoman gizi yang lebih sesuai di sebut gizi seimbang. Gizi seimbang berdasarkan penjelasan pasal 141 undang-undang kesehatan adalah asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk mencegah resiko resiko gizi kurang dan gizi lebih.

Pesan gizi utama dalam pedoman gizi Indonesia yang diterbitkan tahun 1995 terdiri atas 13 pesan gizi, sedangkan pedoman gizi Indonesia yang diterbitkan tahun 2014 terdiri atas 10 pesan gizi utama, di sertai dengan pesan gizi khusus untuk berbagai kelompok umur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sepuluh pesan gizi utama dalama pedoman gizi bagi penduduk indonesia adalah sebagai berikut.

1. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan
2. Banyak makan sayur dan cukup buah-buahan
3. Biasakan makan lauk-lauk yang mengandung protein tinggi

4. Biasakan mengkomsumsi aneka ragam makanan pokok
5. Batasi komsumsi pangan manis, asin, dan berlemak
6. Biasakan sarapan
7. Biasakaan minum air putih yang cukup dan aman
8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan
9. Cuci tangan pake sabun dengana air bersih yang mengalir
10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berar badan normal

Salah satu keunikan dalam peran gizi tersebut dibandingkan pesan gizi di berbagai negara terkait makan aneka ragam makanan adalah penggunaan kata "syukuri dan nikmati" (pesan 1); syukuri dan nikmati mengandung makna penting berterimah kasih dan berdoa kepada sang pencipta atas kesempatan atas ketersediaan makanan dan minuman yang akan di santap. Syukuri dan nikmati juga bermakna agar seseorang yang makan menyadari akan pilihan jenis dan jumlah makanan dan minuman yang akan dikomsumsi (*mindfull eating* atau *attentive eating*) sehingga makan secara perlahan dan tidak tergesa-gesa. Penelitian tinjauan sistematik yang di lakukan oleh Robinson E, et al (2013) membuktikan bahwa orang yang makan dengan penuh sadar bermanfaat akan mengurangi resiko makan berlebihan dan mencegah kegemukan.jadi, selain mengandung nilai luhur religius, anjuran ini juga bermanfaat bagi kesehatan.

Pentingnya Literasi Gizi pada Anak

Hidup sehat di tengah pandemi Covid-19 memang terus dikedepankan masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan memenuhi kebutuhan gizi seimbang guna memperkuat tubuh. Tak terkecuali pada pada anak. Namun sayangnya, tak semua anak paham akan pentingnya gizi seimbang. Untuk itu perlu mengenalkan dan menumbuhkan literasi gizi untuk anak, yang dilakukan orangtua bahkan guru.

Literasi Gizi pada anak sangat penting diterapkan terlebih di tengah krisis kesehatan, yang tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sebab, jika dikenalkan sejak dini, maka bisa membantu mengubah pola hidup lebih sehat hingga dewasa kelak. Sehingga, mereka sudah terbiasa dan memiliki pengetahuan akan gizi yang baik. Tentunya bisa membuat hidup lebih aktif dan sehat. Literasi gizi tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan siswa tapi juga membutuhkan peran aktif orang tua, yang membantu meningkatkan perubahan perilaku terhadap kesadaran gizi dan pola konsumsi pangan sehat dan gaya hidup aktif, baik di sekolah maupun di rumah. Sebenarnya, menumbuhkan literasi gizi bisa berawal dengan memperkenalkan 'Isi Piringku'. Biasanya hal ini diajarkan di sekolah mencakup pemahaman dasar tentang gizi seimbang. Di mana dalam satu piring harus ada lauk-pauk, sayuran, hingga buah. Termasuk pentingnya konsumsi minimal segelas susu setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi perkembangan otak dan fisik yang optimal bagi anak-anak usia prasekolah dan sekolah. Setiap anak membutuhkan asupan gizi berbeda di tiap usianya. Bagi anak usia 2-5 tahun, asupan gizi mesti seimbang, meliputi karbohidrat, buah dan sayur, protein hewani, serta gula, garam, dan minyak.

Dalam sehari, kebutuhan karbohidrat 450-600 mililiter. Dalam satu mangkuk mengandung 250-350 mililiter. Sementara kebutuhan sayur dan buah 200 mililiter atau 20 gram per hari. Kebutuhan protein hewani sari ikan, telur, ayam, daging, dan susu 20-40 gram sehari atau 1-2 sendok makan. Adapun konsumsi gula, garam dan minyak harus dibatasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan, asupan gula dalam bentuk gula tambahan dibatasi kurang dari 10 persen dari total asupan kalori harian bagi anak usia 2-18 tahun atau 50 gram per hari. Bahkan, anak usia 2 tahun dianjurkan mengonsumsi gula kurang dari 5 persen dari total kalori yang dibutuhkan. Untuk konsumsi garam pada anak usia 1-3 tahun kurang dari 2 gram per hari.

Kesimpulan

Literasi gizi bisa menjadi proses berbasis keterampilan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengubah pesan tentang makanan menjadi pengetahuan sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pangan berkualitas, yang akhirnya dapat meningkatkan status gizi bangsa dan membangun keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Aihara Yoko Jm. 2011. Barriest And Catalyst Of Nutrion Literacy Among Elderly Japanese People. Heal Promot Int; 26 (4)

Ali Khomsan. 2021. Perubahan pola makan dan urgensi literasi gizi, koran Sindo.

Haniek Try Umayana Whc. 2015. Dukungan Keluarga Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Keaktifan Penduduk Ke Posbindu Penyakit Tidak Menular. Kesehatan Masyarakat;11(1):96–101.

Hardiansyah Et Al. 2016. Kecukupan Energi, Protein, Lemak Dan Karbohidrat,. Dep Gizi Masyarakat, Univ Indones Jakarta.

Jumrana. 2021. Pengaruh Literasi Gizi terhadap Pola Konsumsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian, Kelauan dan Perikanan (PKP) Kota Parepare, Skripsi.

Kartasapoetra, G Dan Marsetyo. 2017. Korelasi Gizi, Kesehatan Dan Produktivitas Kerja. Kesehatan Masyarakat.

Kusumaastusi, Astuti Dp. 2017. Peningkatan Pengetahuan Tentang Teknik Menyusui Yang Benar Dengan Menggunakan Media Booklet Di Desa Bumiharjo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Ma'munah M. 2015. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan

Booklet Terhadap Pengetahuan Ibu Laktasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Ciputat Timur, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. J Kesehatan, Issn 1979-7621;10.

Nafsiah Mboi. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Kesehatan Republik Indonesia;55:3909

Nazmi. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fak Kesehat Masyarakat, Univ Indones 16424,Indonesia.

Notoatmodjo. 2012. Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Nur Aisyiyah Widjaya. 2021. Konsumsi gula, garam dan lemak harus dibatasi untuk mencegah Obesitas, Sumber: Kompas. 20 Mei 2021. Hal.5

Pratiwi Yf, Puspitasari Di. 2017. Efektivitas Penggunaan Media Booklet Terhadap Pengetahuan Gizi Seimbang Dan Gizi Kurang Di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. J Kesehat;10(1):58.

Veriyal, Nura. 2017. Analisis Pola Asuh Gizi Ibu Terhadap Balita Kurang Energi Protein (Kep) Yang Mendapat Pmt-P Di Puskesmas Pagedangan Kabupaten Tangerang Tahun 2010, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif H. J Kesehatan, Issn 1979-7621;10.

Widiantini W, Tafal Z. 2014. Aktivitas Fisik, Stres, Dan Obesitas Pada Pegawai Negeri Sipil. Kesmas Natl Public Heal J;(4):325.

Bab 5

MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT MELALUI PROGRAM HOME VISIT UNTUK INDONESIA BERMARTABAT

Usman[1]

Pendahuluan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan martabat bangsa. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UU No. 36, 2009).

Kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, keturunan dan pelayanan kesehatan (Blum). Empat faktor determinan kesehatan ini diurutkan berdasarkan besarnya pengaruh terhadap kesehatan. Derajat kesehatan dibedakan antar derajat kesehatan individu, kelompok atau komunitas (masyarakat). Hal ini dapat dipahami karena derajat kesehatan perseorangan tidak hanya

[1]Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare; Email: usman-fikes86@gmail.com

dipengaruhi oleh 4 faktor saja melainkan ada faktor internal juga misalnya, umur, gender,dan pendidikan. Kesehatan juga dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan layanan kesehatan misalnya kemiskinan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu harus ada penerapan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur, memantau dan megontrol hal yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan (Ningsih PNP dkk, 2013)

Indonesia adalah negara yang dianggap tertinggal dalam sektor kesehatan dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Angka Kematian Bayi yang tinggi (34 per 1000 kelahiran hidup), Angka Kematian Ibu melahirkan yang tinggi (228 per 100.000 jiwa), angka harapan hidup yang rendah (6.9 pertahun), tingginya angka rata-rata prevalensi malnutrisi dan penyakit menular, diperburuk dengan isu-isu terkait tidak meratanya dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan biaya berobat yang tidak terkontrol adalah faktor-faktor penyebab memburuknya sektor kesehatan di Indonesia (Puput DCA dan Ilham AR, 2020).

Dalam mengatasi beberapa masalah kesehatan tersebut pemerintah berupaya menanggulanginya dengan membuat program – program yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses kesehatan. Banyak program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia seperti, program Jamkesmas, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan masih banyak lagi program pemerintah dibidang kesehatan (Hartini, 2013). Dari beberapa program yang dibuat oleh pemerintah ini tidak selalu berdampak positif di masyarakat, bahkan dari adanya program pemerintah ini menimbulkan banyak sekali masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat termasuk di dalamnya melakukan kegiatan kunjungan rumah (*home visit*) untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang masimal kepala masyarakat (Tohirin. 2014)

Home visit adalah segala tindakan yang dilakukan kepada pasien oleh tenaga kesehatan sebagai kelanjutan dari tindakan yang dilakukan di Rumah sakit atau bersifat panggilan. Tindakan ini dilakukan di rumah atau tempat tinggal pasien. Pelayanan *Home Visit* ini melibatkan berbagai tenaga yang berkompetensi di bidang masing-masing, diantaranya dokter, baik dokter umum, maupun dokter spesialis, perawat, fisioterapi, laborat, apotik. Kunjungn rumah (*home visit*) merupakan sebagian dari pekerjaan penting petugas tenaga kesehatan. Untuk mendapatkan keterangan yang di perlukan yaitu dengan cara mengunjungi keluarga-keluarga di rumah. Hal ini dikarenakan terkadang salah satu cara terbaik untuk memberi pengetahuan dan perawatan yang efesien terhadap pasien adalah dengan memperagakan, mengenalkan dan mengajarkan pada mereka bagaimana cara melakukan pengobatan dan pencegahan penyakit di mulai dari keluarga sendiri (Eka dkk. 2020).

Sejak pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan primer. Salah satu dampak besar pandemi Covid-19 bagi masyarakat Indonesia adalah bidang pelayanan publik khususnya fasiltas layanan Kesehatan. Selama pandemi Covid-19, masyarakat merasa takut melakukan pemeriksaan dan pengobatan pada fasilitas layanan Kesehatan. Melalui penerapan home visit, masyarakat akan mendapatkan layanan Kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat. Masyarakat yang sehat akan hidup produktif sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian negara untuk meningkatkan martabat bangsa.

Home Visit

Home visit sebagai suatu pendekatan keperawatan kesehatan yang tradisional untuk merawat individu dan Keluarga. *Home visit* merupakan suatu strategi pemberian pelayanan, tetapi konten dan fokus *home visit*

sebagaimana karakteristik *home visitors* dan target hasilnya, berbeda beda sesuai dengan kebutuhan pasien. Basavanthappa (2011) menjelaskan bahawa *home visit* pada pasien berbeda dalam fokus, jangka waktu yang dibutuhkan, dan intensitas sesuai dengan jenis penyakit yang diderita pasien *home visit* (Prayitno. 2012).

Home visit adalah segala tindakan yang dilakukan kepada pasien oleh tenaga kesehatan sebagai kelanjutan dari tindakan yang dilakukan di Rumah sakit atau bersifat panggilan. Tindakan ini dilakukan di rumah atau tempat tinggal pasien. Pelayanan *home visit* ini melibatkan berbagai tenaga yang berkompetensi di bidang masing-masing, diantaranya dokter, baik dokter umum, maupun dokter spesialis, perawat, fisioterapi, laborat, apotik. Pelayanan ini bisa dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri (Eka dkk. 2020).

Ruang lingkup pelayanan home visit adalah:

1. Pelayanan medik.
2. Pelayanan dan asuhan keperawatan.
3. Pelayanan sosial dan upaya menciptakan lingkungan terapeutik.
4. Pelayanan rehabilitasi medik dan keterapian fisik.
5. Pelayanan informasi dan rujukan.
6. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kesehatan.
7. *Hygiene* dan sanitasi perorangan serta lingkungan.
8. Pelayanan perbantuan untuk kegiatan sosial.

Tujuan Kunjungan Rumah (*Home Visit*)

1. Meningkatkan sisitem pendukung yang ada agar efektif dan edekuat sebagai upaya pencapaian kesehatan keluarga.
2. Meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan pada keluarga, khususnya keluarga dengan masalah kesehatan yang spesifik.
3. Optimalisasi perkembangan kesehatan keluarga dan pendidikan kesehatan terhadap pemeliharaan dan pencegahan penyakit.

4. Promosi lingkungan yang sehat.

Alasan dilakukannya Home Visit

Banyak alasan kenapa pertolongan kedokteran perlu dilakukan melalui kunjungan dan ataupun perawatan di rumah tersebut. Dua di antaranya yang dipandang mempunyai peranan yang amat penting, yakni:

1. Karena keadaan kesehatan pasien tidak memungkinkan untuk datang ke tempat praktek.
2. Keadaan kesehatan pasien tidak memungkinkan untuk datang berobat ke tempat praktek, atau kalau tetap dipaksakan, akan lebih memperberat keadaan pasien. Keadaan yang tidak memungkinkan tersebut banyak macamnya. Secara umum dapat dibedakan atas tiga macam, yakni:
   a. Karena menderita penyakit akut yang tidak memungkinkan pasien untuk dibawa ke tempat praktek, atau kalau dibawa dan kebetulan menderita penyakit menular, dapat membahayakan orang lain.
   b. Karena menderita penyakit kronis, terutama apabila dialami oleh orang yang telah lanjut usia
   c. Karena menderita penyakit stadium terminal yang telah tidak ada harapan untuk hidup lagi.
3. Sebagai tindak lanjut pelayanan rawat inap di Puskesmas

   Alasan kedua perlunya dilakukan kunjungan dan atau perawatan di rumah adalah untuk menindaklanjuti pelayanan rawat inap bagi pasien yang baru saja keluar dari puskesmas. Pelayanan tindak lanjut rawat inap melalui kunjungan dan atau perawatan di rumah, tampak semakin bertambah penting. Penyebab utamanya adalah karena mahalnya biaya perawatan di rumah sakit, sehingga pasien karena kesulitan biaya, meskipun belum sembuh sempurna telah minta

untuk segera dipulangkan.

Manfaat Kunjungan dan Perawatan Pasien di Rumah

Apabila kunjungan dan atau perawatan di rumah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, akan diperoleh banyak manfaat. Beberapa dari manfaat tersebut antara lain adalah:

1. Dapat lebih meningkatkan pemahaman dokter tentang pasien
   Adanya peningkatan pemahaman yang seperti ini mudah dimengerti, karena memanglah dengan dilakukannya kunjungan dan atau perawatan pasien di rumah tersebut, dokter akan memperoleh banyak keterangan tentang pasien yang dimaksud.
2. Dapat lebih meningkatkan hubungan dokter – pasien
   Sama halnya dengan pemahaman, peningkatan hubungan dokter - pasien ini adalah juga sebagai hasil dari dilakukannya kunjungan dan atau perawatan pasien di rumah.
3. Dapat lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan kesehatan pasien
   Dengan makin meningkatnya pemahaman dokter tentang keadaan pasien, dan atau dengan makin baiknya hubungan dokter - pasien, berarti sekaligus akan meningkatkan pula pemahaman dokter tentang kebutuhan serta tuntutan kesehatan pasien. Adanya pemahaman yang seperti ini jelas akan berperanan besar dalam upaya lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan kesehatan pasien.
4. Dapat lebih meningkatkan kepuasan pasien
   Pelayanan kedokteran yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan pasien, apalagi jika disertai dengan hubungan dokter - pasien yang baik, pasti mempunyai peranan yang amat besar dalam lebih meningkatkan kepuasan pasien (*patient satisfaction*). Sesuatu yang pada akhir - akhir ini telah disepakati sebagai salah

satu tolok ukur yang paling penting dari pelayanan kesehatan yang bermutu.

Kesehatan Masyarakat

Derajat Kesehatan Masyarakat merupakan gambaran kemampuan/ Kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator Kesehatan, kemampuan SKPD dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Hendrik Blum ada 4 determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan, individu, kelompok atau Masyarakat. Empat determinan tersebut diurut berdasarkan besarnya pengaruh terhadap kesehatan:

1. Lingkungan, baik fisik maupun lingkungan non fisik (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain)
2. Prilaku
3. Pelayanan kesehatan
4. Keturunan atau hereditas

Untuk meningkatkan derajat kesehatan salah satu yang bisa dilakukan adalah miningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, hal ini dilakukan karena dalam proses memberi pelayanan kesehatan terjadi interaksi langsung antara pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini tenaga kesehatan dengan pasien penerima pelayanan kesehatan, sehingga tenaga kesehatan yang memberikan layanan dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang dapat meningkatkan derajat kesehatan pasien. Pasien yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di harapkan mampu mempertahankan kesehatannya dan meningkatkan kesehatannya menjaga dirinya agar tidak kembali sakit, dengan tercapainya apa yang diharapkan maka derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Faktor-faktor atau determinan yang menentukan atau mempengaruhi kesehatan baik individu, kelompok, atau masyarakat ini,

dalam Piagam Otawa disebut prasyarat untuk kesehatan. Piagam Otawa (1986) mengidentifikasikan prasyarat untuk kesehatan dalam sembilan faktor, antara lain:

1. Keamanan
2. Tempat tinggal
3. Pendidikan
4. Makanan
5. Ekosistem yang stabil dan seimbang
6. Keadilan sosial
7. Pemerataan

Sasaran Kesehatan Masyarakat

Sasaran Kesehatan masyarakat adalah individu, keluarga, kelompok khusus baik yang sehat maupun yang sakit yang mempunyai masalah Kesehatan, antara lain:

1. Individu

   Individu adalah bagian dari anggota keluarga, apabila individu tersebut mempunyai masalah kesehatan karena ketidak mampuan merawat dirinya sendiri oleh sesuatu hal dan sebab maka akan dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya baik secara fisik, mental dan sosial

2. Keluarga

   Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, terdiri atas kepala keluarga, anggota keluarga lainnya, yang berkumpul dan tinggal dalam suatu rumah tangga karena pertalian darah dan ikatan perkawinan atau adopsi, satu dengan lainnya saling tergantung dan interaksi, bila salah satu atau beberapa keluarga mempunyai masalah kesehatan maka akan berpengaruh terhadap anggota dan keluarga yang lain.

3. Kelompok khusus

Kelompok khusus adalah kumpulan individu yang mempunyai kesamaan jenis kelamin, umur, permasalahan, kegiatan yang terorganisasai yang sangat rawan terhadap masalah kesehatan, dan termasuk di antaranya adalah:

a. Kelompok khusus dengan kebutuhan kesehatan khusus sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan seperti; ibu hamil, bayi baru lahir, anak balita, anak usia sekolah, dan usia lanjut.
b. Kelompok dengan kesehatan khusus yang memerlukan pengawasan dan bimbingan serta asuhan, diantaranya penderita penyakit menular dan tidak menular.
c. Kelompok yang mempunyai risiko terserang penyakit, di antaranya; wanita tuna susila, kelompok penyalahgunaan obat dan narkoba, kelompok-kelompok pekerja tertentu, dan lain-lain.
d. Lembaga sosial, perawatan dan rehabilitasi, diantaranya; panti werda, panti asuhan, pusat-pusat rehabilitasi dan penitipan anak.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program opersional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dapat dicapai. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*.

Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau disebut juga sebagai tolok ukur

keberhasilan pencapaian sasaran (Eliana dan Sri S. 2016).

Home Visit untuk Indonesia Bermartabat

Kunjungan rumah/ *home visit* merupakan kegiatan luar gedung puskesmas melalui upaya Kesehatan Masyarakat (perkesmas) memiliki tujuan memandirikan masyarakat agar dapat mengatasi masalah kesehatan dan mencapai derajat kesehatan yang optimal. Tingkat derajat Kesehatan masyarakat yang optimal akan berdampak pada tingginya produktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan martabat bangsa. Salah satu cerminan martabat bangsa adalah melalui kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. Fokus pelayanan pada upaya promotif berupa pendidikan kesehatan dan preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif (Kemenkes RI, 2006). Pemberian informasi melalui pendidikan kesehatan dan diskusi partisipasi akan meningkatkan pengetahuan dan menimbulkan kesadaran sehingga dapat digunakan sebagai salah satu strategi merubah sikap (Notoatmodjo, 2007). Perubahan sikap dapat dicapai apabila terjadi komunikasi persuasif yang efektif antara komunikator dan penerima informasi (Notoatmodjo, 207).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penerapan kebijakan *home visit* terhadap peningkitan derajat kesehatan pasien prolanis. Dimana dalam penerapan kebijakan *home visit* derajat kesehatan pasien meningkat karena seringnya dilakukan pemantauan secara teratus pasien prolanis sehingga pasien dapat menjaga derajat kesehatannya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari prolanis adalah mendorong kemandirian peserta, meningkatkan kepuasan peserta dan mengendalikan pelayanan kesehatan jangka panjang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Friendman (2012) menjelaskan bahwa ada hubungan antara penerapan kebijakan *home visit* dengan peningkatan derajat kesehatan pasien psca rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan kebijakan

home visit terhadap peningkitan derajat kesehatan pasien pasca rawat inap. Dimana dalam penerapan kebijakan *home visit* derajat kesehatan pasien meningkat karena seringnya dilakukan pemantauan secara teratur pasien pasca rawat inap sehingga pasien dapat menjaga derajat kesehatannya.

Masalah perawatan pasca rawat inap merupakan tantangan bagi penyelengggara kesehatan yang merupakan upaya ekonomis sebagai alternatif lain dari perawatan di Puskesmas sejauh pertimbangan-pertimbangan medis di lingkungan sosial dan aspek-aspek psikologis dapat terjaga untuk mendukung lebih cepatnya proses penyembuhan. Tujuan dari penyelenggaraan *home visit* pasca rawat inap merupakan proses mencegah terjadinya cacat yang berkelanjutan pada pasien sehingga individu yang menderita dapat berfungsi secara optimal, mental, dan sosial sehingga penderita dapat memepertahankan otonominya selama mungkin. Penyelenggara pelayanan kesehatan *home visit* semakin meningkatkan dan sering melakukan kunjungan rumah pasien sehingga pasien tetap dapat mempertahankan derajat kesehatannya sendiri sehingga terjadi penurunan angka kesakitan demi tercapainya peningkatan derajat kesahatan masyarakat. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator penegasan jati diri dan martabat bangsa.

Kesimpulan

Home visit adalah segala tindakan yang dilakukan kepada pasien oleh tenaga kesehatan yang dilakukan di rumah atau tempat tinggal pasien. Untuk meningkatkan derajat kesehatan salah satu yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kunjungan rumah/ *home visit* merupakan kegiatan luar gedung puskesmas melalui upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat (perkesmas) memiliki tujuan memandirikan masyarakat agar dapat mengatasi masalah kesehatan dan

mencapai derajat kesehatan yang optimal. Tingkat derajat Kesehatan masyarakat yang optimal akan berdampak pada tingginya produktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan martabat bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Eka dkk. 2020. Pengaruh Home Visit Terhadap Kemandirian Anak Autis Di Rumah. Jurnal Pendidikan MINDA. Volume 2. Nomor 1.

Eliana dan Sri S. 2016. Kesehatan Masyarakat. Kementerian Kesehatan RI, Pusan Pendidikan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Hartini, (2013). Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Tahun 2013.

Ningsih PNP dkk, 2013. Analisis Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Bali Dengan Menggunakan Metode Generalized Structured Component Analysis (GSCA). E-jurnal matematika vol. 2, no. 2. Bali.

Notoatmodjo, S, 2007, Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni, Jakarta, Rineka Cipta.

Prayitno. (2012). Bimbingan dan Konseling. Padang: BK UNP.

Puput DCA dan Ilham AR. 2020. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat di Kelurahan Rangkah Kota Surabaya. Jurnal Promkes. Volume 8 Nomor 1.

Tohirin. 2014. Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah. Jakarta: Rajawali Pres.

UU Nomor 36. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta.

Bab 6

HEALTH LITERACY, ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM UNTUK INDONESIA SEHAT BERMARTABAT

Rahmi Amir[1]

Pendahuluan

Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju pada tahun 2045, hal itu dikalkulasi berdasarkan piramida penduduk Indonesia yang surplus usia produktif pada 2045. Meskipun demikian, kemajuan ini tidak ada artinya apabila lingkungan yang ditinggali mengalami kerusakan. David Wallace Wells, salah seorang jurnalis yang juga sering meliput tentang lingkungan memaparkan data-data mencengangkan dalam bukunya berjudul The Uninhabitable Earth (2017). David mengatakan bahwa saat ini kita hidup pada zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.[1,2]

Prediksi kedepan tentang lingkungan bukan malah membaik tapi selalu pada prakiraan yang buruk. Dia bahkan memprediksi bahwa suhu bumi akan meningkat sebesar delapan derajat pada tahun 2100. Padahal, apabila suhu bumi meningkat satu derajat saja, maka produksi bahan makanan dapat menurun sepuluh persen. Apabila suhu bumi naik dua hingga empat derajat maka banyak penduduknya yang mati muda.[1,4]

Kenaikan suhu bumi juga membuat es di kutub mencair sehingga muncul berbagai penyakit dan tangkapan nelayan akan berkurang. Kota-kota di dunia yang berada di dekat pantai juga terancam tenggelam,

[1] Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammdiyah Parepare; Email: ammi-andjala@gmail.com

belum lagi pembangkit listrik, pangkalan kereta, tambak ikan, sungai, dan rawa, semua dapat tenggelam. Berbagai penyakit baru dan wabah dapat muncul ketika suhu bumi meningkat.[3]

Kebutuhan informasi sangat tinggi, terdapat trasnformasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat informasi, yang akan bergantung pada inovasi teknologi yang akan terus berkembang. Adanya perubahan siklus budaya dalam kehidupan sehari-hari sebagai dampak ketersedian informasi dari berbagai saluran media. Di era digital yang serba cepat ini, kecanggihan teknologi terus berkembang dan berubah setiap hitungan detik.[5]

Dalam beberapa dekade belakangan ini, persoalan yang dihadapi oleh manusia semakin beragam. Perkembangan sejarah kehidupan manusia ternyata juga membawa manusia pada kompleksitas masalah. Fukuyama misalnya, mensinyalir bahwa masyarakat sekarang ini mengalami *great disruption* yang menyebabkan munculnya gangguan-gangguan serius terhadap nilai-nilai sosial. Kenyataan ini dapat dilihat dari statistik kriminalitas yang semakin tinggi, anak-anak tanpa orang tua, terbatasnya akses serta kesempatan untuk pendidikan, saling curiga, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan bio-teknologi juga menimbulkan berbagai problem krusial bagi manusia. Munculnya bom nuklir, kerusakan lingkungan akibat teknologi, dan berbagai masalah akibat kemajuan teknologi merupakan realitas yang dapat disaksikan saat ini. Kondisi lingkungan global dewasa ini semakin memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh ulah manusia yang mengekploitasi sumberdaya alam dan lingkungan tanpa batas.

Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, maka mengubah perilaku menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan. Menurut Arne Naess, yang juga seorang ahli ekologi, mengungkapkan bahwa krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan

perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam yang fundamental dan radikal.

Perkembangan teknologi dan industri yang pesat dewasa ini ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Dampak positif memang diharapkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamananan hidup manusia, namun dampak yang bersifat negatif memang tidak diharapkan karena dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia. Semua orang yang ingin memperoleh kenyamanan dan kualitas harus terlibat dalam usaha mengatasi dampak yang bersifat negatif, baik dari kalangan ilmuwan, indutriawan, pemerintah maupun masyarakat biasa.

Literasi kesehatan yang baik sangat penting dimiliki karena bisa berdampak pada batasan faktor sosial, kultur, dan individu, sementara literasi kesehatan yang buruk juga dapat berefek pada pelayanan kesehatan. Beberapa penelitian terkait literasi kesehatan.

Konsep literasi kesehatan muncul dalam kaitannya dengan pendidikan kesehatan pada tahun 1970 di Amerika Serikat dan ketertarikan terhadap topik ini telah meningkat dengan pesat sejak tahun 1990. Literasi kesehatan telah diakui sebagai salah satu determinan kesehatan dan menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan masyarakat . (10)

Literasi kesehatan juga menggambarkan kemampuan kognitif dan keterampilan sosial yang dapat diartikan sebagai motivasi dan kemampuan individu untuk mengakses, memahami dan menggunakan informasi dalam hal menjaga kesehatannya. Literasi kesehatan lebih dari sekadar kemampuan membaca pamflet dan kesuksesan berhubungan atau berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Dengan meningkatkan kemampuan akses terhadap informasi dan kapasitas untuk menggunakannya secara efektif, *health literacy* adalah variabel penting untuk memberdayakan individu dalam hal kesehatan .

Hal ini sejalan dengan pendapat Kern (2000:16) yang mendefinisikan literasi secara lebih komprehensif sebagai berikut:

> *"Literacy is the use of socially, historically, and culturally-situased practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the relationship beetween textual conventions and their contexts of use and, ideally, the ability to reflect critically on those relationships. Because it is purposesensitive, literacy is dynamic-not static-and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written an spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge.*

Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, dan situasi kebudayaan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antar konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/tujuan, literasi itu bersifat dinamis-tidak statis dan dapat bervariasi diantara dan didalam komunitas dan kebudayaan. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kebudayaan.

Dalam tulisan ini, memaknai bahwa dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi, ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji

bahwa literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejehteraan hidup (peradaban unggul) . Penulisan artikel ini merupakan ikhitiar untuk memberikan gambaran bahwa persoalan krisis lingkungan hidup merupakan persoalan global yang menuntut semua kalangan untuk meresponnya. Dalam konteks ini, Islam juga harus memberikan solusi dan respon dengan melakukan pembacaan ulang terkait dengan konsep teologi, etika, dan *fiqh* yang selama ini masih dikuasai dengan cara berpikir klasik yang kurang memberi respon dan landasan dalam konservasi lingkungan. Demikian perlu sebuah rekonstrusi dan pembacaan ulang menuju Islam yang ramah lingkungan dan indonesi yang bermartabat.

Hubungan Manusia-Alam

Keselarasan hidup manusia dengan alam sebagaimana yang telah dipesankan dalam berbagai ajaran agama, telah banyak diabaikan oleh sebagian manusia. Manusia lebih mendominasi kegiatannya untuk menaklukan dan menguasai alam. Dalam suasana kehidupan seperti itu, maka seolah-olah manusia menjadi bagian terpisahkan dari keseluruhan semesta alam ini. Saat ini kita semua sedang merasakan hasil dari kealpaan yang telah dilakukan oleh sebagian manusia untuk memperhatikan peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an. Salah satunya, terdapat pada Surat Ar-Ruum ayat 41, yang artinya: telah nampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[2,5]

Keberhasilan pencapaian program perlindungan serta dalam *Green Community* dan pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan

kerjasama dan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan masyarakat. Upaya untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola lingkungan hidup, bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi dan peran aktif semua komponen masyarakat, baik kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga pendidikan dan perguruan tinggi

Alam merupakan sebuah entitas atau realitas (empirik) yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan manusia dan dengan realitas yang lain Yang Ghaib dan supraempirik. Alam sekaligus merupakan representasi atau manifestasi dari Yang Maha Menciptakan alam dan Yang Maha Benar, yang melampauinya dan melingkupinya yang sekaligus merupakan sumber keberadaan alam itu sendiri. Realitas alam ini tidak diciptakan dengan ketidak-sengajaan (kebetulan atau main-main atau *bathil*) sebagaimana pandangan beberapa saintis barat, akan tetapi dengan nilai dan tujuan tertentu dan dengan *haq* atau benar.

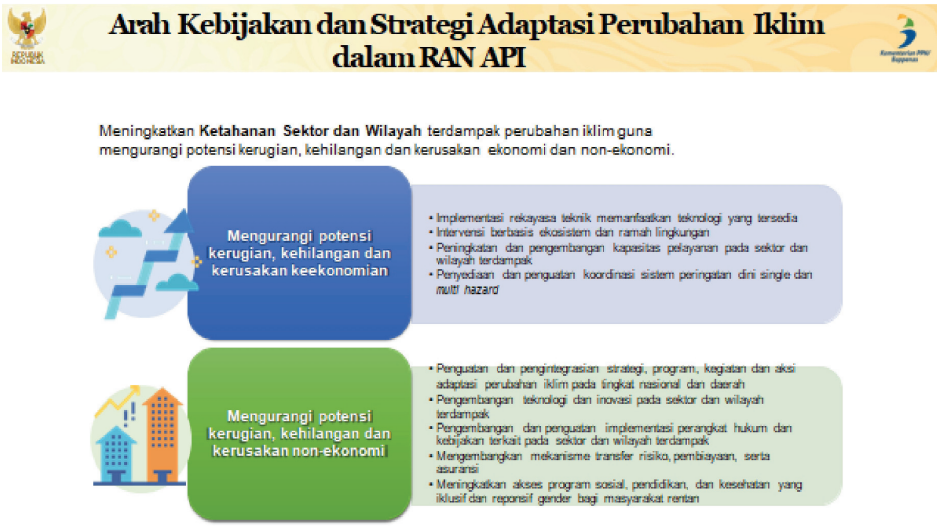

Sumber :(BAPPENAS, 2019)

Perubahan iklim merupakan masalah lingkungan global yang menjadi tanggung jawab tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang. Walaupun kenyataannya bahwa negara-negara industri dipastikan sebagai kontributor terbesar terhadap terjadinya perubahan iklim, negara-negara berkembang diprediksikan juga akan berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer di negara-negara tersebut (Boer, 2007).

Berikut data identifikasi penyakit yang berkorelasi dengan iklim

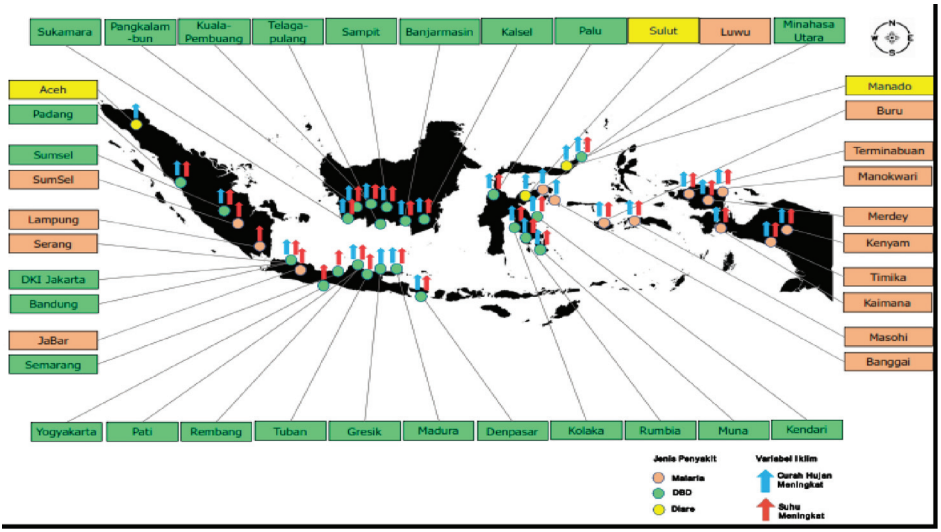

Rencana Aksi Nasional Adaptasi perubahan Iklim (RAN APIK)

Rencana Aksi Nasional Adaptasi perubahan Iklim (RAN APIK)

Kebijakan nasional untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim perlu didasarkan pada penelitian mengenai antisipasi dampak perubahan iklim. Alasan/pertimbangannya adalah untuk mendorong terciptanya prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan serta tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu diambil untuk membuat kebijakan nasional, yaitu:

a) Menyusun prioritas program pelaksanaan strategi adaptasi termasuk kepentingan pendanaan yang memadai bagi kebutuhan penelitian, pemantauan dan pelaksanaannya. b) Program penguatan kapasitas (termasuk *public awareness*) pelatihan dan edukasi yang dilaksanakan secara paralel dengan pelaksana kegiatan lainnya. Kebijakan ini harus diusahakan dengan melibatkan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seluas mungkin dari berbagai tingkatan. c) Prioritas kepada Pengembangan MIH (Menuju Indonesia Hijau) karena sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat indonesia, (khususnya karena frekwensi bencana alam yang terus meningkat.[9]

Tujuan Jangka menengah dari strategi adaptasi perubahan iklim Indonesia adalah untuk mengurangi risiko pada semua sektor pembangunan (pertanian, air, keamanan, energi, kehutanan, kelautan, perikanan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, dan system perkotaan) yang pada tahun 2030 melalui penguatan kapasitas lokal, peningkatan manajemen pengetahuan, kebijakan konvergen tentang adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dan penerapan teknologi adapatif.

Perubahan Iklim dan Dampak Kesehatan

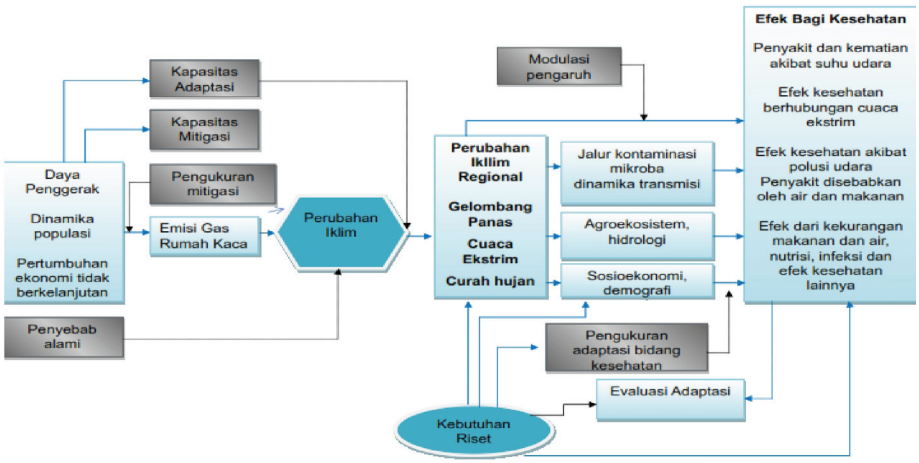

Penetapan Prioritas

Komite Nasional Perubahan Iklim dan dampaknya terhadap kesehatan telah menetapkan tiga prinsip sebagai dasar bagi strategi nasional dalam menghadapi perubahan iklim, yaitu:

1. Strategi nasional tidak dapat dipisahkan dari strategi pembangunan nasional jangka panjang, yang harus mempertimbangkan aspek-aspek penting perubahan iklim dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
2. Prinsip kesetaraan dan keadilan harus memandu proses antisipasi dan penilaian dampak; dan
3. Langah-langkah konkrit harus diambil untuk mengurangi emisi total dari seluruh kegiatan yang berkontribusi terhadap emisi GRK.[9]

Kesimpulan

Pemahaman dan pandangan tentang lingkungan hidup tidak akan mempunyai makna jika tidak diterapkan dalam perilaku dan tindakan nyata dalam kehidupan. Upaya perlindungan dan konservasi alam termasuk bagian dari adaptasi sebagai manusia yang bermartabat, Oleh karena itu pemahaman tentang perlunya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam ini harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih operasional dan konkrit serta dibudayakan. Suatu budaya yang sudah menjadi kebiasaan yang tepat, oleh semua orang dalam komunitas lingkungan yang bersangkutan akan berperan efektif dalam upaya perlindungan dan konservasi alam. Wilayah Indonesia rentan terhadap perubahan iklim ini, serta dampaknya sudah dirasakan di banyak wilayah, agar mengurangi dampak perubahan iklim tersebut perlu dilakukan upaya antisipasi. Upaya antisipasi dapat dilakukan melalui mitigasi berupa edukasi dan *health literacy* serta adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

[1] I. Taufiq, "Transparency And Accountability In The Qur‟a And Its Role I Building Good Governance," Int. J. Business, Econ. Law, vol. 6, no. 4, pp. 73–81, 2015.

[2] M. Fiqh, E. Untuk, and P. Kosmos, "Fiqh ekologi," pp. 77–88.

[3] F. Najitama, "Islam Dan Krisis Lingkungan Hidup (Rekonstruksi Paradigma Menuju Islam Ramah Lingkungan)," An-Nidzam J. Manaj. Pendidik. dan Stud. Islam, vol. 3, no. 2, pp. 126–142, 2019.

[4] D. F. Batten, C. S. Bertuglia, D. Martellato, and S. Occelli, "Learning, Innovation and Urban Evolution: An Introduction," Learn. Innov. Urban Evol., pp. 1–8, 2011.

[5] Syaifuddin, "Epistemologi fiqh: bagaimana fiqh diproduk," J. Falasifa, vol. 2, no. 2, pp. 37–50, 2011.

[6] M. H. Zuhdi, "paradigma fiqh al-bi‟ah berbasis kecerdasan Naturalis: tawaran hukum islam terhadap krisis ekologi," vol. 12, no. 2, pp. 771–784, 2017.

[7] R. Maulidia, "Parenting Dan Hak Asasi Anak Perspekti F Kyai Di Ponorogo,"

[8] Fazlun M Khalid, 2002. Islam and the Environment. In the Ecyclopedia of Global Environmental Change, Vol.5: Social and Economic Dimensions of Global Environmental Change. John Willey and Sons Ltd.

[9] BAPPENAS (2019) "Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim) di dalam Ranwal RPJMN 2020-2024."

[10] Prasanti, D. (2018) "Health Information of Literation as Prevention Processes of Hoax Information in the Use of Traditional Medicine in Digital Era (Literasi Informasi Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Informasi Hoax dalam Penggunaan Obat Tradisional

di Era Digital),” Journal Pekommas, 3(1), hal. 45. doi: 10.30818/jpkm.2018.2030105.

BAGIAN 3:
KEPEMIMPINAN
DAN BUDAYA

Kepemimpinan yang berakar dari iman dan kearifan lokal budaya memberikan warna bagi pembentukan karakteristik suatu masyarakat Indonesia yang bermartabat. Karena iman dan budaya menjadi penciri yang khas, yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Bab 7

RELASI PESAN KUASA DAN UMAT ISLAM INDONESIA BERMARTABAT

Mahsyar[1], St. Nurhayati Ali[2], Ahmad Dhiyaul Haq[3]

Pendahuluan

Secara geneologi manusia lahir bersama dengan adanya pesan dan kuasa. Adam AS. sebagai moyang manusia lahir dengan misi kuasa yang bertujuan untuk memakmurkan bumi. Dengan misi yang mulia tersebut maka dibekali pesan sebagai pegangan dalam mengolah hidup dan kehidupan. Pesan yang diterima Adam terkait dengan pola hidup bersama dari dua jenis insan yang berbeda, tetapi keduanya diciptakan sebagai pasangan (*al-zawj*) adalah pesan untuk tidak mendekati pohon. Awalnya Adam taat pada pesan dan tidak kuasa melanggarnya. Seiring dengan perkembangan dan situasi alam sekitarnya dimana terlibat makhluk ketiga yang bernama iblis mampu memengaruhi Adam sehingga Adam melanggar pesan. Pelanggran itu dikenal sebagai pelanggaran pertama manusia (QS.1:35). Sebagai konsikuensi dari pelanggran pesan maka ia dikeluarkan dari alam ghaib ke alam *syahada*, dari alam spiritual kealam nyata, dari *syorga* ke bumi. (QS.1:36). Sejak itulah manusia dinyatakan bahwa iblis adalah musuh nyata manusia.

[1] Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare; mahhsyar@iain-pare.ac.id
[2] Dosen Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
[3] Mahasiswa Program Pascasarjana di Turki

Bani Adam AS. yang menghuni bumi sudah berkembang sedemikian rupa hidup dalam berbagai suku bangsa, berbagai etnis. Dari zaman klasik ke zaman modern, bahkan milenial tetap pesan dan kuasa memegan peranan penting dalam kehidupan. Pesan dilihat dari segi kesumberannya ada pesan yang bersumber dari agama (wahyu) dan ada pesan bersumber dari budaya (akal). Agama yang dimaksud di sini adalah agama wahyu. Antara budaya dan agama seharusnya saling menguatkan, bukan untuk dipertentangkan. Budaya menjadi media atau sarana pengembangan ajaran agama. Relasi agama dan budaya di Indonesai di Jawa Timur dan Kalimantan misalnya, dapat dilihat dari tiga segi yakni; (1) Relasi agama dengan tradisi lokal, (2) relasi agama etnisitas, (3) relasi agama dengan pemikiran keagamaan Teori akulturasi dapat berjalan sepanjang tidak merusak sendi-sendi ajaran pokok agama. Dalam peraktiknya terkadang pada satu masa pesan harmoni dengan kuasa, tetapi pada masa yang lain kuasa jauh meninggalkan pesan atau pesan tidak "kuasa" melihat kuasa. Baik pesan itu dari agama maupun pesan itu dari budaya.

Dalam konteks lokal khususnya di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan tanah Bugis yakni suku Bugis. Jauh sebelum ada negara Indonesia bangsa Bugis telah eksis menata sebuah sistem pemerintahan dimana pesan dan kuasa keduanya harmoni laksana minyak dan obor yang memancarkan cahaya menerangi semua lorong lorong yang gelap. Tak seorangpun yang dibiarkan tidak menikmati cahaya obor. Keharmonisan pesan dan kuasa tergambar dari dialoh antara Lemellong (orang pintar di tanah Bugis) dengan Arung Pone (Raja Bone). Dialog tersebut terekam dan diabadikan dalam sebuah karya klasik yang disebut kitab Lontarak Latoa

Tata nilai yang tumbuh dan dipelihara oleh masyarakat bugis menjadi pedoman dalam tata kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara. Tata nilai tersebut merupakan peninggalan sejaran, tradisi

dan adat istiadat. Di dunia ini tidak semua suku mempunyai aksara tersendiri. Suku bugis beruntung sebagai salah satu suku yang mempunyai aksara tersendiri. Pesan dalam bahsa bugis disebut "pappaseng". Pappaseng yang dikenal itu berasal dari "*Tomaccae ri Luwu*, *Kajao Laliddong ri Bone,* dan *Arung Bila ri Soppeng*" Ketiga Tokoh tersebut dikenal sebagai orang arif dan bijaksana, pada umumnya pesan itu ditemukan pada *Lontara Attoriolong*. Dalam kitab lontarak latoa lebih banyak lagi menyebutkan sumber pappaseng misalnya, *pappasen toriolo*, *Pappasenna Arung Matinroeri Larian Bangngi Karaetta ri Cinrana* dll. Bagaimana menggali sumber pesan dan relasinya dengan kuasa sehingga kekuasaan bisa ditata dalam mewujudkan umat Islam Inodensia bermartabat. Pertanyaan tersebut yang akan dikaji kembangkan dalam tulisan ini.

Pesan-Pesan Budaya (Kerifan Lokal)

Pesan berarti Perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain, bisa juga berarti wasiat. Dalam konteks bugis, pesan atau pappaseng berarti Warisan leluhur. Sebagai wasiat orang Bugis, Pappasen dalam bentuk sastra Bugis. Dalam literasi Bugis dikenal Lontarak Pappaseng. Salah satu Lontara Bugis yang kaya akan Pappasen ialah Lontarak Latoa.

Lontarak orang Bugis jika dikaji secara mendalam tentang teks teksnya apa yang terucapkan dan apa yang terpahami apa yang tersirat dan apa yang tersurat mempunyai kualitas filosofi yang mengagumkan. Tidak hanya pada tingkat lokal tetapi Lontarak Bugis dikagumi banyak ilmuan dari Barat Lontara yang terkenal misalnya Lagaligo dan Latoa. Tulisan ini fokus memperkenalkan lontarak Latoa.

Lontara Latoa adalah manuskrip dalam peradaban literasi Bugis yang berisi tentang kumpulan ucapan dan petuah raja dan orang bijak Bugis (*kajao*) mengenai berbagai masalah sosial dan kemasyarakatan,

terutama berkenaan dengan kewajiban raja terhadap rakyat dan sebaliknya. *Latoa* memiliki peran penting dalam kepustakaan politik Bugis. Menurut Mattulada, kitab Latoa dijadikan tuntunan bagi penguasa terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan dalam pemerintahan masyarakat Bugis.

Andi Rasdiyanah dalam tulisannya dijelaskan bahwa dalam Latoa dijelaskan tentang sistem *pengngaderren* dengan sistem syariat Islam telah terjadi integrasi (Wacana Integrasi Sistemik), dalam bentuk subtansial maupun dalam bentuk struktural. Pada bentuk Integrasi subtansial materi dan syariat Islam terintegrasi dengan aspek *Pangngaderren* dalam bentuk asimilasi, integrasi dan adaptif. Integrasi asimilasi adalah pembaruan yang terjadi sedemikian rupa sehingga sulit lagi untuk dipisahkan, hal ini terlihat misalnya, kepercayaan ketuhanan antara *Dewata Seuwae* konsep Allah. Integrasi adaptif misalnya kesamaan dan perbedaan antara syariat Islam dan *Pangngaderren*. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam Latoa tentang larangan menikah dengan golongan yang tidak sederajat. Larangan tersebut tidak terdapat dalam syariat Islam namun dapat diadaptasikan. Integrasi struktural adalah integrasi yang diamati secara jelas sebab syariat Islam secara inklusif telah disebutkan dalam struktur *Pengngaderren* dengan istilah *Syara*'. Dalam wujud konkritnya aparat *syara'*sebagai salah satu konponen dari salah satu aparat kerajaan dalam lontarak disebut sebagai "*Pakkatenni Ade* (pemanku adat) serta pejabat tinggi yang disebut kali (*qadhi*).

Mattulada menyatakan posisi Latoa sebagai kitab yang menggambarkan politik telah mendapat pengaruh dari Islam, hal ini terlihat dari penempatan *syara'* (syariat) sebagai sendi yang ke lima dalam sistem *Pangngaderren* (pranata kemasyarakatndan politik). Latoa juga memuat pesan pesan moral, bahkan di dalamnya terdapat pesan Rasulullah dan pesan Luqman al-Hakim.

Di anatara pesan pesan yang terdapat dalam *Lontarak Latoa*

misalnya yang dikemukakan oleh:

1. **Petta Matinroe ri Larian Bangngi**

   Pesan yang berasal dari *Petta Matinroe ri Larian Bangngi* di antaranya:

   a.- Negara sejahtra karena arung dan *Tomabbicara* (hakim). Negara rusak karena *Arung* dan *Tomabbicara*. Artinya Suatu negara bisa maju dan sejahtera karena pemimpinnya, Pemimpin yang dimaksud, adalah *arung,* pemegang kekuasaan tertinggi, dan penegak hukmnya. (semacam Eksekutif dan Yudikatif). Demikian sebaliknya negara bisa rusak juga karena pemimpinnya. Dalam arti Eksekutif maupun dalam arti Yudikatifnya. Lebih lanjut dikatakan "Negara rusak kalau rakyat sudah bercerai berai seperti beras yang dihamburkan" Maksudnya, negara rusak apabila masyarakat bercerai berai,tidak ada lagi persatuan. Dimisalkan sepeti beras yang terhambur.

   b. Keburukan raja ada tiga,yakni: (1) raja dan tomabbicara pendusta, (2) Tidak memenuhi ucapannya, (3) Tidak sepatutnya marah tapi ia marah.

   c- Tiga pangkal kebaikan, (1) kejujuran, (2) pandai, (3) takut kepada Dewata. *Pintar* yang dimkasud harus berbaik hati kepada sesama manusia. Ucapannya perbuatannya menyenangkan. *Pintar* itu harus takut pada Dewata. *Pintar* itu adalah tidak mengambil yang bukan miliknya. Tidak mengambil kepunyaan orang.

2. **Pesan dari Arung Bila**

   a. Perbuatan *arung* sehingga negerinya baik: (1) Berusaha semaksimal mungkin agar ia dirindu oleh rakyatnya (maksudnya jangan ada rakya yang diperlakukan sewenang-wenang. Tidak ada rakyat yang diumpat (2) Berusaha agar

ditakuti seperti *syaithan*. (maksud sesuatu yang angker yang ditempati oleh *syaithan* mungkin pohon atau batu, biasanya orang berbondong-bondong ketempat itu melepas nasar. karena kalau tidak ditakuti maka orang akan sewenang wenang berbuat dalam negeri. (3) Jangan ditakuti seperti seperti buaya. Sungai yang ada buaya semua orang menjauh dari sungai itu.

b. Empat macam perbuatan yang harus dihindari (1) Saling curiga mencurigai, (2) bersetubuh yang tidak pantas misalnya,dengan ibu dengan anaknya atau kemanakannya. (3) *Pabbicara* dinaiki harta benda (hakim disogok), (4) Raja atau arung loba .

c. Negara akan rusak karena; (1) Kemarau berkepanjangan tdk pernah hujang tetapi selalu mendung, padi tidak mau berbuah, pepohonan tidak berbuah, itu terjadi karena arung berbuat sewenang wenang.ada janji arung yang tidak dipenuhi. (2) Apabila tikus makan padi maka *pabbicaralah* yang berbuat sewenang wenang. Mebenarkan orang yang salah dan menyalahkan org yang benar. (3) Apa bila hama merusak padi berarti penduduk (rakyat) yang sudah dzalim curi mencuri dan saling bersengketa, (curi rampok dan begal di mana mana), (4) Apabila arung tidak memberi nasihat kepada perangkatnya maka matilah semua padi. Kalau ini terjadi berarti Dewata sedang marah

3. Pesan dari Petta Matinroe ri Tananna

Petta Matinroe riTananna menjelaskan bahwa, Raja yang jujur tumbuh subur padi, rakyat berkembang biak, tidak terkena bencana, hujan yang turun adalah hujan yang membawa berkah. Kemarau yang memacar adalah kemarau yang menyuburkan padi. Adapun *Arung* yang culas tidak habis habisnya

negaranya ditimpa musiba, wabah menjangkiti masyarakat, wabah menjangkiti hewan ternak. Hujan dan kemarau yang sifatnya merusak. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan apabilaterjadi kerusakan pada negara maka 75% penyebabnya penguasa dan 25 % disebabkan oleh masyarakat atau rakyat.

Lebih lanjut dikatakan ada empat macam yang membuat kejatuhan martabat (1) Dicela oleh ade, (2) Diketawai oleh wari (3) Dicibir oleh *Rapang*, (4) Dihinakan oleh bicara. Selain keempat hal tersebut terdapat pula pesan yang diwarisi secara turun temurun diyakini menjadi penyebab hilangnya martabat seseorang yaitu: (1) Kapau-pau (bicara salah), (2) kagau-gau (kelakuan yang salah), (3) Kainreng-inreng (suka berutang).

Berdasarkan uraian tentang pesan yang terungkap dalam lontarak Latoa dapat dinyatakan sebagi berikut:

1. Jika hasil pertanian selalu gagal: padi gagal, jagung gagal, cengkeh tidak berbuah, coklat rusak, kelapa sawit tidak berbuah, tambak udang gagal, tambak ikan gagal maka isyarat bahwa raja (pemimpin) selalu berbuat kesalahan
2. Jika hujan yang turun adalah bukan membawa berkah tetapi membawa bencana, kemarau menjadi penyebab terjadinya kebakaran dimana-mana, Banjir bandang terjadi di mana-mana, tanah longsor terjadi dimana-mana, Puting beliung menerpa dimana-mana, maka isyarat bahwa raja (pemimpin) selalu berbuat kesalahan.
3. Jika wabah penyakit menyerang, baik wabah yang terkait dengan ternak, wabah yang terkait tanaman, wabah yang terkait dengan penduduk (manusia) maka isyarat bahwa raja (pemimpin) selalu berbuat kesalahan. bahkan bisa jadi pertanda Tuhan sedang marah.

Kesalahan *Arung* atau pemerintah bisa dalam bentuk perbuatan

sewenang-wenang atau mungkin tidak berlaku adail, atau suka marah yang bukan pada tempatnya, atau suka berdusta, atau suka menyalahi janjinya atau Para hakim menerima sogok. Atau semacam hadiah atau menyalahkan orang yang benar atau sebaliknya membenarkan orang yang salah. Kesalahan yang terjadi tidak saja berdampak pada eksistensi *Arung* tetapi bisa berdampak pada hukum alam, dan pada tahap tertentu bisa mengundang kamarahan Tuhan

b. Pesan agama (wahyu)

Dalam al-Qur'an pesan atau *al-dzikr* misalnya dikatakan "Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka" (QS al-Maidah:5/13). Pesan bisa juga dalam arti nasihat misalnya dalam QS.103: 3 Materi pesannya adalah pesan terhadap *al-haq* dan *al-sabr*. Penerima pesan disebut al-insan yang cenderung memilih jalan merugi ketimbang memilin jalan keberuntungan. Terkecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Insan (manusia) menurut al-Qur'an memang mempunyai beberapa sifat yang cenderung jahat. Perhatikan misalnya: *innal insana layatgha*: Keluh kesah (QS. al-Maarij 19) Lemah (QS ar-Rum 54). Zalim dan bodoh (QS al-Ahzab: 72), Ingkar (QS al-Adiat 1006) Suka membantah (QS al-Kahfi 54) Kikir (QS.al-Isra 100) Mencintai dunia (QS al-Qiyamah 75: 20) Melampaui batas (QS al-Alaq 96/6), tergesah gesah (QS al-Anbiya 21/37) gampang terperdaya (QS al-Infithar 6 Lupa (QS.Az-Zumar: 8) berprasngka(QS.Yunus. 36).

Sifat sifat negatif tersebut menjadi pemicu sehinngga ia terjatuh kelembah yang paling jurang dalam al-Qur'an disebut *asfala saafiliin* (QS at-Tin 95/5). Sifat sifat yang menjerumuskan manusia itu hanya dapat dikendalikan dengan sifat sabar. Itulah seabnya pesan utama sebagaimana disebutkan dalam QS al-Ashr

adalah sabar. Iman Syafii berkata, "Sekiranya Allah SWT tidak menurunkan selain surah ini sudah cukup. Di dalam surat al-Ashar di dalamnya sudah tercakup empat masalah asasi yakni: iman, ilmu, akhlak dan amal."

Siapa yang melakukan amal saleh baik laki-laki atau pun perempuan sedang ia beriman, maka sungguh Kami (Allah) berikan kehidupan yang baik *Hayatan thayyibah* (QS.an-Nahl 16/97). Nabi dalam sabdanya banyak menyampaikan pesan,yang terkait dengan menjaga kesabaran dan kejujuran.

Disamping pesan di atas terdapat pula pesan historis dari Nabi, sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Di akhir hayatnya meraih kemenangan secara politis. Mekah dan Madinah berada pada kekuasaan umat Islam. Menurut Istilah *Montgomeri Watt*, Muhammad adalah *prophet and statesman.* Muhammad mengajarkan ajaran Tauhid (ketuhanan) dan pada saat yang sama membentuk komunitas politik (*Political community*). *Bibel* mengajarkan pemisahan antara kekuasaan raja dan pendeta, sedangkan al-Qura'an tidak memisahkannya. Terdapat berbagai penafsiran di kalangan ulama (kaum intelek), apakah kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam aspek politik bersifat doktrim yang sudah final dan wajib diterima dan ditaati sebagai bagian hidup keberagamaan..Ataukah merupakan peristiwa sejarah yang sifatnya kontekstual dan kondisional, dengan demikian hubungan agama dangan negara bersifat *ijtihadi* (Kamaruddin).

Pada sisi lain Kamaruddin melihat bahwa, Dunia Islam mengalami kemunduran disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hanya saja faktor eksternal posisinya sekunder, hali ni disebabkan dunia Islam mewarisi peradaban yang sangat kaya dan pernah unggul dimasa lalu. Beragama fokus pada masalah *fiqih* dan *akidah* (Ilmu Kalam), terlebih masuk pada intervensi kekuasaan

maka menimbulkan pertengkaran yang tiada hentinya. Bahkan tercatat dalam sejarah pernah saling membunuh. Perbedaan terhadap pemahaman (tafsir) terhadap al-Qur'an dan hadis Nabi sangat beragam sehingga melahirkan berbagai mazhab. "Mestinya yang lebih ditekankan pada pesan: akhlak, cinta, dan Ilmu Pengetahuan. Bukankah ketiganya sangat ditekankan dalam al-Quran." Kamaruddin berpandangan untuk kemajuan Islam masa depan harus bisa keluar dari sekat yang kaku menuju aspek yang universal dan lebih maslahah yakni akhlak, cinta dan ilmu.

c. Pesan konstitusi

Negara kesejaateraan sebagimana terantum dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 45 adalah sebuah konsep untuk menyejaterahkan rakyat yang dituangkan dalam pasal demi pasal. Hukum yang baik harus menawarkan sesuatu lebih dari keadilan prosedural, memberi keadilan dan komitmen pada tercapainya rasa adil yang substansil.

Indonesia sudah 76 tahun sebagai negara merdeka, negara kebangsaan dan negara kesejahteraan, tetapi tanda tanda kesejahteraan itu belum kelihatan bahkan kita menyaksikan, dari tahun ketahun, "Proses komersialisasi pendidikan dan kesehatan sebab keterbatasan APBN, keterbatasan lapangan kerja, keterbatasan daya beli masyarakat. Kondisi ini menyakitkan kelompok rakyat yang tidak berpunya."

Welfare state (negara kesejahteraan) adalah gagasan yang menganut konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteran sosial masyarakat. Konsep ini lahir sekitar tahun 1850-an. Dalam *Encylopedia Americana* disebutkan bahwa *wel fare* adalah, "Bentuk pemerintahan dimana negara dianggap bertanggungjawab untuk menjamin standar hidup minimum

setiap warga negaranya.

Di Eropa dan Amerika konsep *welfare state* pada masa lampau berbenturan dengan konsep negara liberal kapitalistik. Situasi kemudian berubah, benturan itu, ”Menghasilkan negara negara makmur dan rakyatnya hidup sejahtera di Amerika Utara dan Eropa Barat.”

Tujuan dari negara kesejahteraan tidak bermaksud untuk menghilangkan perbedaan tingkat ekonomi masyarakat, tetapi bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Terjadinya jarak antara orang kaya (*aghniya*) dan orang miskin (*fuqara*) dalam masyarakat tidak hanya menunjukkan kegagalam pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial, tetapi kondisi kemiskinan memperburuk keadaan sosial kehidupan masyarakat. “Dalam konsep negara kesejahteraan yang mengutamakan untuk mengurusi secara langsung kesejahteraan rakyatnya, membawa akibat bahwa negara kesejahteraan menjadi negara yang memasuki sangat banyak segi kehidupan rakyat, mulai dari soal pendidikan, jaminan sosial”

Konsep untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial–ekonomi, dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia semaksimal mungkin. Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus sesuai dengan nilai–nilai yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Tujuan Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan Keadilan sosial

Dalam Pembukaan UUD 1945 minimal ditemukan sebelas kata kunci yang menjadi inti kehidupan bernegara yakni: 1. merdeka, 2. bersatu, 3. berdaulat, 4. adil, 5. makmur, 6. sejahtera, 7. cerdas, 8. berketuhan, 9. berkemanusiaan, 10. berkeadilan, 11. beradab. Jika diperas dapat menjadi lima item yakni: 1. Berketuhanan, 2. Berkemanusiaan, 3. Berkeadilan, 4. cerdas, 5. sejahtra.

Cita cita negara untuk meningkatkan kesejahteraan tampaknya masih jauh dari harapan .Hal ini dapat dilihat misalnya,berdasarkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) ada yang sangat kaya dan sangat miskin..Kartika Ratna Sari membuat daftar urut negara termiskin dan terkaya di Asia Tenggara. Dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, di akhir tulisannya dikemukakan kesimpulan bahwa Indonesia termasuk urut ke- 5 terkaya di Asia Tenggara. Menurut saya lebih tepat dikatakan Indonesia ($ 3.870) urut ke-7 negara termiskin di Asia Tenggara. Yang tepat negara terkaya Singapura ($ 64.041) dan Brunai Darussalam ($ 32. 413) Negara termiskin, Myanmar ($1.298) dan Kamboja ($ 1.509). Indonesia ($ 3.870) termasuk daftar miskin ke-7. Sedangkan Malaysia ($ 10.941) dan Thailand ($ 7.187) lebih maju. Sesungguhnya belum bisa disebut negara kaya jika dibandingkan dengan Brunai Darussalam dan Singapura. yang PDB-nya masing-masing $ 32. 413 dan $ 64.041.

Kuasa

Kuasa (*authority*) hak untuk bertindak atau memerintah. Dalam bahasa Arab kontemporer kata yang digunakan untuk *authority* adalah

Sulthan. Dalam al-Qur'an dijumpai istilah, *Amr* (perintah) *quwwah* (kekuatan *power*), hukum (penilaian atau keputusan), *mulk* (kadaulatan, kekuasaan, dan kekuatan). Dalam Islam filosofi kuasa sesungguhnya milik Allah SWT. Hanya saja Allah telah mendistribusikan kuasa itu kepada manusia. Dalam menafsirkan kuasa yang ada dalam al-Qur'an ulama berbeda pendapat. Antara Sunnih dan syiah masing-masing mempunyai penfsiran yang berbeda. Ahli Tafsir dari kalangan Sunni mengartikan *amr* (*umara*) dalam al-Qur'an (QS.4:59) adalah *umara*, ulama, *fuqaha*, para sahabat nabi terutama Al-Khulafau Rasyidin. Sedangkan menurut Syiah yang dimaksud adalah imam yang *ma'shum.* Kuasa sebagimana yang tercakup dari kata *amar* lebih khusus kepada kuasa di tangan penguasa

Kuasa di tangan penguasa semisal Ratu Balqis (pemimpin negeri Sabah). Ratu perempuan pertama di dunia, ratu yang mempunyai kekuatan bersenjata yang tidak tertandingi di masanya, tetapi suka memilih jalan damai dengan Nabi Sulaiman dari pada berperang, karena beliau tau resiko yang diderita rakyat jika berperang. Raja yang demokratis, mengajar seluruh pembesarnya bermusyawarah mencari jalan keluar dari suatu masalah. Beliau berusaha sekuat tenaga menjaga masyarakat agar tetap menjadi bangsa yang mulia bukan bangsa yang hina (QS. an-Naml 27/34). Itulah sebabnya dia lebih memilih bersahabat dengan Nabi Sulaiman. Ketika Balqis berkunjung ke Istana Nabi Sulaiman beliau menyaksikan kebesaran Istana Nabi Sulaiman, segera ia sadari betapa kecilnya saya, jika dibanding dengan kerajaan Sulaiman sehingga ia segera menyatakan diri beriman dan menjadi pengikut Nabi Sulaiman. Ucapan Ratu Balqis diabadikan dalam Al-Qur'an, " Ya Tuhanku sesungguhnya kau telah berbuat *dzalim* terhadap diriku sendiri dan saya berserah diri ke pada Allah bersama dengan Sulaiman (QS.an-Naml 27/44). Indahnya kuasa di tangan penguasa yang arif. Negri Sabah ditangan Ratu Balqis disebut sebagai negeri "*Baldatun thayyibatun wa rabbunghafur* (QS Saba 34/15). Namun setelah itu negeri sabah

(Yaman) diluluh lantahkan disebabkan keingkarannya. Kuasa terlalu jauh meninggalkan pesan

Kuasa di Indonesia tidak saja relasinya pada masalah politik tetapi kuasa sudah merambah pada relasi kuasa dengan agama atau relasi kuasa dengan ilmu, bahkan relasi dengan tafsir. Relasi yang terakhir disebut, terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heki Hartono (tesis) yang berjudul, "*Relasi Kuasa dalam Penafsiran Jihad Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI.*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Relasi kuasa pengetahuan mengalir dalam proses produksi, produsen tafsir dan produk tafsir. Pada tahap Produksi relasi kuasa bekerja secara dialektik dan produktif dengan cara : inisiasi, elektasi akomodasi kontestasi, kontroversi negoisasi dan konfromi. Para *mufassir* dalam menafsirkan ayat ayat. Produsen tafsir berupaya mengkonstruksi kehidupan umat agar sejalan dengan agenda pemerintah. Adapun produk tafsir *mufasir* berusaha mengkonstruksi *jihad* yang sesungguhnya (benar) namun konstruksi tersebut tidak seluruhnya netral dan berjalan baik. Hal ini disebabkan masih terdapat disksriminatif dan kecolongan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Relasi kuasa pengetahuan ini bekerja secara sistematik mengawasi relasi kekuasaan yang sedang berjalan dengan upaya penemuan kebenaran, akibatnya melahirkan konsep *jihad* yang tidak ekstrim namun diarahkan kepada konsep jihad yang dapat mengatur kehidupan rakyat atas dalih peningkatan produktivitas. Mekanisme kontrol kuasaa pengetahuan tentang *jihad* juga sarat dengan politik kekuasaan. Kesimpulan yang sama dikemukakan oleh.Tinggal Purwanto, dalam tulisan tentang, "Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia" Dinyatakan bahwa, "Relasi kuasa pengetahuan mengalir dalam kitab tafsir, Para *mufassir* tidak berusaha menafsirkan Al-Qur''an tetapi *mufassir* juga berusaha mengkontruksi kehidupan umat agar sesuai dengan pemerintah. Relasi kuasa pengetahuan ini

berjalan secara sistematik mengawasi hudungan antara kekuasaan dengan kebenaran sehingga melahirkan konstruk kesetaraan yang lebih ditekankan pada pengaturan kehidupan umat yang lebih produktif.

Relasi kuasa dengan *Arung* (kepala negara) sama posisinya dengan relasi kuasa dengan rakyat. Rakyat dalam wawasan lontarak sama pentingnya dengan raja atau *Arung*. "Posisi rakyat tidak ada yang bisa menggantikan jika mereka semua meninggalkan negerinya."

Raja yang tidak lagi peduli pada rakyatnya maka rakyat punya kuasa untuk menurungkan arung secara paksa dari tahtanya (jabatannya). Pada situasi tertentu arung bisa diamuk (*jallo*) didepan halayak yang merasa siri-nya dirusak. Alternatif terakhir rakyat bisa meninggalkan negerinya. Kalau ini terjadi maka rusaklah citra arung dan kerjaannya. Pada sisi lain "apabila rakyat tidak mentaati pemimpinnya dan tidak memenuhi kewajiban terhadap arung akan ditimpa musibah yang berkepanjangan seperti masa Pitu Pariamang yang menimpa masyarakat Bugis di masa lalu. Dalam Latoa sesungguhnya menjamin akan kewajiban menjaga kesejahteraan rakyat (*wujub hizb al-raiyyah*).

Islam Berkemajuan Indonesia Bermartabat

Islam (agama) dan Indonesia (kebangsaan/*nation*) mempunyai sejarah panjang dalam pembentukan negara RI. Mulai dari perjuangan mengusir penjajah sampai pada perumusan dasar negara pembukaan UUD 1945. Terkait pengesahan dasar negara ummat Islam kembali memberikan pengorbanan terbesarnya berupa keikhlasan mencoret kalimat,"Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" Meskipun terdapat pernyataan yang agak aneh dan membuat kalangan Nasionalis Islam galau, "mengapa konstitui yang berdasarkan Islam yang sudah disepakati oleh BPUPKI tidak pernah diberlakukan. Kegalauan itu dicoba oleh Muhammat Hatta untuk dicairkan. Menurut Hatta bahwa, "pada hari proklamasi, sorenya, seorang opsir Jepan dari

AL menyampaikan bahwa wakil Protestan dan Katolik keberatan atas klausul Islami". Dikatakan aneh karena sudah disepakai dalam sidang BPUPKI lalu dibatalkan atas usul seseorang. Sikap keterbukaan dan toleransi umat Islam menggambarkan ketokohan dan kebesaran jiwa pada kelompok nasional Islam pada masa itu. Sudah barang tentu dengan pertimbangan demi NKRI, demi Pancasila. Bisa dibayangkan para tokoh nasional yang berkumpul di Jakarta pada saat itu sudah sepakat, tiba-tiba ada usul satu orang mewakili kawasan Timur Indonesia, "Pak saya keberatan, tolong dihapus kalimat itu," seluruh tokoh bersepakat merubahnya demi NKRI. Dalam konteks sekarang, bagaimana dengan tokoh-tokoh yang ada di Jakarta berkumpul sekiranya ada usul dari salah satu kawasan, "Tolong dihapus *Presidential Threshold* kalau tidak sepertinya saya tidak bisa bersama dengan bapak-bapak dan ibu". Bagaimana kira-kira para tokoh menyikapi sikap itu. Mudah-mudahan tidak dituduh kelompok radikalisme. Pada kasus sebagimana disebutkan di atas umat Islam telah menunjukkan eksistensinya dalam mengawal bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat karena telah mampu memperoklamirkan kemerdekaannya dan mampu merawatnya meskipun mereka berkorban.

Umat Islam (rakyat) dalam negara RI merupakan elemen terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai objek kekuasaan. Rakyat atau umat disebut *tau tebbe*, menjadi elemen vital yang dikaji dalam literasi Bugis Latoa. Umat Islam di satu pihak dan negara RI di pihak lain, mempunyai relasi yang sangat kuat, bahkan RI tidak akan terwujud tanpa umat Islam. Kamaruddin Hidayat melihat umat Islam mempunyai peluang yang paling besar dalam memberikan kontribusi memajukan bangsa dan negara. Dikatakan kalau bangsa ini tidak maju baik kultur, moral maupun politik sudah dapat dipastikan ada salah dalam tubuh umat Islam. Kata Islam di sini dapat diwakili NU dan Muhammadiyah. Gerakan sosial di Indonesia

disponsori oleh Muhammadiyah (1912) dan NU (1926). Kedua ormas ini ikut membidangi lahirnya NKRI, termasuk lahirnya Pancasila. Jadi baik Muhammadiyah maupun NU mempunyai konsep kebangsaan yang sama.

Era reformasi ini, umat Islam diperhadapkan dengan peroblem penemuan jati diri, di tengah benturan klaim ideologi Islam, oleh MUI disebut,"*Tatarruf Yamini* (ekstrim kanan) dan *Tatarruf Yasari* (ekstrim kiri)." Menurut MUI yang dimaksud *Tatarruf Yamini* adalah kelompok umat Islam yang intoleran, sangat *rigid* pemahaman keagamaannya, menganut paham *takfiri*. (siapa yang tidak sepaham dengannya dianggap kafir). Sedangkan yang dimaksud, "*Tatarruf Yasari* adalah mereka yang berpaham liberal. Kelompok Islam ektrim itu melahirkan kelompok radikal dan bahkan berujung pada terorisme. Kondisi ini ikut memperparah situasi internal umat Islam yang menurut Kamaruddin hidayat, "Islam hari ini terpecah ke dalam lorong-lorong sempit yang dipagari oleh tembok sukuisme, dinatiisme, partaisme, dan mazhabisme. Menyikapi konstalasi wacana pemikiran keislaman tersebut, sekitar tahun 2015 muncul wacana keislaman di Indonesia yakni: Islam Nusantara, Islam berkemajuan, "Islam *wasatiyah.* Bahkan sebelumnya sudah berkembang istilah Islam *hadari*" . Dua Istilah yang terakhir merupakan barang impor dari Malaysia. Kementerian Agama RI mempopulerkan istilah moderasi beragama. Di PTKIN sedang disosialisasikan moderasi beragama.

Konsep Islam *wasatiyah* muncul sebagai alternatif dari *tatarruf yamini* dan *tatarruf yasari*. Menurut MUI *tatarruf yamini* tidak dapat digolongkan keberagaman yang ideal. MUI dengan tegas mengatakan kedua kelompok ekstrim tersebut ,"Berlawanan secara diametral dengan keindonesiaan." KH. Abdul Rahman Wahid menawarkan konsep universalisme dan toleransi yang sangat relevan di tengah keberagaman. Konsep Islam *wasatiyah* mengajarkan tidak berlaku ekstrim, tidak memandang enteng urusan agama, tidak bersikap *ghuluw* termasuk

dalam beragama. Karakter Islam *wasatiyah* dalam pandangan MUI memiliki karakter yakni: (1). *Tawastu*, tidak berlebihan (*ifrat*), (2). *Tawazun* atau keseimbangan,(3), *I'tidal* tegak lurus proporsional dalam melaksanakan hak dan kewajiban,(4). *Tasamuh*, mengakui dan toleransi terhadap pluralitas,(5). *Syura* mengedepankan musyawarah, (6). *Islah* reformatif dalam menacapai keadaan yang lebih baik, (7). *Awlawiyyah* mengidentifikasi yang prioritas, (8). *Tatawwur wa ibtikar* memilki semangat berkemajuan,(9). *Tahaddur* menjunjung tinggi etika dalam kehidupan dan pradaban.

Karakter Islam *wasatiya* menurut Din Syamsuddin, "Memiliki konvergensi dengan pandangan Muhammadiyah yang menekankan pada signifikansi *tauhid* dalam Islam. *Tauhid* tidak sekedar diimani melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan. *Tauhid* sebagai pandangan hidup berlandaskan kesatuan penciptaan, (*unity of creation*), kesatuan manusia (*unity ofmankind*), kesatuan tuntunan hidup (*unity of guidance*). Lebih lanjut Din Mengemukakan bahwa, "Islam *wasatiyah* memiliki relevansi dengan perkembangan dunia Muslim kontemporer sekaligus melengkapi tema dua muktamar ormas Islam, NU dan Muhammadiyah."

Kemajuan umat Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran ormas NU dan Muhammadiyah. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa corak Islam di Indonesia Menurut KH Hasyim Muzadi hanya ada dua, kalau tidak NU pasti Muhammadiyah. Hanya saja pada masa itu masih terdapat sekat diantara keduanya, menurut KH Hasyim Muzadi mau bisanan saja susah. Argumnetasi tersebut tampak sejalan dengan pandangan Azyu Mardi Azra, yang mengatakan dalam konteks Indonseia, Islam terdiri dari tiga ajaran yakni, "Teologi, aliran *Asyariyah* dan *Maturidiyah, Fiqh* menganut *mazhab Syafii*, *Tasawuf* menganut *Tasawuf* Imam al-Gazali." . Konsep Islam *wasatiyah* merupakan bagian integral dari Islam *ahlusunnah waljamaah*. Dalam pandangan Yusuf

Qardhawi (ulama kontemporer) sesuai dengan karakter Islam yang sifatnya, "*Rabbaniyah* (bersumber dari Tuhan), *Insaniyah* (*ersesuain* dengan *fitrarhmanusia*), *wasatiyah* (moderat memilih jalan tengah), *waqiiyah* (kontekstual)."

Kesimpulan

1. Pesan yang terdapat kitab lontarak sebagai kearifan Lokal dapat menjadi nasihat untuk menata kuasa lebih maju lebih progresif, lebih bedab, berkeadilan, berprikemanusiaan dan berketuhanan
2. Kuasa yang menjauh dari pesan dapat berakibat pada timbulnya sikap anti pati, sikap konfrontasi, sikap pembangkangan, sikap penantangan. Apa bila terlalu jauh meningglkan pesan semisal, biasa dusta, menyalahi janji, maka bisa berdampak pada tuntutan kuasa untuk mundur (*palessoi rajae*) ,bisa juga rakyat mengamuk demontrasi yang anarki (*jalloi rajae*). Alternatif terakhir tinggalkan negara (*wilai kampongnge*). Penomena alam seperti banjir, longsor, putting beliung, gagal panen,wabah penyakit dalam literatur *Lontarak* diyakini sebagai teguran kepada penguasa. Bahkan pada tingkat tertentu diyakini Tuhan sedang marah.
3. Dalam rangka menjaga jati diri Islam untuk mendorong kemajuan Islam maka lahir konsep Islam *Wasatiyah*, Islam berkemjuan, Islam Nusantara, dan moderasi beragama Kehadiran lima konsep tersebut sebagai alternatif dari *Tatarruf Yamini* dan *Tatarruf Yasari*. Islam *wasatiyah* ditangan MUI, Islam berkemajuan di tangan Muhammadiyah, Islam Nusantara di tangan NU, Moderasi beragama di tangan Kemenag RI sepakat melawan *Tatarruf Yamini* dan *Tatarruf Yasari*. Jadi dapat dikatakan sepanjang Muhammadiyah ada, NU ada, Kemenag dan MUI ada maka Islam Indonesia akan tetap menganut konsep *wasatiyah* (Islam *rahmatan lilalamin*). Dengan demikian bangsa Indonesia sebagai negara

mayoritas muslim tetap kokoh sebagai bangsa yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Joko Tri Haryanto, Relasi Agama dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam, JurnalSmart (Study Masyarakat, Religi dan Tradis)1 (1) 2015
2. Latoa (*ianaE sure puada adaengngi Bisyrran Latoa*).
3. Awal Muqisth. Lontara Latoa: Transformasi Politik Islam di Tanah Bugis (Bag. 1).tgl 21 September 2020
4. Awal Muqsith, Negara Latoa Tinajuan Bernegara Masyarakat Bugis dalam Lontara Latoa, Jurnal Politik Profetik Volume 8, No. 1 Tahun 2020
5. Mattalitti, M. Arief, dkk,. Pappaseng Tomatoa. Ujung Pandang: Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang . 1985
6. F.Fatiyah H. Cangara,Pesan Komunikasi Budaya Dalam Pembentukan Karakter Perempuan Bugis di Sulawesi Selatan, Kareba, Jurnal Ilmu Komunikasi, 2017
7. Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995),
8. Andi Zainal Abidin, "*The Emergence of Early Kingdom in South Sulawesi*" SoutheasAsian, Vol. 20, No. 4 (1983),
9. Andi Rasdiyanah, Sistem Pangngaderreng dalam Latoa dengan Sistem Syariat Islam (Wacana Integrasi Sistemik)
10. Muhammad ibn Abdul Wahab, al-Ushulal-al- Tsalatsah (Darul Haq, 1420.H), h.6
11. Komaruddin Hidayat, Imajinasi Islam, Sebuah Rekonstruksi Islam Masa Depan (Jakarta: Alvabet, 2021)
12. Appe Hamonangan Hutauruk, Filosofi Negara Kesejahteraan yang dirumuskan Dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Soliustisio: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 3,Nomor 1,Juni 2021,h.288.
13. Husodo,S,Y, Menuju Welfare State, (Jakarta, Baris Baru .2009).
14. Jane Dammen MC Auliffe (ed),The Encyclopaedia of the Qur'an (Leiden Boston @ Cologne: Brill, 2001)pp.188.
15. Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adzim juz 19, Terjemhanan Bahrul Abu Bakar (Bandung Sinar Baru Algensindo,2004),h. 281.
16. Heki Hartono, Relasi Kusa Dalam Penafsiran Jihad Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama, RI. (Tesis) UIN Sunan Kalijaga,2019.
17. Tinggal Purwanto, "Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia,"Plastren Jurnal Studi Gender, Juni 2019. Volume 12 Nomor 1.
18. Amrusi Jailani, Perogalakan Politik Antara tokoh Muslim dan Nasinalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia, Karsa, Journal of Sosial and Islamic Culture 2014.
19. Imam Amrusi Jailani, Perogalakan Politik Antara tokoh Muslimdan dan Nasinalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia, Karsa, Journal of Sosial and Islamic Culture 2014.
20. Muhammad Ainu Najib, Ahmad Khairul Fatah, Islam Wasatiyah dan Kontetasi Wacana Moratisme Islam Di Indonesia, Jurnal Teologia, Volume 31 Nomor 1, 1 Juni 2021
21. Fata, "Liberalisme Islam di Indonesia: Gagasan dan Tanggapan Tentang Pluralisme Agama."
22. MUI Jelaskan Beginilah Islam Wasathiyah," Kiblat, 2015, https://www.kiblat. net/2015/08/27/mui-jelaskan-praktik-islam-wasathiyah/.
23. M Amin Rais, Cakrawala Islam (Bandung: Mizan, 1987),

24. Azyumardi Azra, “Kembali Ke Jati Diri (2),” Republika 2, 24 November 2016
25. Yusuf Qardhawi, Karakteristik Islam: Kajian Analitik, ed. oleh Rofi’ Munawar dan Tajuddin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).
26. Jane Dammen MC Auliffe (ed), The Encyclopaedia of the Qur’an (Leiden Boston @ Cologne: Brill, 2001) pp.188.
27. Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adzim juz 19, Terjemhanan Bahrul Abu Bakar (Bandung Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 281.
28. Heki Hartono, Relasi Kusa Dalam Penafsiran Jihad Tafsir al-Qur’an Tematik Kementerian Agama, RI. (Tesis) UIN Sunan Kalijaga,2019
29. Tinggal Purwanto, “Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia,”Plastren JurnalStudi Gender,Juni2019.Volume 12 Nomor1 h.30-63,
30. Mattulada, 1995, Op.Cit., h.169
31. Awal Muqisth. Lontara Latoa: Transformasi Politik Islam di Tanah Bugis (Bag. 1).tgl 21 September 2020,h.148
32. Imam Amrusi Jailani, Pergolakan Politik Antara tokoh Muslimdan dan Nasinalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia, Karsa, Journal of Sosial and Islamic Culture 2014.
33. Imam Amrusi Jailani, Perogalakan Politik Antara tokoh Muslim dan dan Nasinalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia, Karsa, Journal of Sosial and Islamic Culture 2014.
34. Muhammad Ainu Najib, Ahmad Khairul Fatah, Islam Wasatiyah dan Kontetasi Wacana Moratisme Islam Di Indonesia, Jurnal Teologia, Volume 31 Nomor 1,1 Juni 2021, h.122
35. Lihat Fata, “Liberalisme Islam di Indonesia: Gagasan dan

Tanggapan Tentang Pluralisme Agama.". dan Ainun Najib h. 123
36. Muhammad Ainu Najib, Ahmad Khairul Fatah, Islam Wasatiyah dan Kontetasi Wacana Moratisme Islam Di Indonesia, Jurnal Teologia, Volume 31 Nomor 1,1 Juni2021,h.123
37. MUI Jelaskan Beginilah Islam Wasathiyah," Kiblat, 2015, https://www.kiblat.net/2015/08/27/mui-jelaskan-praktik-islam-wasathiyah/.
38. Muhammad Ainu Najib, Ahmad Khairul Fatah, Islam Wasatiyah dan Kontetasi Wacana Moratisme Islam Di Indonesia, Jurnal Teologia, Volume 31 Nomor 1,1 Juni 2021, h.125
39. M Amin Rais, Cakrawala Islam (Bandung: Mizan, 1987), 18
40. Azyumardi Azra, "Kembali Ke Jati Diri (2)," Republika 2, 24 November 2016
41. Lihat Yusuf Qardhawi, Karakteristik Islam: Kajian Analitik, ed. oleh Rofi' Munawar dan Tajuddin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

Bab 8

MENGOKOHKAN PERADABAN BANGSA INDONESIA MELALUI PESAN TRADISI SASTRA LISAN BUGIS (untuk Membangun Indonesia Bermartabat)

Amaluddin[1]

Pendahuluan

Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan yang dikenal memiliki banyak warisan budaya yang adiluhung sebagai salah satu kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah mendunia. Salah satu sangat terkenal adalah epik La Galigo sebagai karya sastra monumental yang mendunia. Karya ini sangat panjang, lebih panjang dari epik India, Mahabarata, dan Ramayana. Juga lebih panjang daripada Epik Yunani, Homerus. Namun demikian, popularitas La Galigo di tanah air masih kurang dibandingkan epik India. Padahal bagi sebagian masyarakat Bugis yang menganut agama lokal, atau kepercayaan, posisi La Galigo sebenarnya bisa dikatakan sebagai kitab suci mereka/sumber ajaran kepercayaan mereka. Warisan budaya Bugis Epik La Galigo memiliki pesan yang sangat sarat dengan makna kehidupan manusia dan ajaran moralitas. Diperkirakan terdiri dari 6.000 halaman folio atau 300.000 baris puisi. Bahkan UNESCO menggarisbawahi sebagai produk karya sastra yang paling produktif di dunia. Merujuk pendapat Prof. Nurhayati Rahman yang menukil pendapat Kern dan Sirtjo Koolhof dikatakan bahwa, La Galigo ialah

[1]Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare; Email: amaluddin1965@gmail.com; amaluddin1965@yahoo.co.id

sebagai karya terpanjang di dunia. Lebih panjang daripada epik India, yaitu Mahabarata dan Ramayana; juga lebih panjang daripada epik Yunani, yaitu Homerus.

Mencermati karya tersebut, bisa dikatakan bahwa peradaban masyarakat Bugis pada masa lalu sangat terkemuka. Masyarakat Bugis pada masa lalu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi bingkai moralitas dalam menjalankan aktivitas mereka, bahkan sampai hari ini masih terjaga dengan baik. Salah satunya dalam hal membangun tatanan kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Menurut Badewi (2015), Kearifan yang terdapat dalam kebudayaan Bugis merupakan salah satu kekayaan budaya/ kemanusiaan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kearifan lokal tersebut telah diwariskan secara turun-temurun, baik melalui tradisi lisan maupun tulisan yang telah lama dikenal oleh masyakatar Bugis dalam bentuk *folklore* (Badewi, 2015:80).

Nilai-nilai Kearifan lokal sebagai salah satu warisan budaya, tentu sangat penting diejawantahkan untuk membangun peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Menurut Alfian (dalam Suwardani, 2020) bahwa warisan budaya sebagai kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu Setiyadi (2012:75) dalam Suwardani, (2020) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Lebih lanjut, Naritoom (Wagiran, 2009 dalam Suwardani, 2020) mendefinisikan *local wisdom*, sebagai berkut: "*Local wisdom is the knowledge that discovered*

or acquired by lokal people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation". Dari definisi tersebut, Suwardani menjelaskan bahwa, ada beberapa konsep yang dapat telaah, misalnya: (1) kearifan lokal merupakan sebuah pengalaman panjang dalam perkembangan suatu masyarakat/bangsa, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat sangat bergantung pada lingkungan pemilik budaya tersebut; dan (3) kearifan lokal di suatu tempat itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Karena itu, Wagiran (2009) mengatakan bahwa konsep demikian juga memberikan gambaran bahwa kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya (dalam Suwardani, 2020), yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Era globalisasi sekarang ini di tengah era revolusi industri 4.0 (*Internet of Things*) diwarnai digitalisasi/informasi dan komunikasi, terutama peran media sosial sangat besar memberi dampak dalam kehidupan suatu bangsa, lebih khusus bangsa Indonesia. Menurut Rahayu, Bangsa Indonesia akan dihadapkan pada kekuatan budaya raksasa yang dapat menjungkirbalikkan norma budaya Indonesia yang esensial, misalnya jika dibiarkan dapat menggerus nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu kekayaan budaya yang sangat penting untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa apabila dicermati, fenomena yang ada di masyarakat memperlihatkan adanya kelatahan budaya dalam berbagai kegiatan. Hal ini mengakibatkan segala kegiatan yang dapat bernilai komoditi dipandang sah-sah saja. Gaya hidup hedonisme menjadi fenomena yang menonjol dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari. Dampaknya, fenomena ini dapat mengikis nilai-nilai sosial yang ada, dengan anggapan bahwa pola perilaku yang selama ini ada dan berkembang di masyarakat sudah menjadi hal yang biasa sebagai salah satu bentuk budaya baru masyarakat (Rahayu, 2018:3)

Menurut Amaluddin (2014) Kemajuan suatu peradaban dalam dunia modern, dalam perspektif "kemanusian" tidaklah tepat hanya menggunakan parameter kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semata sebagai ukuran yang bayak dirujuk manusia untuk menandai peradaban yang modern, sehingga mengeyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam padangan Amaluddin, posisi ilmu pengetahuan dan teknologi hanyalah merupakan bagian dari tatanan peradaban manusia yang dianggap dapat memberikan "kepuasan hidup" dalam dimensi kebendaan/kedunian. Padahal, pada dimensi ini manusia tidak akan pernah menemukan kepuasan dari apa yang mereka usahakan dan dapatkan dari aktivitas mereka. Sejatinya, tidak ada kata "puas" jika aspek ini terpenuhi, bahkan terasa semakin bertambah, semakin terasa kurang. Oleh itu, pada aspek inilah terjadi permasalahan besar dan berkepanjangan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka salah satu pertanyaan yang perlu diajukan, bagaimana membangun bangsa yang bertabat dengan peradaban yang kokoh berdasarkan kearifan lokal tradisi lisan dalam masyarakat Bugis?

Dalam dunia modern, ukuran kemajuan/keberhasilan suatu bangsa dapat dilihat dari kemajuan peradaban yang bersifat material/ kebendaaan. Demikian juga "terkadang" bangsa yang "bermartabat" dalam pandangan modern, dapat dilihat dari kemajuan pembangunan fisik, padahal berbicara martabat, tidaklah cukup dengan pendekatan kebendaan/budaya materi, tetapi esensi yang pokok dari sebuah martabat bangsa adalah ketika hal-hal yang bersifat fundamental dalam kehidupan manusia mendapat tempat yang "terhormat". Menurut Amaluddin

(2014). Untuk mencapai kemajuan itu, terkadang bangsa yang satu dengan bangsa yang lain dan manusia yang satu dengan manusia yang lain kadang-kadang harus "menciptakan" konflik dan bahkan perang serta segala macam cara maupun strategi untuk menguasai dan menindas satu sama lain dalam hegemoni kehidupan. Lebih lanjut Amaluddin mengatakan, dengan parameter keduniaan, bahkan akan menimbulkan sifat-sifat kerakusan dan keserakahan dalam segala bidang kehidupan. Bangsa dan manusianya tidak lagi menghargai nilai-nilai kemanusian yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia yaitu hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hanya untuk satu tujuan, yaitu ingin memenuhi nafsu "keduniaan". Untuk menghindari fenomena tersebut, maka dunia modern dengan peradaban yang maju harus mengutamakan pembangunan dalam perspektif "kemanusiaan." Dalam tradisi lisan Bugis, nilai-nilai tersebut sangat kuat mengikat setiap orang dalam segala aktivitasnya. Oleh sebab itu, Amaluddin berpendapat bahwa pembangunan peradaban manusia modern dalam bingkai kemanusian harus diorientasi¬kan kepada dua hal, yaitu pertama, mengem¬bang¬kan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menghasilkan peradaban materi untuk menjamin kebutuhan hidup manusia, kedua membangun peradaban bangsa yang dapat meningkatkan martabat suatu bangsa yang di dalamnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Inilah nilai lebih dari sebuah bangsa dan negara yang berkeadaban. Karena, negara yang modern dari sisi peradaban materiil belum tentu bisa menjadi negara yang bermartabat. Dengan demikian, martabat sebuah bangsa harus pula dilihat dari sisi peradaban non-materi yang equal. Begitu urgentnya, maka salah satu orientasi dalam revolusi *industry* 5.0, adalah bagaimana mengoptimalkan relasi manusia dengan teknologi, sehingga bagaimanpun kemajuan teknologi, manusia tetap mejadi sentral dalam kehidupan sebuah bangsa.

Menurut Amaluddin (2014) bahwa bangsa yang maju dapat

dilihat dari kemapanan peradaban yang dihasilkan dan dikelola dengan baik untuk memberi kehidupan yang mensejaterakan baik lahir, maupun batin. Itulah esensi sebuah karya perdaban yang bermartabat. Jika membahas tentang tatanan peradaban akan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya dilihat dari aspek fisik material sebagai produk budaya, misalnya kehidupan ekonomi suatu bangsa, akan tetapi juga dari non-fisik (inilah yang sesungguhnya sangat esensial seperti nilai-nilai, tatanan kehidupan bermasyarakat, norma, adat istiadat, seni budaya, sebagai hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia modern). Dengan demikian, dibutuhkan orientasi baru atau "cara pandang dunia modern" dari seluruh penduduk bumi, terutama yang memegang peran penting dan strategis pada suatu negara agar memaknai secara hakiki sebuah negara dalam tatanan peradaban dunia yang menjadi "kunci" kemaslahatan manusia.

Lebih lanjut Amaluddin (2014) mengatakan bahwa kemajuan suatu negara atau bangsa, bila ditinjau dari kemajuan peradabannya, maka ada negara yang bisa dikategorikan sebagai negara yang maju, berkembang, sedang berkembang, maupun negara terkebelakang/ negara miskin. Dalam pengkategorian di atas, harus dipahami bahwa, kecenderungan dalam menata/membangun suatu negara tanpa memberi perhatian pada dimensi kemanusiaan, akan menjadi "ancaman" serius kehidupan manusia di seluruh dunia karena akan menjadi peluang terjadinya malapetaka dan tragedi "kemanusiaan" seperti yang terjadi di berbagai negara, seperti Palestina, Irak, Myanmar pada Rohingya dan lain-lain, termasuk yang yang sering terjadi di Indonesia. Karena sejatinya, negara yang bermartabat dengan peradaban yang bermartabat pula, selalu menempatkan hal yang esensial yaitu menjunjung tinggi nilai "kemanusian" di atas segala nilai yang berlaku dalam masyarakat, karena hak-hak fundamental kemanusiaan adalah pemberian dari Sang Pencipta, termasuk kebebasan menjalankan keyakinannya yang

dilindungi undang-undang.

Harus diakui bahwa salah satu harta "karun" yang dimiliki dunia ini adalah pesan yang terkandung dalam tradisi Sastra Lisan masyarakat Bugis yang bisa menjadi ajaran/patronasi moral yang sangat komprehensif untuk menata kehidupan yang lebih bermartabat. Menurut Amaluddin (2009:12; 2010:53; 2012:11; 2012:12), Tradisi sastra lisan merupakan warisan budaya yang sangat luhur dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tatanan negara yang bermartabat dapat dicapai dengan merektualisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai dari kearifan lokal tersebut.

Tradisi Sastra Lisan sebagai Warisan Budaya yang Bermartabat

Masyarakat Bugis sebagai pemilik Budaya, memandang bahwa tradisi sastra lisan adalah salah satu warisan budaya yang sangat tinggi nilainya dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Bugis. Tentu tradisi Sastra Lisan banyak ditemui di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, lebih khusus dalam masyarakat Bugis. Kelahiran tradisi sastra lisan dapat dikatakan sebagai awal dari sebuah tatanan budaya yang konstruktif walaupun masih dianggap primitif dan cerminan masyarakat yang hidup di dalamnya, sehingga wajar jika sastra lisan menempati relung hati dari setiap masyarakat pemilik sastra lisan tersebut. Bahkan sastra lisan dapat menjadi cermin dari "patron" kehidupan mereka dalam bertingkah laku dan berinteraksi untuk membangun hubungan yang bersifat vertikal dengan "pemilik/pengendali" alam dan hubungan horisontal dengan sesama manusia, sehingga hubungan itu menjadi harmonis. Sastra lisan kaya dengan ajaran moral, bahkan nilai dari sastra lisan bisa menjadi rujukan moralitas yang baik yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut. Oleh sebab itu, sastra lisan dapat memberi kontribusi dalam membangun bangsa yang bermartabat, jika warisan ini di gali, dipelihara, dibina, dan dikembangkan, serta

diejawantahkan dalam dunia "seni" dan kesusastraan. Menurut Simanullang (2010), peradaban-peradaban dari berbagai bangsa di dunia tidak dapat dilepaskan dari sastra, karena sastra merupakan cermin sikap pada khalayak ramai/pemilik sastra, termasuk di dalamnya adalah sastra lisan.

Membangun Peradaban Dunia yang Bermartabat

Membangun sebuah peradaban dunia yang bermartabat adalah cita-cita/agenda besar yang harus dicapai oleh semua umat manusia, terlebih oleh pemangku kepentingan. Membangun peradaban tersebut dalam dimensi global, harus dimulai dari membangun peradaban suatu bangsa/negara. Karena setiap negara memiliki kedaulatannya sendiri. Oleh sebab itu, setiap negara harus menjadikannya sebagai agenda pembangunan. Harus dipahami bahwa bangsa yang memiliki kekuatan besar (*super power*), bukanlah jaminan sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat. Karena peradaban yang bermartabat bukan hanya diukur dari besarnya kekuatan yang dimiliki suatu bangsa, baik itu kekuatan ekonomi yang mampu mendominasi bangsa lain, maupun kekuatan militer dan kekuatan lainnya sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang dimiliki dicapai. Tetapi pernyataan dalam direktori FIP (file.upi. edu/Direktori/FIP) bahwa bangsa yang maju dan modern adalah bangsa yang unggul peradabannya merupakan sebuah fakta empiris. Karena peradaban adalah bentuk budaya paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk lainnya. Peradaban mencerminkan kualitas kehidupan manusia dalam masyarakat. Kualitasnya diukur dari kehidupan manusia, yaitu ketentraman (*human security*), kedamaian (*peacefull*), keadilan (*justice*), kesejahteraan (*welfare*) yang merata.

Peradaban Dunia yang Bermartabat dalam Perspektif Tradisi Sastra Lisan

Ukuran dari sebuah peradaban dunia yang bermartabat bersifat universal dalam perspektif kemanusiaan adalah Negara harus mengedepankan hak-hak fundamental kemanusiaan dalam membangun peradabannya, yaitu menempatkan aspek ketentraman (*human security*), 2) kedamaian (*peacefull*), 3) keadilan (*justice*), dan 4) kesejahteraan (*welfare*) sebagai pilar utama dan "roh" setiap pembangunan peradaban bangsa. Inilah sesungguhnya yang harus dikedepankan oleh para pemimpin dunia untuk membangun negara yang bermartabat.

Ketentraman (*human security*) atau kedamaian (*peacefull*), dalam tradisi Sastra Lisan disebut *asalêwangêng*. Menurut Amaluddin (2012:19; 2009:75; 2009:193; 2010:57; 2012:102) perwujudan dari diksi *asalêwangêng* dalam sastra lisan adalah salah satu ciri negeri yang damai apabila masyarakatnya hidup rukun dan saling menyayangi satu dengan yang lain. *Asalêwangêng* harus menjadi "roh" dalam membangun hubungan yang harmonis antara sesama makhluk bumi di dunia ini tanpa memandang kelas sosial, suku, bangsa, agama, latar belakang budaya dan keberagaman lainnya. *Asalêwangêng* akan terwujud jika setiap orang mau melepaskan sifat-sifat yang bertentangan dengan prinsif kemanusiaan, misalnya ketidakadilan, keserakahan, penindasan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Karena sejatinya, manusia adalah makhluk dengan *fitra* penyayang. Jika masyarakat dunia hidup rukun, maka kehidupan perekonomian dalam masyarakat global bisa berjalan lancar, karena masyarakat dapat beraktivitas secara leluasa dan aman tanpa batas-batas wilayah atau negara. Dengan demikian akan tercipta kesejahteraan (*welfare*) seluruh masyarakat dunia. Sebaliknya, jika sebuah negeri tidak bisa hidup rukun, maka akan muncul rasa ketakutan kepada setiap orang. Kewajiban memelihara kerukunan hidup *asalêwangêng*, tentu bukan hanya tugas pemerintah dan tokoh-

tokoh yang ada dalam suatu masyarakat, tetapi menjadi kewajiban semua orang untuk menciptakan kerukunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta masyarakat dunia.

Berdasarkan uraian Amaluddin (2014), pesan tradisi sastra lisan dapat berupa perintah untuk menjaga dan memelihara kerukunan hidup *asalêwangêng* dalam suatu masyarakat, dapat dikutip dalam teks tradisi sastra lisan Bugis di bawah ini.

> (1) *Nampu'ko ase sisebbu, tunuo tedong siratu', muanrei tudattudang aja' musijellij-jelling sigeso' sipottokmu namarukka bawengnge nauni ceda'-ceda' Langalo Lapaleccengi.*
>
> Terjemahan
> Tumbuklah padi seribu, bakarlah kerbau seratus lalu engkau makan bersama. Jangan saling mengerling, jangan sampai bermusuhan, saling membantulah sampai ribut burung beo dan berisik burung cedak-cedak. *langalo lapaleccengi.*

Kutipan teks tradisi sastra lisan (1) mengekspresikan kebersamaan dalam suatu masyarakat demi menjaga kerukunan hidup dengan cara; saling menghargai (*siakkasireseng*) antara satu dengan yang lain, tidak saling mengerlingkan mata (*sijelling-jelling mata*) atau saling memojokkan, dan menjauhi sifat-sifat yang dapat memancing munculnya permusuhan atau dendam (*ampe-ampe maja'*).

Salah satu simbol yang digunakan untuk mengungkapkan ekspresi kepada orang yang dapat menyambungkan kembali persaudaraan (silaturrahim) yang pernah terputus, yaitu paccolli loloengngi aju marakkoe, artinya orang dapat menumbuhkan kembali kayu yang sudah kering. Dengan terhubungnya kembali tali silaturrahim

antara orang yang pernah berselisih paham dalam masyarakat, maka kerukunan hidup akan terwujud. Perhatikan kutipan sastra lisan berikut.

> *(2) Rennu temaka-makaku padiyaneng natettongi ati mappesona. Iyasia minasakku paccolli loloengngi aju marakkoe, Iyasia minasakku pattanna waliengngi as-simelle-engnge. Iyasia minasaku parappe sikke engngi urenna bangkoe. Pesona temmagangkaku iyapa nakkewiring kameppi linoe. Wennang pute mappesona ejae mami-nasa bali ipupureng. Wennang pute mappesona rinyili sala-sala bali anggangkana.*
>
> Terjemahan
> Aku sangat gembira memiliki landasan berdiri hati tawakal. Yang kurencanakan yang memekarkan kayu kering. Menurut cita-citaku yang dapat menyatukan keakraban kami. Mendamparkan bagaikan penjepit akar buluh. Pasrahku tak berkesudahan nanti berakhir setelah dunia kiamat. Benang putih memerakan diri yang merah berharap menjadi lawan saling berteman. Benang putih menyerahkan diri dilihat salah-salah lawan akhirnya.

Kutipan teks sastra lisan (2) menggambarkan keinginan seseorang yang sangat besar untuk memperbaiki persaudaraan dalam satu masyarakat yang pernah terputus karena diakibatkan oleh kesalahpahaman. Orang tersebut mengamalkan salah satu ajaran agama, yaitu menyambung kembali silaturrahim (tali bersaudaraan dan tali kasih sayang) yang renggang. Dalam ajaran Islam, salah satu perintah agama dalam kaitannya dengan persaudaraan sesama muslim dan non-muslim adalah berupaya mendamaikan orang yang berselisih di antara

kalian. Betapa indah-nya hidup ini, jika semua penduduk bumi saling menyayangi, mengasihi, melindungi, dan menghilangkan sifat-sifat permusuhan di muka bumi ini, sehingga hidup ini menjadi tenteram dan damai di atas heterogenitas kehidupan. Oleh sebab itu, kedamaian (*peacefull*) hidup di dunia menjadi cita-cita semua penduduk bumi, tanpa terkecuali. Begitu pentingnya diksi *asalêwangêng*, bahkan makhluk selain manusiapun mendambakan kedamaaian atau ketentraman. Konstruksi Peradaban yang dibangun di atas landasan perdamaian dunia akan menjadi kekuatan yang tak ternilai melebihi harta/materi yang dimiliki sebagai aset suatu negara. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) hanya akan memberi manfaat dan nilai jika masyarakat dunia dalam kondisi damai dan tentram. Jadi diksi "damai" adalah harta manusia di muka bumi ini yang tak terhingga. Perwujudan diksi *asalêwangêng* (tentram dan damai) dalam kehidupan masyarakat dunia menjadi ciri dan ukuran sebuah peradaban yang bermartabat, karena esensi/hakikat filosofi akan kebutuhan kehidupan manusia dapat diwujudkan dalam kenyataan. Inilah yang disebut sebagai perwujudan peradaban dunia yang modern dalam dimensi "kemanusiaan" yang banyak terdapat dalam teks SLB.

Asalêwangêng (ketentraman dan kedamaian), menurut Amaluddin (2009:368; 2012:15) dapat ditumbuhkan jika lahir sikap saling menghormati dan menghargai antara sesama manusia di muka bumi ini. *Asalêwangêng* bukan hanya ada dalam realitas kehidupan manusia Bugis, sebagai salah satu filosofi kehidupan mereka, namun hal tersebut dapat juga ditemui dalam teks SLB sebagai media ekspresi manusia Bugis untuk menggambarkan peradaban hidup yang bermartabat, berikut.

(3) *Iyaro teppaja musappa,*
Sabbara' mappesonae,

mamase na malabo.
Kampong makkalitutee
padanna ri pancaji ri lino
Takki siwunu-wunu,
(alla) Pakkarajai tau we.

Terjemahan
Yang tak pernah berhenti kau cari,
yang sabar dan tawakal,
pemurah atau dermawan,
kampung yang menyayangi
sesama makhluk bumi,
tak saling membunuh dan
saling menghormati sesama manusia.

Berdasarkan kutipan teks sastra lisan (3) mendeskripsikan tentang keinginan seorang manusia Bugis dalam kehidupannya agar dapat bertemu dengan sosok-sosok manusia yang sangat didambakan atau dicita-citakan. Sosok yang dicari adalah manusia yang sabar, tawakal, dermawan, saling menyayangi sesama makhluk bumi, tidak suka membunuh (karena salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental di dunia ini adalah hak untuk hidup dan mendapatkan penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia serta perlindungan dari rasa aman dalam menjalankan aktivitas hidupnya sehari-hari. Inilah salah satu pesan moral yang sangat esensi dalam sastra lisan yaitu *takki siwunu-wunu* 'tak saling membunuh' untuk mewujudkan peradaban dunia yang bermartabat dalam skala global. Begitu fundamentalnya, sehingga menjadi salah satu isi dari deklarasi hak asasi manusia universal (Deklarasi HAM PBB, Pasal 3 dalam May, 2001:35). Masyarakat Bugis sangat menghargai hak fundamental

tersebut, sebagai salah satu wujud penegakan budaya *siri*' dan *pêsse*. Penghargaan terhadap hak-hak fundamental tersebut menjadi kunci utama bagi terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang diimpikan bagi seluruh masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Bugis (Amaluddin, 2009:175; 2012:15) dan selalu menghormati sesamanya tanpa memandang latar belakang seseorang. Sosok yang paripurna seperti disebutkan di atas sangat sulit ditemukan dalam satu pribadi yang menyatu dalam diri manusia Bugis, namun telah dipaparkan dalam syair sastra lisan. Hal tersebut menunjukkan bahwa alam pikiran manusia Bugis sudah memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan pribadi seperti disebut dalam syair sastra lisan. Pribadi yang merindukan dan sangat mendambakan kehidupan yang harmonis dalam pergumulan masyarakat global, lebih khusus masyarakat Bugis sebagai pemilik sastra lisan. Karena sastra lisan merupakan cerminan kehidupan masyarakat pada masa lalu, maka sastra lisan dapat menjadi rujukan moral budaya yang bermartabat.

Pesan moral lainnya dalam sastra lisan yang terkait dengan hak-hak fundamental dalam kehidupan manusia adalah tentang pentingnya penegakan keadilan (*justice*) untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan dunia yang bermartabat. Diksi keadilan dalam sastra lisan disebut *adele'* banyak ditemui dalam teks SLB, salah satunya pada contoh berikut ini:

> (4) *Teyawa' nalurêng Cakko lebu bulu ammo aja' tatakkalupa Pole riempenna rituppu bulu' matanre, nasaba' decêng isappaede. Narilolongêng Tenri senge' ro matanre Sagala rimunriye adele' napapole.* (Amaluddin, 2009:192; 2012:17).

Terjemahan
Aku tidak mau dimuat kalau engkau sampai di bawah, jangan lupa (terlena) Engkau turun dari gunung yang tinggi didaki untuk mencari kebaikan, barulah di dapatkan. Tidak disenangi yang tinggi, kebaikan dari belakang mendatangkan keadilan.

Teks (4) sastra lisan di atas menunjukkan bahwa "praktik" keadilan merupakan suatu kebaikan yang sangat susah diwujudkan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibaratnya harus mendaki gunung yang tinggi untuk menggapainya. Masyarakat Bugis sangat percaya bahwa keadilan adalah kebutuhan setiap orang dan menjadi "penyangga" dalam membangun pemerintahan yang bermartabat. Dalam Amaluddin (2012:2), dicontohkan salah satu contoh, ajaran moralitas dari Nene' Mallomo tentang keadilan *adele*', yang merupakan tokoh legenda (cendekiawan) Sidenreng yang hidup sekitar abad ke-16 M pada masa pemerintahan *La Patiroi, Addatuang Sidenreng*. Prinsif moralitas yang diajarkan oleh Nene' Mallomo yang harus dijalankan oleh aparat kerajaan dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum dikenal dengan ungkapan:

(5) *"Naia Ade'e Temmakkeana Temmakkeappo"*
Artinya: Hukum tidak mengenal anak cucu.

Suatu hari Nene' Mallomo ketedatangan tamu yang sangat terhormat yaitu, Arung Matoa Wajo. beliau bertanya kepada Nene' Mallomo;

(6) "*Aga muala apettu bicara ri Sidenreng,*
nasalewangeng ana'banuammu,
na'bija olok-kolo'mu,
namoni ase wette muamporeng jajito."

Artinya,
Apakah yang diputuskan di Sidenreng ini,
sehingga rakyatmu sejahtera, ternakmu berkembang biak,
dan benih padimu yang jelek yang kau sebarkan juga tumbuh baik?

Jawaban Nene' Mallomo:
(7) *"iyana uala appettuang bicara ri Sidenreng*
iya naritu alempureng sibawa deceng kapangnge."

Artinya,
yang saya putuskan di Sidenreng
adalah kejujuran dan prasangka baik kepada semua orang.

Beberapa tahun kemudian setelah kedatangan tamu terhormat tersebut, rakyat menjadi resah kernak banyak ternak yang mati, padi sawah pada rusak seluruhnya. Nene' Mallomo bertafakkur dan mengambil kesimpulan bahawa ini adalah teguran/siksaan dari Dewata Sewae (Tuhan) dan pasti ada sebabnya. Atas dasar ini, Nene' Mallomo memerintahkan untuk diadakan penelitian yang jujur (*lempu*) dan tidak memihak (*adele*'). Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak dari Nene' Mallomo yang juga seorang petani mengalami kesulitan sewaktu membajak sawahnya, bajak rusak sehingga tanpa pikir panjang dia mengambil kayu yang telah dipotong dan disandarkan kepohon yang lain. Hal ini disampaikan kepada Nene' Mallomo yang langsung menanyakan kepada anaknya atas kebenaran berita tersebut. Sang anak mengaku terus terang. kemudian Nene' Mallomo memanggil rapat para pabbicara (pemangku adat) dan menguraikan persoalan yang timbul dan penyebabnya. Kesimpulan dari Nene' Mallomo adalah karena anaknya telah mengambil kayu orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, maka harus dihukum mati. Para pabbicara melalui yang tertua menyatakan

pada Nene' Mallomo bahwa: "*lemmu manaro nyawamu pasi angkei nyawana ana'mu na aju sipoloe*". Artinya sampai hatikah engkau Nene' Mallomo membandingkan nyawa anakmu dengan sepotong kayu. Jawaban Nene' Mallomo adalah: "*makko gatu pale taro bicarae temmakki ana' temmakki ambo ada pura onroe*". Artinya "Apakah demikian hukum kita, tidak melihat anak atau bapak? Atas dasar ini anaknya dihukum mati sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian Nene' Mallomo telah melaksanakan semua pesan/anjurannya sebagaimana disebutkan terdahulu. Setelah pelaksanaan hukuman mati tersebut rakyat menjadi sejahtera kembali karena ternak kembali berkembang dan padi menjadi tumbuh subur kembali. Dengan keputusan yang berat dari Nene' Mallomo, dia juga telah meletakkan dasar-dasar demokrasi pada jamannya. Beliau sewaktu akan dilantik sebagai pejabat di Sidrap pada waktu itu bersumpah sebagai berikut:

(8) " *Ooe sipabbanuakku,*
angingko ri ki rau kaju,
soloka na ki batang.

Artinya,
wahai senegeriku,
anda adalah angin
dan saya hanyalah sayuran yang lemah.
(http://www.pelajarpro.com/kearifan-pappaseng-nene-mallomo/).

Setiap perbuatan manusia harus seimbang (*equal*) termasuk menegakkan keadilan *adele'* dan kejujuran seperti yang dicontohkan Nene' Mallomo, adalah wujud keseimbangan hidup/tidak berat sebelah dalam menetapkan keputusan. Ajaran moral *adele'* seperti di atas

banyak sekali dijumpai dalam Tradisi Sastra lisan. Jika contoh di atas dapat menjadi inspirasi untuk membangun masyarakat modern dengan peradaban yang kuat dan bermartabat, maka *roadmap* dari "proyek" kemanusiaan akan jelas arah dan tujuannya.

Kesimpulan

Tradisi Sastra lisan Bugis memiliki "ajaran/pesan" moral budaya yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, terutama dalam tatanan kehidupan manusia yang baik. Telah disebutkan di atas bahwa sastra lisan dapat menjadi "rujukan" moral peradaban yang di dalamnya terkandung pesan kemanusiaan yang sangat esensi untuk membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Jika pesan moral itu dapat direaktualisasi, dikaji, dan diejawantahan dalam kehidupan manusia, maka tidak sulit untuk mewujudkan cita-cita dan proyek raksasa yang bernama "kemanusian" untuk dicapai. Mereaktualisasi dan mengejawantahan pesan moral tersebut, tidaklah berarti manusia kembali ke masa lalu yang dianggap primitif, tetapi mengokohkan kehidupan manusia yang bermartabat dalam bingkai negara yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Amaluddin. 2009. Nyanyian Rakyat Bugis, Kajian Bentuk, Fungsi, Nilai, dan Strategi Pelestariannya. Disertasi UM.

[2] ----------. 2010. Pesan Universal dalam Sastra Lisan Masyarakat Bugis. Tulung Agung: Cahaya Abadi.

[3] ----------. 2010. Nyanyian Rakyat Bugis, Kajian Bentuk, Fungsi, Nilai, dan Strategi Pelestariannya. Jurnal Bahasa dan Seni UM Malang. Tahun 38, Nomor 1. ISSN 0854-8277.

[4] ----------. 2012. Reaktualisasi Nilai Budaya dalam Sastra Lisan Masyarakat Bugis (Merajut Karakter Anak Bangsa yang

Bermartabat dalam Perspektif Kemanusian. Sengkang: Lampena Intimedia.

[5] ----------. 2012. Hak Asasi Manusia dalam Sastra Lisan Masyarakat Bugis. Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra UMS. 11-24 ISSN 0852-9604.

[6] ----------.2014. Membangun Peradaban Bangsa yang Bermartabat dalam Perspektif Masyarakart Bugis. Simposium Internasional UNM.

[7] FIP UPI. Membangun Peradaban Bangsa Indonesia melalui Pendidikan dan Bimbingan Komprehensif yang Bermutu. http://file.upi.edu/direktori/fip/jur._ psikologi_pend_dan_ bimbingan/196606011991031005-juntika/membanguN%20 PERADABAN%20BANGSA%20INDONESIA%20 MELALUI%20PENDIDIKAN.DOCX. Online, diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

[8] Jati, Galih Pangestu. Eksistensi Sastra Lisan dalam Kesusastraan Indonesia. http://www.academia.edu/5521916/Eksistensi_ Sastra_Lisan_dalam_Kesusastraan_Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Online, diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

[9] Simanullang, D. 2010. Kesusastraan. http://www. Repository.usu. ac.id/bitstream/ 123456789/16563/5/ Chapter% 20I.pdf. Universitas Sumatera Utara. Online, diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

[10] Triwati, Rahayu. 2020. Kesantunan Berbahasa sebagai Cermin Karakter Bangsa. Journal of Language Learning and Research.

[11] Suwardana, Ni Putu. 2020. Quo Vadis Pendidikan Karakter dalam Merajut Harapan Bangsa yang Bermartabat. Unhi Press: Denpasar-Bali.

BAGIAN 4:
EKONOMI PEMBANGUNAN

Kesejahteraan hidup merupakan salah satu produk dari ekonomi pembangunan, yang diantaranya meliputi pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan UMKM. Indoesia termasuk salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang bersaing, khususnya dalam pemulihan di masa pandemi covid-19.

Bab 9

PEMBANGUNAN EKONOMI DENGAN PENDEKATAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

Yadi Arodhiskara[1], Fajar Ladung[2]

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global yang begitu pesat telah memberikan warning bagi seluruh sektor ekonomi untuk senantiasa memposisikan diri agar tetap eksis bahkan bertahan dalam pusaran mainstream dunia. Perekonomian Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia, keenam setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia dan Korea Selatan.

Indonesia memiliki beberapa keunggulan strategis dibanding kompetitornya khususnya di Asia Tenggara. Kekayaan sumber daya alam, memiliki pasar domestik yang besar dan menjadi tempat bagi pekerja produktif siap pakai. Keberagaman suku, bahasa dan bentang ribuan pulau-pulaunya menjadi kekhasan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan sumber potensi daerah.

Potensi daerah merupakan sebuah keunggulan alamiah yang pada dasarnya dimiliki oleh suatu daerah. Potensi tersebut dalam perkembangannya memerlukan inovasi atau campur tangan dari

[1]Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare; yadhi01@gmail.com, relax.man88@yahoo.com
[2] Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.

pemerintah maupun masyarakat, sebab tanpa adanya intervensi maka keunggulan alamiah yang dimiliki cenderung stagnan dan apabila dibiarkan akan berdampak pada melemahnya pembangunan suatu daerah, pembicaraan yang sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan adalah bagaimana pentingnya mengembangkan suatu potensi daerah dengan berbasis pada kearifan lokal. Hal ini perlu untuk dilakukan karena potensi daerah akan lebih dapat dikembangkan sehingga pada akhirnya dapat memiliki daya saing dengan berbagai potensi daerah lainnya. Salah satu wujud nyata dari kontribusi potensi daerah terhadap perekonomian yaitu pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Azizah & Muhfiatun, 2018).

Tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil per kapita dan adanya unsur keadilan (pemerataan) dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah Indonesia menerapkan strategi pertumbuhan. Dalam ilmu ekonomi pembangunan, strategi pertumbuhan diartikan sebagai upaya suatu negara dalam pembentukan modal dan bagaimana menanamkannya secara seimbang, terarah dan memusat, (Kurnia & Putri, 2018).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan pembangunan yang merepresentasikan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ekonomi cenderung mendominasi cara berpikir tentang definisi pembangunan dan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses budaya karena ekonomi itu sendiri, merupakan bagian dari realitas budaya yang dapat membentuk *economic sense* sebagaimana disebutkan oleh Michael McPherson yang dikutip (Chavoshbashi et al., 2012). Dengan demikian, tak mengherankan bila pembangunan perkotaan di Indonesia dapat menyuburkan budaya konsumerisme bagi masyarakatnya ketika pembangunan ekonomi perkotaan lebih menitikberatkan pada realitas budaya tersebut.

Kearifan lokal pada intinya berupa kegiatan yang melindungi dan melestarikan alam serta lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan melestarikan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Karena Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Walaupun kearifan lokal bersifat lokal tapi mengandung nilai-nilai moral universal. Terlihat dari masyarakat desa yang kehidupannya apa adanya, mandiri, tidak berlebih-lebihan, tenggang rasa, bijaksana dalam berhutang, tidak merusak kelestarian generasi dan lingkungan, dan sebagainya. Bentuk kearifan lokal tersebut memberi peluang kreatifitas masyarakat yang selanjutnya memunculkan industri kreatif (Sopanah, Syamsul Bahri, 2020).

Sebuah budaya lahir dari keluhuran nilai, kemuliaan sikap, dan keagungan tradisi mayarakat yang berjalan secara berkelanjutan dan mengakar. Dalam prosesnya, budaya lahir dari adanya interaksi bahkan terkadang terjadi akulturasi antara keyakinan religi, sosial, dan tradisi masyarakat. Persentuhan tersebut melahirkan cara pandang, keyakinan, sikap dan ideologi yang heterogen dan dinamis. Oleh karena itu, kerangka yang digunakan untuk memahami budaya dalam komunitas tertentu harus juga memahami cara pandang, sikap, dan ideologi dimana komunitas masyarakat itu berada. Pembangunan lingkungan ekonomi masyarakat lokal tidak terlepas dari kelembagaan sosial swadaya masyarakat yang langsung bersinggungan dengan kegiatan ekonomi produktifnya (Mujahidin, 2017).

Budaya senantiasa berangkat dari sejarah, yang kemudian membentuk produk-produk yang menjelaskan bahwa sebuah evolusi panjang telah terjadi. Artefak, perilaku sosial, dan sistem nilai merupakan produk tersebut. Semua produk budaya selalu berasas pada pola kearifan lokal yang berasal dari manusia dengan segala pemahaman dan pola pikirnya. Kearifan lokal yang bermula dari kognisi untuk

bertindak dan bersikap dalam suatu peristiwa, kemudian membentuk ekspresi beragam berupa adat, karya seni, hingga pola pikir manusia pun terbentuk dari kearifan lokal tersebut. Sebuah sinergi ditunjukkan keduanya: kearifan lokal mengintervensi evolusi budaya, dan karya budaya melukiskan bentuk kearifan lokal yang khas di setiap daerah. Sebagaimana disebutkan oleh Angga Aryo dikutip (Sopanah, Syamsul Bahri, 2020).

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, nilai kearifan lokal yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri yakni budaya *siri'* dan budaya tudang sipulung yang selalu dipegang teguh baik itu masyarakat maupun pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan terkhususnya dalam perancanaan pembangunan yang ada pada tata kelolah pemerintahan. Budaya *siri*' mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri serta kehormatannya (Laica Marzuki dalam Rosadi and Saleh 2021).

Tokoh Bugis H.D. Mangemba yang dikutip oleh (Nurnaningsih, 2015) menyatakan bahwa *siri*' itu merupakan padangan hidup dan inti kebudayaan orang-orang Bugis, sedangkan secara harfiah kata *siri*' berarti malu dan dapat juga berarti kehormatan, harga diri dan martabat seorang manusia, dimana nilai kehormatan menjadi bagian dan tertanam serta dikembangkan pada diri setiap manusia. Penegasan tentang nilai *siri*' sebagai nilai kehormatan juga diuraikan oleh Hamid Abdullah bahwa *siri'* dalam kehidupan masyarakat Bugis merupakan hal yang prinsipil dalam diri mereka dan menjadi sebuah nilai yang selalu dibela dan dipertahankan sebab *siri*' adalah jiwa mereka, harga diri mereka, dan martabat mereka.

Pemaknaan *siri'* itu sendiri dilandaskan pada nilai *Sipakatau* (memanusiakan manusia), *Sipakalebbi* (saling menghargai) dan

Sipakainge (saling menasehati, menyeru pada kebaikan). Dari ketiga nilai *siri'* (*Sipakatau, Sipakainge* dan *Sipakalebbi*) hanya dapat ditegakkan jika dalam diri sesorang memiliki 3 (tiga) sikap sebagai nilai dasar seorang manusia atau biasa disebut dengan nilai dasar *siri*', Sebab sebuah sifat *Lempu* (Kejujuran) jika tidak disertai dengan sebuah nilai *Amaccangeng* (Kepintaran/Cendikiawan/Kepandaian) maka tidak akan memiliki banyak arti, begitupun jika keduanya dimiliki oleh seseorang (*Lempu* dan *Amaccangeng*) jika tidak dilandasi sebuah sikap *Awaraningeng* (Keberanian), maka dapat dikatakan tidak akan mampu menghasilkan atau merubah sesuatu menjadi lebih baik.

Budaya *siri*' yang melekat pada diri masyarakat Bugis Makassar tidak terlepas dari ketetapan diri dalam melaksanakana kepentingan masyarakat sama halnya pada proses perencanaan pembangunan ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan rasa kebersamaan dalam mewujudkan tujuan yang berlandaskan kepentingan bersama. Kebersamaan dalam Budaya Bugis Makassar sangat kental dengan nilai-nilai persaudaraan*, sipakatau, sipakalebbi,* dan bentuk-bentuk kedekatan lainnya dalam masyarakat. Salah satu falsafah yang sarat akan nilai yaitu tudang sipulung.

Nilai budaya bugis tudang sipulung sering digunakan sebagai wadah untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang terjadi untuk mencari jalan keluar sehingga tercapai tujuan bersama. Keputusan yang diambil dari tudang sipulung tersebut, harus berdasarkan *massolo*' *pao* (mengalir bersama), yang artinya bahwa keputusan yang akan dicapai dalam "duduk bersama" (musyawarah) tersebut merupakan keputusan kehendak bersama dan untuk kepentingan bersama, yang diibaratkan bagaikan air yang mengalir bersama. Artinya, kehendak penguasa (pemerintah) dan kehendak rakyat (masyarakat) haruslah beriringan dalam menemukan titik temu yang berdasarkan kepentingan bersama (Arodhiskara et al., 2021).

Langkah pelaksanaan *Tudang Sipulung* digunakan sebagai wadah menunjukkan bahwa para *stakeholder* khususnya pemerintah maupun aktor dalam pembangunan ekonomi memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai *siri' na pesse* merupakan nilai yang tidak terpisahkan dari kearifan lokal *Tudang Sipulung* yang dianut dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Nilai Budaya Siri dalam Pembangunan Ekonomi

Budaya masyarakat yang terus dipertahankan secara turun temurun akan membentuk suatu perilaku yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungannya mempengaruhi pandangan hidup, memahami sifat lingkungan, pengaruhnya terhadap dirinya dan reaksi lingkungan terhadap aktivitas hidupnya dan padangan hidup ini terakumulasi dalam perilaku masyarakat dan dikenal sebagai budaya masyarakat lokal. Pembangunan lingkungan ekonomi masyarakat lokal tidak terlepas dari kelembagaan sosial swadaya masyarakat yang langsung bersinggungan dengan kegiatan ekonomi produktifnya.

Nilai-nilai dasar budaya *siri*' dalam sebuah sistem tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian, tentunya dapat meningkatkan optimisme pemerintah daerah sebagai bentuk menjaga penghormatan dan menjaga harga diri dalam mensejahterahkan masyarakatnya. Pemberlakuan otonomi daerah pada dasarnya membuka peluang pada pemerintah daerah untuk dapat mensinergikan budaya lokal dalam tatanan pelayanan kepada masyarakat, sebab di hampir semua bentuk kultur atau budaya yang ada hampir semua propinsi telah menjadi tata aturan tidak tertulis di masyarakat namun memiliki pengaruh sangat besar dalam mengatur tata kehidupan baik dalam konteks sosial maupun dalam tatanan perekonomian.

Potensi kearifan lokal yang ada di masyarakat dapat dijadikan sebagai entry point atau pintu masuk pengembangan potensi ekonomi suatu daerah. Potensi ekonomi suatu daerah diartikan sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat didikatakan bahwa teori klasik yang menyatakan bahwa penentuan tingkat kemakmuran adalah kemampuan manusia sendiri sebagai faktor produksi sangat erat sekali hubungannya dengan kearifan lokal dan potensi ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dimaknai dari *pappaseng*, bahwa kemakmuran sebuah negara dapat tercapai jika memiliki seorang pemerintah yang jujur dan juga mampu menegakkan aturan perundang-undangan dengan baik, demikian pula terhadap perangkat pemerintah yang dapat disamakan dengan istilah *to acca* dalam lontara.

Pappaseng dapat dimaknai bahwa yang mampu mengokohkan sebuah pemerintahan adalah adat istiadat, dimana dalam adat suku Bugis *siri*' menjadi landasan utamanya, dimana dalam pengelola pemerintahan yang baik harus mampu berpegang teguh pada nilai-nilai *siri*', nilai-nilai ini dapat menjadi filter bagi semua unsur dalam pemerintahan untuk melakukan peningkatan pembangunan perekonomian, dan dengan sendirinya masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah.

Nilai Budaya Tudang Sipulung dalam Pembangunan Ekonomi

Tudang Sipulung dilaksanakan dengan maksud menjalin silaturahmi bersama masyarakat, *tudang sipulung* juga bertujuan menyampaikan program pemerintah dalam membangun suatu daerah ke

depannya, *tudang sipulung* menjadi jembatan untuk menyapa rakyat, sekaligus sebagai bukti kepekaan dan kedekatan pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat, salah satu upaya yang telah dilakukan yakni menerima aspirasi masyarakat, mengetahui apa kebutuhan dan keinginannya, serta peran serta masyarakat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan.

Tudang Sipulung sebagai suatu pendekatan kearifan lokal yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Program sapa warga yang selama ini bersifat formalitas dan terkesan kaku akan membuat masyarakat semakin menjauh dan apatis terhadap program-program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Menjadikan *Tudang Sipulung* sebagai role model dalam menjembatani aspirasi masyarakat, setidaknya pada aspek pengistilahan saja seperti yang telah dilakukan beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Pengejawantahan nilai-nilai tudang sipulung jauh lebih penting bagi masyarakat karena akan lebih mejamin keterbukaan dan kepercayaan, sehingga antara pemangku kebijakan (pemerintah) dan rakyatnya terbangun kebersamaan yang hakiki, menghilangkan sekat dan mampu menggerakkan pembangun daerah.

Proses *Tudang Sipulung* dapat menjadi bagian penting menyerap aspirasi atau curhatan masyarakat mengenai ketepatan program pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Proses ini pula dapat menjadi ruang penyampaian program-program pembangunan daerah yang ditawarkan bagi masyarakat. Dalam posisi tersebut masyarakat dapat memetakan peran dan fungsi mereka dalam pembangunan tidak hanya sebgai objek tapi juga subyek pembangunan. Nilai-nilai *Tudang Sipulung* akan membangunan keselarasan pembungan anatara pemrintah daerah dan masyarakat.

Nilai-nilai *Tudang Sipulung* dapat diintegrasikan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tidak hanya proses penyusunannya yang dilaksanakan dalam bentuk *tudang sipulung*. Pendekatan ini akan membuat proses penyusunan anggaran daerah dilakukan berdasarkan nilai-nilai etika bermusyawarah atau dikatakan nilai-nilai dari *tudang sipulung* itu sendiri seperti Nilai *Lempu* (perilaku jujur) dan *tonging* (perkataan jujur), nilai dasar *getteng* (keteguhan/ ketegasan) dan Nilai dasar sipakatau (saling menghargai).

Dasar penyusunan pembangunan ekonomi bagi pemerintah daerah akan lebih realistis dan disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah daerah tentunya, serta turunannya akan diimplementasikan melalui program-program dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu penyusunan program kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah telah melalui proses musyawarah berdasarkan nilai-nilai tudang sipulung, dengan menyerap aspirasi masyarakat yang akan menjadi prioritas program dan kegiatan pemerintah daerah.

Posisi pemerintah daerah dengan masyarakat disejajarkan atau disamakan sebagai peserta *Tudang Sipulung* sehingga ruang tersebut steril dari intervensi dari pihak manapun dan pemerintah daerah harus menghargai setiap aspirasi atau pendapat yang disampaikan oleh setiap peserta *Tudang Sipulung*. Dalam pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan berdasarkan nilai *sipakatau,* diamana pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dalam mewujudkan kebaikan, cita-cita, atau tujuan bersama tanpa adanya perbedaaan status dengan rasa saling menghargai satu sama lain dengan berpegang teguh pada prinsip bahwa kita semua bersaudara.

Tudang Sipulung juga berfungsi sebagai unsur nilai-nilai kearifan lokal lahir dari dorongan rasa *siri' na pesse* yang dipraktikkan dalam pembangunan perekonomian. Unsur pertumbuhan ekonomi merupakan output yang dihasilkan dari pembangunan ekonomi yang

diarahkan untuk kesejahteran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Unsur kesejahteraan merupakan kenikmatan yang dirasakan oleh masyarakat dari pemanfaatan *output* yang dihasilkan. Unsur harkat dan martabat merupakan kepercayaan dan pengakuan yang berikan oleh masyarakat dari pemanfaatan *output* guna memenuhi kebutuhan publiknya atau yang diterima dari pemerintah dan masyarakat.

Kesimpulan

Nilai-nilai dasar budaya *siri'* dalam sebuah sistem tata kelola pemerintahan daerah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian tentunya dapat meningkatkan partisipasi pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat. Pemberlakuan otonomi daerah pada dasarnya membuka peluang pada pemerintah daerah untuk dapat mensinergikan budaya lokal dalam tatanan pelayanan kepada masyarakat, sebab dihampir semua bentuk kultur atau budaya yang ada hampir semua propinsi telah menjadi tata aturan tidak tertulis di masyarakat namun memiliki pengaruh sangat besar dalam mengatur tata kehidupan baik dalam konteks sosial maupun dalam tatanan perekonomian.

Nilai budaya *siri'* sebagai karakter diri masyarakat Bugis Makassar yang impelementasikan dalam musyawarah/*Tudang Sipulung* yang menjadi alternatif bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Hal ini dapat terjadi jika nilai-nilai yang terdapat dalam *Tudang Sipulung* menjadi dasar dalam proses perencanaan khususnya pada saat proses pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Arodhiskara, Y., Mas'ud, M., Su'un, M., & Mursalim, M. (2021). The influence of Tudang Sipulung, public accountability,

and transparency to the regional budget performance of the municipality of Parepare. Management Science Letters, 11, 49–56. https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.8.031

Azizah, S. N., & Muhfiatun, M. (2018). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 17(2), 63. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1273

Chavoshbashi, F., Ghadami, M., Broumand, Z., & Marzban, F. (2012). Designing dynamic model for measuring the effects of cultural values on Iran's economic growth. African Journal of Business Management, 6(26), 7799–7815. https://doi.org/10.5897/AJBM11.2473

Kurnia, R., & Putri, M. (2018). Pembangunan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Perspektif Ekonomi Islam. Batusangkar International Conference, 3, 183–196.

Mujahidin, A. (2017). Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 15(2), 153. https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.496

Nurnaningsih, N. (2015). Rekonstruksi Falsafah Bugis dalam Pembinaan Karakter: Kajian Naskah Paaseng Toriolo Tellumpoccoe. Jurnal Lektur Keagamaan, 13(2), 393. https://doi.org/10.31291/jlk.v13i2.232

Rosadi, I., & Saleh, H. (2021). Indonesian Journal of Business and Management PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DENGAN BUDAYA SIRI ' SEBAGAI PEMODERASI The Influence of Good Governance on the

Analysis of Finacial Performance of the Government of. 3(2), 126–133.

Sopanah, Syamsul Bahri, M. G. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2020), Ciastech, 61.

Bab 10

MENINGKATKAN DAYA TAHAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

Taqyuddin Djabbar[1]

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa dilepaskan dari kontribusi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), demikian halnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pelaku UMKM itu merupakan bagian penting dan memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu bangsa terutama bagi negara berkembang. Pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah sudah teruji tampil sebagai pihak yang ikut mendorong pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM tidak bisa pula dilepaskan dari upaya mereka memberi kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja di tengah banyaknya pengangguran di dalam negeri, meski sebagian besar pelaku UMKM menghadapi tantangan yang sungguh sangat berat terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Banyak pelaku UMKM yang menurun omzetnya secara drastis bahkan tidak sedikit yang mengalami gulung tikar sejak pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*) pada pertengahan tahun 2020. Hampir semua kalangan ikut merasakan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19, bagi pelaku UMKM tentu

[1]Ketua Divisi Pengembangan UMKM Sulawesi Selatan dan Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Parepare; Email: afifahaprilia622@gmail.com

pihak yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19 karena modal usaha tidak berputar bahkan stagnan hingga ada yang menganggur selama beberapa bulan. Hal ini tidak terjadi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai kantoran, terlebih lagi bagi Aparatur Sipil Negara atau kalangan profesional lainnya, dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 relatif tidak memberi pengaruh yang signifikan atau setidaknya masih mampu bertahan (*survive*). Menurut data kementerian perindustrian Republik Indonesia dalam 5 tahun terakhir, UMKM telah memberikan kontribusi produk domestik bruto sebesar 60.34%. Data ini menujukkan bahwa keberadaan UMKM memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian nasioanl.

Kebijakan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19, sebagian pelaku UMKM memilih mentaati kebijakan pemerintah agar untuk sementara waktu tidak berjualan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pembatasan sosial-pun sudah mulai dilonggarkan setelah vaksinasi terus digalakkan di berbagai daerah. Pada pertengahan tahun 2021 ini, aktivitas pelaku UMKM sudah mulai pulih kembali, mereka bertarung dengan situasi yang mengancam keselamatan jiwanya. Ada yang menarik dicermati selama masa pandemi Covid-19 ini, yaitu tumbuh pesat model promosi dan penjualan produk barang dan jasa melalui media *online*, beragam ide-ide inovatif bermunculan. Situasi ini direspon oleh pelaku UMKM secara fleksibel untuk beradaptasi dengan situasi pasar yang sangat beragam dan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat terutama dalam kondisi yang tidak normal yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai saat ini, pelaku UMKM masih terus menghadapi tantangan dan disrupsi akibat pandemi. Namun harus ada upaya mencari alternatif solusi agar aktivitas usaha tetap bisa berjalan karena tanggungjawab keluarga merupakan hal penting untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Oleh karena itu inovasi

merupakan alternatif solusi untuk mensiasati situasi pandemi ini. Di masa pandemi ini, hasil Survei BPS mencatat 15 dari 100 perusahaan cenderung melakukan diversifikasi usaha. Sedangkan *World Bank* (2021) menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik. Tentu data ini merupakan suatu perkembangan yang sangat menggembirakan di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang kurang stabil selama masa pandemi.

Krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 merupakan suatu ancaman sekaligus sebagai peluang bagi UMKM. Pandemi covid-19 di satu sisi merupakan krisis kesehatan masyarakat secara global, yang belum pernah terjadi selama satu abad terakhir, namun di sisi lain ada cukup banyak peluang usaha yang justru terbuka lebar yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Pandemi Covid-19 ini telah menyebar dengan cepat dan menyelimuti seluruh dunia. Setiap hari diberitakan di berbagai media tentang jumlah korban jiwa akibat positif Covid-19. Di sisi lain, risiko ekonomi dan dukungan biaya tentu tidaklah sedikit sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2020 sampai 2021 ini, pelaku UMKM betul-betul mengalami tekanan ekonomi yang dahsyat, produksi yang stagnan, permintaan yang menurun, dan logistik yang semakin terbatas serta kesulitan melakukan ekspansi usaha.

Meskipun pelaku UMKM menghadapi situasi ekonomi yang tidak sehat sejak tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, mereka tetap memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi inilah kontribusi UMKM yang terendah sejak 2010 yakni 37,3 persen. Kontribusi tersebut mengalami penurunan hingga 38,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2019). Sedangkan kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2019 sebesar Rp 7.034,1 triliun pada 2019, naik 22,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.721,1 triliun. Ini suatu kondisi yang sungguh berat bagi pelaku UMKM, sementara sebagian besar diantara mereka tidak berlatar pendidikan sarjana

tetapi pengalamanlah yang menjadikannya tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha mandiri. UMKM pada umumnya memiliki ciri-ciri, diantaranya; a). manajemen sederhana, b). modal usaha diperoleh dari usaha sendiri atau uang pribadi, c). jumlah karyawannya terbatas dan berasal dari keluarga, d. wilayah pemasarannya dalam skala lokal, dan e). aset diperoleh dari hasil usaha yang masih sederhana. Namun karena kegiatan usaha tersebut dijalankan dengan penuh komitmen yang kuat dan konsisten, sehingga ciri-ciri yang disebutkan, perlahan mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Dalam kondisi ekonomi yang rapuh, UMKM diminta untuk menghadapi tantangan eksternal yang sulit disikapi jika tanpa diawali dengan menyusun perencanaan atau strategi untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Olehnya itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM perlu menemukan cara-cara baru dalam melakukan bisnis sebagai alternatif solusi hingga ditemukan model yang tepat. Selama masa pandemi-19 ini, pilihan yang paling strategis adalah memilih bertahan hidup sambil meningkatkan kinerja, mengingat persaingan usaha yang semakin ketat bahkan persaingan usaha saat ini bukan hanya di dalam negeri tetapi persaingan usaha yang semakin ketat bahkan sudah antar negara.

Beberapa dampak yang dihadapi oleh pelaku UMKM menuntut mereka untuk lebih berinovasi terhadap produk maupun jasa yang disediakan. Kemampuan organisasi kecil untuk mengeluarkan inovasi adalah elemen utama untuk daya saing ekonomi. Kondisi pasar yang semakin kompetitif dan sumber daya alam yang semakin terbatas, memerlukan terobosan baru dalam mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif sebagai modal dasar dalam menghadapi persaingan pasar bebas. UMKM yang inovatif lebih fleksibel, beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan merespon lebih cepat dan lebih baik terhadap perubahan kebutuhan masyarakat

secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena alasan inilah inovasi dianggap sebagai faktor penting yang membuat pelaku UMKM mampu bertahan (*survive*) dalam berusaha yang penuh tantangan dan dinamika dalam kelangsungan hidupnya. Sebagian pelaku UMKM yang telah mampu bertahan itulah yang akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi pelaku usaha yang sukses sebagai pengusaha mandiri.

Inovasi itu tidaklah datang secara tiba-tiba, tetapi lahir melalui proses panjang melewati berbagai tantangan dan dinamika sehingga berangkat dari pengalaman itulah yang kemudian menginspirasi pelaku UMKM melahirkan inovasi. Hal ini menujukkan bahwa pengalaman melewati tantangan dan dinamika berusaha itu dapat menjadi sumber pembelajaran (*lesson learnt*) untuk mengembangkan usaha agar lebih baik dari sebelumnya sampai lahir inovasi dalam usaha tersebut. Inovasi itu akan meningkatkan produk barang/jasa dan bagaimana mengefisienkan biaya sehingga perusahaan berpeluang meningkatkan laba dan pangsa pasarnya. Dengan demikian, inovasi merupakan pintu masuk (*entry point*) untuk memperoleh faktor-faktor lainnya dalam mengembangkan atau ekspansi bidang usaha yang lebih luas.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja UMKM

Dalam menjalankan usaha banyak faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM sehingga mereka mampu bertahan terutama di masa pandemi Covid-19. Faktor-faktor yang disebutkan pada bagian ini tentu masih ada faktor lain, setidaknya menurut hasil pengamatan penulis selama aktif sebagai pengurus di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Inovasi

Inovasi merupakan hal penting dalam kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa, baik di level mikro ekonomi (korporasi) hingga

level makro ekonomi (negara). Di level korporasi, jargon "inovasi atau mati" selalu didengungkan untuk menginspirasi pekerja untuk berkreasi serta menghasilkan nilai tambah ekonomis, baik dari sisi produk/jasa, proses, hingga sistem manajemen.

Di level makro (negara), pemerintah maupun masyarakat selalu berusaha agar indeks kemajuan inovasinya, yang diukur dalam ranking GCI (*Global Competitiveness Indexes*), bisa meningkat dengan tujuan mendatangkan investasi asing, meningkatkan surplus neraca perdagangan antarnegara, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bila penemuan (*invention*) bisa dimaknai sebagai penciptaan konsep atau teknologi baru yang terjadi secara kebetulan atau "*trial and error*" dengan tujuan memenuhi suatu perbaikan berkelanjutan, maka inovasi memiliki beragam definisi tergantung dari sudut pandang bidang kajian.

Inovasi merupakan kelanjutan dari penemuan (*invention*) dan kegiatan inovasi merupakan penciptaan nilai (*creation of value*) yang melibatkan peningkatan teknologi. Dalam penciptaan nilai tersebut, inovasi harus secara signifikan mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan, yang dipresentasikan pada layak jual (diterima pasar) atau tidaknya produk/jasa inovatif tersebut.

Dengan demikian, inovasi erat hubungannya dengan kemampuan untuk memahami *need* (kebutuhan) maupun *want* (keinginan) konsumen. Inovasi juga erat kaitannya dengan sikap kreatif, yaitu sikap yang selalu mereka tidak puas dengan pendekatan yang lama, yang dikemas dan disampaikan melalui sarana "teknologi" yang lebih baik.

Menurut Schumpeter (1982), inovasi bekerja sebagai kekuatan pendorong di balik kemajuan ekonomi. Pengusaha kapitalis memastikan perubahan dalam kemajuan dan penurunan, yang membantu dalam memastikan pertumbuhan ekonomi. Tetapi lanskap ekonomi saat ini telah berubah sepenuhnya dibandingkan dengan tahun 1980-an dan

1990-an. Dalam lingkungan bisnis yang beragam dan dinamis saat ini, inovasi dianggap sebagai alat yang paling penting untuk mengelola keberlanjutan dan strategi bisnis.

Memperoleh inovasi dalam UMKM dipandang sebagai mekanisme penting untuk mempromosikan pengembangan ekonomi. Inovasi memiliki peran penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Berdasarkan pendapat dari Johnston & Prokop (2021), inovasi dikatakan terhambat jika pelaku UMKM tidak memiliki konektivitas, infrastruktur digital, sumber daya manusia yang memadai.

Sejalan dengan pendapat Johnston & Prokop di atas, pemerintah daerah, perlu memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengakses informasi dan jejaring ke pemerintah pusat khususnya dari Kementerian Koperasi, yang sedang menyusun agenda antara lain; transformasi dari usaha informal menjadi usaha formal, transformasi digital, transformasi UMKM masuk ke dalam rantai global dan ekspor, korporasi modern dan terdigitalisasi serta penciptaan wirausaha baru yang mapan, inovasi, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja. Agenda ini sangat diperlukan oleh pelaku UMKM di daerah agar mereka bisa tetap bertahan hingga mampu berkembang dan mandiri. Pelaku usaha UMKM masih membutuhkan pendampingan dan perhatian pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk pemberian pelayanan publik kepada kelompok usaha yang belum kuat dari berbagai aspek.

Setiap pelaku usaha UMKM pada umumnya memiliki pengalaman bekerja pada sektor usaha tertentu, pengalaman ini bisa dijadikan sebagai referensi lahirnya inovasi. Bagaimana cara meningkatkan inovasi itu? Tentu butuh refleksi, dan perbandingan dengan usaha orang lain serta menganalisis kebutuhan pasar. Dengan demikian kemampuan atau kapasitas pelaku UMKM sangat penting selalu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu bersaing sehat. Satu-satunya cara yang mungkin untuk meningkatkan inovasi dalam

organisasi adalah dengan mengidentifikasi semua faktor potensial khususnya sumber daya manusia untuk dapat berupaya mengembangkan usaha melalui inovasi yang diciptakan sendiri. Perencanaan yang efektif dan implikasi praktis dari berbagai strategi untuk meningkatkan inovasi membantu dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor untuk meningkatkan inovasi harus terutama difokuskan pada bidang usaha yang sudah digeluti selama ini sehingga berdasarkan proses atau pengalaman bekerja itu dapat mengembangkan lebih banyak inovasi. Disinilah pentingnya ada proses transformasi menuju UMKM masa depan yang mampu bersaing sehat. Pelaku usaha UMKM masa depan adalah pengusaha yang menggunakan berbagai pendekatan yang konprehensif, dapat diterima banyak kalangan. Untuk memajukan usaha seorang pelaku UMKM membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem yang tidak hanya holistik dari hulu ke hilir, namun juga menyertakan inisiatif dan sinergi dari seluruh *stakeholder*.

2. Strategi Bisnis

Strategi bisnis merupakan hal penting yang harus diketahui oleh pelaku UMKM agar mereka memiliki peta jalan dalam menjalankan usahanya atau tidak tiba masa tiba akal tetapi sudah terencana dengan baik secara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Olehnya itu pelaku UMKM harus difasilitasi merumuskan apa tujuan yang ingin dicapai dalam berusaha, didampingi mengidentifikasi apa saja sumber daya yang dimilikinya dan bagaimana memanfaatkan secara efektif sumber daya itu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud seperti apa yang telah dirumuskan. Hubungan perusahaan dengan lingkungan, dua hal yang sangat berkaitan erat sebagai suatu ekosistem yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Pelaku UMKM dalam mengambil suatu keputusan, sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan internal tetapi penting pula mempertimbangkan kepentingan pihak eksternal sebagai bagian dari

strategis bisnis masa depan.

Kata "strategi" ini, pada awalnya lebih sering digunakan oleh militer terutama bagaimana menghadapi lawan atau musuh agar mampu memenangkan peperangan. Namun dalam perkembangannya saat ini, kata strategi-pun digunakan di kalangan pelaku bisnis untuk mengelola usaha agar dapat bertahan atau mendapat keuntungan. Dengan demikian cara pandang "lawan atau musuh" sudah beralih pada konpetitor bisnis. Namun dalam persaingan usaha itu sangat dianjurkan dilakukan dengan beretika, sehingga budaya bangsa tetap menjadi ciri yang melekat pada pelaku usaha. Dalam konteks organisasi bisnis, istilah lawan atau musuh dalam perang militer, maknanya tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam bisnis cara menghadapi lawan atau musuh itu tidaklah dalam pemahaman untuk mematikan usaha pesaing kita. Pelaku UMKM masa depan, perlu difasilitasi bagaimana menyusun strategi bisnin yang baik sehingga produk-produk usaha yang dihasilkan direspon dengan baik oleh pasar. Strategi bisnis yang baik itu harus menanggapi kekuatan eksternal yang dinamis dan m esaing itu dijadikan sebagai sumber belajar bagaimana bersaing sehat agar sama-sama bisa eksis dalam berusaha.

Strategi berusaha dimaksudkan untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan sarana yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Jika tanpa strategi dalam berusaha, berarti seorang pelaku usaha sedang merencanakan suatu kegagalan dalam berusaha. Strategi ini merupakan aspek yang sangat penting bahkan sangat prinsip untuk digunakan dalam manajemen berusaha sehingga dengan strategi itu seorang pelaku UMKM dapagt mengambil posisi pasar yang jelas, dan mampu menjalankan operasinya secara terorganisir dan sistematis. Dengan menggunakan strategi yang baik, bukan hanya mendatangkan kemajuan perusahaan secara jangka panjang tetapi yang tak kalah pentingnya adalah memberi kepuasan kepada pelanggan dan menarik

perhatian pelanggan untuk terus membeli produk yang kita hasilkan. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat menyelesaikan tugasnya dengan puas pula dan pada akhirnya peluang kesuksesan lebih terbuka di depan mata, dan sekaligus akan mencapai tujuan organisasi.

Strategi sangat penting dikaitkan dengan desain dan tindakan terpadu untuk mencapai tujuan utama, mendapatkan komando atas situasi dengan perspektif jangka panjang dan mengamankan posisi yang sangat menguntungkan.. Strategi secara sadar dipertimbangkan dan dirancang secara fleksibel skema niat dan tindakan perusahaan untuk mencapai efektivitas, untuk memobilisasi sumber daya, untuk mengarahkan upaya dan perilaku, untuk menangani peristiwa dan masalah, untuk memahami dan memanfaatkan peluang, dan untuk menghadapi tantangan dan ancaman bagi kelangsungan hidup dan kesuksesan perusahaan.

Strategi perlu dirumuskan bagaimana membuat dan menentukan pilihan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar yang penuh persaingan. Organisasi harus membuat pilihan yang tepat karena jika gagal merumuskan pilihan itu, maka pesaing atau pelanggan akan memilih untuk beralih ke tempat lain yangs sejenis. Dengan demikian hal yang sangat penting dan inti adalah harus ada strategi bisnis yang mampu memberikan arahan yang dapat ditindaklanjuti tentang bagaimana cara suatu organisasi mampu bersaing, termasuk produk atau layanan ataupun tempat, serta bagaimana cara untuk dapat meraih proposisi nilai secara baik.

Strategi harus mampu menyediakan kerangka kerja terpadu bagi manajemen puncak untuk mencari, mengevaluasi dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan, untuk memahami dan memenuhi potensi ancaman dan krisis, untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya dan kekuatan, untuk mengimbangi kelemahan perusahaan dan untuk membuat keputusan besar secara umum. Manajemen puncak beroperasi

dalam lingkungan sebagian ketidaktahuan dan ketidakpastian. Strategi dirumuskan di tingkat korporat, divisi, dan fungsional.

Perubahan konstan dan cepat terjadi di pasar, memaksa UMKM untuk terus mencari cara bertahan, tumbuh dan menjadi kompetitif. Aktivitas berbasis pengetahuan dianggap sebagai dasar strategi bisnis yang berkelanjutan dalam perekonomian saat ini. Pengetahuan telah menjadi faktor strategis yang paling penting dalam operasi perusahaan, karena dikaitkan dengan kemampuan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, perusahaan harus menemukan cara untuk mengelola pengetahuan secara memadai yang menimbulkan tantangan khusus bagi perusahaan kecil karena biasanya kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya stok pengetahuan mereka.

Banyak UMKM menghadapi kendala sumber daya. Biasanya di UMKM, pemilik/manajer mengambil posisi sentral. Dalam lingkungan seperti ini, tidak jarang proses perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan terbatas hanya pada satu orang. Sentralitas ini menandakan bahwa orang-orang tersebut secara khusus bertanggung jawab untuk mengenali manfaat manajemen pengetahuan (*Knowledge Management*) untuk mendukung operasi perusahaan. Pelaku UMKM perlu diberi pemahaman dengan baik bahwa manajemen pengetahuan (*Knowledge Management*) itu sangat penting untuk mendukung keberlanjutan usaha secara jangka panjang. Strategi manajemen pengetahuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan berbagi pemahaman dan pengalaman kepada pihak lain agar pembelajaran-pembelajaran yang kita peroleh dapat diketahui oleh pihak lain atau pelaku UMKM yang masih baru yang ingin atau sedang belajar menjalankan usahanya. Pelaku UMKM yang telah sukses perlu didorong untuk terus berani berbagi dengan pelaku UMKM yang lain dengan memberi data dan informasi sehingga dapat mengispirasi

bagi pelaku UMKM untuk bertahan dan terus mengembangkan usahanya meski menghadapi tantangan. Olehnya itu strategi manajemen pengetahuan (*Knowledge Management*) merupakan informasi yang sangat berguna bagi kepentingan kemajuan usaha dan pengembangan pengetahuan yang lebih luas.

3. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi bagi pelaku UMKM saat ini sudah merupakan keharusan yang tidak bisa dihindari terlebih dengan era industri 4.0, sudah pasti teknologi sebagai faktor utama. Pengelolaan bisnis dan perspektif pelaku bisnis khususnya pelaku UMKM dipaksa melakukan adaptasi sebagai tuntutan perubahan zaman untuk melakukan digitalisasi dalam memasarkan produk-produknya, apakah itu produk yang dibuat sendiri sebagai *local maker* maupun produk yang mereka dapatkan dari produsen lain dan kemudian dijual kembali secara *online*. Hanya dengan cara ini pelaku UMKM bisa bersaing, baik di tingkat lokal, nasional dan global.

Selama masa pandemi Covid-19 ini, terjadi peningkatan penjualan secara *online* khususnya di tiga provinsi yang berada di luar Jawa, yaitu NTB 144,6%, Sulawesi Tengah 73,4%, dan Sulawesi Selatan 73,3%. Masuknya Sulawesi Selatan sebagai daerah penjualan online terbesar ketiga, menunjukkan bahwa selama pandemi ini, Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki pangsa pasar yang memiliki prospek yang baik. Dengan demikian, bisnis bisa berkembang saat ini jika ditunjang oleh teknologi digitalisasi. Namun, disisi lain harus dipahami bahwa ada sebagian pelaku UMKM yang belum siap dengan digitalisasi ini sehingga menjadi tugas ICMI untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM untuk belajar menguasai teknologi sehingga dengan cepat bisa beradaptasi dengan perubahan ini yang sangat cepat.

Belanja *online* sudah menjadi tren bukan hanya di perkotaan tetapi sudah mulai diminati oleh masyarakat di desa, sehingga pelaku

UMKM mau tidak mau harus mempelajari promosi produk secara online agar tetap bisa bertahan, itupun harus memiliki kemampuan bersaing dengan menjual produk-produk yang diunggulkan. Menyadari perubahan ini, maka pelaku UMKM harus dibimbing atau dilatih untuk segera beralih ke model penjual digital.

Pelaku UMKM dapat meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan pemenfaatan Informasi dan Komunikasi (TIK). TIK terdiri dari produk dan layanan seperti *smartphone, gadget*, intranet berkabel atau *Wi-Fi*, pemrograman profitabilitas organisasi seperti pengelola konten, dan lembar kerja cetak, pemrograman asosiasi, penyimpanan data dan keamanan, pengaturan keamanan dan lain-lain. Kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Banyak penemuan baru dalam bidang teknologi menunjukkan begitu pesatnya perkembangannya, mulai dari teknologi yang sederhana hingga teknologi yang mutakhir. Pemanfaatan teknologi banyak diadopsi di berbagai sektor. Dalam sektor ekonomi-bisnis, pemanfaatan teknologi memberikan keuntungan dalam bentuk efektifitas dan efisisensi untuk mendukung perencanaan, produksi hingga distribusi produk. Selain itu dengan pemanfaatan teknologi memberikan kemudahan akses informasi, transaksi jarak jauh, pemasaran dan interaksi dengan pelanggan.

Pemanfaatan teknologi merupakan suatu cara yang strategis untuk mendesain dan mengelola organisasi usaha, serta dapat membuat organisasi usaha lebih responsif, fleksibel, dan efisien. Pelaku UMKM harus mampu memanfaarkan teknologi sehingga mampu bersaing sehat dengan mengembangkan berbagai inovasi produk atau inovasi pemasaran yang efektif. Pemanfaatan teknologi sangat membantu pelaku UMKM mengubah strategi berbisnis dari konvensional ke bisnis digitalisasi. Strategi ini bertujuan untuk menumbuhkan keunggulan bersaing dan mengubah pengelolaan dan perspektif UMKM terhadap perubahan zaman.

4. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan, dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), umumnya diterapkan pada organisasi sektor swasta (sektor bisnis) yang membutuhkan adaptasi cepat terhadap lingkungan bisnis dan perilaku konsumen (Verbeeten, 2008). Di sektor bisnis, manajemen pengetahuan sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah (perilaku pasar dan konsumen).

Pengembangan pemikiran karyawan perlu diberi ruang atau sarana yang baik agar pemikiran dapat dikomunikasikan kepada orang lain sebagai transfer pengetahuan. Upaya ini akan mendorong lahirnya ide atau ide baru untuk menciptakan produk dan sistem baru dan juga dapat melakukan perbaikan pada produk atau sistem lama.

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk mengoptimalkan dan mendorong munculnya pengetahuan baru sebagai hasil pembelajaran dan kombinasi dari berbagai pengetahuan yang berbeda-beda. Adapun jenis pengetahuan yang dapat dibagikan melalui dalam manajemen pengetahuan tidak hanya pengetahuan atau pengalaman yang bersifat prestasi atau kesuksesan, namun pengetahuan atau pengalaman yang menghasilkan kegagalan pun harus dibagikan agar unit-unit atau organisasi yang lain tidak mengulang kesalahan yang sama.

Identifikasi pengetahuan berfokus pada kegiatan yang membantu mengidentifikasi pengetahuan yang diperlukan bagi perusahaan, serta sumber untuk memperoleh pengetahuan. Kegiatan ini juga terdiri dari identifikasi pengetahuan yang sudah ada. Penciptaan pengetahuan mengacu pada cara, yang berfokus pada konstruksi pengetahuan baru. Penciptaan pengetahuan di perusahaan dapat didukung dengan memberikan anggota organisasi untuk bereksperimen. Pengelolaan pengetahuan yang sesuai merupakan faktor yang sangat penting untuk perusahaan tetap bertahan..

Pengelolaan pengetahuan semakin diakui sebagai alat yang penting untuk meningkatkan kinerja UMKM. Pengelolaan pengetahuan merupakan proses dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan secara sistematis perolehan, penciptaan, dan penyebarluasan pengetahuan, pengalaman dan keahlian dalam suatu organisasi. Proses tersebut melibatkan analisis sistematis, perencanaan, akuisisi, penciptaan, pengembangan, pernyimpanan dan penggunaan pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi pengelolaan pengetahuan yang efektif akan mengurangi waktu dalam proses informasi dan penggunaan kembali pengetahuan karena meningkatkan penciptaan, transfer dan pemanfaatan pengetahuan dalam organisasi. Peran kunci perusahaan adalah menciptakan, menyimpan, dan menerapkan pengetahuan untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang.

Keberhasilan perusahaan tergantung pada kolaborasinya dengan organisasi lain yang memengaruhi penciptaan dan pengiriman priduk atau layanannya. Untuk UMKM, manajemen pengetahuan dapat menjadi tugas yang sulit karena karakteristiknya sering menghambat pemanfaatan sumber daya dan kompetensi yang dibutuhkan dalam organisasi untuk menghasilkan peluang baru. Tantangan bagi UMKM adalah sulitnya membangun praktik manajemen pengetahuan. Biasanya pada UMKM pegetahuan terkonsentrasi pada beberapa orang kunci.

5. Literasi Keuangan

Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan pribadi atau usaha. Beberapa pakar dan ahli mendefinisikan literasi keuangan diantaranya, Lusardi & Mitchell (2008) mengemukakan bahwa literasi keuangan adalah kemampuan kognitif dan pendidikan keuangan seseorang yang mempengaruhi perilaku dan kegiatan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Huston (2010) mendefinisikan literasi keuangan adalah struktur modal bagi manusia berupa pengetahuan

dan kemampuan yang dapat digunakan dalam kegiatan keuangan yang mempengaruhi perilaku keuangan dan kesejahteraan keuangan. Concepcio-Gallardo & Libot (2017) mengartikan literasi keuangan merupakan kombinasi antara kesadaran dan pengetahuan bisnis dan keuangan, kemampuan keuangan, manajemen keuangan, dan perencanaan keuangan.

Literasi keuangan mencerminkan kemampuan individu untuk memahami konsep keuangan, produk dan jasa keuangan, dan untuk mengendalikan sumber daya keuangan pribadi secara mandiri. Remund (2010) mengonsepkan literasi keuangan ke dalam 5 (lima) konsep yaitu, pengetahuan konsep keuangan, kemampuan komunikasi konsep keuangan, bakat mengelola keuangan pribadi, keterampilan membuat keputusan keuangan yang tepat, dan keyakinan dalam perencanaan keuangan secara efektif untuk kebutuhan keuangan mendatang. Tingkat literasi keuangan akan mempengaruhi perilaku keuangan seseorang dalam mengelola dan merencanakan keuangan pribadi. Terlebih kaitannya dengan sikap seseorang dalam mempertimbangkan rasio keuntungan yang ia dapatkan dan suku bunga yang diperoleh dari dana pinjaman.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 76 Tahun 2016, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang menentukan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan mencakup edukasi keuangan dan pengembangan infrastruktur, yang kurang lebih mencakup pengelolaan keuangan, jenis industri jasa keuangan, produk dan layanan jasa keuangan termasuk manfaat, biaya, risiko atas produk dan layanan jasa keuangan, hak dan kewajiban nasabah, mekanisme transaksi produk dan layanan jasa keuangan seperti pajak.

Dalam konteks UMKM, pemilik atau pengelola harus memiliki

pemahaman manajemen keuangan untuk membuat keputusan keuangan yang akurat dalam mencapai tujuan. Hal tersebut perlu didukung oleh kemampuan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Pengusaha harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan membuat rencana keuangan yang dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dalam penelitian ini, kemampuan mengelola keuangan yang dimaksud adalah literasi keuangan.

Semakin tinggi potensi transaksi keuangan, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya semakin tinggi potensi transaksi keuangan, semakin tinggi ditribusi. Dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, diharapkan semakin banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di bank dan menggunakannya untuk investasi. Tingkat literasi keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain status sosial ekonomi dan gaya hidup (Prete, 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa pelaku UMKM itu ketika telah berhasil sebagai pengusaha mandiri merupakan akumulasi dari perjalanan panjang mereka menghadapi berbagai tantangan dan dinamika hingga menemukan suatu pola kerja yang mengantarnya menemukan alternatif solusi yang lebih efektif dan efesien. Selain kapasitasnya sudah meningkat dari sebelumnya seiring dengan semakin meluasnya jejaringnya sehingga informasi bisnis pun semakin mudah diperolehnya untuk mengembangkan atau untuk ekspansi bisnis ke sektor lain yang memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Namun kapasitas dan jejaring belum lengkap tanpa adanya integritas dalam hal ini kejujuran, keterbukaan dan komitmen. Untuk membangun nama baik itu di dunia bisnis, integritas merupakan aspek yang sangat prinsip dan sangat menentukan keberlajutan usaha.

Keberhasilan pelaku UMKM dalam berusaha, ternyata bantuan bukan suatu jaminan keberhasilan. Tetapi kinerjalah yang penuh motivasi yang didukung oleh kapasitas atau sumber daya manusia, jejaring yang luas dan integritas merupakan modal yang paling utama. Tetapi di pihak lain, tidak sedikit pelaku UMKM justru berhasil setelah mendapat kredit perbankan. Hal ini menujukkan bahwa keberhasilan itu membutuhkan proses belajar menghadapi tantangan dan dinamika karena dengan proses atau pengalaman yang berulang-ulang dilakoni setiap hari secara jangka panjang pada akhirnya menjadi suatu "laboratorium" bisnis meuju prestasi sebagai pengusaha sukses yang mandiri.

Dalam masa awal menjalankan usaha, tidak semua pelaku UMKM menyandarkan diri atau berharap pada bantuan modal atau kredit, tetapi sebagian diantaranya berangkat dari modal sendiri yang jumlahnya terbatas. Namun seiring dengan perkembangan waktu, bantuan modal atau kredit pun akhirnya diaksesnya dengan penuh pertimbangan demi memajukan usaha ke depan. Sebaliknya tidak sedikit diatara penerima bantuan modal atau kredit itu belum siap dengan penambahan modal yang sangat besar dari sebelumnya sehingga bantuan modal atau kredit itu hanya terasa diawal pencairan dana, tetapi setelah itu justru mengalami kemunduran usaha. Olehnya itu kinerja usaha harus ada keterampilan melakukan pemasaran yang didukung oleh teknologi informasi sehingga pemasaran itu tepat sasaran. Kontribusi pelaku UMKM yang sudah terbukti telah ikut mendorong perekonomian nasional, sudah pada tempatnya jika mereka mendapat perhatian dari pemerintah atau pemerintah daerah, mengingat mereka telah ikut mengatasi pengangguran. Pelaku UMKM itu adalah pahlawan ekonomi sehingga untuk mendukung keberlajutannya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah darah, diataranya; a). memberi kemudahan bantuan kredit usaha dengan bunga yang rendah terutama pelaku UMKM yang telah teruji meminjam

dan mengembalikan kreditnya dengan baik atau bertanggungjawab, b). memberi kemudahan persyaratan izin usaha, dan c). memfasilitasi pembinaan usaha agar mampu mandiri.

Sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. diantaranya; a). terbatasnya kapasitas (pengetahuan, keterampilan, dan sikap), b). belum kondusifnya perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19, dan c). terbatasnya dukungan teknologi produksi. Hal-hal yang disebutkan ini, jika dapat diatasi dengan baik tentu akan mengantar pelaku UMKM tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha mandiri. Namun harus dipahami bahwa sepertinya sangat jarang ada pengusaha yang tidak pernah mengalami kerugian atau perubahan situasi yang datang tanpa pernah diperkirakan sebelumnya. Sama seperti dengan datangnya pandemi Covid-19, pelaku UMKM harus menerima realitas ini sambil mencari cara bagaimana tetap bisa bertahan. Namun pengalaman menghadapi tantangan, kerugian atau situasi tertentu itulah yang menjadikan pelaku UMKM yang menjadikannya mereka memiliki daya tahan menghadapi tantangan demi tantangan dan dinamika usaha yang dijalankannya secara mandiri. Pelaku UMKM pada umumnya berawal dari modal sendiri dalam mengembangkan usahanya. Namun karena usaha itu dijalankan dengan penuh motivasi, komitmen dan konsekuen sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang serta menjadi pengusaha yang mandiri sehingga keberadaan pelaku UMKM menjadi penyangga perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Concepcio-Gallardo, M. and B. Libot. 2017. “Financial Literacy and Retirement Preparedness among University of Bohol Employees.” University of Bohol Multidisciplinary Research Journal 5(1):1–16.

Durst, Susanne and Stefan Wilhelm. 2012. "Knowledge Management and Succession Planning in SMEs." Journal of Knowledge Management.

Huston, Sandra J. 2010. "Measuring Financial Literacy." Journal of Consumer Affairs 44(2):296–316.

Johnston, Andrew and Daniel Prokop. 2021. "Peripherality and University Collaboration: Evidence from Rural SMEs in the UK." Journal of Rural Studies.

Lusardi, Annamaria and Olivia S. Mitchell. 2008. "Planning and Financial Literacy: How Do Women Fare?" American Economic Review 98(2):413–17.

Remund, David L. 2010. "Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy." Journal of Consumer Affairs 44(2):276–95.

Schumpeter, Joseph A. 1982. "The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle (1912/1934)." Transaction Publishers.–1982.–January 1:244.

Verbeeten, Frank H. M. 2008. "Performance Management Practices in Public Sector Organizations: Impact on Performance." Accounting, Auditing & Accountability Journal.

Wong, Kuan Yew and Elaine Aspinwall. 2004. "Characterizing Knowledge Management in the Small Business Environment." Journal of Knowledge Management.

Bab 11

KETIMPANGAN EKONOMI DAN UPAYA MEMBANGUN INFRASTRUKTUR JALAN YANG HANDAL DAN BERKUALITAS

Muh. Nashir T[1]

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan memiliki kepulauan terbesar di dunia yang melingkupi 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Luas wilayah Indonesia yaitu 1.916.906,77 km^2. Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Secara umum persentase luas Pulau Kalimantan sebesar 28,39% dari luas Indonesia atau seluas 544.150,07 km^2. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Pulau Papua (termasuk negara Papua New Guinea). Wilayah terluas berdasarkan provinsi adalah Provinsi Papua, dengan luas wilayah 319.036,05 km^2 atau sebesar 16,64%. Sedangkan provinsi yang memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu provinsi Papua Barat sebanyak 4.108 pulau. Pulau Sumatera memiliki luas wilayah 480.793,28 km^2 atau sebesar 25%, Pulau jawa dengan luas 129.442,02 km^2 atau sebesar 7%, Pulau Sulawesi seluas 188.563,19 km^2 atau sebesar 10%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara seluas 73.070,48 km^2 atau sebesar 4% dan Maluku seluas 78.895,53 km^2 atau sebesar 4%.(*Public Works and Housing Ministry*, 2020) Besaran Pulau Indonesia dapat dilihat

[1]Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare; email: nashirt75@gmail.com

pada gambar 1.

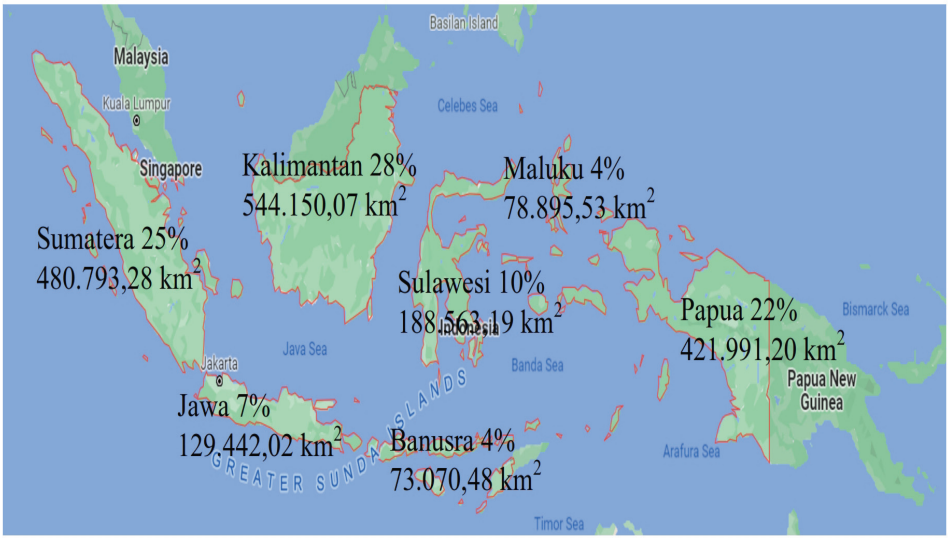

Gambar 1. Besaran Pulau-Pulau di Indonesia

Luasnya pulau-pulau di Indonesia berdasarkan data di atas mengakibatkan keterjangkauan antar wilayah menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa. Ketertinggalan dalam membangun infrastruktur suatu wilayah dan daerah akan menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi lambat dan cenderung stagnan dalam satu wilayah dan daerah. Kesenjangan infrastruktur antar wilayah dan daerah akan menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi yang berakibat berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan infrastruktur transportasi akan memberikan dampak pertumbuhan perekonomian secara signifikan pada wilayah dan daerah serta dapat memacu penciptaan lapangan pekerjaan.

Ketimpangan Ekonomi Indonesia Antar Provinsi Periode 2013-2015

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson. Indeks ini menggunakan PDRB per kapita (Williamson, 1965). Pada indeks Williamson, apabila nilai indeks mendekati angka nol, maka tingkat kesenjangan semakin kecil. Sebaliknya, apabila angka indeks mendekati angka satu, maka tingkat kesenjangan semakin tinggi.

Dimana, $0 < CV_w < 1$ …….. (1)

Keterangan:

CVw : Indeks Williamson

fi : Jumlah penduduk di wilayah yuridis ke-i yang lebih rendah (kabupaten/kota atau provinsi) (jiwa)

f : Jumlah penduduk seluruh wilayah yuridis yang lebih tinggi (provinsi atau nasional) (jiwa)

Yi : PDRB per kapita di wilayah yuridis ke-i yang lebih rendah (kabupaten/kota atau provinsi) (rupiah)

Y : PDRB per kapita rata-rata seluruh wilayah yuridis yang lebih tinggi (provinsi atau nasional) (rupiah)

Periode tahun 2010-2012, nilai Indeks Williamson cenderung meningkat, dan pada periode 2013-2015 cenderung menurun. Hasil ini menunjukkan bahwa tren ketimpangan antarprovinsi di Indonesia cenderung membaik meskipun nilai Indeks Williamson berkisar pada angka 0,70 masih tergolong cukup tinggi. Fakta ini menyarankan kepada pemerintah untuk mengakselerasi program-program pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dengan demikian, proses pembangunan yang terjadi tidak hanya bias pada wilayah yang sudah maju saja, tetapi juga pada wilayah-wilayah lainnya yang dianggap masih tertinggal (Sukwika, 2018).

Analisis Ketimpangan Ekonomi Indonesia Antarprovinsi Tahun 2020

Indikator ekonomi makro di suatu provinsi salah satunya adalah PDRB. PDRB dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dalam lingkup provinsi. Berdasarkan pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Ketimpangan ekonomi di Indonesia antar wilayah provinsi dengan indeks Williamson pada periode tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Williamson pada tahun 2020 sebesar 0,78 yang berarti ketimpangan ekonomi antarprovinsi di Indonesia mengalami kenaikan, sehingga pemerintah diharapkan dapat melakukan akselerasi pembukaan lapangan kerja diberbagai sektor infrastruktur agar dapat mendongkrak nilai PDRB setiap wilayah provinsi.

Infrastruktur Transportasi Jalan yang Handal

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antarwilayah, pemerintah telah menetapkan target pembangunan infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan sangat berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik yang merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional, serta penghubung antardaerah sebagaimana kondisi geografis Indonesia. Salah satu infrastuktur fisik adalah pembangunan jalan nasional, provinsi dan daerah. Jalan nasioanl adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Kondisi Jalan Nasional di Indonesia secara umum dalam kondisi mantap dengan persentase 92,81%. Provinsi dengan persentase jalan

Tabel 1. Indeks Williamson Ketimpangan Ekonomi Indonesia Tahun 2020

Nama Provinsi	Jumlah Penduduk (jiwa)	PDRB (Miliar Rp)	PDRB per Kapita (Rp/tahun)	Proporsi Penduduk		
DKI Jakarta	10.562.100	2.840.828	268.964.315,81	0,0385	43.599.538.929.794.200,00	1.677.400.718.420.080,0000
Jawa Timur	40.665.700	2.352.425	57.847.891,47	0,1481	5.342.561.776.495,36	791.375.239.941,3090
Jawa Barat	48.274.200	2.125.158	44.022.645,64	0,1758	260.391.281.494.077,00	45.787.420.482.751,2000
Jawa Tengah	36.516.000	1.362.457	37.311.233,43	0,1330	522.033.675.047.623,00	69.436.267.989.294,6000
Sumatera Utara	14.799.400	801.733	54.173.344,87	0,0539	35.831.535.516.076,60	1.931.586.588.582,5400
Riau	6.394.100	765.198	119.672.510,60	0,0233	3.541.823.461.854.350,00	82.491.839.420.117,7000
Banten	11.904.600	664.963	55.857.651,66	0,0434	18.504.089.758.011,30	802.393.102.966,3840
Kalimantan Timur	3.766.000	653.677	173.573.287,31	0,0137	12.862.734.854.213.300,00	176.448.628.167.300,0000
Sulawesi Selatan	9.073.500	504.747	55.628.698,96	0,0331	20.526.252.430.882,70	678.405.190.738,5210
Sumatera Selatan	8.467.400	455.233	53.763.020,53	0,0308	40.912.259.298.190,50	1.261.851.338.293,8600
Lampung	9.007.800	360.664	40.039.077,24	0,0328	404.822.949.107.871,00	13.282.765.713.378,8000
Kepulauan Riau	6.394.100	268.080	41.926.150,67	0,0233	332.447.358.736.863,00	7.742.959.079.672,8800
Bali	4.317.400	252.598	58.506.971,79	0,0157	2.730.154.467.269,85	42.935.266.176,9541
Sumatera Barat	5.534.500	246.423	44.524.889,33	0,0202	244.434.474.787.514,00	4.927.714.106.699,1600
Jambi	3.548.200	217.712	61.358.435,26	0,0129	1.437.950.090.680,25	18.584.742.888,3967
Kalimantan Barat	5.414.400	212.318	39.213.578,61	0,0197	438.722.813.100.203,00	8.652.571.723.486,3500
Papua	4.303.700	189.716	44.082.068,92	0,0157	258.477.027.963.213,00	4.051.992.143.928,8100
Kalimantan Selatan	4.073.600	180.738	44.368.126,47	0,0148	249.360.835.939.367,00	3.700.081.415.501,5900
Sulawesi Tengah	2.985.700	166.403	55.733.328,87	0,0109	19.589.129.254.718,60	213.042.354.451,5090
Aceh	5.274.900	164.211	31.130.637,55	0,0192	842.662.645.552.353,00	16.190.960.990.276,6000
Kalimantan Tengah	2.670.000	150.283	56.285.767,79	0,0097	15.004.171.954.412,10	145.924.410.384,4540
DI Yogyakarta	3.668.700	141.400	38.542.262,93	0,0134	467.295.846.336.032,00	6.244.659.655.207,8300
Nusa Tenggara Barat	5.320.100	132.674	24.938.253,04	0,0194	1.240.521.423.099.840,00	24.039.681.944.219,8000
Sulawesi Utara	2.621.900	130.201	49.659.025,90	0,0096	110.255.539.843.829,00	1.052.982.604.733,2500
Sulawesi Tenggara	2.624.900	129.260	49.243.780,72	0,0096	119.148.336.304.851,00	1.139.214.223.279,1400
Nusa Tenggara Timur	5.325.600	106.893	20.071.541,23	0,0194	1.607.027.576.691.090,00	31.174.286.789.867,3000
Kalimantan Utara	701.800	97.458	138.868.623,54	0,0026	6.195.159.234.079.120,00	15.836.911.526.195,2000
Papua Barat	1.134.100	84.348	74.374.393,79	0,0041	202.069.184.471.804,00	834.749.355.213,3830
Kepulauan Bangka Belitung	1.455.700	75.829	52.091.090,20	0,0053	65.095.843.153.524,20	345.167.416.284,6620
Bengkulu	2.010.700	72.143	35.879.544,44	0,0073	589.506.029.830.412,00	4.317.577.906.448,6100
Sulawesi Barat	1.419.200	46.360	32.666.290,87	0,0052	755.864.984.552.489,00	3.907.441.481.920,7600
Maluku	1.848.900	46.257	25.018.659,74	0,0067	1.234.863.873.450.950,00	8.316.434.298.996,1800
Gorontalo	1.171.700	41.151	35.120.764,70	0,0043	626.927.733.933.322,00	2.675.707.066.167,4200
Maluku utara	1.282.900	39.716	30.957.985,81	0,0047	852.716.148.445.811,00	3.984.757.950.636,7400
Jumlah	**274.533.500**	**16.079.255**	**2.045.415.849,66**			2.219.869.590.106.080,0000
	Rata-Rata PDRB Per Kapita		**60.159.289,70**			47.115.492,0393
					Nilai Williamson	**0,78**

mantap terbesar adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 99,84%. Sedangkan provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 73,10%. Secara agregat 68% atau 32.790,18 km jalan provinsi dalam kondisi mantap, jalan kabupaten sebesar 54% atau 211.644,08 km dalam kondisi mantap, sedangkan jalan kota dengan kondisi mantap sebesar 78% atau 35.241,40 km (*Public Works and Housing Ministry*, 2020).

Data Statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021) menunjukkan panjang jalan di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Luas, Wilayah, Panjang Jalan
dan Jumlah kendaraan Tahun 2018-2019

Tahun	Luas Wilayah ($km^{2)}$	Jumlah Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan (unit)
2018	1.916.906,77	540.252	126.702.280
2019		542842	133.811.462
2020		542909	136.316.726
Rata-Rata		**542.001**	**132.276.823**

Tabel 2 menunjukkan bahwa upaya membangun infrastruktur fisik khususnya jalan mengalami peningkatan pada periode tahun 2018-2020 dengan rata-rata panjang jalan setiap tahunnya 542.001 km yang melayani rata-rata sekitar 132.276.823 unit kendaraan dengan luas wilayah cakupan seluas 1916.906,77 km^2.

Jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih (mobil, bus, truk) dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Jalan tol merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan untuk membayar tol. Pembangunan jalan tol secara masif di Indonesia merupakan upaya

pemerintah dalam rangka meningkatkan indeksi daya saing nasional dan indeksi performa biaya logistik nasional diantaranya melalui pembangunan infrastruktur jalan termasuk jalan tol.

Selama kurun waktu 20 tahun pada periode tahun 1978-1998, pembangunan jalan tol sepanjang 561 km yang terdiri dari Trans Sulawesi 6 km, Trans Sumatera 43 km, Non Trans Jawa 85 km, Jabodetabek 138 km dan Trans Jawa 289 km. Pada Periode 1999-2004 selama kurun waktu 5 tahun jalan tol yang dibangun adalah sepanjang 13 km yang berada di Jabodetabek. Sedangkan pada periode 2015-2019 selama kurun waktu 4 tahun jalan tol yang dibangun mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni sepanjang 1.298 km dengan pembangunan jalan tol di Jabodetabek sepanjanh 43 km, Kalimantan 65 km, Non Trans Jawa 77 km, Trans Sumatera 427 km serta Trans Jawa sepanjang 705 km (*Public Works and Housing Ministry,* 2020).

Infrastruktur Transportasi Jalan yang Berkualitas

Membangun infrastruktur tansportasi jalan yang bermartabat dalam hal ini membangun jalan yang memenuhi standar-standar teknis yang berlaku dan lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan akan memberikan kepercayaan publik dan secara tidak langsung akan membuka peluang investasi lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan transportasi jalan khususnya pembangunan jalan tol saat ini meliputi 10.351 km dengan 1.910 km tol dalam pembangunan dengan rincian Trans Sumatera sepanjang 1.146 km, Sulawesi 43 km, Trans Jawa 187 km dan Jabodetabek 286 km. Sedangkan perencanaan jalan tol terdiri dari Trans Sumatera 3.163 km, Trans Kalimantan 2.364 km, Trans Sulawesi 1.583 km, Bali-Nusra 296 km, Trans Jawa 28 km dan Jabodetabek 314 km.

Selain pembangunan jalan, keselamatan pengguna jalan merupakan hal yang sangat utama, sehingga seluruh pembangunan jalan harus

memenuhi standar teknis keselamatan jalan. Keselamatan di jalan adalah terhindarnya seseorang dari resiko terjadinya kecelakaan di jalan. Salah satu faktor penyebab kecelakaan terjadi disebabkan karena jalan tidak sesuai dengan perencanaan pada saat dibangun. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menciptakan keselamatan jalan adalah membangun jalan beserta perlengkapannya, menetakan batas kecepatan yang sesuai dengan fungsi masing-masing jalan, menaati batas kecepatan, memasang fitur keselamatan pada kendaraan dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan. Seluruh upaya yang dilakukan dalam rangka keselamatan jalan harus melibatkan peran seluruh *stakeholder*.

Kesimpulan

Ketimpangan ekonomi antar wilayah provinsi di Indonesia masih cukup tinggi dihitung berdasarkan analisis indeks Williamson. Nilai indeks Willliamson pada tahun 2020 sebesar 0,78.

Kondisi Jalan Nasional di Indonesia dengan kondisi mantap sebesar 92,81%. Secara agregat 68% jalan provinsi dalam kondisi mantap, jalan kabupaten sebesar 54% dalam kondisi mantap, dan jalan kota dengan kondisi mantap sebesar 78%.

Membangun infrastruktur tansportasi jalan yang bermartabat dalam hal ini membangun jalan yang memenuhi standar-standar teknis yang berlaku dan lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan akan memberikan kepercayaan publik.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menciptakan keselamatan jalan adalah membangun jalan beserta perlengkapannya, menetapkan batas kecepatan yang sesuai dengan fungsi masing-masing jalan, menaati batas kecepatan, memasang fitur keselamatan pada kendaraan dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). Catalog : 1101001. Statistik Indonesia 2021, 1101001, 790. https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html.

Public Works and Housing Ministry. (2020). Indonesian Insfrastructure Statistics. Pusdatin, 53(9), 1–58.

Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 6(2), 115. https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130

Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of the patterns. Economic Development and Cultural Change, 13(4), 1–84. doi:10.1086/450136.

BAGIAN 5:
EKONOMI
DAN KEUANGAN SYARIAH

Ekonomi syariah menduduki peran sentral dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Perbankan syariah tidak sekedar perkara tata kelola keuangan, tetapi lebih dari itu, memberikan fokus pada aspek kemanfaatannya bagi kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, ICMI mengambil peran penting memberikan pencerahan terkait literasi perbankan dan keuangan syariah.

Bab 12

EKONOMI SYARIAH PENGGERAK EKONOMI NASIONAL DAN SUMBER KESEJAHTERAAN UMAT

Syarifuddin Yusuf[1],
Muhammad Amin Syarhan[2]

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki 229 juta penduduk Muslim (87,2%) atau ekuivalen dengan 13% dari total populasi muslim dunia (*World Population Review,* 2020) menjadi kontributor utama ekonomi nasional. *Global Islamic Economy Report* 2019/2020, menyebutkan bahwa potensi Indonesia dalam peta perkembangan bisnis syariah memiliki ukuran pangsa pasar yang sangat besar. Laporan Dinar *Standard* (2019) menempatkan Indonesia masih berada di posisi ke-4 (skor 49) dalam "Top 15 *Global Islamic Economy Indicator*" di bawah Malaysia, UEA, Bahrain dan Saudi Arabia. Secara terperinci pada sub-sektor *islamic finance,* Indonesia berada diperingkat ke-5; peringkat ke-1 *Top Muslim Food Expenditure*, peringkat ke-4 Top 10 *Muslim friendly travel;* peringkat ke-3 Top 10 Modest Fashion; peringkat ke-5 top muslim media expenditure dan peringkat ke-6 top muslim *pharmaceuticals expenditure*. Sektor-sektor tersebut merupakan indikator Ekonomi Islam yang digunakan sebagai

[1]Dosen Ekonomi Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Parepare, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Kota Parepare; Email: yusufsyarif64@gmail.com
[2]Mahasiswa Komunikasi dan Dakwah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

gambaran menyeluruh tentang posisi terbaik dari suatu negara dalam menciptakan keunggulan dan diferensiasi produk dan layanan yang peruntukkannya bagi segmen Muslim. Dengan kondisi anomali tersebut, Indonesia bertekad untuk mendorong dan memperkuat ekonomi halal di semua sektor (Asnawi, Nur, 2021).

Sebenarnya Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan "buah tangan" manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dipastikan dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya. Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam (Zakaria BatuBara, 2019).

Perkembangan keuangan *syariah* ke depan akan mengalami sinyal yang lebih baik, karena pemerintah sudah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah* menjadi landasan normatif dalam menjalankan operasional perbankan *syariah*. Selain itu, pemerintah juga sudah membentuk komite khusus serta membuat *Masterplan* Ekonomi *Syariah* Indonesia 2019-2024 yang konsen terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi *syariah* dan industri keuangan *syariah* ke depan (Fitri Raya, 2020). Begitu besar dukungan regulasi, komitmen pemerintah dan pangsa pasar penduduk muslim yang besar, tentu peluang dan potensi yang besar Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi *syariah* dunia. Akan tetapi, M Syarif Hidayatullah (2020), sampai saat ini faktanya, pangsa pasar dari keuangan syariah terhadap sistem keuangan di Indonesia baru mencapai 9,03% (April 2020), sedangkan perbankan *syariah* masih tergolong rendah yakni sebesar 6,07%. Karenanya, kontribusi seluruh komponen dan sektor dalam pengembangan ekonomi *syariah* harus

bersinergi dengan sistem ekonomi modern untuk memperkuat dan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional demi kesejahteraan umat mencapai bangsa Indonesia yang bermartabat.

Perekonomian Indonesia

Sejak reformasi, terutama sejak SI-MPR 1998, istilah Ekonomi Kerakyatan menjadi populer sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Bung Hatta sebagai *founding father* (Bapak Pendiri) negeri ini telah meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi *Syariah* dalam dasar negara Indonesia yang dikenal sekarang menjadi ekonomi kerakyatan yang dulu dengan nama ekonomi perkoperasian kemudian ekonomi Rakyat dan ekonomi Pancasila yang terletak pada landasan Negara Indonesia, yakni Pancasila. Di dalam Pancasila telah disebutkan lima ciri dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Semua itu bersumber dari ajaran Islam (Syahruddin el-fikri, 2008). Karenanya, istilah ekonomi kerakyatan sebagai bangun usaha rakyat, dianggap paling sesuai dengan konsep pemberdayaan umat Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), bertanggungjawab dan musyawarah. Sistem ini masih sangat berguna bagi pembangunan, khususnya bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar rakyatnya masih serba kekurangan" (Syahruddin el-fikri, 2008). Sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan berbagai prinsip kemaslahatan umat, dianggap paling relevan. Sebab, selain keberpihakannya dengan rakyat, juga memiliki misi kebersamaan, kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan.

Jati diri sistem ekonomi Indonesia dalam perjalanan lebih 20 tahun reformasi mengalami pasang surut lima presiden berkuasa dari sisi pertumbuhan ekonomi mulai presiden BJ Habibie (1998-1999)

dengan pertumbuhan hanya 0,47% atas keterpurukan ekonomi usai jatuhnya kekuasaan presiden Soeharto yang ditimpa krisis yang sangat dalam, namun mampu menaikkan nilai tukar rupiah menjadi Rp. 7.000,- yang sempat terkerek dari Rp. 16.650,- per US Dollar tahun 1998. Selanjutnya meningkat dari 4% di pemerintahan Gusdur selama 2 tahun (1999-2001), kemudian mencapai 5% di pemerintahan Megawati tahun 2002-2004, dan pemerintahan SBY tertinggi pada level 6,49% atau rata-rata pertumbuhan 5,8% selama 10 tahun berkuasa (2004-2014). Hingga tujuh tahun (2014-2021) presiden Joko Widodo berkuasa baru mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 5% hingga akhir 2019, namun belum mampu melampaui pencapaian pemerintahan SBY diatas 6%. Bahkan pada 2 tahun terakhir (2020-2021) mencatat nilai terendah, diperkirakan hanya mencapai pertumbuhan ekonomi 3,7% akibat pandemi covid-19 yang menjadi *pandemic global.*

Pertumbuhan ekonomi sebagai satu indikator berhasil tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun, ada banyak faktor lain, baik di dalam negeri maupun di tataran global yang menjadi faktor penentu. Menurut ekonom Amerika Serikat, Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemampuan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang dicapai oleh tiga faktor, yakni peningkatan persedian barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif.

Pada tahun 2020 ini,disaat pandemic covid-19 sudah melandai pertumbuhan ekonomi Indonesia defisit 2,07% masih relatif lebih baik, jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN serta negara-negara G20 lainnya. Sementara untuk defisit fiskal 6,09% juga masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN serta negara G20. Dengan kata lain, pemerintah dapat mempertahankan atau mencegah resesi yang sangat dalam dengan sumber daya berasal dari fiskal, yang

memberi titik awal sangat baik untuk tahun 2021. Sejauh ini sangat baik terutama dalam pengelolaan di sisi makro dan hasilnya pada pertumbuhan dan terutama juga dalam pengelolaan dan pengendalian COVID-19. Selain itu, jika melihat implikasi COVID-19 terhadap kemiskinan dan pengangguran, juga relatif ada bukti kuat bahwa apa yang dilakukan mencegah peningkatan tajam pada kemiskinan dan pengangguran,

Fokus pemerintah pada tahun 2021, akan meningkatkan hasil yang baik pada tahun 2020 dan mempercepat pemulihan ekonomi baik dari segi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan tentunya mobilitas masyarakat yang tetap patuh protokol kesehatan. Investasi juga perlahan pulih terutama di sisi ekspor dan impor yang juga menunjukkan pemulihan yang sangat kuat. Bahkan optimisme pemerintah memproyeksikan perekonomian Indonesia dapat tumbuh di kisaran 3,7%-4,5% di akhir 2021 dan 5,2% pada tahun 2022. Proyeksi ekonomi Indonesia ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global

Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki potensi minimal pangsa pasar, konsumen utama, maka sangat pantas menjadi negara pengembangan ekonomi syariah besar didunia. Potensi besar ini direspon dengan baik oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai rencana strategis, yakni (Rehia Sebayang, 2021).

1. *Masterplan* Ekonomi *Syariah* Indonesia

Mendongkrak ekonomi syariah Indonesia telah menjadi salah satu agenda pemerintah. Presiden JokoWidodo telah meluncurkan *Masterplan* Ekonomi *Syariah* Indonesia 2019-2024, merupakan program membangkitkan ekonomi *syariah* di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi *syariah* bisa menjadi penggerak bagi ekonomi nasional dan sumber

kesejahteraan umat. Apalagi mengingat fakta Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Ekonomi *syariah* memiliki potensi sangat besar di tingkat dunia, yang mana pada tahun 2023 akan mencapai 3 triliun dolar AS atau kurang lebih Rp.45 ribu triliun. Tentu saja angka pantastis, karena APBN baru mencapai Rp.2 ribu triliun lebih. Ini berarti ekonomi *syariah* akan mampu mendongkrak perekonomin Indonesia sekaligus memberi kesejahteraan umat.

2. Ekonomi *Syariah* di Indonesia akan terus berkembang

Sejalan dengan master plan ekonomi *syariah* yang mengharapkan Indonesia bisa menikmati kebangkitan ekonomi *syariah,* Menteri Keuangan Sri Mulyani juga optimistis ekonomi *syariah* di Indonesia akan terus berkembang dan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan di tengah keterpurukan akibat pandemik COVID-19 sekalipun. Sistem ekonomi *syariah* memiliki keunikan tersendiri karena mengusung nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Misalnya kejujuran, keadilan, tolong menolong, dan profesional, serta keberpihakan pada kelompok lemah. Penandatanganan nota kesepahaman antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengembangan ekonomi dan keuangan *syariah*. Di dalamnya mencakup tujuan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Kesepahaman antara KNEKS dengan MUI tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini diharapkan dapat mengembangkan dan menggali potensi perekonomian *syariah* di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Peran ekonomi *syariah* terhadap perekonomian nasional masih belum optimal saat ini meski Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan *syariah* secara maksimal.

3. Potensi ekonomi *syariah* Indonesia besar

Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy Report* 2019/2020, Indonesia berpotensi meningkatkan kapasitas ekonomi *syariah* dalam negeri. Indonesia termasuk dalam negara yang mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam ekonomi syariahnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung naik ke posisi ke-5 tahun ini dari ke-10 di tahun 2018. Beberapa negara telah memimpin dalam membangun ekosistem yang kuat, Malaysia memimpin dalam laporan Indikator Ekonomi Islam Global (GIEI), diikuti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Arab Saudi. Di antara penggerak besar dalam GIEI tahun 2020, Indonesia naik dari posisi kesepuluh pada 2018 menjadi peringkat kelima, didorong oleh inisiatif yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan strategi ekonomi Islam yang berdedikasi.

Laporan GIEI memperkirakan bahwa umat muslim menghabiskan 2,2 triliun dolar pada tahun 2018 di sektor makanan, farmasi, dan gaya hidup syariah. Pengeluaran ini mencerminkan pertumbuhan tahun ke tahun 5,2 % yang sehat dan diperkirakan akan mencapai 3,2 triliun dolar pada tahun 2024 dengan Tingkat Pertumbuhan Tahunan Kumulatif ("CAGR") sebesar 6,2 persen. Selain itu, aset keuangan Islam dilaporkan telah mencapai 2,5 triliun pada tahun 2018.

4. Investasi berperan penting dalam mendongkrak ekonomi *syariah*

State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 juga menyebutkan bahwa investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi *syariah* dunia. Pada tahun 2018/2019, sebanyak 1,2 miliar dolar diinvestasikan secara global di berbagai perusahaan ekonomi Islam. Itu mencerminkan pertumbuhan 399% pada transaksi yang sebanding di seluruh produk halal, gaya hidup Islami dan keuangan Islam dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan

rentang luas akuisisi yang dipimpin perusahaan, investasi ventura dalam perusahaan rintisan teknologi Halal, dan investasi ekuitas swasta.

Produk halal mengumpulkan bagian terbesar dari investasi, terhitung 54% dari nilai kesepakatan, diikuti oleh keuangan Islam sebesar 42%, dan 4% dalam gaya hidup Islami, terutama dalam mode sederhana dan pariwisata ramah Muslim. Obat-obatan halal, kosmetik dan media bertema Islami, meski menarik investasi, masih tertinggal. Dalam dekade terakhir, keuangan Islam telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, melampaui pasar keuangan konvensional. *Global Islamic Economic Report* tahun 2020 memperkirakan nilai aset keuangan *syariah* meningkat 13,9% pada 2019, dari $2,52 triliun menjadi $2,88 triliun. Selanjutnya, di tahun 2021, sejalan dengan tren global yang meningkat, keuangan *syariah* di Indonesia tumbuh positif di tengah pandemi. Dari sisi perbankan pada Mei 2021, aset perbankan *syariah* tumbuh 15,6% (*year-on-year)* atau mencapai Rp. 598,2 triliun.

Khusus keuangan syariah, dinilai terdapat potensi pengembangan yang sangat besar, karena menekankan prinsip atau nilai-nilai Islam seperti keadilan, pada praktik keuangan *syariah* terutama melalui skema *risk-sharing* (berbagi risiko). Selain prinsip keadilan, potensi keuangan *syariah* juga terlihat dari pasar modal *syariah* jumlah investornya yang meningkat 9,3% selama tiga bulan pertama tahun 2021. Per Juli 2021 sendiri, *outstanding* sukuk negara Indonesia tercatat sebesar 1.076,01 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 10,75% (*year-to-date*) dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa mendatang. Di pasar internasional, Indonesia berada di antara para kontributor utama penerbitan *sukuk* global. Khusus *sukuk* (negara) terbukti sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dapat diandalkan, dalam periode 2013-2021, terdapat 3.447 proyek yang dibiayai melalui sukuk.

Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pasar keuangan *syariah* dengan mengembangkan lebih banyak varian pembiayaan melalui sukuk atau *blended finance*, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan *Green Sukuk*.

Di sektor keuangan syariah lainnya, seiring dengan berkembangnya *ekosistem financial technology* (*fintech*), aset *fintech syariah* di Indonesia tumbuh mencapai 134 miliar rupiah pada Juni 2021 yang mewakili 3% dari total aset *fintech* di Indonesia. Meski kontribusi terhadap keseluruhan aset *fintech* relatif kecil, aset *fintech syariah* telah meningkat lebih dari 50 kali lipat dalam 2,5 tahun terakhir. *Global Islamic Fintech Report* (2021) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam hal *market size* transaksi *fintech syariah* yang mencapai USD 2,9 miliar selama tahun 2020. Indonesia berada di posisi 5 besar, di belakang Arab Saudi (USD 17,9 miliar), Iran (USD 9,2 miliar), Uni Emirat Arab (USD3,7 miliar), dan Malaysia (USD3 miliar). Lagi-lagi menjadi potensi besar pengembangan ekonomi *syariah* di Indonesia.

Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Kesejahteraan Umat

Ekonomi syariah yang bermakna ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islami merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif, karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti (Mustafa Edwin Nasution, Dkk. 2007).

Menurut Heri sudarsono (2004), ada beberapa prinsip dasar sistem ekonomi *syariah* yang menjadi titik point utama dalam mewujudkan kesejahteraan umat, yakni:

a) Kebebasan Individu. Manusia mempunyai kebebasan membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebebasan manusia dalam *syariah* didasarkan atas

nilai-nilai *tauhid* yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Landasan itu, manusia dapat semaksimal melakukan inovasi yang baik, karena dalam nilai-nilai *tauhid* dan ajaran Islam justru manusia adalah *khalifah* (wakil) Allah dalam memelihara dunia seisinya, sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan hak penuh untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dengan konsekuensi selalu memelihara alam itu sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan keadaan sekarang, bahwa manusia selalu menggunakan potensi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelangsungan dan kelestarian, mengakibatkan bencana alam yang tak terkendali pada akhir-akhir dekade ini.

b) Hak Terhadap Harta. *Syariah* mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai ketentuan Islam. *Syariah* mengatur kepemilikan harta atas dasar kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan meng-hormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa : 29). Bagi seorang muslim harta merupakan amanah Allah, yang dipercayakan kepada manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan nantinya. Seorang muslim tidak akan menyia-nyiakan amanah, karena pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.

c) Ketidaksamaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar. *Syariah* mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Disadari bahwa di dunia ini ada orang yang mampu dan yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,

sehingga konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama haruslah ada penyeimbang dari ketidaksamaan ekonomi tersebut. Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Dalam zakat telah diatur beberapa ketentuan yang harus dibayarkan meliputi:

a) Zakat harta; merupakan kewajiban membayar zakat setelah memenuhi syarat wajib (haul dan nizab) dan syarat yang telah ditentukan, dapat berupa (1) zakat barang niaga, (2) zakat barang tambang, (3) zakat profesi, (4) zakat binatang ternak, dan (5) zakat pertanian
b) Zakat *fitrah,* merupakan kewajiban membayar zakat yang dilakukan di bulan suci Ramadhan.

Ketentutan zakat di atas semuanya ditujukan bagi orang-orang yang sudah memiliki harta lebih sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam *fiqh*. Realisasi dari pernyataan bahwa zakat dan bentuk sedekah sunnah yang lain sebagai penyeimbang ekonomi dapat dilihat dari penggunaan dana-dana zakat, *infaq* dan sedekah yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ketidaksamaan ekonomi masyarakat dapat diatasi.

d) Jaminan Sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dan dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing dalam sebuah negara. Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi negara untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai prinsip "hak untuk hidup". Dalam sistem ekonomi *syariah*, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka *syariah* memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, *infaq*,

dan sedekah sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan). Pengambilan zakat dari orang-orang kaya, otomatis membersihkan dari sifat-sifat kikir dan mendorong mereka membiasakan berkorban dan memberikan kepada saudaranya yang tiada mampu. Sedangkan dari segi pemberian zakat kepada mereka yang fakir (membutuhkan), tentu membersihkan jiwa mereka dari rasa dendam dan *hasud,* menyelamatkan mereka dari berbagai kegoncangan. Dengan demikian, semakin amanlah orang-orang kaya dari kejahatan-kejahatan si fakir serta terciptanya keamanan dan rasa saling cinta pada seluruh masyarakat.

e) Larangan Menumpuk Kekayaan. Secara langsung sistem ekonomi *syariah* (*sharia*) melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya. Karena akan menghambat perputaran perekonomian suatu negara. Sehingga seorang muslim mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal, dan diantaranya adalah harta.

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(QS. Al-Maidah: 87)

f) Distribusi Kekayaan. Karena syariah mencegah terhadap penumpukan harta, maka syariah sangat menganjurkan kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaannya. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan untuk kemaslahatan kehidupan mereka, upaya ini akan menjadi

masalah, bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan- ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah merupakan perbuatan yang zalim.

g) Kesejahteraan Individu dan Masyarakat. Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dan penting dalam pembentukan sikap individu, sehinga karakter individu bisa dipengaruhi oleh karakter masarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada, maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri. "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. Al-Maidah : 2).

Kontribusi ekonomi *syariah* di era pandemi covid-19 telah membuktikan (Jureid, 2020) bahwa masyarakat Indonesia sangat merasakan betapa bencana covid-19 telah membuat perekonomian hancur dan tidak bisa lagi berusaha dengan baik. Banyak jenis usaha telah ditutup hanya demi mematuhi peraturan PSBB dan physical distancing, mulai dari usaha kaki lima, sopir becak, kantin, travel, rumah makan dan usaha lainnya. Selama *stay at home* tidak dapat menghasilkan apa-apa untuk kebutuhan hidup selain harus menggadaikan barang simpanannya bagi yang memiliki simpanan, mengambil tabungan bagi yang punya tabungan. Kebutuhan sehari-hari hanya dipenuhi dengan mengharapkan bantuan berupa zakat dari mereka yang lebih punya dengan menyalurkan zakat mal dan dibayarkan khusus untuk masyarakat yang terdampak covid.

Berdasarkan kondisi di atas, dapat dijelaskan bahwa zakat telah banyak meringankan beban masyarakat di masa covid ini. Pelembagaan zakat adalah solusi kesejahteraan bagi masyarakat. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang lebih luhur sebagai *khalifah* Allah di bumi. Pengelolaan zakat harus dioptimalkan secara produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada umumnya dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, beberapa perusahaan dan masyarakat harus mengoptimalkan lembaga zakat terlebih di masa covid-19 ini.

Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka, Menggunakan manajemen dan administrasi modern, dan Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan sebaik-baiknya. Kesulitan masyarakat direspon pemerintah dengan memberi bantuan sembako dan uang 600 ribu rupiah setiap bulan selama corona. Bantuan pemerintah juga adalah salah satu wujud pengamalan ekonomi *syariah* yang profit *oriented*nya bukan hanya dunia tetapi juga akhirat, dapat dikategorikan sebagai shodaqah atau zakat dalam prinsip ekonomi *syariah.*

Zakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami, karena zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam zakat ada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yang merupakan prinsip ekonomi *syariah*. Segala sesuatu yang kita miliki yang Allah ciptakan, termasuk harta kita adalah milik Allah SWT. Semuanya merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan

masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrumen dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antarsesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya.

Ekonomi *syariah* memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*daruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu. setidaknya zakat dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak kerusakan ekonomi, termasuk saat ini adalah yang terdampak covid-19. Fungsi sosial harta dalam Al Qur'an adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Konsep ekonomi *syariah* menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/ equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi *syariah* mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangun ekonomi *syariah* tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pada sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

Senafas dengan makna zakat, dipastikan memiliki hikmah (nilai-nilai positif) dari pemungutan, pengelolaan, dan pendistrbusian dana zakat itu sendiri. Terutama terkait dengan program jangka pendek dan menengah yang sering kali tantangannya datang setiap saat dan sepanjang zaman. Misal, kebutuhan makan-minum (konsumsi), pakaian dan tempat tinggal. Begitu pula kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang harus dinikmati oleh semua dan setiap warga-negara dalam konteks kebangsan dan kenegaraan, atau kesejahteraan umat Islam dalam konteks kehidupan keagamaan dalam hal ini agama Islam (Muhammad

Amin Suma, 2013).

Di masa covid-19 ini, kekurangan pangan dan kebutuhan yang terjadi akibat covid-19 dapat diatasi secara perlahan dengan adanya bantuan dana zakat dari berbagai pihak yang menyalurkannya baik dari pemerintah, swasta maupun perseorangan. Zakat telah mengurangi beban kesulitan masyarakat terdampak covid-19 di bidang pangan (*dharury*), zakat telah mengangkat derajat masyarakat terdampak sehingga tidak menyebabkan meminta-minta. Selain zakat, yang ada secara lembaga dan pribadi, sedekah, *infaq* dan *wakaf* juga cukup banyak menerima bantuan berupa makanan, bahan pokok dan uang untuk menolong para masyarakat terdampak covid. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban, zakat adalah item bisnis ekonomi syariah yang berorientasi kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat. Zakat adalah beban moral para si kaya dan hak si miskin yang kekurangan. Bila zakat dikelola secara benar dan penuh kesungguhan, idealnya zakat dapat mengurangi kesenjangan masyarakat, terutama mengurangi mereka yang berkategori fakir dan miskin.

Berdasarkan keadaan riilnya, zakat ternyata mampu meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok, dan menjaga daya beli warga masyarakat yang terdampak Covid-19. Para *muzakki* adalah bagian terpenting ekosistem zakat, *infaq* dan sedekah. Lembaga zakat harus menjaga kepercayaan dan komitmen mereka untuk memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Cara Efektif Internalisasi Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia

Melihat potensi yang ada dalam sistem ekonomi *syariah*, maka aplikasi secara menyeluruh dalam tataran sosio-politik dan sosio-ekonomi Indonesia harus segera dilakukan, ada beberapa tahapan jalur alternatif untuk memulai akselerasi penginternalisasian dan pengaplikasian sistem ekonomi *syariah* yang dapat digunakan (Zakaria

Batu Bara, MA, 2019), yakni:

1. Jalur lembaga pendidikan, melalui jalur ini dapat ditanamkan sejak dini *mainstream* kebijakan yang terdapat dalam ekonomi *syariah*, sehingga potensi output sumber daya manusia (SDM) akan lebih unggul lagi dalam persaingan ekonomi, intelek yang bertakwa.
2. Jalur lembaga keuangan, setelah penanaman mainstream kebijakan ekonomi *syariah* melalui jalur pendidikan sudah tertata dengan baik, melalui jalur ini, secara aplikatif dari prinsip dasar ekonomi *syariah* akan diterapkan, sehingga pengembangan sektor riil akan lebih terdukung dengan baik karena pada dasarnya sektor keuangan adalah sektor pendukung bagi sektor riil. Ada beberapa aplikasi yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Indonesia dengan memperhatikan prinsip *syariah* yang sudah ada, yaitu: a) Aplikasi perbankan, b) Aplikasi pasar modal dan pasar uang, c) Aplikasi *pilantrophy* Islam; sentralisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan produktivitas *wakaf* .
3. Jalur lembaga pemerintahan/hukum. Pengesahan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi *syariah*; RUU perbankan *syariah*, RUU sukuk dan tindak lanjut beberapa *fatwa* DSN-MUI yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan negara.

Ekonomi Syariah Membangun Indonesia Bermartabat

Perkembangan ekonomi *syariah* di Indonesia menunjukkan kemajuan yang patut disyukuri dan diapresiasi. Perkembangan tersebut tidak hanya dijumpai pada tataran wacana yang bersifat teoritik-normatif, namun sudah sampai pada tataran yang lebih praktis-aplikatif. Pada tataran wacana, kita menjumpai banyak pemikiran ekonomi *syariah* yang dikembangkan oleh para ahli. Kini kita merasakan betapa

ekonomi *syariah* tidak hanya menjadi 'menara gading' melainkan sudah lebih membumi dan lebih aplikatif. Pemikiran *fiqh muamalah* misalnya, sudah mulai dikembangkan secara praktis sesuai dengan persoalan aktual kontemporer. Bahkan pemikiran *fiqh muamalah* yang dikembangkan oleh para ulama, telah diadaptasi sedemikian rupa dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan *Syariah* Nasional (DSN) telah menjadi 'panduan praktis' bagi publik dalam *bermuamalah* sesuai *syariah*.

Kemajuan pemikiran ekonomi *syariah* juga tampak pada ikhtiar untuk mencari relevansinya dengan ekonomi modern. Kini kita menjumpai banyak buku yang mengulas tentang relasi antara ekonomi modern dengan ekonomi *syariah.* Gagasan para pemikir ekonomi Islam dituangkan dalam konteks yang lebih modernis. Misalnya, Abu Yusuf yang menggagas tentang pajak dan tanggung jawab pemerintah terhadap ekonomi. Selain itu juga gagasan Ibn Taimiyyah yang berbicara tentang kebijakan fiskal, terutama mengenai sumber penerimaan dan alokasi belanja keuangan negara. Kondisi ini makin menegaskan bahwa ekonomi *syariah* tidak hanya identik dengan bank *syariah*, melainkan juga mencakup ekonomi makro, ekonomi mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembiayaan publik sampai dengan ekonomi pembangunan. Sedangkan pada tataran praktis, lembaga keuangan publik *syariah* mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada sektor perbankan misalnya, hingga Oktober 2018, jumlah Bank Umum *Syariah* sudah mencapai 14 buah dengan total aset sebesar 304,292 miliar rupiah.

Sedangkan Bank Umum Konvensional yang membuka Unit Usaha *Syariah* sebanyak 20 buah, dengan total aset 149,957 miliar rupiah, dan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* mencapai 168 buah dengan jumlah kantor sebanyak 450 buah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga November 2018, jumlah reksadana

syariah sebesar 220 atau sekitar 10,61% dari total reksadana. Jumlah ini cukup tinggi bila dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 7.84%. Perkembangan Efek *Syariah* juga sangat menggembirakan, terdapat 407 Efek *Syariah* dari berbagai sektor. Jumlah sukuk *syariah* juga mengalami peningkatan, sudah mencapai 108 *sukuk syari'ah.* Perkembangan saham *syariah* juga mengalami kenaikan, hingga November 2018, Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia di *Jakarta Islamic Index* mencapai 2.065.369,10, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2010 sebesar 1.134.632,00.

Perkembangan lembaga keuangan *syariah* juga ditunjukkan dengan tingginya jumlah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) yang saat ini diperkirakan mencapai 4500 buah. BMT sendiri merupakan lembaga keuangan *syariah* yang memberikan layanan pembiayaan *syariah* pada usaha mikro bagi anggotanya. Keberadaan BMT menjadi strategis, terutama untuk menjangkau wilayah perdesaan (sektor pertanian dan sektor informal). Perkembangan ekonomi *syariah* juga nampak dengan berdirinya Bank *Wakaf* Mikro, yang berfungsi memberikan layanan penyediaan akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Hingga Desember 2018, OJK mencatat sebanyak 41 Bank *Wakaf* Mikro telah berdiri di Indonesia.

Pengelolaan zakat dan *wakaf* juga mengalami kemajuan. Upaya penguatan pengelolaan zakat terus dilakukan pemerintah, misalnya dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan diterbitkannya Undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam ajaran zakat juga, ada filosofi yang sangat mendalam bahwa kewajiban orang-orang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin dan

dhuafa. Dan sebaliknya, sesungguhnya ada hak orang miskin atas harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya.

Proses penunaian zakat bukan hanya akan mensucikan harta kekayaan dan jiwa orang-orang yang berzakat. Namun sejatinya juga "transfer keberdayaan" dari para *Muzakki* (*the have*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Dengan demikian, akan ada "aliran kemaslahatan" yang terus mengalir tak pernah putus. Bila zakat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat Islam di sebuah tempat, apalagi dengan jumlah *muzakki* yang signifikan. Tentulah kelolaan dananya pun akan besar jumlahnya. Dan ini akan berdampak pada berkurangnya kaum miskin dan menumbuhkan kesejahteraan ditengah masyarakat terutama di era covid-19 yang sedang mengancam keberlangsungan hidup manusia secara normal.

Berkaitan dengan pengelolaan *wakaf*, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang tersebut melahirkan paradigma baru tentang pengelolaan *wakaf* di Indonesia, terutama pengelolaan *wakaf* uang. Hal ini merubah paradigma publik bahwa obyek harta wakaf tidak hanya tanah, namun juga meliputi barang-barang bergerak, seperti uang dan surat berharga lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut, tidak bisa dilepaskan dari geliat perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Menurut analisis Hilman Latief, munculnya filantropi Islam di Indonesia merupakan fenomena kepedulian masyarakat muslim kelas menengah ke atas terhadap persoalan kemanusiaan. Perkembangan ekonomi syariah pada satu sisi melahirkan kegembiraan atas optimisme masa depan ekonomi syariah sebagai 'sistem ekonomi alternatif'. Namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru untuk peningkatan kualitas. Perkembangan ekonomi *syariah* tidak boleh hanya bertumpu pada sektor keuangan, namun perlu penguatan pada sektor riil. Secara kelembagaan, institusi keuangan publik *syariah* nampaknya juga perlu dikelola untuk melahirkan

sinergisitas dan harmonisasi. Dengan demikian, perkembangan ekonomi *syariah* akan dapat dinikmati oleh kalangan luas terutama kaum *dhuafa,* (Mansyur Efendi, 2019).

Pada akhirnya, Ekonomi *Syariah* adalah Solusi alternatif terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pengimpelementasiannya berbasis zakat, *infaq* dan *shadaqah*. Instrumen terbaik ekonomi *syariah* dalam upaya mensejahterakan masyarakat sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang bermartabat.

Kesimpulan

1. Instrumen penggerak dan penyeimbang perekonomian negara dari sistem ekonomi *syariah* apabila diaplikasikan dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia, sudah dapat dipastikan akan terbentuk suatu negara yang tegak dan kokoh dengan rakyatnya yang sejahtera, tentunya dengan beberapa tahapan jalur internalisasi ekonomi *syariah*, yaitu jalur lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan penguatan dengan jalur hukum.
2. Alternatif utama berdasarkan sistem ekonomi *syariah* dalam mensejahterakan masyarakat adalah zakat dan dengan derivasinya telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan memiliki potensi yang luar biasa mampu mengatasi dampak bencana alam, tak terkecuali warga terdampak covid-19. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan
3. Perkembangan ekonomi *syariah* tidak boleh hanya bertumpu pada sektor keuangan, namun perlu penguatan pada sektor riil. Secara kelembagaan, institusi keuangan *syariah* juga

perlu dikelola untuk melahirkan sinergisitas dan harmonisasi, sehingga perkembangan ekonomi *syariah* akan dapat dinikmati oleh kalangan luas terutama *dhuafa.*

DAFTAR PUSTAKA

Amin Summa, 2013; "Ulumul Qur'an", Rajawali Press, Jakarta. https://www.rajagrafindo.co.id/produk/ulumul-quran-amin-summa/

Asnawi, Nur (2021) Mendukung masterplan ekonomi syariah Indonesia melalui internalisasi pemasaran syariah pada industri halal strategis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. http://repository.uin-malang.ac.id/7874/.

Fitri Raya, 2020; Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat; Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2120. Vol.12, No.1. (2020).

Heri sudarsono (2004), Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. H. UII Press Yogyakarta

Jureid, 2020, Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat pada Era Covid-19, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Juni 2020

Mansyur Efendi, 2019. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, https://syariah.iain-surakarta.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/, diunduh; Selasa, 21 des 2021, pukul 21:50

Mustafa Edwin Nasution,2007; Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana

M. Ilham Ramadhan Avisena.2020. Kontribusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Diperlukan dalam Pemulihan: https://mediaindonesia.com/ekonomi/379364/kontribusi-ekonomi-dan-keuangan-syariah-diperlukan-dalam-pemulihan

Rehia Sebayang, 2021, Menakar Potensi Ekonomi Syariah Indonesia, Ekonomi Busines, https://www.idntimes.com/ diunduh Rabu, 17 nov 2021, pukul 09.08 wita

Syaharuddin el-Fikri, 2008, Kembali ke Khittah UUD 1945, file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/1-Article%20Text-4-1-10-20190710-1.pdf, diunduh, Rabu, 15 Desember 2021, 10:20 wita

Syarif Hidayatullah, M, 2020. Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia; (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat), IJTIHAD Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. ISSN: 1907-4514, e-ISSN: 2614-8471. Vol. 14 No. 2, September 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4619

Zakaria Batu Bara, MA, 2019, Ekonomi Syariah sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan untuk Mencapai Indonesia Sejahtera, -Article Text-4-1-10-20190710.pdf, diunduh Rabu, 17 Nov 2021, pukul 09:43 wita

Bab 13

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH: ICMI DAN MARTABAT INDONESIA DI MATA DUNIA

Muhammad Majdy Amiruddin[1]

Pendahuluan

Pada saat penulis masih berkuliah di negeri orang, Indonesia sangat masyhur oleh dua hal utama: Indomie dan Bulutangkis. Gerai-gerai toko selalui dipenuhi oleh makanan instan ini. Bahkan di salah satu di negara Afrika, Indomie termasuk makanan mewah karena mampu menyajikan aroma kaldu ayam yang merupakan favorit penduduk setempat. Lain halnya dengan dengan Badminton, nama-nama susi susanti, taufik hidayat hingga the minion kerap kali digaungkan tatkala menyebut nama Indonesia *Islamic.* Ada sedikit rasa bangga terselip, namun juga sedikit sesal. Mengapa Indonesia hanya dikenal kerena makanan dan olahraga?[1]

Faktanya, Indonesia mampu berbicara banyak dalam beberapa hal, termasuk dalam keuangan syariah. *Islamic Finance Country Index* (IFCI) dari *Global Islamic Finance Report* 2021 menempatkan Indonesia di urutan pertama. Salah satunya ini disebabkan oleh sektor keuangan sosial Islam di Indonesia paling dinamis di dunia. Industri keuangan syariah Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebagai hasil dari pencapaian IFCI yang membanggakan tahun ini, yang merupakan

[1] Dosen Muamalat IAIN Parepare, tenaga Pengajar di Pesantren DDI Mangkoso, dan anggota komisi pengkajian dan penelitian MUI Sulawesi Selatan.

bagian dari rencana ekonomi global untuk mendukung pemulihan pascapandemi .

International Islamic Financial Centers Index (IIFCI) adalah pemeringkatan kondisi perbankan dan keuangan Islam di seluruh dunia. Selanjutnya, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan keuangan sosial *syariah, FinTech*, dan *Green Economy*, yang diharapkan dapat membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam hal ini. Pasar modal *syariah* Indonesia ditopang oleh dukungan penuh dari Presiden, unsur lembaga pemerintah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. KNEKS memiliki peran kunci dalam hal ini, mendorong perbankan dan keuangan *syariah* untuk lebih dikenal luas di pasar layanan keuangan *syariah* global .

Selain itu, Indonesia memiliki aset *wakaf* dan potensi *wakaf* uang yang sangat besar sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sebesar menjadi Rp. 2.000 triliun dan Rp. 180 triliun. Peningkatan efisiensi, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan dapat dicapai melalui pengelolaan *wakaf* produktif yang efektif dan inovatif. Ekonomi dan keuangan Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap era normal baru dengan membantu memulihkan dan membangun kepercayaan dalam pembangunan ekonomi melalui peran unik *wakaf*, menurut Sugeng.

Pada tahun sebelumnya, posisi Indonesia di industri keuangan *syariah* global naik ke peringkat kedua dari posisi keempat di tahun 2019. Laporan Pengembangan Keuangan Islam yang diterbitkan pada 9 Desember oleh *Refinitiv* dan Perusahaan Islam untuk Pengembangan Sektor Swasta (ICD), sebuah organisasi pengembangan sektor swasta milik Bank Pembangunan Islam, mengungkapkan fakta ini (IsDB). Pertumbuhan tahunan sebesar 14 persen diterjemahkan menjadi total aset keuangan Islam global sebesar 2,88 triliun dolar AS pada 2019,

menurut laporan tersebut.

Diperkirakan US$ 1,2 triliun diinvestasikan dalam aset keuangan Islam di Dewan Kerjasama Teluk (tidak termasuk GCC) pada 2019, diikuti oleh Timur Tengah dan Afrika Utara sebesar US$ 755 miliar (tidak termasuk GCC). *Aset Global Islamic Finance* sebagian besar berasal dari industri perbankan syariah. Aset global di sektor ini tumbuh sebesar 14 persen pada 2019, menjadi total $1,99 triliun. Pertumbuhannya hanya 1% dibandingkan 2018 dan rata-rata pertumbuhan tahunan 5% dari 2015 hingga 2018, jadi tidak banyak.

Keuangan syariah adalah industri yang berkembang di negara-negara maju seperti Malaysia, Indonesia, Bahrain, UEA (Uni Emirat Arab), dan Arab Saudi, menurut sebuah laporan baru. *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) Indonesia naik ke posisi kedua untuk pertama kalinya tahun ini karena peringkat yang tinggi untuk pengetahuan dan kesadaran keuangan *syariah.*

Keuangan Islam telah ditahan oleh kurangnya data yang relevan dan dapat ditindaklanjuti terlalu lama. Oleh karena itu, semakin pentingnya Indikator Pengembangan Keuangan Islam bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar. Ada pasar $3 triliun dalam keuangan Islam, dan saya menantikan masa depannya, terutama dalam hal *Sukuk* dan karena keuangan Islam banyak berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, salah satu tren terpenting dalam bisnis global saat ini. Laporan tahun ini akan menjadi titik referensi penting bagi keadaan keuangan Islam selama masa-masa sulit ini. Kami yakin bahwa keuangan *syariah* akan memainkan peran penting dalam memitigasi konsekuensi sosial dan ekonomi.

Investasi hijau dan bertanggung jawab sosial (SRI) diperkirakan akan meningkat di UEA dan Asia Tenggara pada tahun 2020, menurut laporan itu. Setelah pandemi ini, beberapa bank *syariah* telah melaporkan kerugian dan pengurangan keuntungan sepanjang

tahun ini.

Pandemi juga menyebabkan pertumbuhan di beberapa kawasan industri karena beberapa regulator beralih ke keuangan *syariah* dalam upaya memitigasi dampak ekonomi dari pandemi. Setelah sempat terhenti sejenak dalam penerbitan instrumen keuangan syariah pada triwulan I-2020, penerbitan sukuk korporasi juga meningkat. Terlepas dari dampak pandemi pada perdagangan dan ekonomi, perusahaan mengambil keuntungan dari biaya pinjaman yang rendah untuk memperkuat neraca mereka .

Sementara ICD adalah anggota Kelompok Bank Pembangunan Islam, itu adalah lembaga keuangan pembangunan multilateral (IsDB). Pada bulan November 1999, *International Development Association* (IDA) didirikan untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara anggotanya dengan menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek sektor swasta, mempromosikan persaingan dan kewirausahaan, dan memberikan layanan konsultasi kepada negara-negara anggotanya.

Genaologi dan Embrio keuangan Islam

Presetasi Indonesia menduduki peringkat pertama dalam keuangan sosial Islam dan keberhasilannya menjaga kestabilan ekonomi masa COVID-19 adalah hal yang sangat membanggakan. Sudah berkali-kali ekonomi Indonesia dibantai oleh badai resesi dan krisis, namun ia tetap bisa bangkit kembali meski dengan tertatih-tatih. Salah satu pilar penting dalam masa pemulihan tersebut adalah ekonomi *Syariah* seperti yang terjadi pada krisis moneter 1998 dan yang teranyar, peran keuangan sosial Islam masa pandemi. Jika kita menengok ke belakang, Perbankan dan lembaga keuangan didirikan di Indonesia pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank *Muamalat* Indonesia (BMI). Indonesia baru memiliki bank *syariah* sejak tahun 1996, sedangkan Malaysia sudah memiliki bank *syariah* sejak tahun 1983.

Tapi ada penjelasan yang bagus untuk ini. Perbankan dan lembaga keuangan *syariah* sudah lama dicita-citakan di Indonesia sebelum berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Indonesia. Beberapa negara Muslim telah melihat kelahiran lembaga keuangan Islam sebagai hasil dari penciptaan *Islamic Development Bank* (IDB). Akibatnya, bank-bank Islam telah muncul di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki, antara lain (Antionio, 2001). Bank *syariah* tidak dapat didirikan di Indonesia karena alasan politik pada waktu itu. Karena konotasi ideologisnya, sebagian orang melihat pendirian bank *syariah* sebagai ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat. UU Pokok Perbankan 14 Tahun 1967 tidak mengatur bank *syariah* yang menganut prinsip bagi hasil.

Untuk lebih memahami bagaimana bank *syariah* masuk ke dalam perekonomian ini, orang Indonesia datang dengan ide untuk membuka mereka sendiri pada tahun 1980. Perbankan *syariah* diuji di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan Jakarta dalam skala kecil sebagai proyek percontohan (Koperasi Ridho Gusti).

Ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan untuk membuat bank *syariah* pada tahun 1990, dibentuklah kelompok kerja. *Workshop* perbankan dan bunga perbankan diselenggarakan Majelis Ulama (MUI) di Cisarua, Bogor (Jawa Barat) pada 18 Agustus-20 Agustus 1990. Pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, hasilnya Dari lokakarya tersebut dibahas secara luas, yang mengarah pada pembentukan kelompok kerja untuk pendirian bank syariah di Indonesia. Menghubungi dan berkonsultasi dengan semua pihak di bidang keuangan menjadi tanggung jawab Tim Perbankan MUI.

Berkat kerja keras Tim Perbankan MUI, bank *syariah* pertama di Indonesia, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), berdiri pada 1

November 1991. Didirikan pada 1 Mei 1992, dengan modal awal Rp. 106.126.382.000,- dan terus beroperasi sampai sekarang

Bank-bank nasional memiliki sedikit minat pada bank-bank Islam pada awal keberadaannya. Hukum *Syariah* mengizinkan "bank dengan sistem bagi hasil" untuk beroperasi, menurut UU No. 7 Tahun 1992; namun, tidak ada spesifik di bawah hukum *syariah* atau jenis bisnis yang diperbolehkan. Negara ini memiliki sistem perbankan ganda sejak revisi UU No. 7/1992 tahun 1998, ketika secara eksplisit disebutkan bahwa perbankan konvensional dan perbankan *syariah* ada. Bank IFI dan Bank *Syariah* Mandiri adalah dua dari sekian banyak bank *syariah* yang bermunculan dalam merespon peluang tersebut, begitu juga dengan Bank Jabar dan Bank Aceh.

Undang-Undang Perbankan *Syariah* Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang & Jasa telah disahkan oleh pemerintah. Dengan kata lain: Undang-undang yang membuat perbankan syariah nasional disahkan pada 16 Juli 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbankan *syariah* diharapkan dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan aset lebih dari 65 persen per tahun selama lima tahun terakhir. Peran industri dalam menopang perekonomian Dua tahun dari sekarang, 11 Bus (2009-2010).

Perbankan *syariah* telah mengalami kemajuan yang signifikan selama dua dekade terakhir dalam hal institusi dan infrastruktur pendukung, sistem regulasi dan pengawasan, serta pemahaman publik. Di sini, Anda akan menemukan salah satu sistem keuangan Islam terbaik dan terlengkap di dunia. Menurut laporan Dana Moneter Internasional, Bank Umum *Syariah*, Unit Usaha *Syariah* yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS memiliki total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dan pangsa pasar 4,61 persen pada Juni 2015. Total

aset kotor Provinsi DKI Jakarta adalah Rp. 201,397 triliun, Rp. 85.410 triliun, dan Rp. 110.509 triliun (BUS dan UUS) (BUS dan UUS).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan perbankan hingga akhir tahun 2013. Oleh karena itu, OJK telah memikul tanggung jawab untuk pengawasan dan pengaturan perbankan *syariah*. Selama beberapa tahun terakhir, OJK, regulator jasa keuangan Indonesia, telah menyempurnakan visi dan strategi kebijakan untuk mengembangkan sektor perbankan *syariah* Indonesia, yang dituangkan dalam *Roadmap* Perbankan *Syariah* Indonesia 2015-2019 yang diresmikan pada tahun 2014.

ICMI dan Inklusi Keuangan *Syariah* berbasis *Community Based Development*

Bank, yang dibuka pada Mei 1992, diciptakan oleh beberapa Muslim Indonesia yang peduli dengan suku bunga. Mereka percaya bahwa bank dilarang memungut bunga. Bank konvensional dianggap ilegal oleh sebagian orang. Untuk periode 1984-1990, Kiai Haji Hasan Basri menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga keuangan bebas bunga menjadi dambaan masyarakat muslim di Indonesia. Ulama Muhammadiyah Muara Teweh menanggapinya dengan menggelar seminar bank tanpa bunga di Hotel Safari Cisarua, Bogor, pada 18-20 Agustus 1990, menurut mimbar Ulama: Perjalanan 42 Tahun MUI (2017:17). Selain akademisi dan pejabat Bank Indonesia serta ekonom, seminar ini juga dihadiri oleh menteri terkait. Pada akhir Agustus tahun itu, hasilnya dipresentasikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI. Belakangan, MUI meluncurkan bank bebas bunga. Baharuddin Jusuf Habibie, Menteri Riset dan Teknologi saat itu, diperkenalkan dengan konsep bank tanpa bunga oleh Hasan Basri dan Amin Aziz. Tidak lama kemudian para cendekiawan Muslim Indonesia berkumpul untuk membentuk ICMI (Ikatan Cendekiawan

Muslim Indonesia)," kata Habibie, seperti dikutip dari New York Times (2006:11). Bank tanpa bunga ini akan sejalan dengan visi dan misi ICMI, menurut Habibie selaku Ketua Umum. Dalam kapasitasnya sebagai menteri, gagasan itu sejalan dengan strategi pemerintah secara keseluruhan. Gagasan pendirian bank *syariah* pertama di Indonesia disambut baik oleh Presiden Soeharto. Wujud komitmen pemerintah dibentuknya Bank syariah pertama yaitu bank muamalat. Bank *Mualamat* merupakan rekomendasi dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai pemegang saham mayoritas Bank *Muamalat.*

Menurut Jimly, Bank *Muamalat* harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia, Ideal sekali kalau BPKH bergabung karena Lembaga tersebut mengelola dana haji yang semakin besar dan ini membutuhkan dukungan politik dari pemerintah. Dengan begitu, BPKH tidak perlu lagi mendirikan kantor wilayah sendiri di Indonesia dan bank *syariah* lainnya jadi BPKH hanya sebagai pemegang saham Bank Muamalat .

ICMI melihat Bank Muamalat sebagai pemain kunci dalam pengembangan ekonomi *syariah*, karena Bank Muamalat adalah usaha Islam pertama dan tersulit di Indonesia, kegagalannya akan mengakhiri ekonomi Islam di negara ini.

Tahun 1992 berdirinya Bank *Muamalat* Indonesia, dan tahun 1990 lahirnya ICMI. Kerja sama ICMI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) inilah yang melahirkan praktik ekonomi *syariah* pertama dengan Bank *Muamalat*. Untuk mempertahankan posisi simbolis dan penting, Bank *Muamalat* harus dilestarikan.

Bank Muamalat memiliki rasio *non-performing loan* (NPF) yang tinggi dan membutuhkan tambahan modal. Proses ini akan selesai pada 31 Desember 2017, ketika perjanjian berlangganan saham bersyarat (CSSA) berakhir. Bank *Muamalat* membutuhkan minimal Rp 8 triliun untuk memperbaiki kondisi bisnis dan terus beroperasi dengan kapasitas penuh.

Selain Perbankan *Syariah*, ICMI juga berperan penting pada Pendirian *Baytul Mal Wal Tamwil* (BMT). BMT didirikan pada tahun 1984 oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) di Masjid Salman dan merupakan lembaga keuangan Islam untuk usaha kecil. Pada tahun 1992, BMT dengan dukungan penuh ICMI menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari pegawai perusahaan dan instansi pemerintah. Selanjutnya bekerja sama dengan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) yang kemudian menjadi lembaga pelatihan dan meluncurkan pengembangan puluhan ribu BMT.

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 mendorong terbentuknya BMT Syariah, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memberikan alternatif pemulihan ekonomi melalui lembaga keuangan mikro yang sesuai *syariah*. Usaha mikro dan kecil adalah cara untuk mengangkat derajat dan melindungi kepentingan mereka yang kurang beruntung. Salah satu contoh, BMT telah menjadi populer di Amerika Serikat karena kemampuannya untuk membantu usaha kecil dan menengah tumbuh. Lembaga keuangan yang menganut *syariat* dapat dimaklumi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Pertumbuhan dan perkembangan di BMT yang juga dikenal sebagai koperasi *syariah* akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, Koperasi Jasa Keuangan *Syariah* (KJKS) saat ini memiliki BMT dengan target aset Rp. 2 triliun. Ada empat BMT besar di Indonesia: BMT Bina Ummah Sejahtera (BUS) Lasem-Rembang Jawa Tengah, BMT Fastabiqul Khoirot Pati, BMT Tamzis Wonosobo dan BMT Bringharjo Yogyakarta. BMT memiliki peran penting untuk memastikan bahwa koperasi dijalankan secara profesional dan modern. (REPUBLIKA.CO.ID). Sudah sepuluh tahun BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) mengkonsolidasikan 561 BMT dengan badan hukum koperasi di seluruh tanah air. Anggotanya berjumlah 2.694.013 orang dengan total aset Rp. 11,9 triliun yang

tersebar di seluruh Indonesia. Pada Oktober 2015, Federasi Rusia mendirikan republiknya sendiri (CO.ID).

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, BMT merupakan salah satu dari sekian banyak upaya untuk memajukan perekonomian mayoritas umat Islam. Pergerakan lembaga keuangan tingkat bawah berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat kelas bawah terhadap rentenir. *Bagian Baitul Maal* (BMT) bertanggung jawab untuk mengelola zakat, *infaq,* dan sedekah, sedangkan bagian Baitul Maal (BMT) bertanggung jawab untuk mengelola tauhid (ZIS). Kedua, divisi Baitul Tamwil bertanggung jawab menarik simpanan dan menyalurkan dana (pembiayaan modal) melalui model bagi hasil. Diharapkan masyarakat, termasuk umat Islam, mendapat manfaat dari sistem ekonomi Islam. Simpan pinjam seperti bisnis perbankan menjadi fokus utama BMT sebagai institusi bisnis; merupakan sarana penghimpunan dana dari nasabah dan calon nasabah (anggota) dan menyalurkannya ke sektor ekonomi yang menguntungkan dan halal. BMT merupakan badan hukum paling dekat di Indonesia dengan badan hukum koperasi, baik dari segi usaha keliling (KSU) maupun dalam hal simpan pinjam (KSP).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) akan mendapatkan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sebagai bagian dari kampanye migrasi moral ICMI, sebuah program diluncurkan pada 2011 yang akan diperkuat pada kongres keenam tahun ini di Mataram, NTB. Tujuan ICMI agar desa membantu membangun kota dan Indonesia. Tujuan kita menumbuhkan jiwa Islam yang kuat di desa agar bisa sejahtera dan menjadi sumber keridhaan Allah SWT.

Hijrah moral diperkenalkan pada 2011 sebagai bagian dari program persahabatan nasional ICMI, menurut Sugiharto. Untuk merespon arah pembangunan yang dianggap menyimpang oleh ICMI, dilancarkan kampanye moral. Perlu program yang "*on the ground*".

Sejak didirikan 20 tahun lalu, ICMI telah mempelopori gerakan ekonomi masyarakat melalui pendirian BMT, pusat inkubator bisnis. saat ini sudah lebih dari 7.000 kelahiran BMT di Indonesia. Program *one village, one* BMT dianggap relevan dengan moral hijrah oleh peneliti.

ICMI berniat fokus pada pembangunan 72.000 dea di Indonesia sebagai program utamanya. Selain itu, ICMI akan bekerjasama dengan ormas Islam lainnya untuk mensukseskan program tersebut.

Kesimpulan

Presentasi Indonesia di kancah dunia dalam bidang keuangan Islam, tidak terlepas dari peran ICMI dangan gagasannya terkait *Community Based Developent.* Gagasan inilah yang melahirkan embrio perbankan *syariah* dengan Bank Muamalatnya dan ekonomi kerakyatan dengan basis *Baitul Mal wal Tamwil*. Jika hal ini tetap dilestarikan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu *leading* ekonomi *Syariah* dunia bersama Saudi Arabia, Malaysia dan negara-negara yang tergabung dalam *Gulf Coorporate Council.*

DAFTAR REFERENSI

1. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo pada 29 Oktober 2021 dalam seminar internasional Cambridge IFA Islamic Finance dengan tema "The Role of Islamic Finance in the Post-Covid World". Isis Economic Festival (ISEF) tahun ke-8, hari kelima, acara ke-5 merupakan rangkaian kegiatan untuk menyorot acara tahun ini.
2. Dalam seminar "Penguatan Sinergi Keuangan Komersial & Sosial Syariah, *Cross Borders* & Inovasi Digital untuk Optimalisasi Wakaf yang Lebih Baik", Deputi Gubernur BI Sugeng mengungkapkan hal ini.

3. Pembangunan Kuantitatif, Tata Kelola Pengetahuan, Kesadaran, dan Tanggung Jawab Perusahaan dan Sosial adalah lima metrik utama dalam laporan yang mencakup 135 negara (CSR).
4. Salah satu penyedia data dan infrastruktur pasar keuangan terbesar di dunia, Refinitiv melayani lebih dari 40.000 institusi di lebih dari 190 negara.
5. Jimly di Jakarta, Senin, 19 Februari 2018.
6. Republika, Minggu (6/12), Ketua Presidium ICMI Sugiharto

BAGIAN 6:
HUKUM
DAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan dan penegakan hukum adalah dua mata pisau yang tidak dapat dipisahkan dalam tata kelola suatu bangsa, sebab hukum pada prinsipnya membentuk martabat suatu pemerintahan. Namun dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, kerap ditemukan ketimpangan hukum, dimana hukum disalahgunakan oleh kepentingan-kepentingan elit politik dan pemerintahan.

Bab 14

PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN UNTUK INDONESIA BERMARTABAT

Asram A. T. Jadda[1]

Pendahuluan

Bumi merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah SWT. Di atas bumi hidup berbagai macam makhluk hidup yang saling berdampingan yang menjadikan bumi begitu indah, seperti Firman Allah SWT bahwa, "*Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat*" (Q. S. Fatir: 27). Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan bumi beserta isinya sedemikian rupa dengan keindahannya. Dalam hal ini manusia sebagai *khalifah* di muka bumi diwajibkan untuk memelihara ciptaan Allah tersebut.

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia (Supriadi, 2005:183). Segala kebutuhan dan keperluan hidup makhluk hidup di dunia ini berasal dari lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan akan menjadi kerugian yang

[1]Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare; email: asramatjadda@gmail.com

sangat besar di kemudian hari. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting dan wajib bagi setiap manusia agar kehidupan berlangsung secara berkesinambungan, namun dimasa sekarang ini lingkungan tempat hidup telah mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan hidup merupakan kemunduran lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar dan kerusakan ekosistem (Sodikin, 2007:8).

Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena dua faktor, yakni akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti letusan gunung Merapi, banjir, abrasi, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami merupakan contoh dari bencana alam. Sedangkan kerusakan lingkungan oleh akibat ulah manusia didasari karena eksploitasi dan ketamakan berlebihan terhadap lingkungan, sehingga berdampak pada kerusakan yang sistemik dan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau trans-lokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yamg terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula (N.H.T. Siahaan, 2004: 1-2). Melestarikan lingkungan sama nilainya dengan memelihara kelangsungan hidup manusia dan segala yang eksis di alam. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup dengan bentuk apapun merupakan bumerang yang serius bagi kelangsungan kehidupan di alam dengan segala isinya ini, termasuk manusia.

Manusia merupakan bagian dari alam semesta (kosmos) yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan sebagai abdi-Nya. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memanfaatkan, mengolah, dan menjaga potensi alam semesta yang telah diciptakan-Nya (*khalifatullah*). Dengan alam pula manusia berproses dan memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Oleh karena itu membahas hubungan antara manusia, alam, dan Allah SWT sebagai pencipta tidak dapat dipisahkan (Samidi, 2016:14-26).

Untuk itu, masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama dalam mencegah kerusakan lingkungan yang dapat merugikan bagi keberlangsungan hidup. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar terus berupaya melestarikan lingkungan memang harus ditumbuhkan secara serius, agar mengurangi risiko terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan. Antara masyarakat dan pemerintah memiliki perannya masing-masing untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Namun, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi di masa depan.

Mencegah Kerusakan Lingkungan di Indonseia

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh bencana alam yang dahsyat, misalnya meletusnya gunung merapi, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunya kualitas lingkungan yang menyangkut nilai lingkungan untuk

kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman, sehingga nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan akan hilang atau berkurangnya nilai lingkungannya karena pemanfaatan tertentu oleh manusia. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup di Indonesia maka sangat perlu adanya perlindungan dan penjagaan terhadap lingkungan hidup di Indonesia (Andi Hamzah, 1995:6-7).

Lingkungan hidup adalah suatu wadah bagi manusia atau mahkluk hidup lain untuk hidup, tinggal, melakukan segala bentuk aktivitas dan melakukan interaksi, dimana dari interaksi tersebut akan memunculkan hubungan timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran nyata dalam satuan kehidupan (A. Rusdina, 2015:247). Dapat dikatakan lingkungan adalah suatu media dari seluruh makhluk hidup hidup dan tinggal serta melakukan segala bentuk kehidupan yang akan menimbulkan hubungan timbal balik.

Masalah lingkungan adalah persoalan yang sangat kompleks. Kompleksitas persoalan lingkungan memerlukan penyelesaian dari berbagai disiplin ilmu. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planalogis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum (Siti Sundari Rangkuti, 2005:1). Pemecahan masalah hukum dalam pembangunan tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan suatu disiplin ilmu saja (monodisipliner) yang bebas dari pengaruh ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, penguasaan hukum yang mengatur lingkungan dalam pembangunan mengharuskan kita menguasai pula ilmu-ilmu yang relevan, misalnya ekonomi, sosial-budaya, planalogi, hidrologi, kimia, dan biologi (Daud Silalahi, 1995:5).

Kerusakan lingkungan akan selalu dibarengi dengan tercemarnya suatu lingkungan. Kerusakan lingkungan sendiri adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan perubahan fisik, hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak lang-

sung terhadap sifat yang dimiliki, sehingga terlampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup (P. Joko Subagyo, 2002:23). Rusaknya suatu kondisi lingkungan memiliki makna bahwa menurunnya tingkat kegunaan untuk pemanfaatan tertentu bahkan bisa tidak digunakan sama sekali. Kerusakan lingkungan bisa menimbulkan suatu bencana seperti longsor, banjir. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas manusia yang berlebihan dan melanggar hukum yang berakibat pada rusaknya lingkungan, yang dimana tidak dilakukannya upaya reboisasi atau revegetasi.

Mencegah kerusakan lingkugan sudah mulai di lakukan beberapa dekade terakhir ini. Berkembangnya isu pemanasan global (*global warming*) di masyarakat mendorong masyarakat dunia untuk mulai merubah pola pikir terhadap gaya hidup mereka. Gaya hidup untuk mengurangi kerusakan terhadap lingkungan. Energi dan material yang ramah lingkungan membuat para peneliti berpikir lebih keras agar menciptakan teknologi yang ramah dengan lingkungan, tidak hanya peneliti yang berpikir keras agar teknologi yang digunakan manusia membuat keseimbangan terhadap alam, masyarakat umum mulai belajar bagaimana mengurangi kerusakan lingkungan dengan cara yang sederhana dan mudah disamping para peneliti mengembangkan penemuan yang lebih "hijau".

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan manfaat dibidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas

lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor baik di pusat maupun daerah (Muhammad Erwin, 2008:29).

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah lingkungan, hukum lingkungan memiliki kedudukan istimewa seperti dijelaskan Siti Sundari Rangkuti sebagai berikut: Hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi. Namun disamping itu, hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional serta tata ruang, sehingga tidak dapat digolongkan kedalam pembidangan hukum klasik. Hukum lingkungan memiliki sifat terobosan dari mata kuliah-mata kuliah hukum tradisional, sehingga digolongkan kedalam mata kuliah hukum fungsional. Dengan demikian, dari segi substansi, pembidangan hukum lingkungan terdiri atas: hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum lingkungan perpajakan, hukum lingkungan internasional yang berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri serta hukum penataan ruang (Siti Sundari Rangkuti, 1991: 5).

Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Ada pun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam

upaya mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Secara umum, berikut ini merupakan upaya pencegahan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan.

1. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan
2. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk
3. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan.
4. Melakukan penghijauan.
5. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan
6. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.

Regulasi terhadap isu lingkungan pun diberlakukan oleh beberapa Negara sebagai pembelajaran dan pembiasaan terhadap warga negaranya untuk lebih peduli terhadap lingkungannya sebagai contoh mengurangi konsumsi kantong plastik dengan membeli kantong plastik berbayar. Sistem ini memakasa kita (manusia) untuk lebih bijak lagi memilih kantong belanja dengan harapan dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak hanya dalam bentuk regulasi, kampanye terhadap kerusakan lingkungan juga sering digaungkan oleh sekumpulan orang yang peduli terhadap lingkungan baik itu dalam lingkungan rumah tangga,sekolah, perkantoran ataupun universitas.

Pembangunan yang dilakukan tentu diharapkan dapat memberikan manfaat berupa keadaan yang menguntungkan namun di sisi lain kita juga berhadapan dengan resiko lingkungan (*Environmental Risk*) atau suatu keadaan yang merugikan, sehingga untuk mengamankan

pembangunan di bidang lingkungan hidup maka hendaknya dilakukan secara sungguh-sungguh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap penilaian, dan juga aspek penegakan hukum menjadi sangat penting sebagai upaya untuk melawan perusak/pencemar lingkungan di Indonesia.

Solusi Alternatif Mencegah Kerusakan Lingkungan untuk Indonesia Bermartabat

Menjaga Lingkungan menjadi prioritas yang sangat tinggi demi kenyamanan seluruh makhluk hidup. Sebagian besar makhluk di bumi ini bergantung dari lingkungan. Maka dari itu kegiatan melestarikan lingkungan perlu dilakukan oleh semua orang agar lingkungan tetap terjaga ketersediaan sumber dayanya. Harus diakui, semakin hari bumi dan lingkungan yang kita tempati semakin memburuk kualitasnya. Degradasi lingkungan ini terus terjadi dan cenderung meningkat karena kekurang-pedulian manusia sehingga kerap melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang ramah lingkungan. Sikap kurang peduli ini kerap kali diiringi persepsi bahwa untuk melakukan penyelamatan lingkungan dibutuhkan hal-hal besar dan spektakuler padahal dengan hal-hal sepele, sederhana dan kecil, kita dapat turut serta dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup atas terjadinya kerusakan.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin kronis dan parah untuk Indonesia bermartabat dibutuhkan solusi dalam penanganannya. Menurut penulis, ada 2 (dua) solusi yang dapat di gunakan untuk mencegah kerusakan lingkungan yakni:

1) Penegakan hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan lingkungan

Negara Indonesia saat ini juga mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup

masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Eksploitasi pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam. Maraknya kerusakan alam seperti, ekosistem lautan, rusaknya sebagaian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan di wilayah Indonesia ini adalah kebakaran hutan, dimana permasalahan kebakaran hutan hampir setiap tahun mengalami peningkatan (Badan Pusat Statistik, 2018: 3).

Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk dapat melindungi lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Hukum sebagai salah satu cara refleksi dari suatu tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan sehari-hari baik meliputi kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus ditegakkan (Zainal Arifin Hoesein, 2012:308).

Adanya penegakan hukum lingkungan dapat dijadikan sebagai mata rantai dalam siklus pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan urutan perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan, dan penegakan hukum yang nantinya akan digunakan sebagai cara untuk penataan terhadap sebuah nilai-nilai yang akan memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan harus ada beberapa instrumen yang terdiri dari kepastian, kemanfaatan dan keadilan dimana harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain (Yann Kerbrat & Sandrine Maljean-Dubois, 2011:352).

Dari data yang berkaitan dengan hukum lingkungan, ada tiga macam kategori dalam penegakan hukum lingkungan yaitu hukum administrasi/Tata Usaha Negara, hukum perdata dan hukum pidana. Ketiga ini merupakan penegakan hukum yang sering digunakan namun,

yang lebih penting di sini adalah penegakan hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi lebih menyorot kepada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dimana setiap pelaku juga akan diberikan hukuman. Penegakan hukum lingkungan digunakan agar tegaknya dan fungsi yang sesuai dapat dijadikan pedoman untuk manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Suwari Akhmaddhian, 2016:12).

Upaya penegakan hukum lingkungan dalam kasus kerusakan lingkungan harus dapat dilakukan secara optimal guna terciptanya lingkungan yang baik. Aspek pada penegakan hukum lingkungan harus mendapat perhatian yang khusus dan maksimal terutama pada kerusakan lingkungan. Adanya penegakan hukum lingkungan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk dapat lebih mematuhi peraturan yang ada. Hal ini akan sangat berpengaruh, karena adanya unsur yang saling berkaitan dan melibatkan semua yang ada dalam subyek hukum. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, agar tujuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penegakan hukum pada permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan harus terus di dukung dan diterapkan agar tingkat permasalahan kebakaran hutan di Indonesia dapat menurun seiring dengan berjalannya waktu. Banyaknya kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh ulah manusia mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari artikel *Tempo.Co* tentang kasus permasalahan kebakaran yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu, 22 september 2019 baru baru ini. Kebakaran ini bisa terjadi karena ulah manusia sendiri yang tidak berhati-hati dan tentunya merugikan banyak orang. Akibatnya sebagian hutan hangus terbakar dalam kasus tersebut (Purwanto, 2019).

Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terletak pada Bagian Kedua Pasal 3 ayat (9) yang intinya bahwa adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai wadah untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu dengan penegakan hukum yang kuat dalam perkembangan baru maka akan dapat mendorong manusia untuk membuat wacana pembangunan berkelanjutan dengan memiliki sebuah usaha kesadaran yang penuh maka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan untuk masa depan dapat berjalan dengan yang diharapkan (Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, 2018: 3).

Selain adanya penegakan hukum terhadap penataan, penindakan, dan penyelesaian sengketa, peran masyarakat juga akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum berkaitan dengan lingkungan hidup. Adanya peran masyarakat sebagai *empowering* dalam mengawasi dan melakukan sebuah penegakan hukum dapat memberikan berbagai dukungan yang positif untuk memberikan dorongan dalam membangun dan memberikan keselarasan dimana masyarakat akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam proses pembangunan dan kesejahteraan. Dalam konteks inilah Indonesia akan menjadi negara yang bermartabat dan berdaulat karena dapat menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai faktor utama kehidupan di bumi.

2) Penegakan Hukum Islam dalam mencegah kerusakan lingkungan

Ajaran Islam berlandaskan pada Al Qur'an yang memuat ketentuan hukum yang multi dimensi, salah satunya adalah aspek menjaga dan melestarikan lingkungan. Dalam berbagai ayat Al Qur'an yang peruntukannya itu tidak hanya diberikan kepada umat Islam

melainkan non-Islam pun juga berhak menerimanya. Sama halnya dengan perbedaan antara lafal "*yā ayyuhalażīna āmanū*" dengan lafal "*yā ayyuhannās", dimana lafal "yā ayyuhalażīna āmanū*" peruntukan pesan yang terkandung di dalam Al Qur'an hanya diperuntukan untuk orang muslim, sedangkan dalam penggalan lafal ayat "*yā ayyuhannās*" peruntukan pesan yang terkandung di dalamnya tidak hanya diberikan kepada muslim melainkan para non-muslim juga berhak mengambil pelajaran di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dalam Al Qur'an bersifat universal yang berlaku bagi semua ummat manusia.

Menurut Fazlur Rahman, terdapat beberapa kelompok pendapat mengenai Al Qur'an, yaitu: pertama, mereka yang berpendapat bahwa Al Qur'an ibarat kitab undang-undang yang telah lengkap pasal demi pasal yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia baik politik, ekonomi, moral, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Kedua, Al Qur'an adalah landasan religius seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian Al Qur'an merupakan inspirasi kehidupan yang mengarah kepada kebenaran dan kebaikan, memberikan ide moral pada seluruh aspek kehidupan manusia (Mustaqimah, 2015:138-149). Dari dua agrumentasi di atas dapat diambil pelajaran penting yang ingin penulis garis bawahi yaitu alqur'an sebagai sumber lengkap ilmu pengetahuan dan landasan religius seluruh aspek kehidupan yang berupa ide moral, dari dua poin ini dirasa terjaganya lingkungan dapat diwujudkan dengan adanya ilmu pengetahuan yang didasari landasan religius dalam kehidupan karena adanya penanaman nilai moral di dalamnya.

Saat ini dapat kita lihat betapa banyaknya orang yang berilmu akan tetapi tidak mempunyai landasan religius yang kuat dalam dirinya, sehingga dengan tidak adanya landasan religius di dalam diri seseorang maka tidak ada alat yang menjadi pengukur atau pengontrol perbuatannya, atau bisa dikatakan bahwa orang tersebut bebas berbuat tanpa ada batasan dalam ilmu pengetahuan. Hal seperti ini dinilai tidak

baik karena kerusakan sebuah alam dapat dipicu dengan adanya ilmu pengetahuan yang tidak ada pengontrol kesadaran berupa nilai moral. Hal ini bisa saja memicu pada eksploitasi alam dan merusak lingkungan karena ilmu pengetahuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan, misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Dalam lingkungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam berbagai ayat Al Qur'an dijelaskan tentang kelestarian lingkungan, sebagaimana dalam Surat Ar Rum tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: Adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)" (QS Ar Rum: 41-42).

Dalam Al Qur'an surat Ar Rum di atas terdapat kandungan bahwa Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai *khalifah* di muka bumi. Sebagai *khalifah*, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat

menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kemudian di ayat yang lain, dijelaskan tentang kepedulian Al Qur'an mengenai lingkungan misalnya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahma Nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur" (QS Al A'raf: 56-58).

Adapun kandungan Surat al A'raf adalah bahwa bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan *jahiliyah* lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali

mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah SWT melarang umat manusia berbuat kerusakan dimuka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahnya. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah, seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain (lihat QS Al Qasas: 4).

Saat ini kita perlu berbenah diri untuk senantiasa mengharap *ridho* kepada Allah SWT, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya. Jangan melanggar aturan-aturan dalam *syaria'at* Islam, mengetahui posisi kita ada dimana sehingga kita tidak akan salah dalam melangkah. Dalam ajaran Islam siapa yang mengerjakan baik maka kelak hidupnya akan bermanfaat, tetapi apabila siapa yang curang, culas, serakah maka kelak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Balasan yang sifatnya kecil hingga balasan yang manusia tidak bisa memperhitungkan, kerusakan material dan kematian yang dahsyat. Jika secara hukum tidak bisa membuat mereka jera (pengambil keputusan) maka balasan dari Allah SWT -lah yang akan membuat mereka jera.

Kesimpulan

Kerusakan lingkungan akan selalu dibarengi dengan tercemar dan rusaknya suatu lingkungan. Kerusakan lingkungan sendiri merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan perubahan fisik, hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia yang semakin kronis dan parah untuk Indonesia bermartabat dibutuhkan 2 (dua) solusi dalam penanganannya. Yakni: *pertama*, penegakan hukum lingkungan dalam kasus mencegah kerusakan lingkungan harus dapat dilakukan secara optimal guna terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Aspek pada

penegakan hukum lingkungan harus mendapat perhatian yang khusus dan maksimal terutama pada kerusakan lingkungan. Adanya penegakan hukum lingkungan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk dapat lebih mematuhi peraturan yang ada. *Kedua,* Penegakan Al Qur'an dalam mencegah kerusakan lingkungan melalui Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai perintah, sedangkan manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi sebagai larangan.

Adapun saran atau rekomendasi penulis mengenai mencegah kerusakan lingkungan untuk Indonesia bermartabat adalah bahwa masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama dalam mencegah kerusakan lingkungan yang dapat merugikan bagi keberlangsungan hidup. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar terus berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan memang harus ditumbuhkan secara serius, agar mengurangi risiko terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rusdina. (2015). Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab, ISSN 1979-8911, Vol IX No 2.

Andi Hamzah. (1995). Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Arikha Media Cipta.

Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos. (2018). "And for Law: Why Spacecannot be understood without Law", Law, Culture and the Humanities, Vol 1 –20.

Badan Pusat Statistik. (2018) Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik, Indonesia.

Daud Silalahi. (1995). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Muhammad Erwin. (2008). Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung.

Mustaqimah. (2015). Urgensi tafsir kontekstual dalam penafsiran al-Qur'an, journal IAIN Gorontalo vol. 12 no. 1 juni 2015

N.H.T. Siahaan. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta.

Purwanto. 26 September 2019 "Kasus Karhutla, Korporasi Dijerat UU Lingkungan Hidup", < https://nasional.tempo.co/read/1252771/kasus-karhutla-korporasi dijeratlingkungan-hidup>.

Samidi. (2016). Tuhan, Manusia, Dan Alam: Analisis Kitab Primbon Atassadhur Adam makna, dalam Shahih vol. 1, No. 1, Januari-Juni.

Siti Sundari Rangkuti. (2005). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.

Siti Sundari Rangkuti. (1991). Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum, Pidato Pengukuhan Diucapkan di Hadapan Rapat Senat Universitas Airlangga Saat Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 1991.

Sodikin. (2007). Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, Jakarta.

Supriadi. (2005). Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta.

Suwari Akhmaddhian. (2016). "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

(Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", Jurnal Unifikasi, Vol. 03, No. 1.

Yann Kerbrat & Sandrine Maljean-Dubois. (2011). "The Transformation of International Environmental Law", enlr, Vol. 13, No. 4.

Zainal Arifin Hoesein. (2012). "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)", Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 3.

Bab 15

TANTANGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: MULTI PARTAI VERSUS PRESIDENSIAL

Ibrahim Fattah[1]

Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi saat ini, sering mengalami dinamika yang menjadikan sistem ketatanegaraan kita tidak konsisten dengan kesepakatan para perumus UUD 1945. Para pendiri bangsa bersepakat dengan sistem presidensial, namun dalam perjalanannya 4 (empat) tahun kemudian (1949) berubah menjadi sistem parlementer setelah berlakunya UUD RIS 1949 dan UUD 1950, kemudian melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali lagi ke UUD 1945. Pada momen inilah sistem presidensial terus digunakan hingga di era reformasi saat ini.

Angin perubahan konstitusi sepanjang era orde baru nyaris tak pernah ada inisiatif dari MPR karena kekuasaan otoritarian yang sangat kuat. Meski kelompok pro demokrasi yang diinisiasi oleh aktivis LSM, akademisi, mahasiswa dan *civil society* lainnya mengeritik pemerintahan otoritarian itu di berbagai forum diskusi terbatas. Puncak dari kritik itu terjadi pada tahun 1998 yang dikenal sebagai tahun reformasi, dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut adanya perubahan mendasar dalam pengelolaan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis.

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare; Email: fattahumpar2020@gmail.com

Secara konstitusional, perubahan konstitusi negara itu hanya dimungkinkan melalui sidang umum MPR sebagai lembaga tertinggi yang memiliki tugas yang salah satunya yaitu menetapkaan UUD 1945. Tuntutan reformasi yang menyuarakan perlunya perubahan terhadap UUD 1945, bukan tanpa alasan. Ada trauma sejarah sepanjang orde baru, dimana relasi Presiden-DPR lebih sebagai relasi yang tak mencerminkan adanya *check and balances*, Presiden lebih kuat dibandingkan DPR. Posisi tawar DPR sangat lemah dihadapan Presiden sehingga pada masa itu DPR diberi label sebagai "tukang stempel" kehendak Presiden (Halimah N.I. 2016).

Pada momentum reformasi pasca pemilu Tahun 1998 kemudian diikuti dengan sidang Umum MPR, secara resmi mengagendakan perubahan UUD 1945. Anggota DPR/MPR hasil pemilu 1999 mendapat kesempatan yang sangat baik karena ada dukungan publik yang sangat kuat untuk melakukan perubahan UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan hak atau kewenangan Presiden yang terlalu luas sedangkan kewenangan DPR terbatas sehingga menciptakan pola relasi Presiden-DPR yang menjadikan Presiden lebih kuat sedangkan DPR posisinya sangat lemah.

Selama orde reformasi, UUD 1945 telah mengalami empat (4) kali perubahan/amandemen (1999-2002). Hasil amandemen tersebut menegaskan kembali bahwa sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yaitu sistem presidensial sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa pasal di dalam UUD Tahun 1945 hasil amandemen jika dicermati, sesungguhnya sudah mengarah pada ciri-ciri sistem pemerintahan yang bukan lagi sistem pemerintahan presidensial yang dipahami selama ini karena begitu banyaknya kewenangan yang diberikan kepada DPR. Momentum

reformasi tahun 1998 itu hingga sidang umum MPR tahun 1999-2002, aspirasi yang berkembang sangat kuat memberi dukungan kepada DPR agar kewenangannya lebih diperluas dibandingkan pada UUD 1945 yang asli.

Sistem Presidensial di Indonesia

Sistem presidensial yang dijalankan Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, sesungguhnya tidak lagi menempatkan presiden pada kedudukan yang kuat karena sebelum pengambilan keputusan, presiden harus terlebih dahulu meminta pendapat dan perseujuan DPR. Dengan demikian kekuasaan presiden saat ini tidak lagi sepenuhnya berpusat pada dirinya tetapi ada proses membagi kekuasaannya kepada DPR. Ada beberapa pasal di dalam UUD Tahun 1945 hasil amandemen yang menunjukkan betapa semakin kuatnya posisi DPR. Hal ini menimbulkan suatu implikasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak bisa melepaskan diri dari ciri-ciri parlementer. Pemilu langsung DPR dan Presiden-Wakil Presiden yang dilakukan secara bersamaan, mulai pada pemilu tahun 2004, merupakan faktor utama yang menjadi alasan penulis bahwa sistem pemerintahan yang dianut Indonesia pada UUD Tahun 1945 hasil amandemen, sudah bukan sistem presidensial yang asli, penulis mengkategorikannya sebagai sistem pemerintahah semi parlementer (Halimah N.I. 2016).

Setelah diberlakukannya sistem multi partai sejak tahun 1999, Calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sulit diusung oleh hanya satu partai politik karena jumlah suara atau kursi di DPR terdistribusi ke banyak parpol. Sehingga pilihan yang paling realistis adalah calon Presiden dan calon Wakil Presiden, diusung oleh gabungan parpol dan setelah usungan gabungan parpol menang, akan menjadi parpol koalisi pemerintah sedangkan yang kalah, akan menjadi "parpol oposisi" di

DPR. Namun Indonesia tidak menganut secara formal praktek oposisi sehingga partai politik yang kalah dalam pemilihan presiden-wakil presiden tidak otomatis menjadi "oposisi" permanen, tetapi bisa tiba-tiba berubah haluan menjadi partai koalisi pemerintah. Inilah konsekuensi yang harus diterima dari sistem multi partai. Dalam penyusunan kabinet pasca dilantiknya Presiden dan wakil Presiden oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Presiden tidak bisa leluasa menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih menteri atau membentuk kabinet seperti di Amerika Serikat yang juga menganut sistem pemerintahan presidensial. Di Amerika Serikat hanya terdapat 2 (dua) partai politik. Inilah yang menarik di Indonesia karena tidak terlembagakannya secara formal partai koalisi dan partai oposisi (La Ode Husen. 2019).

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang diusung oleh gabungan partai politik, merupakan faktor penyebab presiden yang menang tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya secara bebas untuk menyusun kabinetnya karena harus memberi jatah kursi kepada masing-masing parpol yang telah mengusungnya. Di sisi lain setiap parpol ada mekanisme internal untuk mengambil keputusan menerima atau menolak jumlah kursi menteri yang ditawarkan oleh presiden pemenang pemilu. Selain ada mekanisme di internal parpol, ada juga mekanisme pengambilan keputusan antar partai koalisi untuk membicarakan jumlah kursi menteri masing-masing partai politik yang tentu saja tidak mustahil berpotensi terjadi tarik menarik kepentingan baik antar partai politik koalisi maupun antara Presiden dengan masing-masing pimpinan partai politik tersebut (La Ode Husen. 2019).

Pasca pembentukan kabinet, relasi presiden dan DPR ditentukan oleh berapa banyak parpol di DPR yang menjadi koalisi pemerintah dan berapa banyak parpol yang menjadi "oposisi". Dua kekuatan besar inilah yang saling adu argumentasi dalam menyikapi keputusan atau kebijakan presiden. Dalam praktek, suara partai di DPR, kadang-kadang

suara partai koalisipun bisa bersuara berbeda dengan presiden atau tidak sejalan dengan presiden sehingga proses pengambilan keputusan itu sangat dinamis.

Selama empat (4) kali amandemen UUD 1945 oleh MPR tahun 1999 - 2002, telah mengubah secara cukup mendasar pola relasi presiden dan DPR. Apabila selama pemerintahan Orde Baru (1966–1998) relasi Presiden dan DPR cenderung "sarat eksekutif" (*executive heavy*), maka sejak hasil pemilu 1999 pola relasi kedua lembaga tersebut berubah menjadi "sarat legislatif" (*legislative heavy*). Perubahan relasi ini yang membuat kebijakan presiden tidak mulus bahkan bisa berakibat dibatalkan oleh DPR. Hal ini menujukkan bahwa DPR memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat ketimbang Presiden. Dengan demikian pelembagaan sistem presidensial tantangannya jauh lebih besar sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan umum multi partai yang sulit mengusung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya, apatah lagi tidak ada jaminan bahwa koalisi tersebut setelah menang pada pemilihan umum akan menjadi partai koalisi permanen.

Berdasarkan gambaran di atas, menunujukkan bahwa sistem presidensial itu lebih cocok pada negara yang menganut dwi partai seperti di Amerika Serikat, dimana jika salah satu parpol yang menjadi pemenang pemilu, maka parpol yang kalah menjadi oposisi. Sedangkan di Indonesia dengan multi partai, sulit menerapkan sistem presidensial secara konsisten . Olehnya itu sistem ketatanegaraan Indonesia masih perlu terus mencari suatu model sistem pemerintahan presidensial yang cocok dengan budaya bangsa kita.

Pemisahan kekuasaan antara Presiden dan DPR berdasarkan UUD Tahun 1945 hasil amandemen, yang kemudian memberi posisi DPR yang lebih kuat dibandingkan Presiden, menunjukkan bahwa sistem presidensial di Indonesia telah mengalami perbedaan dari konsep

sistem prsidensial itu sendiri. Oleh karena itu perlu pemikiran yang lebih konstruktif untuk merumuskan desain sistem pemerintahan yang lebih sesuai dengan karakter budaya bangsa dalam menjalankan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Peluang Amanden UUD 1945 ke depan diharapkan masih selalu terbuka untuk tetap bisa dilakukan sampai ditemukannya solusi yang lebih cocok dengan budaya Indonesia sebagaimana pemikiran para perumus awal UUD 1945 yang kecenderungannya tidak mau berkiblat secara penuh pada 2 (dua) model sistem pemeritahan yang berlaku pada banyak negara pada waktu itu yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Soekiman dalam sidang BPUPK menyatakan bahwa sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem yang berbeda dengan sistem yang dianut Undang-Undang Dasar beberapa negara terkemuka. Soekiman menyatakan bahwa UUD 1945 bersistem sendiri yang didukung pula oleh Soepomo bahwa sistem yang dibentuk oleh UUD 1945 berlainan dengan sistem presidensial seperti yang digunakan Amerika Serikat, Filipina dan Amerika Selatan serta berbeda pula dengan sistem kabinet (parlementer) yang digunakan di Inggris dan Prancis (Fitra Arsil. 2017).

Multi Partai dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Setelah diberlakukannya multi partai dalam pemilihan umum di Indonesia, potensi konflik antara presiden dan DPR berlangsung semakin terbuka. Satu hal yang menarik dicermati sebuah fakta bahwa semua presiden pasca reformasi kecuali pemerintahan Joko Widodo pada priode keduanya (2019-2024), pernah menghadapi tarik menarik atau konflik kepentingan antara presiden dengan DPR dan yang menarik bahwa partai koalisi presiden bukan jaminan untuk tidak mendapat dukungan politik di DPR dengan kata lain anggota partai koalisi bisa saja mengeritik bahkan menekan presiden terhadap

kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh DPR sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat (Halimah N.I. 2016.). Sebaliknya partai politik yang kalah dalam pemilihan Presiden bukan berarti tidak bisa bergabung dengan koalisi pemerintah yang memenangkan pemilihan Presiden-Wakil Presiden, kejadian ini terjadi pada pemerintahan Joko Widodo pada priode ke-2, setelah mengalahkan Prabowo dan Sandiagauno pada pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2019. Partai Gerindra sebagai pengusung utama calon presiden Prabowo dan Sandiagauno, justru mendapatkan 2 (dua) kursi menteri padahal sebelumnya merupakan 2 (dua) pasangan yang berlawanan pada saat pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2019, bahkan puncaknya pada saat pasangan Prabowo dan Sandiagauno, mengajukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Mahkamah Konstitusi yang disiarkan secara langsung oleh sejumlah televisi swasta nasional. Terlepas dari bergabungnya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan, tentu saja kekuatan penyeimbang atau "oposisi" di DPR jumlahnya semakin berkurang sehingga proses *check and balance* kurang berjalan baik karena berkurangnya suara wakil rakyat di DPR yang melakukan kontrol terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

Sejak orde reformasi, sudah 4 (empat) presiden yang pernah berkuasa di Indonesia, dimulai dari Abdurrrahman Wahid, berkuasa hanya 2 tahun, Megawati Soekarnoputri, menggantikan Abdurrahman Wahid dan berkuasa selama 3 tahun, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama 2 (dua) priode, dan Joko Widodo, saat ini sedang berkuasa pada priode ke-2. Dari empat presiden tersebut, maka pemerintahan SBY yang paling banyak menghadapi konflik kepentingan dengan DPR, yaitu sebanyak 14 usulan penggunaan hak interpelasi DPR, tahun 2004 – 2014 dan yang paling heboh dan menguras energi yaitu kasus *Bank Century*. Artinya sepanjang 10 tahun menjadi presiden, SBY tidak pernah sepi dari ketegangan dengan DPR dibandingkan dengan pada

masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, meski ada tiga (3) usulan penggunaan hak interpelasi DPR dan yang paling heboh dan menguras energi yaitu kasus BLBI, tahun 2002–2003. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, meskipun hanya dua (2) usulan penggunaan hak interpelasi DPR, namun justru pemerintahannya berakhir dengan dimakzulkan oleh DPR pada sidang istimewa MPR, tahun 2002. Kasus yang heboh dan menguras energi yaitu kasus dana *non budgeter Bulog*. Sedangkan pemerintahan Jokowidodo, pada priode pertamanya hanya ada dua (2) usulan penggunaan hak interpelasi DPR, tahun 2014 – 2015, itupun tidak ada yang heboh dan menguras energi. Penggunaan hak angket DPR, terhitung sejak tahun 1999 – 2018, pemerintahan SBY masih yang paling banyak menghadapi usulan penggunaan hak angket DPR, sebanyak 9 (sembilan) usulan sejak tahun 2002 - 2009.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa relasi Presiden-DPR sejak empat kali amandemen UUD 1945, selalu diwarnai tarik menarik kepentingan, suatu proses berdemokrasi yang sungguh sangat jauh berbeda dibandingkan pada masa orde baru yang jauh dari ketegangan dan saling serang antara Presiden dan DPR. Dengan berubahnya sistem pemilihan presiden dari sebelumnya dipilih oleh MPR sebagai mandataris MPR ke sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat melalui sistem multi partai sejak tahun 2004, maka relasi presiden dan DPR pun mengalami perubahan secara mendasar. Setiap calon pasangan presiden-Wakil presiden, sulit maju sebagai pasangan calon tanpa melalui koalisi partai politik karena tidak ada satupun partai politik di DPR yang memiliki suara mayoritas. Sedangkan pada saat pasangan presiden dan wakil presiden dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU, maka pada saat penyusunan kabinet tidak ada pilihan lain bagi presiden kecuali harus mengakomodir partai pengusungnya dalam pemerintahan dengan memberikan kursi kabinet berdasarkan perolehan jumlah kursi parpol itu di DPR. Sedangkan

parpol yang calon presidennya kalah, maka pihannya adalah menjadi partai "oposisi" atau tidak mustahil justru balik haluan bergabung dengan partai koalisi pemenang untuk mendapat jatah kursi kabinet seperti yang sudah dipraktekkan pada hasil pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2019, dimana partai Gerindra sebagai partai utama yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, justru masuk bergabung dengan pasangan presiden dan wakil presiden yang mengalahkannya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Dengan demikian menurut pendapat penulis, sistem multi partai sangat tidak memungkinkan dapat menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara konsisten di Indonesia seperti yang dipraktekkan pada negara yang menggunakan sistem dwi partai politik. Seharusnya jika demokrasi ingin berjalan dengan baik, maka prinsip "*chek and balace*" perlu dilembagakan. Namun sekali lagi bahwa prinsip *chek and balance* itu sepertinya tidak efektif di negara yang menjalankan pemilu dengan sistem multi partai seperti Indonesia karena tidak adanya garis tegas atau pembeda antara partai koalisi pemerintah dengan partai oposisi yang berada di luar pemerintahan.

Pemisahan kekuasaan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pembangunan demokrasi. Konsolidasi demokrasi secara nasional menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan konsolidasi baik pada institusi DPR terutama dalam melakukan mekanisme chek and balance maupun pada Presiden terutama dalam melakukan pembentukan kabinet sebagai hak prerogatif yang "tersandera" oleh kepentingan partai koalisi. Dengan demikian pemisahan kekuasaan di Indonesia menunjukkan sebuah sistem pemerintahan yang berbentuk presidensial namun sedikit bercampur dengan karakter parlementer.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang dikategorikan sebagai *das sain*, atau fakta normatif antara lain:

pertama, permasalahan dari kerangka hukum dasar yang terdapat di dalam UUD 1945 hasil amandemen, masih menyisakan ketidak tegasan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia dimana sistem pemerintahan presidensial belum dianut secara konsisten dan dalam praktek sering menimbulkan bias dalam pembentukan kabinet oleh presiden terpilih yang tidak leluasa menggunakan hak prerogatifnya karena harus mengakomodir partai pengusungnya bahkan termasuk partai yang sebelumnya menjadi lawan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua, sistem multi partai dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, menunjukkan bahwa partai politik pemenang yang bergabung sebagai partai pemerintah (koalisi) tidak selamanya bisa bertahan dan sebaliknya partai politik yang calonnya kalah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden belum tentu konsisten berada di luar pemerintahan. Namun disi lain kekuatan di DPR secara kuantitatif mengalami pengurangan jumlah kursi dalam melakukan pengawasan terhadaap pemerintah terutama dalam menjalankan mekanisme *chek and balance*.

Ketiga, pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial akan timbul sebuah masalah ketika dipraktekkan dalam sistem multi partai karena berpotensi terjadinya deadlock dalam membangun relasi antara Presiden dan DPR karena tidak adanya partai politik yang menguasai kursi di DPR secara mayoritas sehingga pembentukan kabinet tidak bisa terhindar dari kabinet "pelangi" yang tentu saja sarat muncul konflik internal di partai koalisi yang berujung atau berpeluang seringnya dilakukan perombakan kabinet dan bubarnya partai koalisi serta terbuka peluang digantikan oleh partai politik yang sebelumnya berada di luar pemerintahan.

Keempat, Meskipun perubahan UUD 1945 sudah dilakukan empat kali ternyata masih menyisakan banyak kelemahan dan

inkonsistensi dalam proses penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. UUD Tahun 1945 hasil perubahan, sebagian menilai bahwa perubahan ini tidak lagi dapat disebut sebagai amandemen melainkan sudah merupakan penggantian (*alternation*); baik ditinjau dari aspek landasan filosofis maupun ketatanegaraan, sistem politik dan pemerintahan, hasil perubahan yang dilakukan oleh MPR sangat membingungkan. Hal itu terjadi karena terlalu banyak kewenangan Presiden yang dimintai persetujuan sebelumnya kepada DPR. Meskipun UUD Tahun 1945 hasil amandemen keempat secara resmi mencantumkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial tetapi DPR memiliki banyak fungsi sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 justru menciptakan sistem pemerintahan yang tidak jelas.

Kelima, Di masa yang akan datang jika ada perubahan ke-5 UUD 1945, perlu dilakukan dengan suatu *grand design* yang jelas, disertai visi yang lebih jelas pula. Sebab Undang-Undang Dasar suatu negara bersifat dinamis, mengikuti gerak masyarakatnya, bahkan diharapkan dapat menjadi *guiding star* yang memandu kehidupan masyarakatnya dalam meraih cita-cita bersama. Karena itu pembentuk UUD Tahun 1945 harus mampu menangkap semangat zaman dan sekaligus berpikir visioner.

Sejarah perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia kontemporer mencatat bahwa sejak pasca reformasi, relasi DPR-Presiden mengalami dinamika yang berujung pada menguatnya posisi DPR dibandingkan dengan presiden. Menguatnya DPR juga dipengaruhi setelah diberlakukannya sistim multi partai sehingga setiap kali hasil pemilihan legislatif dilaksanakan, selalu muncul protes yang meragukan proses maupun hasil perolehan suara seorang calon legislatif atau hasil perolehan suara seorang calon presiden dan wakil presiden. Sebagian diantaranya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik

Indonesia di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat jauh berbeda pada pemillu-pemilu pada masa orde baru yang berlangsung tanpa adanya protes atau gugatan secara hukum maupun secara politik.

Semakin kuatnya kewenangan DPR saat ini dibandingkan denga presiden, dapat dilihat pada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyebutkan peran strategis DPR dalam pengambilan keputusan presiden yang terlebih dahulu presiden harus meminta persetujuan DPR. Beberapa pasal-pasal tersebut, yaitu Pasal 11 ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan bahwa:

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa: "*Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*".

Ayat (4) menyebutkan bahwa: "*Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan menperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*".

Demikian pula pada Pasal 14 ayat (2), menyebutkan bahwa: "*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*".

Ayat (3) "*Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*".

Persetujuan DPR untuk pengangkatan Anggota Komisi Yudisial

sebagaimana disebutkan pada Pasal 24B ayat (3) bahwa: "*Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*"

Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa meskipun presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR dan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, namun presiden tidak bisa mengambil keputusan tanpa peran serta DPR. Kata yang digunakan dari pasal- pasal di atas adalah "persetujuan" dan "pertimbangan". Relasi ini semakin meyakinkan bahwa meskipun UUD Tahun 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem presidensial. Namun presiden tidak diberikan hak prerogatif sepenuhnya.

Oleh karena itu sistem presidensial dengan kombinasi sistem multi partai, merupakan suatu dilematis karena presiden yang terpilih adalah atas dukungan partai politik dan partai politik meminta jatah menteri ke presiden sedangkan pemilihan dan pemberhentian menteri adalah merupakan hak prerogatif presiden sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian seorang menteri seharusnya loyal kepada Presiden tetapi karena sistem multi partai, maka menteri lebih loyal kepada partainya. Terlebih partai politik di DPR bisa menggunakan wewenangnya (hak angket, interpelasi dan hak menyatakan pendapat) adalah merupakan wewenang DPR untuk menjadi alat untuk "menyandera" presiden dalam momentum politik, yaitu pembentukan kabinet, *resufle* menteri atau pengambilan kebijakan.

Kesimpulan

Sistem pemerintahan merupakan hal prinsip yang harus dirumuskan terlebih dahulu di dalam konstitusi sehingga penyelenggaraan ketatanegaraan diselenggarakan beradasrkan sistem pemerintahan yang telah ditetapkan. Sistem pemerintahan akan menentukan masa depan suatu negara. Oleh karena itu sistem pemerintahan

presidensial yang telah dipilih oleh Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan politik bangsa kita. Dengan adanya kejelasan sistem pemerintahan presidensial akan memberikan kepastian hukum dalam hal bagaimana lembaga atau badan-badan negara menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan.

Negara demokrasi pada umumnya menempatkan pemerintahan dan rakyat sebagai unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan bekerja untuk mencapai tujuan negara dalam hal ini menjamin keberlangsungan eksistensi unsur unsur yang ada dalam negara tersebut. Oleh karena itu sistem pemerintahan dapat dikatakan sebagai keseluruhan unsur-unsur yang terdapat dalam pemerintahan yang berfungsi dan saling berhubungan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.

Pasca perubahan UUD 1945, harus diakui bahwa posisi DPR lebih kuat daripada presiden, maka dapat dikatakan bahwa sistem multipartai inilah sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap lemahnya posisi presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Namun perlu dicatat bahwa sistem presidensial akan tetap berjalan efektif meskipun dengan sistem pemilu multi partai jika partai politik koalisi atau pendukung pemerintah/presiden di DPR tetap konsisten mendukung kebijakan pemerintah, demikian pula sebaliknya.

Sistem multi partai itu lebih pas diterapkan di negara yang menganut sistem parlamenter dibandingkan di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia. Sistem *three* partai pada era orde baru (PPP, PDI dan Golkar) sudah mendekati konsep ideal sebagai kombinasi sistem presidensial, hanya sangat disayangkan karena presiden Soeharto sangat dominan mengintervensi partai politik ketika itu sehingga DPR tidak bisa menjadi lembaga negara yang merepresentasikan dirinya sebagai lembaga wakil rakyat.

Ketika sistem pemilu multi partai diterapkan pada pemilu tahun 1999, seolah mengulang sistem multi partai pada pemilu tahun 1955. Sistem multi partai di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, tidak disebutkan secara tegas, tetapi dirumuskan bahwa "pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik". Hal ini menunjukkan bahwa Pasal ini tidak secara tegas bahwa Indonesia menganut sistem multi partai, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa sistem multi partai-lah yang digunakan untuk mengusung calon presiden-wakil presiden. Kata "gabungan partai politik" itu artinya ada lebih dari 1 (satu) partai politik yang bergabung untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Inilah faktor penguat kurang pasnya antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multi partai di Indonesia. Sehingga ini merupakan tantangan yang perlu terus dikaji hingga suatu kita akan menemukan suatu konsep yang lebih pas dengan ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Fitra Arsil. 2017. Teori Sistem Pemerintahan, PT. Rajawali Grafindo.

Halimah N.I. 2016. Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Online Mahasiswa. Volume 3 Nomor 2.

La Ode Husen. 2019. Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan.

TENTANG EDITOR

SYARIFUDDIN YUSUF, Staf pengajar pada Program Studi Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Parepare. Lahir di Enrekang, Sulawesi Selatan 23 Maret 1964. Pendidikan Sarjana (S1) jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Makassar (1989). Pendidikan Magister dalam bidang Manajemen Keuangan di Universitas Hasanuddin, UNHAS (2003). Program Doktor dalam bidang Ilmu Manajemen di Universitas Muslim Indonesia (2013). Sejak tahun 2007-2016, menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, pada tahun 2000-2007 menjadi wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan.

Berbagai kegiatan orientasi akademik dilakukan di luar negeri; Malaysia, Singapore dan Thailand (2008) untuk pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi terbaik di Asia serta penanganan masalah Tenaga Kerja Indonesia. Dan menjadi *Key Note Speaker* : "*Human Resource*

Develovment in Indonesia : Toward Islamic Economic's Approach", pada *Symposium 25" Anniversary Economic East Asia's, Saga University, Japan*, 2015. Tahun 2006-2021 ia menjadi anggota tim peneliti "Evaluasi Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Produksi dan Ekspor Kakao Indonesia, kelembagaan petani kakao dalam mereduksi Kemiskinan di indonesia" melalui Hiba penelitian DRPM, Kemenristek Dikti. Tulisannya tersebar di berbagai jurnal ilmiah, termasuk "*Assessing the Impact of Oil Prices and Interest Rate Policies: The Case of Indonesian Cocoa*", dipublikasi oleh *Ryukoku Journal of Economic Studies*, 48 (1):65-92, Kyoto, Jepang. *Revenue and Financing of Patients with National Health Insurance by the Social Security Organizing Agency to Improve Health Services*, pada *Journal Enfermeria Clinica Elsevier publisher*, 2020. Telah menulis buku monograf : "Model Kelembagaan Pertanian Untuk Wilayah Perbatasan Indonesia", dan penulis buku : "Strategi Bisnis Bank *Syariah*" tahun 2020, penulis *Book Chapter* dengan judul : "Ekonomi Islam dan Perbankan *Syariah* pada Buku Pembangunan Berkelanjutan", tahun 2015 dan Strategi Ketangguhan dan Keberlangsungan Perguruan Tinggi Menghadapi Pandemi Covid-19 dalam buku *chapter "*Tantangan dan Strategi Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi," tahun 2020. Anggota penulis "Model Pendidikan Karakter Fokus Kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Parepare", tahun 2011, dan "Obat Tradisional Jamu Ternak", tahun 2018.

Selain itu, aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat di organisasi profesi, sejak 2010-2020 sebagai Ketua Umum Assosiasi Perguruan tinggi Swasta Indonesia (APTISI) IX-A Sulawesi dan Assosiasi Dosen Indonesia (ADI). Email: aryus_umpar@yahoo.com

HANIARTI, Dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare. Lahir di Kota Parepare, 29 April 1969. Pendidikan Sarjana Farmasi di Universitas Hasanuddin (1996), Pendidikan Profesi Apoteker di Universitas Hasanuddin (1999) dan Pendidikan Magister Kesehatan Masyaakat konsentrasi Gizi (2011). Tahun 2010- 2018 menjabat sebagai Wakil Dekan 1, dan tahun 2018 sampai sekarang sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare. Sejumlah karya ilmiah yang telah dihasilkan di antaranya *International Journal European Journal of moleculer dan Cinical medicine* 7(8) 168-172, *Correlation of Body mass Index with regular menstrual Cycle of young women. Revenue and financing of patients with national health insurance by the social security organizing agency to improve health service*, di Jurnal Enfermeria Cli-nica. Penulis dan Editor sejumlah buku, Hasil karya berupa buku, Pemba-ngunan berkelanjutan pemikiran Dosen UM Parepare , Obat Tradisional jamu Ternak, Cegah Stunting Dalam 1000 HPK, Tantangan dan Strategi Pendidikan Tinggi di masa Pandemi dan Optimisme menghadapi Tantangan Pandemi Covid -19, Buku Ajar Manajemen Penyehatan Makanan dan Minuman, serta Problem Gizi dan Kedaruratan Stunting. Aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, di organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), APTISI, ADI, ICMI dan organisasi perempuan Pimpinan Daerah Aisyiyah, Dharma Wanita Persatuan dan PKK Kota Parepare. Alamat email korespondensi: haniarti.umpar@gmail.com.

USMAN, lahir pada 27 Juli 1986 di Kota Parepare Sulawesi Selatan, Menyelesaikan Studi (S1) pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2008. Studi (S2) pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Indonesia Timur Makassar Tahun 2013. Saat ini aktif dalam beberapa organisasi keagamaan maupun kemasyarakatan, misalnya Pemuda Muhammadiyah, Lembaga Pengakajian, Edukasi, Komunikasi dan Masyarakat (LAPEKOM), Asosiasi Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Komisariat Ajatappareng, IKA FIKES, PERSAKMI, ICMI Orda Kota Parepare, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Parepare, Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Muhammadiyah Indonesia (APTKMMI).

Sejak tahun 2011, terdaftar sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Parepare penempatan Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan jabatan fungsional sebagai Lektor dan pada Tahun 2015. Beberapa buku telah ditulis, antara lain Organisasi & Manajemen serta Konsep Ekonomi Kesehatan Dalam Pembangunan dan Buku Konsep Ekonomi Kesehatan Dalam Pembangunan mendapatkan Hak Cipta (HAKI) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu, aktif menulis Artikel pada Prosiding baik Prosiding Nasional maupun Internasional serta menulis beberapa Artikel Ilmiah yang dipublish di Jurnal Nasional maupun Internasional bereputasi serta beberapa buku chapter seperti Optimisme Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19 "Gagasan dan Pemikiran Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare" dan Pendidikan Tinggi di masa pandemik "Tantangan dan Strategi" serta Menatap Wajah Pendidikan di Kota Parepare.

IBRAHIM FATTAH, SH.,MH (*Candidat Doctor* Hukum), lahir di Pinrang, 30 Desember 1968; Pendidikan S-1 Hukum Tahun 1994, di Universitas Muslim Indonesia Makassar; Pendidikan S-2 Hukum Tahun 2015 di Universitas Muslim Indonesia Makassar; Pendidikan S-3 Hukum - (Doktor Hukum) Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Sejumlah keahlian yang dimiliki mencakup penyusun naskah akademik, menulis jurnal. Modul dll., membangun Jejaring dengan Multipihak, memfasilitasi Pertemuan Multi Pihak; Pengalaman profesional meliputi Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Tahun 2017 – sekarang. Tugas Utama: 1. Mengajar, Melakukan Penelitian dan 3. Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat; Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Tahun 2017 – 2020. Tugas Utama: 1. Membina Organisasi Kemahasiswaan, Memfasilitasi Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan; Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Tahun 2020 – 2024. Tugas Utama: 1. Memimpin fakultas ke dalam dan ke luar, 2. mengembangkan fakultas agar bisa berkembang, 3. Membangun jejeraing; Konsultan, Program Desa Ramah Perempuan di Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Ende, Alor dan Mangrai Timur). Konsorsium Global Koncence (KOPEL Indonesia). 2015. Tugas Utama: (i) Mengindentifikasi masalah dan kondisi desa yang mendukung terwujudnya desa ramah perempuan, (ii) Memfasilitasi aparat desa DPD menyusun peraturan desa secara partisipatif untuk mendukung kelembagaan desa ramah perempuan; Penanggung Jawab Program, Program Maju Perempuan Indonesia (MAMPU) Kota Parepare Sulawesi Selatan. Oktober 2014-Desember 2015. Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pengem-

bangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) kerjasama MAMPU-BaKTI Makassar. Tugas Utama; Penanggung Jawab Program, Program *Building Butter Budget For Women And The Poor* (B3WP), Kota Parepare Sulawesi Selatan. April 2011 – Maret 2014, Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) kerjasama The Asia Foundation (TAF) dan CIDA. Tugas utama : (i) Melakukan assesment awal kondisi masyarakat, CSO, pemerintah dan legislatif terkait tata kelola anggaran yang responsive gender dan pro poor, (ii) Membuat rumusan proposal tentang tata kelola anggaran yang pro poor dan responsive gender, (ii) Melakukan lobby dan kordinasi baik dengan donor maupun pemerintah kota, (iv) Membentuk dan menyusun schedule tim work program B3WP, (v) Melakukan pelatihan dan pembekalan tim work, (vi) Mensupport seluruh tim program dan keuangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, (vii) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala baik sebelum pelaksanaan, (viii) selama berlangsung kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan, (ix) Memastikan program kegiatan dan keuangan berjalan dengan baik, (x) Melakukan kordinasi rutin dengan lembaga donor, pemda dan pihak lainnya terkait program kegiatan, (xi) Melakukan pengecekan dan evaluasi pelaporan kegiatan dan keuangan sebelum diserahkan kepada pihak lembaga donor dan pemda.

Ia juga bekerja sebagai Konsultan Penyusunan Perda Inisiatif DPRD (Perda pendidikan Gratis), *Better Approaches to Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi* (BASICS), 2012. Tugas utama ; i) Menfasilitasi penguatan kapasitas Baleg DPRD dan tim penyusun perda, ii). Mendampingi Tim Penyusun Perda dalam melakukan *Need Assesment,* Penyusunan naskah Akademik, Drafter dan Konsultasi public, iii). Memfasilitasi penyusunan buku panduan praktis penyusunan perda melalui hak inisiatif DPRD; Konsultan Penyusunan Perda Inisiatif DPRD, Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM), 2011. Tugas utama : i) Sebagai Konsultan

DPRD Sidrap Mendampingi Baleg dan Ranperda, 2).Perda No.15 Thn 2011 tentang pembentukan produk hokum daerah., 3). Perda no.16 Thn 2011 tentang pelayanan public.4).Perda No.17 Thn 2011 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pembangunan dan pemerintah. Penanggung Jawab Program, Program Pengarusutaman Gender dalam strategi pengurangan kemiskinan daerah, di Kab. Enrekang, Wajo dan Pinrang, *The Asia Foundation*, 2011-2012. Tugas utama: i) Memfasilitasi penguatan partisipasi perempuan dan kelompok marginal untuk mengahdiri proses musrenbang secara partisipatif, ii) Memfasilitasi diskusi berkala kelompok perempuan dengan pengambil kebijakan (SKPD) untuk lahirnya regulasi daerah yang *pro poor* dan responsif gender. iii) Memfasilitasi penyusunan RPJMDes secara partisipatif di Kota Pinrang dan Kabupaten Wajo. iv) Memfasilitasi penguatan kapasitas staf SKPD dan CSO untuk melakukan analisis anggaran (APBD) yang *pro poor* dan responsif gender.

Terlibat dalam berbagai *training* dan *Workshop*, seperti Narasumber pada inspirasi BaKTI di Makassar "Musrenbang partisipatif dan advokasi anggaran", Maret 2014; Narasumber Seminar dan *Launching* Buku "Pembelajaran, tantangan dan Peluang Gerakan Advokasi Gender Budget Terkini dilaksanakan oleh Seknas FITRA di Makassar. 2013; Konfrensi Nasional II (Kedua) Gerakan Advokasi Anggaran dengan tema "Memperkuat Gerakan Advokasi Anggaran Pro Rakyat Miskin yang Responsif Jender" di Jakarta 2011; Lokakarya Nasional Anggaran di Bandung, dilaksanakan oleh LGSP-USAID; Fasilitator Pengembangan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (PFPM), Kerjasama *British Council-Desentralisation Support Facility* (DSF)-GGRD-Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia-UKSW Salatiga tahun 2011.

MEMBANGUN INDONESIA BERMARTABAT

Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang meresap dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat. Nilai budaya yang diproduksi dari warisan gagasan para leluhur yang hidup dan berkembang dalam tradisi baik agama maupun kearifan lokal (Local Wisdom), yang merupakan representasi dari identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan.

Buku kumpulan gagasan terkait "Membangun Indonesia Bermartabat" ini merupakan elaborasi dari sejumlah gagasan dan pemikiran para Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kota Parepare. Pemikiran-pemikiran dalam buku ini membentuk mozaik kehidupan berbangsa dan bernegara yang khas Indonesia. Suatu produk cerdas yang akan membingkai pola dan tatanan kehidupan ke-Indonesiaan masa kini. Referensi tepat bagi berbagai generasi.

"Buku ini pula semakin memperkuat komitmen ICMI dalam menjaga identitas dan pandangan dasar ICMI yaitu keislaman, kecendekiawanan, dan keindonesiaan. Buku ini mengajak kita untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam praktik berbangsa dan bernegara. Di samping itu, buku ini juga menunjukkan sikap kecendekiawanan para anggota ICMI yang peduli terhadap nasib bangsa dan menawarkan solusi cerdas dan inovatif. Tidak kalah pentingnya, buku ini menunjukkan wawasan keindonesiaan, dimana kontribusi para penulis tidak lain untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam konteks negara madani yang dicita-citakan."

Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd
Ketua ICMI Orwil Sulawesi Selatan

Penerbit
de la macca
Anggota IKAPI
Jl. Borong Raya, No. 75 A, Makassar

ISBN 978-602-263-199-6
9 786022 631996